PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
dan
BUPATI SUMBA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6. Laporan ...

6. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi:
a. Pelaporan Keuangan; dan
b. Iktisar Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) terdiri dari:
a. LRA;
b. LPSAL;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. LPE;
f. LAK; dan
g. CaLK.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Paragraf 1
LRA

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.23,085,656,010.36,-	
2. Pendapatan Transfer	Rp.545,105,020,037.00, -	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.9,342,731,248.77,-	
Jumlah Pendapatan		Rp.577,533,407,296.13,-

b. Belanja :

1. Belanja Operasi :		
a) Belanja Pegawai	Rp.256,553,382,060.00,-	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.153,880,944,644.94,-	
c) Belanja Hibah	Rp.9,226,925,504.00,-	
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp.21,140,000,000.00	
	Rp.440,801,252,208.94,-	
2. Belanja Modal	Rp.49,184,558,012.00,-	
3. Belanja Tak Terduga	Rp.0,00,-	
4. Belanja Transfer	Rp.84,809,787,389.00,-	
Jumlah Belanja	Rp.574,795,597,609.94,-	
Surplus/(Defisit)	Rp.2,737,809,686.19,-	

e) Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.38,223,289,821.15,-	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.0, 00,-	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp.38,223,289, 821.15,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp.40,961,099, 507.34,-

f) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.17,934,062,293.87,-), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.595,467,469,590.00,-
2. Realisasi	Rp.577,533,407,296.13,-

Selisih lebih ...

Selisih lebih/(kurang) Rp.17,934,062,293.87,-

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 58,892,245,135.21,-), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.633,687,842,745.15,-
2. Realisasi	Rp.574,795,597,609.94,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp.58,892,245,135.21,-

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(defisit) sejumlah (Rp.35,482,563,468.96), dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/(defisit) setelah Perubahan	(Rp.38,220,373,155.15),-
2. Realisasi	Rp.2,737,809,686.19,-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp.35,482,563,468.96),-

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp. 2,916,666.00),- dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.38,220,373,155.15,-
2. Realisasi	Rp.38,223,289,821.15,-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp.2,916,666.00),-

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0.00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.0.00,-
2. Realisasi	Rp.0.00,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp.0.00,-

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp.2,916,666.00),- dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.38,220,373,155.15,-
2. Realisasi	Rp.38,223,289,821.15,-
Selisih lebih/(kurang)	(Rp2,916,666.00),-

Pasal 5

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
LPSAL

Pasal 6

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. Saldo ...

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.38,220,373,155.15,-
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.38,220,373,155.15,-
	Sub Total	Rp.0,00,-
c.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 40,961,099,507.34,-
	Sub Total	Rp. 40,961,099,507.34,-
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp.0,00,-
e.	Lain-lain	Rp.0,00,-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.40,961,099,507.34,-

Pasal 7

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Neraca

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c per 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp.1,343,445,787,223.18,-
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.3,104,969,576.61,-
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1,340,340,817,646.57,-

Pasal 9

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
LO

Pasal 10

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut:

a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 24,808,970,823.41,-
b.	Pendapatan Transfer	Rp. 491,203,417,100.00,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 4,723,455,831.99,-
	Total Pendapatan	Rp. 520,735,843,755.40,-
d.	Beban Pegawai	Rp. 256,426,801,060.00,-
e.	Beban Persediaan	Rp. 50,016,567,479.70,-

f. Beban Jasa ...

f.	Beban Jasa	Rp.	62,300,551,527.61,-
g.	Beban Pemeliharaan	Rp.	2,015,733,879.90,-
h.	Beban Perjalanan Dinas	Rp.	30,138,449,013.00,-
i.	Beban Barang dan Jasa BOS	Rp.	8,624,647,948.00,-
j.	Beban Hibah	Rp.	9,226,925,504.00,-
k.	Beban Bantuan Sosial	Rp.	17,496,065,880.72,-
l.	Beban Penyusutan	Rp.	98,474,926,244.91,-
m.	Beban Amortisasi	Rp.	379,921,705.00,-
n.	Beban Penyisihan Piutang	Rp.	76,554,633.81,-
o.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp.	(291,666.60),-
p.	Beban Transfer	Rp.	34,911,401,649.00,-
q.	Total Beban	Rp.	570,088,254,859.05,-
r.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	(49,352,411,103.65),-
s.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	(193,457,307.67),-
t.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	0,00,-
	Surplus/Defisit-LO	Rp.	(49,545,868,411.32),-

Pasal 11

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
LPE

Pasal 12

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.1,405,100,800,771.02,-
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp.(49,545,868,411.32),-
c.	Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	
	1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp.0,00,-
	2. Koreksi Aset Tetap	Rp.0,00,-
	3. Koreksi Penghapusan Aset Tetap	Rp.0,00,-
	4. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp.15,214,114,713.13),-
d.	Ekuitas Akhir	Rp.1,340,340,817,646.57,-

Pasal 13

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
LAK

Pasal 14 ...

Pasal 14

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2025	Rp.	38,260,218,420.15,-
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasional	Rp.	51,836,026,698.19,-
c.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi	Rp.	(49,098,217,012.00),-
d.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	Rp.	2,916,666.00,-
e.	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris	Rp.	20,842,654.61,-
f.	Saldo Kas Akhir di BUD per 31 Desember Tahun 2025	Rp.	41,021,787,426.95,-
g.	Kas di Kas Daerah	Rp.	39,416,098,992.62,-
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00,-
i.	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	54,000.00,-
j.	Kas di Bendahara JKN (Kapitasi)	Rp.	618,555,915.41,-
k.	Kas Dana BOS dan BOP PAUD	Rp.	304,788,208.31,-
l.	Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	613,623,191.00,-
m.	Kas Lainnya	Rp.	68,667,119.61,-
n.	Kas di Deposito Berjangka	Rp.	0.00,-
o.	Saldo Akhir Kas	Rp.	41,021,787,426.95,-

Pasal 15

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
CaLK

Pasal 16

(1) CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g pada tahun anggaran 2025 (dua ribu dua puluh lima) meliputi:
a. informasi secara kuantitatif; dan
b. informasi secara kualitatif atas akun laporan keuangan.
(2) CaLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pasal 17

Iktisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENUTUP

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul,
pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

BERNARDUS B. GELA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 1-16/2026

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus disampaikan pertanggungjawabannya setiap akhir tahun anggaran, yaitu dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada lembaga legislatif dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3.....

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 156

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	HALAMAN
1				2	3
				Lampiran I.1	*1 - 16*
				Lampiran I.2	*17 - 19*
1				***URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR***	
1	***01***			***PENDIDIKAN***	
1	*01*	*01*	*01*	*Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*	*20 - 24*
1	*01*	*01*	*02*	*Sanggar Kegiatan Belajar*	*25 - 26*
1	***02***			***KESEHATAN***	
1	*02*	*01*	*01*	*Dinas Kesehatan*	*27 - 32*
1	*02*	*01*	*02*	*Rumah Sakit Umum Daerah*	*33 - 35*
1	*02*	*01*	*03*	*Puskesmas Malinjak*	*36 - 38*
1	*02*	*01*	*04*	*Puskesmas Mananga*	*39 - 42*
1	*02*	*01*	*05*	*Puskesmas Wairasa*	*43 - 46*
1	*02*	*01*	*06*	*Puskesmas Maradesa*	*47 - 49*
1	*02*	*01*	*07*	*Puskesmas Lawonda*	*50 - 52*
1	*02*	*01*	*08*	*Puskesmas Weeluri*	*53 - 55*
1	*02*	*01*	*09*	*Puskesmas Lendiwacu*	*56 - 58*
1	*02*	*01*	*10*	*Puskesmas Pahar*	*59 - 61*
1	*02*	*01*	*11*	*Puskesmas Umbu Riri*	*62 - 64*
1	*02*	*01*	*12*	*Puskesmas Tana Mbanas*	*65 - 67*
1	***03***			***PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG***	
1	*03*	*01*		*Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*	*68 - 71*
1	*03*	*01*	*01*	*UPTD Pengelola Air Minum*	*72 - 73*
1	***05***			***KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM serta PERLINDUNGAN MASYARAKAT***	
1	*05*	*01*		*Badan Penanggulangan Bencana Daerah*	*74 - 75*
1	*05*	*02*		*Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran*	*76 - 78*
1	***06***			***SOSIAL***	
1	*06*	*01*		*Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	*79 - 83*
2				***URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR***	

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	HALAMAN
1			2	3
2	**14**		**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK**	
2	14	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84 - 86
2	**11**		**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	11	01	Dinas Lingkungan Hidup	87 - 90
2	**12**		**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	
2	12	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	91 - 93
2	**13**		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	
2	13	01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94 - 95
2	**15**		**PERHUBUNGAN**	
2	15	01	Dinas Perhubungan	96 - 97
2	**17**		**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	
2	17	01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	98 - 102
2	**16**		**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2	20	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	103 - 106
2	**23**		**KEARSIPAN**	
2	23	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	107 - 109
3			**URUSAN PILIHAN**	
3	**25**		**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3	25	01	Dinas Perikanan	110 - 111
3	**26**		**KEBUDAYAAN**	
3	36	01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	112 - 115

KODE				URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	HALAMAN
1				2	3
3	**27**			***PERTANIAN***	
3	03	02		Dinas Peternakan	116 - 117
3	03	02	01	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	118 - 119
3	03	01		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	120 - 123
3	03	02	01	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	124 - 125
3	**32**			***TRANSMIGRASI***	
3	32	01		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	126 - 129
4				***URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***	
4	01			***PEMERINTAHAN UMUM***	
4	01	01		Sekretariat Daerah	
4	01	01	01	Bagian Administrasi Pembangunan	130 - 131
4	01	01	02	Bagian Perekonomian	132 - 133
4	01	01	03	Bagian Umum	134 - 136
4	01	01	04	Bagian Hukum	137 - 138
4	01	01	05	Bagian Tata Pemerintahan	139 - 140
4	01	01	06	Bagian Organisasi	141 - 142
4	01	01	07	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	143 - 144
4	01	01	08	Bagian Kesejahteraan Rakyat	145 - 146
4	01	02		Sekretariat DPRD	147 - 149
5	**01**			***PERENCANAAN***	
5	01	01		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	150 - 154
5	**02**			***KEUANGAN***	
5	02	02		Badan Keuangan Daerah	155 - 159
5	**03**			***KEPEGAWAIAN***	
5	03	04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	160 - 162
6	**01**			***PENGAWASAN***	
6	01	01		Inspektorat	163 - 165

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		HALAMAN
1			2		3
7	01		***KEWILAYAHAN***		
7	01	01	Kecamatan Katikutana		166 - 168
7	01	02	Kecamatan Katikutana Selatan		169 - 170
7	01	03	Kecamatan Mamboro		171 - 172
7	01	04	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat		173 - 174
7	01	05	Kecamatan Umbu Ratu Nggay		175 - 176
7	01	06	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah		177 - 178
8	**01**		***PEMERINTAHAN UMUM***		
8	01	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		179 - 182
			Lampiran I.4		183 - 231
			Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran	232 - 232
			Lampiran III	Laporan Operasional	233 - 234
			Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	235 - 235
			Lampiran V	Neraca	236 - 237
			Lampiran VI	Laporan Arus Kas	238 - 239
			Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan	240 - 422
			Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	423 - 423
			Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih	424 - 424
			Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	425 - 425
			Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal	426 - 426
			Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	427 - 435
			Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	436 - 436
			Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	437 - 437
			Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya - Aset Lain-lain	438 - 440
			Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	441 - 441
			Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	442 - 443
			Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	444 - 444
			Lampiran XIX	Daftar DPAL yang dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikut	445 - 445
			Lampiran XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD ~ PD. SOLAPORA	446 - 446
			Lampiran XX.2		447 - 447

Lampiran l.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**595.467.469.590,00**	**577.533.407.296,13**	**(17.934.062.293,87)**	**96,99**
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.222.682.750,00	7.553.421.274,00	(1.669.261.476,00)	81,90
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	8.922.682.750,00	7.178.408.312,00	(1.744.274.438,00)	80,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Malinjak	249.005.250,00	184.534.500,00	(64.470.750,00)	74,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	249.005.250,00	184.534.500,00	(64.470.750,00)	74,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.005.250,00	184.534.500,00	(64.470.750,00)	74,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	239.005.250,00	184.534.500,00	(54.470.750,00)	77,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	(1.065.725.488,00)	84,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	(1.065.725.488,00)	84,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	(1.065.725.488,00)	84,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	738.014.000,00	862.407.481,00	124.393.481,00	116,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000.000,00	4.809.881.031,00	(1.190.118.969,00)	80,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Mananga	433.000.000,00	265.649.800,00	(167.350.200,00)	61,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	433.000.000,00	265.649.800,00	(167.350.200,00)	61,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	433.000.000,00	265.649.800,00	(167.350.200,00)	61,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	825.000,00	(1.175.000,00)	41,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.000.000,00	264.824.800,00	(166.175.200,00)	61,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Wairasa	318.000.000,00	250.032.700,00	(67.967.300,00)	78,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	318.000.000,00	250.032.700,00	(67.967.300,00)	78,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318.000.000,00	250.032.700,00	(67.967.300,00)	78,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	18.000.000,00	10.400.000,00	(7.600.000,00)	57,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.000.000,00	239.632.700,00	(60.367.300,00)	79,88

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Maradesa	159.395.000,00	125.369.900,00	(34.025.100,00)	78,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	159.395.000,00	125.369.900,00	(34.025.100,00)	78,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159.395.000,00	125.369.900,00	(34.025.100,00)	78,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	975.000,00	(1.025.000,00)	48,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	157.395.000,00	124.394.900,00	(33.000.100,00)	79,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Lawonda	432.000.000,00	285.920.400,00	(146.079.600,00)	66,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	432.000.000,00	285.920.400,00	(146.079.600,00)	66,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	432.000.000,00	285.920.400,00	(146.079.600,00)	66,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	950.000,00	(9.050.000,00)	9,50
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	422.000.000,00	284.970.400,00	(137.029.600,00)	67,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Weluri	152.144.600,00	101.784.500,00	(50.360.100,00)	66,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	152.144.600,00	101.784.500,00	(50.360.100,00)	66,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.144.600,00	101.784.500,00	(50.360.100,00)	66,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.875.000,00	(125.000,00)	93,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.144.600,00	99.909.500,00	(50.235.100,00)	66,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Lendiwacu	167.123.900,00	148.129.000,00	(18.994.900,00)	88,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	167.123.900,00	148.129.000,00	(18.994.900,00)	88,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.123.900,00	148.129.000,00	(18.994.900,00)	88,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	16,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.123.900,00	147.804.000,00	(17.319.900,00)	89,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Pahar	172.000.000,00	108.099.000,00	(63.901.000,00)	62,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	172.000.000,00	108.099.000,00	(63.901.000,00)	62,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.000.000,00	108.099.000,00	(63.901.000,00)	62,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	170.000.000,00	108.099.000,00	(61.901.000,00)	63,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Umbu Riri.	102.000.000,00	36.600.000,00	(65.400.000,00)	35,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	102.000.000,00	36.600.000,00	(65.400.000,00)	35,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.000.000,00	36.600.000,00	(65.400.000,00)	35,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	36.600.000,00	(63.400.000,00)	36,60
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000,00	375.012.962,00	75.012.962,00	125,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,58
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,58
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,58
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,58

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001		UPTD Pengelola Air Minum	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	336.000.000,00	357.240.500,00	21.240.500,00	106,32
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,63
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,63
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,63
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,63
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	120.000.000,00	162.001.000,00	42.001.000,00	135,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	70.000,00	(5.930.000,00)	1,17
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,08
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,08
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,08
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,08
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,08
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.577.500.000,00	1.337.279.502,00	(240.220.498,00)	84,77
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.502.500.000,00	1.277.279.502,00	(225.220.498,00)	85,01
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001		UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,64
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,64
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,64
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,64
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Umum	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	(16.040.380.819,87)	97,25
5.02			KEUANGAN	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	(16.040.380.819,87)	97,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	(16.040.380.819,87)	97,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	(16.040.380.819,87)	97,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.722.276.468,00	13.743.154.734,36	1.020.878.266,36	108,02
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	4.924.214.886,00	5.473.094.162,67	548.879.276,67	111,15
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	30.222.000,00	34.292.000,00	4.070.000,00	113,47
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.671.142.115,00	4.671.142.115,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.096.697.467,00	3.564.626.456,69	467.928.989,69	115,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	561.408.707.201,00	545.105.020.037,00	(16.303.687.164,00)	97,10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.665.259.373,00	527.681.963.405,00	(15.983.295.968,00)	97,06
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.743.447.828,00	17.423.056.632,00	(320.391.196,00)	98,19
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	(757.571.922,23)	92,50
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	(757.571.922,23)	92,50
		5	**Belanja**	**633.687.842.745,15**	**574.795.597.609,94**	**(58.892.245.135,21)**	**90,71**
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	345.019.111.269,00	324.066.983.157,94	(20.952.128.111,06)	93,93
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	158.062.865.664,00	151.418.642.636,00	(6.644.223.028,00)	95,80
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	157.191.881.664,00	150.570.027.436,00	(6.621.854.228,00)	95,79
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	157.191.881.664,00	150.570.027.436,00	(6.621.854.228,00)	95,79
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	155.256.075.818,00	148.910.407.773,00	(6.345.668.045,00)	95,91

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	122.938.740.883,00	116.458.922.984,00	(6.479.817.899,00)	94,73
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.303.541.135,00	24.292.666.539,00	(10.874.596,00)	99,96
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	8.013.793.800,00	8.158.818.250,00	145.024.450,00	101,81
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.935.805.846,00	1.659.619.663,00	(276.186.183,00)	85,73
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.485.696,00	543.876.433,00	(17.609.263,00)	96,86
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	925.393.350,00	925.393.350,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	448.926.800,00	190.349.880,00	(258.576.920,00)	42,40
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060		Sanggar Kegiatan Belajar	870.984.000,00	848.615.200,00	(22.368.800,00)	97,43
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	5	BELANJA DAERAH	870.984.000,00	848.615.200,00	(22.368.800,00)	97,43
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	5.1	BELANJA OPERASI	856.984.000,00	834.615.200,00	(22.368.800,00)	97,39
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	856.984.000,00	834.615.200,00	(22.368.800,00)	97,39
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	133.623.197.305,00	120.393.938.179,94	(13.229.259.125,06)	90,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	100.785.703.371,00	91.825.759.772,94	(8.959.943.598,06)	91,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	100.785.703.371,00	91.825.759.772,94	(8.959.943.598,06)	91,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	71.013.142.248,00	65.534.654.122,94	(5.478.488.125,06)	92,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	44.123.399.671,00	42.906.355.553,00	(1.217.044.118,00)	97,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.889.742.577,00	22.628.298.569,94	(4.261.444.007,06)	84,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	29.772.561.123,00	26.291.105.650,00	(3.481.455.473,00)	88,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.968.125.000,00	4.937.290.000,00	(30.835.000,00)	99,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.574.436.123,00	19.123.815.650,00	(3.450.620.473,00)	84,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Malinjak	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	(179.793.854,00)	90,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	(179.793.854,00)	90,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	(179.793.854,00)	90,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	(179.793.854,00)	90,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah	19.349.707.284,00	16.447.725.750,00	(2.901.981.534,00)	85,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	19.349.707.284,00	16.447.725.750,00	(2.901.981.534,00)	85,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.317.988.284,00	13.156.184.218,00	(2.161.804.066,00)	85,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.288.284,00	13.138.484.218,00	(2.161.804.066,00)	85,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.031.719.000,00	3.291.541.532,00	(740.177.468,00)	81,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.981.719.000,00	3.241.543.532,00	(740.175.468,00)	81,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Mananga	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	(247.300.211,00)	86,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	(247.300.211,00)	86,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	(247.300.211,00)	86,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	(247.300.211,00)	86,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Wairasa	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	(218.362.477,00)	87,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	(218.362.477,00)	87,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	(218.362.477,00)	87,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	(218.362.477,00)	87,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Maradesa	1.201.023.500,00	1.140.710.488,00	(60.313.012,00)	94,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	1.201.023.500,00	1.140.710.488,00	(60.313.012,00)	94,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.178.523.500,00	1.118.210.488,00	(60.313.012,00)	94,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.167.123.500,00	1.106.810.488,00	(60.313.012,00)	94,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Lawonda	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	(163.942.903,00)	90,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	(163.942.903,00)	90,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	(163.942.903,00)	90,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	(163.942.903,00)	90,20
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Weluri	973.415.600,00	872.287.740,00	(101.127.860,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	973.415.600,00	872.287.740,00	(101.127.860,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	973.415.600,00	872.287.740,00	(101.127.860,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	973.415.600,00	872.287.740,00	(101.127.860,00)	89,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Lendiwacu	1.084.269.900,00	949.181.416,00	(135.088.484,00)	87,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	1.084.269.900,00	949.181.416,00	(135.088.484,00)	87,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.084.269.900,00	949.181.416,00	(135.088.484,00)	87,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.084.269.900,00	949.181.416,00	(135.088.484,00)	87,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Pahar	972.833.000,00	850.554.384,00	(122.278.616,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	972.833.000,00	850.554.384,00	(122.278.616,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	972.833.000,00	850.554.384,00	(122.278.616,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.833.000,00	850.554.384,00	(122.278.616,00)	87,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Umbu Riri.	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	(77.334.048,00)	94,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	(77.334.048,00)	94,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	(77.334.048,00)	94,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	(77.334.048,00)	94,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Tanambanas	817.841.700,00	756.049.172,00	(61.792.528,00)	92,44

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	817.841.700,00	756.049.172,00	(61.792.528,00)	92,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	817.841.700,00	756.049.172,00	(61.792.528,00)	92,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.841.700,00	756.049.172,00	(61.792.528,00)	92,44
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.053.687.890,00	25.511.319.589,00	(542.368.301,00)	97,92
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	25.083.007.792,00	24.547.119.462,00	(535.888.330,00)	97,86
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.083.007.792,00	24.547.119.462,00	(535.888.330,00)	97,86
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.676.638.932,00	11.541.155.602,00	(135.483.330,00)	98,84
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.086.432.848,00	4.020.676.154,00	(65.756.694,00)	98,39
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.590.206.084,00	7.520.479.448,00	(69.726.636,00)	99,08
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.406.368.860,00	13.005.963.860,00	(400.405.000,00)	97,01
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.406.368.860,00	13.005.963.860,00	(400.405.000,00)	97,01
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001		UPTD Pengelola Air Minum	970.680.098,00	964.200.127,00	(6.479.971,00)	99,33
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	5	BELANJA DAERAH	970.680.098,00	964.200.127,00	(6.479.971,00)	99,33
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	970.680.098,00	964.200.127,00	(6.479.971,00)	99,33
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.880.098,00	950.400.127,00	(6.479.971,00)	99,32
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5	BELANJA DAERAH	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.118.500,00	255.113.500,00	(5.000,00)	100,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00	0,00	100,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.858.019.130,00	5.427.884.092,00	(430.135.038,00)	92,66
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	(114.822.381,00)	93,86
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	(114.822.381,00)	93,86
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	(114.822.381,00)	93,86
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	810.670.180,00	720.695.401,00	(89.974.779,00)	88,90
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.058.197.180,00	1.033.349.578,00	(24.847.602,00)	97,65
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.989.151.770,00	3.673.839.113,00	(315.312.657,00)	92,10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.989.151.770,00	3.673.839.113,00	(315.312.657,00)	92,10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.978.651.770,00	3.663.339.113,00	(315.312.657,00)	92,07
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.990.818.416,00	1.761.738.415,00	(229.080.001,00)	88,49
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.987.833.354,00	1.901.600.698,00	(86.232.656,00)	95,66
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	(106.137.619,00)	96,42
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	(106.137.619,00)	96,42
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	(106.137.619,00)	96,42
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	(106.137.619,00)	96,42
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.644.335.549,00	1.566.524.816,00	(77.810.733,00)	95,27
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.321.887.231,00	1.293.560.345,00	(28.326.886,00)	97,86
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.283.243.558,00	30.481.409.984,00	(2.801.833.574,00)	91,58
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	875.770.000,00	874.747.830,00	(1.022.170,00)	99,88
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	875.770.000,00	874.747.830,00	(1.022.170,00)	99,88
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	5	BELANJA DAERAH	875.770.000,00	874.747.830,00	(1.022.170,00)	99,88
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	875.770.000,00	874.747.830,00	(1.022.170,00)	99,88
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.770.000,00	874.747.830,00	(1.022.170,00)	99,88
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	687.739.000,00	627.260.625,00	(60.478.375,00)	91,21
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	687.739.000,00	627.260.625,00	(60.478.375,00)	91,21
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	687.739.000,00	627.260.625,00	(60.478.375,00)	91,21
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	687.739.000,00	627.260.625,00	(60.478.375,00)	91,21
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	687.739.000,00	627.260.625,00	(60.478.375,00)	91,21
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	(1.038.562.320,00)	79,56
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	(1.038.562.320,00)	79,56
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	(1.038.562.320,00)	79,56
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	(1.038.562.320,00)	79,56
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	(1.038.562.320,00)	79,56
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	(214.842.599,00)	94,32
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		Dinas Lingkungan Hidup	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	(214.842.599,00)	94,32
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	(214.842.599,00)	94,32
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	(214.842.599,00)	94,32
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.647.170.000,00	1.455.997.693,00	(191.172.307,00)	88,39
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.136.155.222,00	2.112.484.930,00	(23.670.292,00)	98,89
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.761.103.764,00	2.571.027.065,00	(190.076.699,00)	93,12
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.761.103.764,00	2.571.027.065,00	(190.076.699,00)	93,12
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	2.761.103.764,00	2.571.027.065,00	(190.076.699,00)	93,12
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.741.103.764,00	2.551.047.065,00	(190.056.699,00)	93,07
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.974.300.000,00	1.793.216.701,00	(181.083.299,00)	90,83
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.803.764,00	757.830.364,00	(8.973.400,00)	98,83
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.711.872.657,00	2.599.682.796,00	(112.189.861,00)	95,86
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	2.711.872.657,00	2.599.682.796,00	(112.189.861,00)	95,86
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	2.711.872.657,00	2.599.682.796,00	(112.189.861,00)	95,86
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.645.372.657,00	2.533.185.856,00	(112.186.801,00)	95,76
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.980.996,00	1.483.915.375,00	(107.065.621,00)	93,27
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.054.391.661,00	1.049.270.481,00	(5.121.180,00)	99,51
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	66.500.000,00	66.496.940,00	(3.060,00)	100,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.500.000,00	66.496.940,00	(3.060,00)	100,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.602.089.454,00	3.207.004.258,00	(395.085.196,00)	89,03
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.602.089.454,00	3.207.004.258,00	(395.085.196,00)	89,03
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.602.089.454,00	3.207.004.258,00	(395.085.196,00)	89,03
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.568.589.454,00	3.174.089.258,00	(394.500.196,00)	88,95
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.438.071.302,00	1.303.642.633,00	(134.428.669,00)	90,65
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.130.518.152,00	1.870.446.625,00	(260.071.527,00)	87,79
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	33.500.000,00	32.915.000,00	(585.000,00)	98,25
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.500.000,00	32.915.000,00	(585.000,00)	98,25
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	(281.499.094,00)	86,65
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	(281.499.094,00)	86,65
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	(281.499.094,00)	86,65
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	(281.499.094,00)	86,65
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.324.000.000,00	1.241.779.997,00	(82.220.003,00)	93,79
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	783.838.308,00	584.559.217,00	(199.279.091,00)	74,58
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.934.043.680,00	1.892.571.106,00	(41.472.574,00)	97,86
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	1.934.043.680,00	1.892.571.106,00	(41.472.574,00)	97,86
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.934.043.680,00	1.892.571.106,00	(41.472.574,00)	97,86
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.869.043.680,00	1.827.601.106,00	(41.442.574,00)	97,78
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.805.981,00	1.361.376.718,00	(38.429.263,00)	97,25
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.237.699,00	466.224.388,00	(3.013.311,00)	99,36
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	64.970.000,00	(30.000,00)	99,95
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	64.970.000,00	(30.000,00)	99,95
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.638.075.556,00	3.511.482.693,00	(126.592.863,00)	96,52
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.638.075.556,00	3.511.482.693,00	(126.592.863,00)	96,52
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5	BELANJA DAERAH	3.638.075.556,00	3.511.482.693,00	(126.592.863,00)	96,52
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.559.875.556,00	3.433.389.880,00	(126.485.676,00)	96,45
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.742.623.132,00	2.634.039.942,00	(108.583.190,00)	96,04

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	817.252.424,00	799.349.938,00	(17.902.486,00)	97,81
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	78.200.000,00	78.092.813,00	(107.187,00)	99,86
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.174.035,00	(25.965,00)	99,80
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.918.778,00	(81.222,00)	99,88
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	135.083.966,00	132.551.800,00	(2.532.166,00)	98,13
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.083.966,00	132.551.800,00	(2.532.166,00)	98,13
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	5	BELANJA DAERAH	135.083.966,00	132.551.800,00	(2.532.166,00)	98,13
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	135.083.966,00	132.551.800,00	(2.532.166,00)	98,13
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.083.966,00	132.551.800,00	(2.532.166,00)	98,13
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	349.301.500,00	339.791.500,00	(9.510.000,00)	97,28
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	349.301.500,00	339.791.500,00	(9.510.000,00)	97,28
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	349.301.500,00	339.791.500,00	(9.510.000,00)	97,28
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	349.301.500,00	339.791.500,00	(9.510.000,00)	97,28
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.301.500,00	339.791.500,00	(9.510.000,00)	97,28
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	178.766.500,00	178.396.426,00	(370.074,00)	99,79
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	178.766.500,00	178.396.426,00	(370.074,00)	99,79
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	178.766.500,00	178.396.426,00	(370.074,00)	99,79
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	178.766.500,00	178.396.426,00	(370.074,00)	99,79
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.766.500,00	178.396.426,00	(370.074,00)	99,79
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	(104.725.058,00)	95,96
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	(104.725.058,00)	95,96
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	(104.725.058,00)	95,96
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	(104.725.058,00)	95,96
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	(95.846.886,00)	95,46
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.652.496,00	472.774.324,00	(8.878.172,00)	98,16
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.525.014.068,00	2.306.689.047,00	(218.325.021,00)	91,35
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.525.014.068,00	2.306.689.047,00	(218.325.021,00)	91,35
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	2.525.014.068,00	2.306.689.047,00	(218.325.021,00)	91,35
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.487.514.068,00	2.269.189.047,00	(218.325.021,00)	91,22
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000.000,00	1.432.324.298,00	(167.675.702,00)	89,52
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	887.514.068,00	836.864.749,00	(50.649.319,00)	94,29
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2	BELANJA MODAL	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	309.285.452,00	304.836.448,00	(4.449.004,00)	98,56
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	309.285.452,00	304.836.448,00	(4.449.004,00)	98,56
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5	BELANJA DAERAH	309.285.452,00	304.836.448,00	(4.449.004,00)	98,56
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1	BELANJA OPERASI	309.285.452,00	304.836.448,00	(4.449.004,00)	98,56
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.085.452,00	288.636.448,00	(4.449.004,00)	98,48
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.448.982.871,00	30.653.075.515,00	(2.795.907.356,00)	91,64
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.636.314.294,00	2.590.749.883,00	(45.564.411,00)	98,27
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	2.636.314.294,00	2.590.749.883,00	(45.564.411,00)	98,27
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5	BELANJA DAERAH	2.636.314.294,00	2.590.749.883,00	(45.564.411,00)	98,27
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.616.514.294,00	2.570.949.883,00	(45.564.411,00)	98,26
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.796.777.910,00	1.754.616.147,00	(42.161.763,00)	97,65
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	819.736.384,00	816.333.736,00	(3.402.648,00)	99,58
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	737.746.000,00	673.357.514,00	(64.388.486,00)	91,27
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	737.746.000,00	673.357.514,00	(64.388.486,00)	91,27
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	737.746.000,00	673.357.514,00	(64.388.486,00)	91,27
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	687.746.000,00	673.357.514,00	(14.388.486,00)	97,91
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	687.746.000,00	673.357.514,00	(14.388.486,00)	97,91
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.423.923.936,00	24.849.221.751,00	(2.574.702.185,00)	90,61
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.872.886.448,00	16.623.668.480,00	(2.249.217.968,00)	88,08
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	5	BELANJA DAERAH	18.872.886.448,00	16.623.668.480,00	(2.249.217.968,00)	88,08
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	5.1	BELANJA OPERASI	18.872.886.448,00	16.623.668.480,00	(2.249.217.968,00)	88,08
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.311.500.000,00	9.988.766.230,00	(322.733.770,00)	96,87
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.561.386.448,00	6.634.902.250,00	(1.926.484.198,00)	77,50
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	(176.582.964,00)	96,75
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	(176.582.964,00)	96,75
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	(176.582.964,00)	96,75
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.689.993.496,00	3.522.575.771,00	(167.417.725,00)	95,46
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.743.937.888,00	1.734.772.649,00	(9.165.239,00)	99,47
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.144.396.600,00	999.903.000,00	(144.493.600,00)	87,37
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.144.396.600,00	999.903.000,00	(144.493.600,00)	87,37
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.144.396.600,00	999.903.000,00	(144.493.600,00)	87,37

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.094.446.600,00	949.953.000,00	(144.493.600,00)	86,80
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001		UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1.972.709.504,00	1.968.301.851,00	(4.407.653,00)	99,78
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	5	BELANJA DAERAH	1.972.709.504,00	1.968.301.851,00	(4.407.653,00)	99,78
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.963.709.504,00	1.959.301.851,00	(4.407.653,00)	99,78
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.963.709.504,00	1.959.301.851,00	(4.407.653,00)	99,78
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	338.700.000,00	338.570.000,00	(130.000,00)	99,96
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	338.700.000,00	338.570.000,00	(130.000,00)	99,96
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	5	BELANJA DAERAH	338.700.000,00	338.570.000,00	(130.000,00)	99,96
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	338.700.000,00	338.570.000,00	(130.000,00)	99,96
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.700.000,00	338.570.000,00	(130.000,00)	99,96
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	266.587.000,00	264.635.985,00	(1.951.015,00)	99,27
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	266.587.000,00	264.635.985,00	(1.951.015,00)	99,27
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	5	BELANJA DAERAH	266.587.000,00	264.635.985,00	(1.951.015,00)	99,27
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	266.587.000,00	264.635.985,00	(1.951.015,00)	99,27
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.587.000,00	264.635.985,00	(1.951.015,00)	99,27
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2.045.711.641,00	1.936.540.382,00	(109.171.259,00)	94,66
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.045.711.641,00	1.936.540.382,00	(109.171.259,00)	94,66
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.045.711.641,00	1.936.540.382,00	(109.171.259,00)	94,66
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.015.711.641,00	1.907.458.382,00	(108.253.259,00)	94,63
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.759.960.325,00	1.653.460.451,00	(106.499.874,00)	93,95
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.751.316,00	253.997.931,00	(1.753.385,00)	99,31
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.082.000,00	(918.000,00)	96,94
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.082.000,00	(918.000,00)	96,94
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	45.456.144.302,00	43.733.387.556,00	(1.722.756.746,00)	96,21
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	25.288.493.923,00	23.651.146.802,00	(1.637.347.121,00)	93,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		Bagian Administrasi Pembangunan	1.285.035.700,00	1.182.804.850,00	(102.230.850,00)	92,04
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.285.035.700,00	1.182.804.850,00	(102.230.850,00)	92,04
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.236.335.700,00	1.134.169.050,00	(102.166.650,00)	91,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	196.758.500,00	162.794.500,00	(33.964.000,00)	82,74
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.039.577.200,00	971.374.550,00	(68.202.650,00)	93,44
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	48.700.000,00	48.635.800,00	(64.200,00)	99,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.700.000,00	48.635.800,00	(64.200,00)	99,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Perekonomian	397.620.900,00	388.153.917,00	(9.466.983,00)	97,62
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	397.620.900,00	388.153.917,00	(9.466.983,00)	97,62

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	397.620.900,00	388.153.917,00	(9.466.983,00)	97,62
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.620.900,00	388.153.917,00	(9.466.983,00)	97,62
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Umum	16.329.911.823,00	15.930.762.563,00	(399.149.260,00)	97,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	16.329.911.823,00	15.930.762.563,00	(399.149.260,00)	97,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.901.728.623,00	12.503.427.963,00	(398.300.660,00)	96,91
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	5.900.859.883,00	5.558.364.235,00	(342.495.648,00)	94,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.868.740,00	6.945.063.728,00	(55.805.012,00)	99,20
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	3.428.183.200,00	3.427.334.600,00	(848.600,00)	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.428.183.200,00	3.427.334.600,00	(848.600,00)	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Hukum	306.635.000,00	294.427.000,00	(12.208.000,00)	96,02
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	306.635.000,00	294.427.000,00	(12.208.000,00)	96,02
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	306.635.000,00	294.427.000,00	(12.208.000,00)	96,02
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.635.000,00	294.427.000,00	(12.208.000,00)	96,02
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Organisasi	513.878.000,00	513.282.342,00	(595.658,00)	99,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	513.878.000,00	513.282.342,00	(595.658,00)	99,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	513.878.000,00	513.282.342,00	(595.658,00)	99,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	513.878.000,00	513.282.342,00	(595.658,00)	99,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	376.007.000,00	372.660.320,00	(3.346.680,00)	99,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	376.007.000,00	372.660.320,00	(3.346.680,00)	99,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	376.007.000,00	372.660.320,00	(3.346.680,00)	99,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.007.000,00	372.660.320,00	(3.346.680,00)	99,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055		Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	(1.087.611.600,00)	78,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	5	BELANJA DAERAH	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	(1.087.611.600,00)	78,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	5.1	BELANJA OPERASI	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	(1.087.611.600,00)	78,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.273.000,00	894.661.400,00	(611.600,00)	99,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	5.1.05	Belanja Hibah	1.275.000.000,00	599.000.000,00	(676.000.000,00)	46,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.931.000.000,00	2.520.000.000,00	(411.000.000,00)	85,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	978.132.500,00	955.394.410,00	(22.738.090,00)	97,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	978.132.500,00	955.394.410,00	(22.738.090,00)	97,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	978.132.500,00	955.394.410,00	(22.738.090,00)	97,68
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.132.500,00	955.394.410,00	(22.738.090,00)	97,68
4.02			SEKRETARIAT DPRD	20.167.650.379,00	20.082.240.754,00	(85.409.625,00)	99,58
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	20.167.650.379,00	20.082.240.754,00	(85.409.625,00)	99,58
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	20.167.650.379,00	20.082.240.754,00	(85.409.625,00)	99,58
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	19.536.650.379,00	19.453.518.377,00	(83.132.002,00)	99,57
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.502.768.178,00	8.453.650.694,00	(49.117.484,00)	99,42
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.033.882.201,00	10.999.867.683,00	(34.014.518,00)	99,69

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	631.000.000,00	628.722.377,00	(2.277.623,00)	99,64
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.000.000,00	553.765.187,00	(2.234.813,00)	99,60
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.957.190,00	(42.810,00)	99,94
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	159.041.154.640,15	129.517.808.617,00	(29.523.346.023,15)	81,44
5.01			PERENCANAAN	4.196.594.441,00	4.031.217.810,00	(165.376.631,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000		Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.196.594.441,00	4.031.217.810,00	(165.376.631,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	4.196.594.441,00	4.031.217.810,00	(165.376.631,00)	96,06
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.133.594.441,00	3.968.417.811,00	(165.176.630,00)	96,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.932.879.849,00	1.862.990.467,00	(69.889.382,00)	96,38
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.714.592,00	2.105.427.344,00	(95.287.248,00)	95,67
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	63.000.000,00	62.799.999,00	(200.001,00)	99,68
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.000.000,00	62.799.999,00	(200.001,00)	99,68
5.02			KEUANGAN	113.505.959.529,15	93.879.321.592,00	(19.626.637.937,15)	82,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	113.505.959.529,15	93.879.321.592,00	(19.626.637.937,15)	82,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	113.505.959.529,15	93.879.321.592,00	(19.626.637.937,15)	82,71
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	9.737.518.529,15	8.969.110.803,00	(768.407.726,15)	92,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.404.617.257,15	2.992.651.736,00	(411.965.521,15)	87,90
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.332.901.272,00	5.976.459.067,00	(356.442.205,00)	94,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	100.500.000,00	100.423.400,00	(76.600,00)	99,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.500.000,00	100.423.400,00	(76.600,00)	99,92
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00	(15.358.153.611,00)	84,67
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.329.300.000,00	1.087.482.549,00	(241.817.451,00)	81,81
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.838.641.000,00	83.722.304.840,00	(15.116.336.160,00)	84,71
5.03			KEPEGAWAIAN	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	(9.459.639.148,00)	76,35
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	(9.459.639.148,00)	76,35
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	(9.459.639.148,00)	76,35
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	(9.459.639.148,00)	76,35
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	38.605.420.058,00	29.193.907.626,00	(9.411.512.432,00)	75,62
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	971.626.912,00	923.500.196,00	(48.126.716,00)	95,05
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,82
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,82
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,82
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,82
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,82

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,07
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000		Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,07
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,07
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,07
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,07
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	(91.441.826,00)	98,04
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	(91.441.826,00)	98,04
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	(91.441.826,00)	98,04
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	(91.441.826,00)	98,04
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	(91.441.826,00)	98,04
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.569.573.262,00	2.484.849.819,00	(84.723.443,00)	96,70
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.095.024.492,00	2.088.306.109,00	(6.718.383,00)	99,68
7			UNSUR KEWILAYAHAN	9.468.556.517,00	8.623.697.760,00	(844.858.757,00)	91,08
7.01			KECAMATAN	9.468.556.517,00	8.623.697.760,00	(844.858.757,00)	91,08
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Katiku Tana	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	(155.990.147,00)	88,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	(155.990.147,00)	88,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	(155.990.147,00)	88,87
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	904.088.150,00	754.226.196,00	(149.861.954,00)	83,42
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.739.120,00	491.610.927,00	(6.128.193,00)	98,77
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Katiku Tana Selatan	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	(156.021.566,00)	88,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	(156.021.566,00)	88,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	(156.021.566,00)	88,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.030.561.486,00	875.760.770,00	(154.800.716,00)	84,98
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.134.732,00	344.913.882,00	(1.220.850,00)	99,65
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Mamboro	1.666.698.062,00	1.516.158.960,00	(150.539.102,00)	90,97
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.666.698.062,00	1.516.158.960,00	(150.539.102,00)	90,97
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.626.248.062,00	1.475.708.960,00	(150.539.102,00)	90,74
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.087.361.793,00	941.102.871,00	(146.258.922,00)	86,55
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.886.269,00	534.606.089,00	(4.280.180,00)	99,21
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	(85.077.445,00)	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	(85.077.445,00)	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	(85.077.445,00)	94,60
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	979.103.096,00	902.509.751,00	(76.593.345,00)	92,18
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	597.399.660,00	588.915.560,00	(8.484.100,00)	98,58
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Umbu Ratu Nggay	1.848.123.061,00	1.697.804.523,00	(150.318.538,00)	91,87

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.848.123.061,00	1.697.804.523,00	(150.318.538,00)	91,87
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.648.123.061,00	1.497.824.523,00	(150.298.538,00)	90,88
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.144.081.997,00	993.932.353,00	(150.149.644,00)	86,88
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.041.064,00	503.892.170,00	(148.894,00)	99,97
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.980.000,00	(20.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.990.000,00	(10.000,00)	99,98
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	139.990.000,00	(10.000,00)	99,99
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah	1.598.709.150,00	1.451.797.191,00	(146.911.959,00)	90,81
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.598.709.150,00	1.451.797.191,00	(146.911.959,00)	90,81
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.573.709.150,00	1.428.652.813,00	(145.056.337,00)	90,78
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.546.216,00	900.827.515,00	(108.718.701,00)	89,23
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	564.162.934,00	527.825.298,00	(36.337.636,00)	93,56
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	23.144.378,00	(1.855.622,00)	92,58
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	23.144.378,00	(1.855.622,00)	92,58
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	(159.972.742,00)	95,16
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	(159.972.742,00)	95,16
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	(159.972.742,00)	95,16
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	(159.972.742,00)	95,16
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	(159.972.742,00)	95,16
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.437.995.000,00	1.292.227.799,00	(145.767.201,00)	89,86
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.398.949.580,00	1.384.744.039,00	(14.205.541,00)	98,98
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.05	Belanja Hibah	469.107.254,00	469.107.254,00	0,00	100,00
			Jumlah	**(38.220.373.155,15)**	**2.737.809.686,19**	**40.958.182.841,34**	**(7,16)**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBA TENGAH

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4 / 3) * 100	5
PENDAPATAN	**595.467.469.590,00**	**577.533.407.296,13**	**96,98**	**659.050.245.625,08**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**23.958.459.218,00**	**23.085.656.010,36**	**96,35**	**24.236.012.419,50**
Pajak Daerah	4.924.214.886,00	5.473.094.162,67	111,14	7.611.248.292,61
Retribusi Daerah	3.125.736.000,00	3.076.072.445,00	98,41	2.314.742.567,46
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.671.142.115,00	4.671.142.115,00	100,00	2.759.129.716,00
Lain-lain PAD yang Sah	11.237.366.217,00	9.865.347.287,69	87,79	11.550.891.843,43
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**23.958.459.218,00**	**23.085.656.010,36**	**96,35**	**24.236.012.419,50**
PENDAPATAN TRANSFER	**561.408.707.201,00**	**545.105.020.037,00**	**97,09**	**629.340.026.908,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	1.350.443.000,00	2.229.856.000,00	165,12	1.962.210.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.157.612.000,00	1.167.164.000,00	100,82	1.526.576.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	337.161.768.620,00	333.239.140.981,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	129.451.039.753,00	127.079.261.684,00	98,16	167.484.659.257,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DANA PERIMBANGAN	**469.120.863.373,00**	**463.715.422.665,00**	**98,84**	**531.582.191.358,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Desa	60.476.241.000,00	49.898.385.740,00	82,50	65.947.240.000,00
Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	14.068.155.000,00	100,00	12.929.007.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	**74.544.396.000,00**	**63.966.540.740,00**	**85,80**	**78.876.247.000,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.743.447.828,00	17.223.056.632,00	97,06	18.881.588.550,00
Bantuan Keuangan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	**17.743.447.828,00**	**17.423.056.632,00**	**98,19**	**18.881.588.550,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**561.408.707.201,00**	**545.105.020.037,00**	**97,09**	**629.340.026.908,00**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4 / 3) * 100	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Lainnya	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	92,49	5.474.206.297,58
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**10.100.303.171,00**	**9.342.731.248,77**	**92,49**	**5.474.206.297,58**
JUMLAH PENDAPATAN	**595.467.469.590,00**	**577.533.407.296,13**	**96,98**	**659.050.245.625,08**
BELANJA	**633.687.842.745,15**	**574.795.597.609,94**	**90,70**	**662.745.128.607,84**
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	277.794.002.749,15	256.553.382.060,00	92,35	213.986.839.398,00
Belanja Barang dan Jasa	166.777.209.913,00	153.880.944.644,94	92,26	190.482.106.032,50
Belanja Hibah	9.757.901.054,00	9.226.925.504,00	94,55	30.093.121.500,00
Belanja Bantuan Sosial	21.551.000.000,00	21.140.000.000,00	98,09	4.332.000.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**475.880.113.716,15**	**440.801.252.208,94**	**92,62**	**438.894.066.930,50**
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.174.662.896,00	13.379.171.304,00	94,38	13.143.410.114,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.879.829.473,00	20.379.072.968,00	85,34	8.891.385.407,89
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.636.368.860,00	15.235.963.860,00	97,43	98.063.043.920,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	448.926.800,00	190.349.880,00	42,40	166.536.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	140.336.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**54.139.788.029,00**	**49.184.558.012,00**	**90,84**	**120.264.375.442,34**
JUMLAH BELANJA	**533.519.901.745,15**	**489.985.810.220,94**	**91,84**	**559.158.442.372,84**
TRANSFER				
Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
Transfer Bagi Hasil Pajak	777.821.000,00	777.821.000,00	100,00	596.597.165,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi	551.479.000,00	309.661.549,00	56,15	229.119.070,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	98.838.641.000,00	83.722.304.840,00	84,70	102.760.970.000,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	**100.167.941.000,00**	**84.809.787.389,00**	**84,66**	**103.586.686.235,00**
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**633.687.842.745,15**	**574.795.597.609,94**	**90,70**	**662.745.128.607,84**
SURPLUS/DEFISIT	**(38.220.373.155,15)**	**2.737.809.686,19**	**(7,16)**	**(3.694.882.982,76)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**38.220.373.155,15**	**38.223.289.821,15**	**100,00**	**41.915.256.137,91**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	38.220.373.155,15	38.220.373.155,15	100,00	47.866.256.139,91
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**38.220.373.155,15**	**38.223.289.821,15**	**100,00**	**47.915.256.137,91**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4 = (4 / 3) * 100	5
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO	**38.220.373.155,15**	**38.223.289.821,15**	**100,00**	**41.915.256.137,91**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**40.961.099.507,34**	**0,00**	**38.220.373.155,15**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	157.191.881.664,00	150.570.027.436,00	(6.621.854.228,00)	95,78	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.869.608.024,00	116.399.860.839,00	(6.469.747.185,00)	94,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	122.346.905.883,00	115.881.887.984,00	(6.465.017.899,00)	94,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	122.310.330.883,00	115.845.312.984,00	(6.465.017.899,00)	94,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	122.310.330.883,00	115.845.312.984,00	(6.465.017.899,00)	94,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	122.310.330.883,00	115.845.312.984,00	(6.465.017.899,00)	94,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	17.000.000,00	16.980.000,00	(20.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	17.000.000,00	16.980.000,00	(20.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.980.000,00	(20.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.980.000,00	(20.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	7.885.000,00	(115.000,00)	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	8.000.000,00	7.885.000,00	(115.000,00)	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.885.000,00	(115.000,00)	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.885.000,00	(115.000,00)	98,56	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	137.667.501,00	137.645.451,00	(22.050,00)	99,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.196.001,00	4.196.001,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.196.001,00	4.196.001,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.196.001,00	4.196.001,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.465.000,00	27.465.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.465.000,00	27.465.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.465.000,00	27.465.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	10.836.500,00	10.836.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.836.500,00	10.836.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.836.500,00	10.836.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.000.000,00	47.977.950,00	(22.050,00)	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.977.950,00	(22.050,00)	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.977.950,00	(22.050,00)	99,95	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	281.534.640,00	277.777.904,00	(3.756.736,00)	98,66	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	37.800.000,00	36.119.000,00	(1.681.000,00)	95,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	36.119.000,00	(1.681.000,00)	95,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	36.119.000,00	(1.681.000,00)	95,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	243.734.640,00	241.658.904,00	(2.075.736,00)	99,14	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	243.734.640,00	241.658.904,00	(2.075.736,00)	99,14	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.734.640,00	241.658.904,00	(2.075.736,00)	99,14	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	78.500.000,00	77.684.500,00	(815.500,00)	98,96	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	73.500.000,00	72.684.500,00	(815.500,00)	98,89	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.500.000,00	72.684.500,00	(815.500,00)	98,89	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	72.684.500,00	(815.500,00)	98,89	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	33.975.157.640,00	33.825.204.677,00	(149.952.963,00)	99,55	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	15.879.110.334,00	15.754.057.983,00	(125.052.351,00)	99,21	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	50.208.000,00	48.828.000,00	(1.380.000,00)	97,25	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	50.208.000,00	48.828.000,00	(1.380.000,00)	97,25	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.208.000,00	48.828.000,00	(1.380.000,00)	97,25	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	5.082.269.392,00	4.995.292.030,00	(86.977.362,00)	98,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	5.082.269.392,00	4.995.292.030,00	(86.977.362,00)	98,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.269.392,00	4.995.292.030,00	(86.977.362,00)	98,28	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	423.822.000,00	404.294.800,00	(19.527.200,00)	95,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	423.822.000,00	404.294.800,00	(19.527.200,00)	95,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.822.000,00	404.294.800,00	(19.527.200,00)	95,39	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	9.118.684.000,00	9.101.576.211,00	(17.107.789,00)	99,81	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	8.812.151.621,00	8.801.149.629,00	(11.001.992,00)	99,87	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.974.470.621,00	4.796.099.279,00	(178.371.342,00)	96,41	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	3.837.681.000,00	4.005.050.350,00	167.369.350,00	104,36	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	306.532.379,00	300.426.582,00	(6.105.797,00)	98,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.532.379,00	300.426.582,00	(6.105.797,00)	98,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	99,88	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	225.483.592,00	225.483.592,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	225.483.592,00	225.483.592,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.483.592,00	225.483.592,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	928.643.350,00	928.643.350,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	925.393.350,00	925.393.350,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	925.393.350,00	925.393.350,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	9.845.481.823,00	9.765.614.947,00	(79.866.876,00)	99,18	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	108.158.400,00	108.158.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	108.158.400,00	108.158.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.158.400,00	108.158.400,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	3.028.423.628,00	2.952.720.502,00	(75.703.126,00)	97,50	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	3.028.423.628,00	2.952.720.502,00	(75.703.126,00)	97,50	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.028.423.628,00	2.952.720.502,00	(75.703.126,00)	97,50	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	83.055.000,00	81.259.650,00	(1.795.350,00)	97,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	83.055.000,00	81.259.650,00	(1.795.350,00)	97,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.055.000,00	81.259.650,00	(1.795.350,00)	97,83	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	5.961.864.000,00	5.960.744.000,00	(1.120.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	5.366.142.283,00	5.635.102.669,00	268.960.386,00	105,01	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.01	Belanja Pegawai	628.410.000,00	613.610.000,00	(14.800.000,00)	97,64	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.464.374.283,00	3.748.134.669,00	283.760.386,00	108,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	1.273.358.000,00	1.273.358.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	595.721.717,00	325.641.331,00	(270.080.386,00)	54,66	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.794.917,00	135.291.451,00	(11.503.466,00)	92,16	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	448.926.800,00	190.349.880,00	(258.576.920,00)	42,40	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	113.960.000,00	112.731.600,00	(1.228.400,00)	98,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	113.960.000,00	112.731.600,00	(1.228.400,00)	98,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.960.000,00	112.731.600,00	(1.228.400,00)	98,92	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	130.425.000,00	130.405.000,00	(20.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	130.425.000,00	130.405.000,00	(20.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.425.000,00	130.405.000,00	(20.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK	315.015.300,00	315.015.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1	BELANJA OPERASI	315.015.300,00	315.015.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.015.300,00	315.015.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	104.580.495,00	104.580.495,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068	5.1	BELANJA OPERASI	104.580.495,00	104.580.495,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.580.495,00	104.580.495,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	7.990.275.683,00	8.048.906.697,00	58.631.014,00	100,73	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	4.588.695.488,00	4.582.864.252,00	(5.831.236,00)	99,87	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	4.588.695.488,00	4.582.864.252,00	(5.831.236,00)	99,87	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.588.695.488,00	4.582.864.252,00	(5.831.236,00)	99,87	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD	133.367.200,00	129.592.200,00	(3.775.000,00)	97,16	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	133.367.200,00	129.592.200,00	(3.775.000,00)	97,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.367.200,00	129.592.200,00	(3.775.000,00)	97,16	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	170.856.000,00	169.430.150,00	(1.425.850,00)	99,16	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	170.856.000,00	169.430.150,00	(1.425.850,00)	99,16	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.856.000,00	169.430.150,00	(1.425.850,00)	99,16	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.844.650.000,00	2.914.335.100,00	69.685.100,00	102,44	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.844.650.000,00	2.914.335.100,00	69.685.100,00	102,44	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.580.000,00	148.610.000,00	92.030.000,00	262,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.788.070.000,00	2.765.725.100,00	(22.344.900,00)	99,19	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK PAUD	252.706.995,00	252.684.995,00	(22.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1	BELANJA OPERASI	252.706.995,00	252.684.995,00	(22.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.706.995,00	252.684.995,00	(22.000,00)	99,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	260.289.800,00	256.625.050,00	(3.664.750,00)	98,59	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN	260.289.800,00	256.625.050,00	(3.664.750,00)	98,59	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	260.289.800,00	256.625.050,00	(3.664.750,00)	98,59	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.605.000,00	141.940.250,00	(3.664.750,00)	97,48	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	5.1.05	Belanja Hibah	114.684.800,00	114.684.800,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	347.116.000,00	344.961.920,00	(2.154.080,00)	99,37	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	347.116.000,00	344.961.920,00	(2.154.080,00)	99,37	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002		PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	347.116.000,00	344.961.920,00	(2.154.080,00)	99,37	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	347.116.000,00	344.961.920,00	(2.154.080,00)	99,37	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.116.000,00	344.961.920,00	(2.154.080,00)	99,37	
				JUMLAH BELANJA	**157.191.881.664,00**	**150.570.027.436,00**	**(6.621.854.228,00)**	**95,78**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(157.191.881.664,00)**	**(150.570.027.436,00)**	**6.621.854.228,00**	**95,78**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(157.191.881.664,00)**	**(150.570.027.436,00)**	**6.621.854.228,00**	**95,78**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	349.301.500,00	339.791.500,00	(9.510.000,00)	97,27	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	38.701.500,00	29.901.500,00	(8.800.000,00)	77,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.701.500,00	29.901.500,00	(8.800.000,00)	77,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA	38.701.500,00	29.901.500,00	(8.800.000,00)	77,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.701.500,00	29.901.500,00	(8.800.000,00)	77,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.701.500,00	29.901.500,00	(8.800.000,00)	77,26	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	310.600.000,00	309.890.000,00	(710.000,00)	99,77	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	310.600.000,00	309.890.000,00	(710.000,00)	99,77	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	310.600.000,00	309.890.000,00	(710.000,00)	99,77	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	310.600.000,00	309.890.000,00	(710.000,00)	99,77	
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.600.000,00	309.890.000,00	(710.000,00)	99,77	
				JUMLAH BELANJA	**349.301.500,00**	**339.791.500,00**	**(9.510.000,00)**	**97,27**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(349.301.500,00)**	**(339.791.500,00)**	**9.510.000,00**	**97,27**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(349.301.500,00)**	**(339.791.500,00)**	**9.510.000,00**	**97,27**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Sanggar Kegiatan Belajar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060		5	BELANJA DAERAH	870.984.000,00	848.615.200,00	(22.368.800,00)	97,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.362.000,00	99.703.200,00	(2.658.800,00)	97,40	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.537.000,00	14.537.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	14.537.000,00	14.537.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.537.000,00	14.537.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.537.000,00	14.537.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	36.025.000,00	35.892.700,00	(132.300,00)	99,63	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	27.000.000,00	26.867.700,00	(132.300,00)	99,51	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.867.700,00	(132.300,00)	99,51	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.867.700,00	(132.300,00)	99,51	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.800.000,00	19.558.000,00	(2.242.000,00)	89,71	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.800.000,00	14.558.000,00	(2.242.000,00)	86,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	14.558.000,00	(2.242.000,00)	86,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	14.558.000,00	(2.242.000,00)	86,65	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.000.000,00	29.715.500,00	(284.500,00)	99,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.000.000,00	29.715.500,00	(284.500,00)	99,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.715.500,00	(284.500,00)	99,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.715.500,00	(284.500,00)	99,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	768.622.000,00	748.912.000,00	(19.710.000,00)	97,43	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	309.850.000,00	294.350.000,00	(15.500.000,00)	94,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.03.0047		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	309.850.000,00	294.350.000,00	(15.500.000,00)	94,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.03.0047	5.1	BELANJA OPERASI	309.850.000,00	294.350.000,00	(15.500.000,00)	94,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.03.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.850.000,00	294.350.000,00	(15.500.000,00)	94,99	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	458.772.000,00	454.562.000,00	(4.210.000,00)	99,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04.0014		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	458.772.000,00	454.562.000,00	(4.210.000,00)	99,08	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	444.772.000,00	440.562.000,00	(4.210.000,00)	99,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.772.000,00	440.562.000,00	(4.210.000,00)	99,05	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04.0014	5.2	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**870.984.000,00**	**848.615.200,00**	**(22.368.800,00)**	**97,43**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(870.984.000,00)**	**(848.615.200,00)**	**22.368.800,00**	**97,43**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(870.984.000,00)**	**(848.615.200,00)**	**22.368.800,00**	**97,43**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	100.785.703.371,00	91.825.759.772,94	(8.959.943.598,06)	91,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.324.697.671,00	43.106.355.227,00	(1.218.342.444,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	44.135.599.671,00	42.918.461.553,00	(1.217.138.118,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	44.123.399.671,00	42.906.355.553,00	(1.217.044.118,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.123.399.671,00	42.906.355.553,00	(1.217.044.118,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	44.123.399.671,00	42.906.355.553,00	(1.217.044.118,00)	97,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	5.000.000,00	4.926.000,00	(74.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.926.000,00	(74.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.926.000,00	(74.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	7.200.000,00	7.180.000,00	(20.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.180.000,00	(20.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.180.000,00	(20.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	22.498.000,00	22.493.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	22.498.000,00	22.493.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.498.000,00	22.493.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.498.000,00	22.493.000,00	(5.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	108.000.000,00	107.835.458,00	(164.542,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	55.000.000,00	54.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.000.000,00	47.836.458,00	(163.542,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	47.836.458,00	(163.542,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	47.836.458,00	(163.542,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.800.000,00	5.666.381,00	(133.619,00)	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.800.000,00	5.666.381,00	(133.619,00)	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.666.381,00	(133.619,00)	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.666.381,00	(133.619,00)	97,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.800.000,00	51.898.835,00	(901.165,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	52.800.000,00	51.898.835,00	(901.165,00)	98,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.800.000,00	51.898.835,00	(901.165,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	51.898.835,00	(901.165,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.105.205.924,00	45.518.150.425,94	(7.587.055.498,06)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.029.402.243,00	31.430.041.108,00	(3.599.361.135,00)	89,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	22.995.904.323,00	19.521.784.750,00	(3.474.119.573,00)	84,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	255.150.000,00	255.070.000,00	(80.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.150.000,00	255.070.000,00	(80.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	22.740.754.323,00	19.266.714.750,00	(3.474.039.573,00)	84,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000.000,00	1.976.580.000,00	(23.420.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.140.754.323,00	15.690.134.750,00	(3.450.619.573,00)	81,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	630.329.900,00	630.329.900,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	628.929.900,00	628.929.900,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	628.929.900,00	628.929.900,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		PENGEMBANGAN PUSKESMAS	4.743.332.004,00	4.743.331.104,00	(900,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.580.104,00	11.580.104,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.580.104,00	11.580.104,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.731.751.900,00	4.731.751.000,00	(900,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.481.751.900,00	2.481.751.000,00	(900,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	325.700.000,00	325.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	1.106.825.000,00	1.106.410.000,00	(415.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.106.125.000,00	1.105.710.000,00	(415.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.125.000,00	475.710.000,00	(415.000,00)	99,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	313.110.016,00	222.685.580,00	(90.424.436,00)	71,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	313.110.016,00	222.685.580,00	(90.424.436,00)	71,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.110.016,00	222.685.580,00	(90.424.436,00)	71,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	4.717.937.000,00	4.686.654.923,00	(31.282.077,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.717.937.000,00	4.686.654.923,00	(31.282.077,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.717.937.000,00	4.686.654.923,00	(31.282.077,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA	13.887.000,00	13.767.000,00	(120.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	13.887.000,00	13.767.000,00	(120.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.887.000,00	13.767.000,00	(120.000,00)	99,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	182.377.000,00	179.377.851,00	(2.999.149,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	182.377.000,00	179.377.851,00	(2.999.149,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.377.000,00	179.377.851,00	(2.999.149,00)	98,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.747.105.681,00	13.799.181.617,94	(3.947.924.063,06)	77,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	33.818.000,00	33.808.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.818.000,00	33.808.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.818.000,00	33.808.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	390.351.000,00	384.227.000,00	(6.124.000,00)	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	390.351.000,00	384.227.000,00	(6.124.000,00)	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.351.000,00	384.227.000,00	(6.124.000,00)	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	45.675.000,00	45.655.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.675.000,00	45.655.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.675.000,00	45.655.000,00	(20.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	61.663.400,00	61.443.000,00	(220.400,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.663.400,00	61.443.000,00	(220.400,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.663.400,00	61.443.000,00	(220.400,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	18.090.000,00	18.065.000,00	(25.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.090.000,00	18.065.000,00	(25.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.090.000,00	18.065.000,00	(25.000,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	37.833.400,00	37.661.000,00	(172.400,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.833.400,00	37.661.000,00	(172.400,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.833.400,00	37.661.000,00	(172.400,00)	99,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	37.010.000,00	37.000.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	37.010.000,00	37.000.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.010.000,00	37.000.000,00	(10.000,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	8.757.000,00	8.742.000,00	(15.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.757.000,00	8.742.000,00	(15.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.757.000,00	8.742.000,00	(15.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	8.000.000,00	7.970.000,00	(30.000,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.970.000,00	(30.000,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.970.000,00	(30.000,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	14.674.000,00	14.019.000,00	(655.000,00)	95,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.674.000,00	14.019.000,00	(655.000,00)	95,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.674.000,00	14.019.000,00	(655.000,00)	95,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	15.064.000,00	15.034.000,00	(30.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	15.064.000,00	15.034.000,00	(30.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.064.000,00	15.034.000,00	(30.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KL	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.900.000,00	(100.000,00)	99,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	91.345.000,00	90.411.556,00	(933.444,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	91.345.000,00	90.411.556,00	(933.444,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.345.000,00	90.411.556,00	(933.444,00)	98,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	82.000.000,00	80.830.286,00	(1.169.714,00)	98,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	82.000.000,00	80.830.286,00	(1.169.714,00)	98,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	80.830.286,00	(1.169.714,00)	98,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	20.000.000,00	19.029.785,00	(970.215,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.029.785,00	(970.215,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.029.785,00	(970.215,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	181.105.000,00	178.328.000,00	(2.777.000,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	181.105.000,00	178.328.000,00	(2.777.000,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.105.000,00	178.328.000,00	(2.777.000,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	25.762.000,00	25.572.000,00	(190.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	25.762.000,00	25.572.000,00	(190.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.762.000,00	25.572.000,00	(190.000,00)	99,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	194.811.000,00	194.614.400,00	(196.600,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	194.811.000,00	194.614.400,00	(196.600,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.811.000,00	194.614.400,00	(196.600,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	445.504.000,00	443.232.000,00	(2.272.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	445.504.000,00	443.232.000,00	(2.272.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.504.000,00	443.232.000,00	(2.272.000,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	13.682.167.757,00	10.026.147.464,94	(3.656.020.292,06)	73,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	13.440.167.757,00	9.791.147.464,94	(3.649.020.292,06)	72,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.440.167.757,00	9.791.147.464,94	(3.649.020.292,06)	72,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	242.000.000,00	235.000.000,00	(7.000.000,00)	97,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.000.000,00	235.000.000,00	(7.000.000,00)	97,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	129.829.000,00	78.318.800,00	(51.510.200,00)	60,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	129.829.000,00	78.318.800,00	(51.510.200,00)	60,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.829.000,00	78.318.800,00	(51.510.200,00)	60,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	1.756.601.124,00	1.540.315.456,00	(216.285.668,00)	87,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	1.756.601.124,00	1.540.315.456,00	(216.285.668,00)	87,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.756.601.124,00	1.540.315.456,00	(216.285.668,00)	87,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	104.142.000,00	97.457.600,00	(6.684.400,00)	93,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	104.142.000,00	97.457.600,00	(6.684.400,00)	93,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.142.000,00	97.457.600,00	(6.684.400,00)	93,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.980.000,00	(20.000,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	13.008.000,00	12.578.000,00	(430.000,00)	96,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	13.008.000,00	12.578.000,00	(430.000,00)	96,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.008.000,00	12.578.000,00	(430.000,00)	96,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	7.736.000,00	7.597.000,00	(139.000,00)	98,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	7.736.000,00	7.597.000,00	(139.000,00)	98,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.736.000,00	7.597.000,00	(139.000,00)	98,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	43.718.000,00	43.673.000,00	(45.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	43.718.000,00	43.673.000,00	(45.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.718.000,00	43.673.000,00	(45.000,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0043		PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK	12.635.000,00	12.635.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	12.635.000,00	12.635.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.635.000,00	12.635.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	231.806.000,00	230.942.270,00	(863.730,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	231.806.000,00	230.942.270,00	(863.730,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.806.000,00	230.942.270,00	(863.730,00)	99,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048		PENGELOLAAN LAYANAN IMUNISASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	293.524.000,00	253.753.700,00	(39.770.300,00)	86,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	293.524.000,00	253.753.700,00	(39.770.300,00)	86,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	293.524.000,00	253.753.700,00	(39.770.300,00)	86,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.524.000,00	253.753.700,00	(39.770.300,00)	86,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.174.000,00	35.174.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004		PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	35.174.000,00	35.174.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.174.000,00	35.174.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.174.000,00	35.174.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.038.915.776,00	2.929.986.366,00	(108.929.410,00)	96,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	2.177.785.776,00	2.144.073.560,00	(33.712.216,00)	98,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	31.035.600,00	30.943.500,00	(92.100,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.035.600,00	30.943.500,00	(92.100,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.035.600,00	30.943.500,00	(92.100,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	2.106.282.276,00	2.077.672.160,00	(28.610.116,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.106.282.276,00	2.077.672.160,00	(28.610.116,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.106.282.276,00	2.077.672.160,00	(28.610.116,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	40.467.900,00	35.457.900,00	(5.010.000,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.467.900,00	35.457.900,00	(5.010.000,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.467.900,00	35.457.900,00	(5.010.000,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	861.130.000,00	785.912.806,00	(75.217.194,00)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	861.130.000,00	785.912.806,00	(75.217.194,00)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	861.130.000,00	785.912.806,00	(75.217.194,00)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	861.130.000,00	785.912.806,00	(75.217.194,00)	91,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	265.774.000,00	220.322.754,00	(45.451.246,00)	82,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	244.774.000,00	200.054.144,00	(44.719.856,00)	81,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	244.774.000,00	200.054.144,00	(44.719.856,00)	81,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	244.774.000,00	200.054.144,00	(44.719.856,00)	81,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.774.000,00	200.054.144,00	(44.719.856,00)	81,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04		PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	21.000.000,00	20.268.610,00	(731.390,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	21.000.000,00	20.268.610,00	(731.390,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	20.268.610,00	(731.390,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.268.610,00	(731.390,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.110.000,00	50.945.000,00	(165.000,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.420.000,00	4.415.000,00	(5.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	4.420.000,00	4.415.000,00	(5.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.420.000,00	4.415.000,00	(5.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	4.415.000,00	(5.000,00)	99,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.690.000,00	46.530.000,00	(160.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	46.690.000,00	46.530.000,00	(160.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.690.000,00	46.530.000,00	(160.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.690.000,00	46.530.000,00	(160.000,00)	99,65	
				JUMLAH BELANJA	**100.785.703.371,00**	**91.825.759.772,94**	**(8.959.943.598,06)**	**91,10**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(100.785.703.371,00)**	**(91.825.759.772,94)**	**8.959.943.598,06**	**91,10**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(100.785.703.371,00)**	**(91.825.759.772,94)**	**8.959.943.598,06**	**91,10**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	(1.065.725.488,00)	84,18	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	(1.065.725.488,00)	84,18	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	738.014.000,00	862.407.481,00	124.393.481,00	116,85	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000.000,00	4.809.881.031,00	(1.190.118.969,00)	80,16	
				JUMLAH PENDAPATAN	**6.738.014.000,00**	**5.672.288.512,00**	**(1.065.725.488,00)**	**84,18**	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	19.349.707.284,00	16.447.725.750,00	(2.901.981.534,00)	85,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.123.389.200,00	2.298.356.560,00	(825.032.640,00)	73,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	913.294.000,00	883.202.610,00	(30.091.390,00)	96,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	102.500.000,00	86.228.000,00	(16.272.000,00)	84,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	81.000.000,00	64.728.000,00	(16.272.000,00)	79,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.000.000,00	64.728.000,00	(16.272.000,00)	79,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	83.100.000,00	83.073.400,00	(26.600,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	83.100.000,00	83.073.400,00	(26.600,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.100.000,00	83.073.400,00	(26.600,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	464.050.000,00	454.597.960,00	(9.452.040,00)	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	464.050.000,00	454.597.960,00	(9.452.040,00)	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.050.000,00	454.597.960,00	(9.452.040,00)	97,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	107.676.000,00	107.638.500,00	(37.500,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	107.676.000,00	107.638.500,00	(37.500,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.676.000,00	107.638.500,00	(37.500,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	135.988.000,00	131.684.750,00	(4.303.250,00)	96,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	135.988.000,00	131.684.750,00	(4.303.250,00)	96,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.988.000,00	131.684.750,00	(4.303.250,00)	96,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.083.100.000,00	346.312.350,00	(736.787.650,00)	31,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	160.500.000,00	160.284.500,00	(215.500,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	160.000.000,00	159.784.500,00	(215.500,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000.000,00	159.784.500,00	(215.500,00)	99,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	922.600.000,00	186.027.850,00	(736.572.150,00)	20,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.100.000,00	1.100.000,00	(13.000.000,00)	7,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	1.100.000,00	(13.000.000,00)	7,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	908.500.000,00	184.927.850,00	(723.572.150,00)	20,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	908.500.000,00	184.927.850,00	(723.572.150,00)	20,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	268.400.000,00	264.991.100,00	(3.408.900,00)	98,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	258.400.000,00	255.191.100,00	(3.208.900,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	258.400.000,00	255.191.100,00	(3.208.900,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.400.000,00	255.191.100,00	(3.208.900,00)	98,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	832.495.200,00	777.750.500,00	(54.744.700,00)	93,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	339.995.200,00	286.003.500,00	(53.991.700,00)	84,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	339.995.200,00	286.003.500,00	(53.991.700,00)	84,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.995.200,00	286.003.500,00	(53.991.700,00)	84,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	175.000.000,00	174.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.997.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	317.500.000,00	316.752.000,00	(748.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	317.500.000,00	316.752.000,00	(748.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.500.000,00	316.752.000,00	(748.000,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12.363.064.500,00	10.291.973.706,00	(2.071.090.794,00)	83,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.015.561.000,00	7.862.488.122,00	(153.072.878,00)	98,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	2.834.719.000,00	2.834.603.182,00	(115.818,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.832.219.000,00	2.832.103.182,00	(115.818,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.832.219.000,00	2.832.103.182,00	(115.818,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	170.000.000,00	144.335.300,00	(25.664.700,00)	84,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	144.335.300,00	(25.664.700,00)	84,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	144.335.300,00	(25.664.700,00)	84,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	552.622.000,00	551.100.000,00	(1.522.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	552.622.000,00	551.100.000,00	(1.522.000,00)	99,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.622.000,00	551.100.000,00	(1.522.000,00)	99,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	4.458.220.000,00	4.332.449.640,00	(125.770.360,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.458.220.000,00	4.332.449.640,00	(125.770.360,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.458.220.000,00	4.332.449.640,00	(125.770.360,00)	97,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.200.000.000,00	2.333.506.384,00	(1.866.493.616,00)	55,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	4.200.000.000,00	2.333.506.384,00	(1.866.493.616,00)	55,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000.000,00	2.333.506.384,00	(1.866.493.616,00)	55,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000.000,00	2.333.506.384,00	(1.866.493.616,00)	55,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.503.500,00	95.979.200,00	(51.524.300,00)	65,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	147.503.500,00	95.979.200,00	(51.524.300,00)	65,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	147.503.500,00	95.979.200,00	(51.524.300,00)	65,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.503.500,00	95.979.200,00	(51.524.300,00)	65,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.2.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.863.253.584,00	3.857.395.484,00	(5.858.100,00)	99,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	3.713.253.584,00	3.711.573.584,00	(1.680.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002		PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	3.713.253.584,00	3.711.573.584,00	(1.680.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.713.253.584,00	3.711.573.584,00	(1.680.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.713.253.584,00	3.711.573.584,00	(1.680.000,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	145.821.900,00	(4.178.100,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	145.821.900,00	(4.178.100,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	145.821.900,00	(4.178.100,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	145.821.900,00	(4.178.100,00)	97,21	
				JUMLAH BELANJA	**19.349.707.284,00**	**16.447.725.750,00**	**(2.901.981.534,00)**	**85,00**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(12.611.693.284,00)**	**(10.775.437.238,00)**	**1.836.256.046,00**	**85,44**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(12.611.693.284,00)**	**(10.775.437.238,00)**	**1.836.256.046,00**	**85,44**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Malinjak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	249.005.250,00	184.534.500,00	(64.470.750,00)	74,10	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249.005.250,00	184.534.500,00	(64.470.750,00)	74,10	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	239.005.250,00	184.534.500,00	(54.470.750,00)	77,20	
				JUMLAH PENDAPATAN	249.005.250,00	184.534.500,00	(64.470.750,00)	74,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	(179.793.854,00)	90,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.456.200,00	169.107.117,00	(1.349.083,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	51.066.200,00	51.066.200,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.812.500,00	10.812.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.812.500,00	10.812.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.812.500,00	10.812.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	17.217.700,00	17.217.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	17.217.700,00	17.217.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.217.700,00	17.217.700,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.200.000,00	28.200.000,00	(1.000.000,00)	96,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.200.000,00	28.200.000,00	(1.000.000,00)	96,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	28.200.000,00	(1.000.000,00)	96,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	28.200.000,00	(1.000.000,00)	96,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.190.000,00	63.840.917,00	(349.083,00)	99,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	55.500.000,00	55.177.417,00	(322.583,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.500.000,00	55.177.417,00	(322.583,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	55.177.417,00	(322.583,00)	99,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.690.000,00	4.663.500,00	(26.500,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.690.000,00	4.663.500,00	(26.500,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	4.663.500,00	(26.500,00)	99,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.636.128.250,00	1.457.683.479,00	(178.444.771,00)	89,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.636.128.250,00	1.457.683.479,00	(178.444.771,00)	89,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	7.966.000,00	2.766.000,00	(5.200.000,00)	34,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.966.000,00	2.766.000,00	(5.200.000,00)	34,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.966.000,00	2.766.000,00	(5.200.000,00)	34,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	25.600.000,00	23.600.000,00	(2.000.000,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	25.600.000,00	23.600.000,00	(2.000.000,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	23.600.000,00	(2.000.000,00)	92,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	469.623.000,00	404.283.000,00	(65.340.000,00)	86,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	469.623.000,00	404.283.000,00	(65.340.000,00)	86,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.623.000,00	404.283.000,00	(65.340.000,00)	86,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	93,75	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	93,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	42.865.000,00	35.925.000,00	(6.940.000,00)	83,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	42.865.000,00	35.925.000,00	(6.940.000,00)	83,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.865.000,00	35.925.000,00	(6.940.000,00)	83,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	186.444.000,00	181.544.000,00	(4.900.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	186.444.000,00	181.544.000,00	(4.900.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.444.000,00	181.544.000,00	(4.900.000,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	256.105.250,00	201.493.883,00	(54.611.367,00)	78,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	256.105.250,00	201.493.883,00	(54.611.367,00)	78,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.105.250,00	201.493.883,00	(54.611.367,00)	78,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	431.313.000,00	395.459.596,00	(35.853.404,00)	91,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	431.313.000,00	395.459.596,00	(35.853.404,00)	91,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.313.000,00	395.459.596,00	(35.853.404,00)	91,68	
				JUMLAH BELANJA	**1.806.584.450,00**	**1.626.790.596,00**	**(179.793.854,00)**	**90,04**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.557.579.200,00)**	**(1.442.256.096,00)**	**115.323.104,00**	**92,59**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.557.579.200,00)**	**(1.442.256.096,00)**	**115.323.104,00**	**92,59**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Mananga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	433.000.000,00	265.649.800,00	(167.350.200,00)	61,35	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	433.000.000,00	265.649.800,00	(167.350.200,00)	61,35	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	825.000,00	(1.175.000,00)	41,25	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	431.000.000,00	264.824.800,00	(166.175.200,00)	61,44	
				JUMLAH PENDAPATAN	433.000.000,00	265.649.800,00	(167.350.200,00)	61,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	(247.300.211,00)	86,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.270.000,00	249.261.907,00	(13.008.093,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.580.500,00	22.580.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.580.500,00	14.580.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.580.500,00	14.580.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.580.500,00	14.580.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	46.000.000,00	44.300.000,00	(1.700.000,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	26.000.000,00	25.800.000,00	(200.000,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	25.800.000,00	(200.000,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	25.800.000,00	(200.000,00)	99,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	62,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	62,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	62,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	39.599.500,00	39.149.500,00	(450.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.550.000,00	7.100.000,00	(450.000,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.550.000,00	7.100.000,00	(450.000,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	7.100.000,00	(450.000,00)	94,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.659.500,00	15.659.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.659.500,00	15.659.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.659.500,00	15.659.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	66.000.000,00	57.500.000,00	(8.500.000,00)	87,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	66.000.000,00	57.500.000,00	(8.500.000,00)	87,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	57.500.000,00	(8.500.000,00)	87,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	57.500.000,00	(8.500.000,00)	87,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.090.000,00	85.731.907,00	(2.358.093,00)	97,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78.090.000,00	75.731.907,00	(2.358.093,00)	96,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.090.000,00	75.731.907,00	(2.358.093,00)	96,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.090.000,00	75.731.907,00	(2.358.093,00)	96,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.571.339.000,00	1.349.226.882,00	(222.112.118,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.571.339.000,00	1.349.226.882,00	(222.112.118,00)	85,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	44.700.000,00	43.100.000,00	(1.600.000,00)	96,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.700.000,00	43.100.000,00	(1.600.000,00)	96,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	43.100.000,00	(1.600.000,00)	96,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	6.211.000,00	6.211.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.211.000,00	6.211.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.211.000,00	6.211.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	50.700.000,00	47.500.000,00	(3.200.000,00)	93,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.700.000,00	47.500.000,00	(3.200.000,00)	93,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	47.500.000,00	(3.200.000,00)	93,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	30.600.000,00	27.000.000,00	(3.600.000,00)	88,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	27.000.000,00	(3.600.000,00)	88,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	27.000.000,00	(3.600.000,00)	88,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	13.400.000,00	13.200.000,00	(200.000,00)	98,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.400.000,00	13.200.000,00	(200.000,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.200.000,00	(200.000,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	249.820.000,00	249.820.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	249.820.000,00	249.820.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.820.000,00	249.820.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	17.576.000,00	17.676.000,00	100.000,00	100,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	17.576.000,00	17.676.000,00	100.000,00	100,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.576.000,00	17.676.000,00	100.000,00	100,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	29.300.000,00	25.500.000,00	(3.800.000,00)	87,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	29.300.000,00	25.500.000,00	(3.800.000,00)	87,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	25.500.000,00	(3.800.000,00)	87,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	20.600.000,00	26.000.000,00	5.400.000,00	126,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	20.600.000,00	26.000.000,00	5.400.000,00	126,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	26.000.000,00	5.400.000,00	126,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	445.200.000,00	273.416.790,00	(171.783.210,00)	61,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	445.200.000,00	273.416.790,00	(171.783.210,00)	61,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.200.000,00	273.416.790,00	(171.783.210,00)	61,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	304.232.000,00	261.903.092,00	(42.328.908,00)	86,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	304.232.000,00	261.903.092,00	(42.328.908,00)	86,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.232.000,00	261.903.092,00	(42.328.908,00)	86,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	2.600.000,00	1.500.000,00	(1.100.000,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	1.500.000,00	(1.100.000,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	1.500.000,00	(1.100.000,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.380.000,00	7.200.000,00	(12.180.000,00)	37,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.380.000,00	7.200.000,00	(12.180.000,00)	37,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	19.380.000,00	7.200.000,00	(12.180.000,00)	37,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.380.000,00	7.200.000,00	(12.180.000,00)	37,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.380.000,00	7.200.000,00	(12.180.000,00)	37,15	
				JUMLAH BELANJA	**1.852.989.000,00**	**1.605.688.789,00**	**(247.300.211,00)**	**86,65**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.419.989.000,00)**	**(1.340.038.989,00)**	**79.950.011,00**	**94,36**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.419.989.000,00)**	**(1.340.038.989,00)**	**79.950.011,00**	**94,36**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Wairasa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	318.000.000,00	250.032.700,00	(67.967.300,00)	78,62	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	318.000.000,00	250.032.700,00	(67.967.300,00)	78,62	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.02	Retribusi Daerah	18.000.000,00	10.400.000,00	(7.600.000,00)	57,77	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	300.000.000,00	239.632.700,00	(60.367.300,00)	79,87	
				JUMLAH PENDAPATAN	318.000.000,00	250.032.700,00	(67.967.300,00)	78,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	(218.362.477,00)	87,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	177.172.500,00	176.609.039,00	(563.461,00)	99,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.000.000,00	20.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.998.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SK	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	40.172.500,00	39.611.039,00	(561.461,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	40.172.500,00	39.611.039,00	(561.461,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.172.500,00	39.611.039,00	(561.461,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.172.500,00	39.611.039,00	(561.461,00)	98,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.564.110.000,00	1.346.310.984,00	(217.799.016,00)	86,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.564.110.000,00	1.346.310.984,00	(217.799.016,00)	86,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	135.251.000,00	133.251.000,00	(2.000.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.251.000,00	133.251.000,00	(2.000.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.251.000,00	133.251.000,00	(2.000.000,00)	98,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	76.445.000,00	76.445.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	76.445.000,00	76.445.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.445.000,00	76.445.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	24.576.000,00	24.576.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.576.000,00	24.576.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.576.000,00	24.576.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	23.400.000,00	26.100.000,00	2.700.000,00	111,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	26.100.000,00	2.700.000,00	111,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	26.100.000,00	2.700.000,00	111,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	3.500.000,00	2.100.000,00	(1.400.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.100.000,00	(1.400.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.100.000,00	(1.400.000,00)	60,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	38.400.000,00	38.200.000,00	(200.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	38.200.000,00	(200.000,00)	99,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	38.200.000,00	(200.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	7.400.000,00	2.000.000,00	(5.400.000,00)	27,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	2.000.000,00	(5.400.000,00)	27,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	2.000.000,00	(5.400.000,00)	27,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KL	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	268.495.000,00	179.045.000,00	(89.450.000,00)	66,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	268.495.000,00	179.045.000,00	(89.450.000,00)	66,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.495.000,00	179.045.000,00	(89.450.000,00)	66,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	75.975.000,00	75.075.000,00	(900.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	75.975.000,00	75.075.000,00	(900.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.975.000,00	75.075.000,00	(900.000,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	335.600.000,00	254.654.408,00	(80.945.592,00)	75,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	335.600.000,00	254.654.408,00	(80.945.592,00)	75,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.600.000,00	254.654.408,00	(80.945.592,00)	75,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	347.805.000,00	307.601.576,00	(40.203.424,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	347.805.000,00	307.601.576,00	(40.203.424,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.805.000,00	307.601.576,00	(40.203.424,00)	88,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	17.376.000,00	17.376.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	17.376.000,00	17.376.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.376.000,00	17.376.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**1.745.082.500,00**	**1.526.720.023,00**	**(218.362.477,00)**	**87,48**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.427.082.500,00)**	**(1.276.687.323,00)**	**150.395.177,00**	**89,46**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.427.082.500,00)**	**(1.276.687.323,00)**	**150.395.177,00**	**89,46**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Maradesa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	159.395.000,00	125.369.900,00	(34.025.100,00)	78,65	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159.395.000,00	125.369.900,00	(34.025.100,00)	78,65	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	975.000,00	(1.025.000,00)	48,75	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	157.395.000,00	124.394.900,00	(33.000.100,00)	79,03	
				JUMLAH PENDAPATAN	159.395.000,00	125.369.900,00	(34.025.100,00)	78,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	1.201.023.500,00	1.140.710.488,00	(60.313.012,00)	94,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	138.507.500,00	138.507.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.957.500,00	53.957.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	53.957.500,00	53.957.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.957.500,00	53.957.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.957.500,00	53.957.500,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.062.516.000,00	1.002.202.988,00	(60.313.012,00)	94,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.062.516.000,00	1.002.202.988,00	(60.313.012,00)	94,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	149.155.000,00	146.755.000,00	(2.400.000,00)	98,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.155.000,00	146.755.000,00	(2.400.000,00)	98,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.155.000,00	146.755.000,00	(2.400.000,00)	98,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	29.679.000,00	29.679.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.679.000,00	29.679.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.679.000,00	29.679.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	8.000.000,00	7.800.000,00	(200.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.800.000,00	(200.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.800.000,00	(200.000,00)	97,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	195.387.000,00	182.486.935,00	(12.900.065,00)	93,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	195.387.000,00	182.486.935,00	(12.900.065,00)	93,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.387.000,00	182.486.935,00	(12.900.065,00)	93,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	108.939.000,00	108.939.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	108.939.000,00	108.939.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.939.000,00	108.939.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	42.340.000,00	41.540.000,00	(800.000,00)	98,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	42.340.000,00	41.540.000,00	(800.000,00)	98,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.340.000,00	41.540.000,00	(800.000,00)	98,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	162.395.000,00	125.604.406,00	(36.790.594,00)	77,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	162.395.000,00	125.604.406,00	(36.790.594,00)	77,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.395.000,00	125.604.406,00	(36.790.594,00)	77,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	200.621.000,00	193.398.647,00	(7.222.353,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	200.621.000,00	193.398.647,00	(7.222.353,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.621.000,00	193.398.647,00	(7.222.353,00)	96,40	
				JUMLAH BELANJA	**1.201.023.500,00**	**1.140.710.488,00**	**(60.313.012,00)**	**94,97**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.041.628.500,00)**	**(1.015.340.588,00)**	**26.287.912,00**	**97,47**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.041.628.500,00)**	**(1.015.340.588,00)**	**26.287.912,00**	**97,47**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Lawonda

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	432.000.000,00	285.920.400,00	(146.079.600,00)	66,18	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	432.000.000,00	285.920.400,00	(146.079.600,00)	66,18	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	950.000,00	(9.050.000,00)	9,50	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	422.000.000,00	284.970.400,00	(137.029.600,00)	67,52	
				JUMLAH PENDAPATAN	432.000.000,00	285.920.400,00	(146.079.600,00)	66,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	(163.942.903,00)	90,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	240.668.000,00	234.832.118,00	(5.835.882,00)	97,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.000.000,00	26.500.000,00	(3.500.000,00)	88,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.000.000,00	26.500.000,00	(3.500.000,00)	88,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	26.500.000,00	(3.500.000,00)	88,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	26.500.000,00	(3.500.000,00)	88,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.918.000,00	99.582.118,00	(2.335.882,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	63.918.000,00	61.582.118,00	(2.335.882,00)	96,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.918.000,00	61.582.118,00	(2.335.882,00)	96,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.918.000,00	61.582.118,00	(2.335.882,00)	96,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.432.464.000,00	1.274.356.979,00	(158.107.021,00)	88,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.432.464.000,00	1.274.356.979,00	(158.107.021,00)	88,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	31.600.000,00	34.400.000,00	2.800.000,00	108,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.600.000,00	34.400.000,00	2.800.000,00	108,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	34.400.000,00	2.800.000,00	108,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	8.549.000,00	2.583.000,00	(5.966.000,00)	30,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.549.000,00	2.583.000,00	(5.966.000,00)	30,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.549.000,00	2.583.000,00	(5.966.000,00)	30,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	243.408.000,00	243.408.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	243.408.000,00	243.408.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.408.000,00	243.408.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	34.500.000,00	38.700.000,00	4.200.000,00	112,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	34.500.000,00	38.700.000,00	4.200.000,00	112,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	38.700.000,00	4.200.000,00	112,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.600.000,00	7.800.000,00	(1.800.000,00)	81,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	7.800.000,00	(1.800.000,00)	81,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	7.800.000,00	(1.800.000,00)	81,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	47.892.000,00	43.692.000,00	(4.200.000,00)	91,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	47.892.000,00	43.692.000,00	(4.200.000,00)	91,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.892.000,00	43.692.000,00	(4.200.000,00)	91,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	434.500.000,00	285.727.192,00	(148.772.808,00)	65,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	434.500.000,00	285.727.192,00	(148.772.808,00)	65,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.500.000,00	285.727.192,00	(148.772.808,00)	65,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	303.665.000,00	299.296.787,00	(4.368.213,00)	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	303.665.000,00	299.296.787,00	(4.368.213,00)	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.665.000,00	299.296.787,00	(4.368.213,00)	98,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**1.673.132.000,00**	**1.509.189.097,00**	**(163.942.903,00)**	**90,20**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.241.132.000,00)**	**(1.223.268.697,00)**	**17.863.303,00**	**98,56**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.241.132.000,00)**	**(1.223.268.697,00)**	**17.863.303,00**	**98,56**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Weluri

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	152.144.600,00	101.784.500,00	(50.360.100,00)	66,89	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	152.144.600,00	101.784.500,00	(50.360.100,00)	66,89	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	1.875.000,00	(125.000,00)	93,75	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.144.600,00	99.909.500,00	(50.235.100,00)	66,54	
				JUMLAH PENDAPATAN	152.144.600,00	101.784.500,00	(50.360.100,00)	66,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	973.415.600,00	872.287.740,00	(101.127.860,00)	89,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.364.000,00	79.877.011,00	(1.486.989,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.500.000,00	32.013.011,00	(1.486.989,00)	95,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	30.000.000,00	28.513.011,00	(1.486.989,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.513.011,00	(1.486.989,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.513.011,00	(1.486.989,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	878.744.600,00	779.103.729,00	(99.640.871,00)	88,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	878.744.600,00	779.103.729,00	(99.640.871,00)	88,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	35.980.000,00	35.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.980.000,00	35.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.980.000,00	35.980.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	5.800.000,00	4.800.000,00	(1.000.000,00)	82,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	4.800.000,00	(1.000.000,00)	82,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	4.800.000,00	(1.000.000,00)	82,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	24.200.000,00	23.000.000,00	(1.200.000,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.200.000,00	23.000.000,00	(1.200.000,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	23.000.000,00	(1.200.000,00)	95,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	48.800.000,00	50.000.000,00	1.200.000,00	102,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	48.800.000,00	50.000.000,00	1.200.000,00	102,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	50.000.000,00	1.200.000,00	102,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	13.600.000,00	13.000.000,00	(600.000,00)	95,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.000.000,00	(600.000,00)	95,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.000.000,00	(600.000,00)	95,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	162.150.000,00	116.870.000,00	(45.280.000,00)	72,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	162.150.000,00	116.870.000,00	(45.280.000,00)	72,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.150.000,00	116.870.000,00	(45.280.000,00)	72,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	16.600.000,00	16.000.000,00	(600.000,00)	96,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	16.600.000,00	16.000.000,00	(600.000,00)	96,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	16.000.000,00	(600.000,00)	96,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	42.864.000,00	42.864.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	42.864.000,00	42.864.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.864.000,00	42.864.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	154.644.600,00	115.636.317,00	(39.008.283,00)	74,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	154.644.600,00	115.636.317,00	(39.008.283,00)	74,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.644.600,00	115.636.317,00	(39.008.283,00)	74,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	200.088.000,00	186.957.412,00	(13.130.588,00)	93,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	200.088.000,00	186.957.412,00	(13.130.588,00)	93,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.088.000,00	186.957.412,00	(13.130.588,00)	93,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.278.000,00	3.256.000,00	(22.000,00)	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	3.278.000,00	3.256.000,00	(22.000,00)	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.278.000,00	3.256.000,00	(22.000,00)	99,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**973.415.600,00**	**872.287.740,00**	**(101.127.860,00)**	**89,61**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(821.271.000,00)**	**(770.503.240,00)**	**50.767.760,00**	**93,81**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(821.271.000,00)**	**(770.503.240,00)**	**50.767.760,00**	**93,81**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Lendiwacu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4	PENDAPATAN DAERAH	167.123.900,00	148.129.000,00	(18.994.900,00)	88,63	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.123.900,00	148.129.000,00	(18.994.900,00)	88,63	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	325.000,00	(1.675.000,00)	16,25	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.123.900,00	147.804.000,00	(17.319.900,00)	89,51	
				JUMLAH PENDAPATAN	167.123.900,00	148.129.000,00	(18.994.900,00)	88,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	1.084.269.900,00	949.181.416,00	(135.088.484,00)	87,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.330.000,00	139.813.543,00	(10.516.457,00)	93,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	19.680.000,00	19.050.000,00	(630.000,00)	96,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	6.870.000,00	(630.000,00)	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.870.000,00	(630.000,00)	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.870.000,00	(630.000,00)	91,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.550.000,00	47.663.543,00	(9.886.457,00)	82,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	55.050.000,00	46.663.543,00	(8.386.457,00)	84,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.050.000,00	46.663.543,00	(8.386.457,00)	84,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.050.000,00	46.663.543,00	(8.386.457,00)	84,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	930.144.900,00	805.972.873,00	(124.172.027,00)	86,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOT	930.144.900,00	805.972.873,00	(124.172.027,00)	86,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	67.933.000,00	67.800.000,00	(133.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.933.000,00	67.800.000,00	(133.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.933.000,00	67.800.000,00	(133.000,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	217.886.000,00	186.831.000,00	(31.055.000,00)	85,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	217.886.000,00	186.831.000,00	(31.055.000,00)	85,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.886.000,00	186.831.000,00	(31.055.000,00)	85,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	80,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	121.000.000,00	120.100.000,00	(900.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	121.000.000,00	120.100.000,00	(900.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.000.000,00	120.100.000,00	(900.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	169.628.900,00	142.745.233,00	(26.883.667,00)	84,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	169.628.900,00	142.745.233,00	(26.883.667,00)	84,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.628.900,00	142.745.233,00	(26.883.667,00)	84,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	244.529.000,00	181.869.640,00	(62.659.360,00)	74,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	244.529.000,00	181.869.640,00	(62.659.360,00)	74,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.529.000,00	181.869.640,00	(62.659.360,00)	74,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.347.000,00	806.000,00	(1.541.000,00)	34,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.347.000,00	806.000,00	(1.541.000,00)	34,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.347.000,00	806.000,00	(1.541.000,00)	34,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.795.000,00	3.395.000,00	(400.000,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.795.000,00	3.395.000,00	(400.000,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	3.795.000,00	3.395.000,00	(400.000,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.795.000,00	3.395.000,00	(400.000,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.795.000,00	3.395.000,00	(400.000,00)	89,45	
				JUMLAH BELANJA	**1.084.269.900,00**	**949.181.416,00**	**(135.088.484,00)**	**87,54**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(917.146.000,00)**	**(801.052.416,00)**	**116.093.584,00**	**87,34**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(917.146.000,00)**	**(801.052.416,00)**	**116.093.584,00**	**87,34**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Pahar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4	PENDAPATAN DAERAH	172.000.000,00	108.099.000,00	(63.901.000,00)	62,84	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172.000.000,00	108.099.000,00	(63.901.000,00)	62,84	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	170.000.000,00	108.099.000,00	(61.901.000,00)	63,58	
				JUMLAH PENDAPATAN	172.000.000,00	108.099.000,00	(63.901.000,00)	62,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	972.833.000,00	850.554.384,00	(122.278.616,00)	87,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.663.000,00	151.247.339,00	(2.415.661,00)	98,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	28.185.000,00	28.185.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	11.965.000,00	11.965.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	109.113.000,00	108.897.339,00	(215.661,00)	99,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	92.713.000,00	92.497.339,00	(215.661,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.713.000,00	92.497.339,00	(215.661,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.713.000,00	92.497.339,00	(215.661,00)	99,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	819.170.000,00	699.307.045,00	(119.862.955,00)	85,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOT	819.170.000,00	699.307.045,00	(119.862.955,00)	85,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	30.460.000,00	26.535.000,00	(3.925.000,00)	87,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.460.000,00	26.535.000,00	(3.925.000,00)	87,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.460.000,00	26.535.000,00	(3.925.000,00)	87,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	38.165.000,00	37.765.000,00	(400.000,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.165.000,00	37.765.000,00	(400.000,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.165.000,00	37.765.000,00	(400.000,00)	98,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	6.600.000,00	84.800.000,00	78.200.000,00	1.284,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	84.800.000,00	78.200.000,00	1.284,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	84.800.000,00	78.200.000,00	1.284,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	0,00	(81.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	13.657.000,00	13.657.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.657.000,00	13.657.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.657.000,00	13.657.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	5.400.000,00	4.000.000,00	(1.400.000,00)	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	4.000.000,00	(1.400.000,00)	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	4.000.000,00	(1.400.000,00)	74,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	138.796.000,00	133.636.000,00	(5.160.000,00)	96,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	138.796.000,00	133.636.000,00	(5.160.000,00)	96,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.796.000,00	133.636.000,00	(5.160.000,00)	96,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	14.800.000,00	4.200.000,00	(10.600.000,00)	28,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	14.800.000,00	4.200.000,00	(10.600.000,00)	28,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	4.200.000,00	(10.600.000,00)	28,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	13.597.000,00	9.014.000,00	(4.583.000,00)	66,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	13.597.000,00	9.014.000,00	(4.583.000,00)	66,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.597.000,00	9.014.000,00	(4.583.000,00)	66,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0019		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0022		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	8.800.000,00	8.700.000,00	(100.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.700.000,00	(100.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.700.000,00	(100.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	177.000.000,00	111.483.948,00	(65.516.052,00)	62,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	177.000.000,00	111.483.948,00	(65.516.052,00)	62,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	111.483.948,00	(65.516.052,00)	62,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	179.795.000,00	157.216.097,00	(22.578.903,00)	87,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	179.795.000,00	157.216.097,00	(22.578.903,00)	87,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.795.000,00	157.216.097,00	(22.578.903,00)	87,44	
				JUMLAH BELANJA	**972.833.000,00**	**850.554.384,00**	**(122.278.616,00)**	**87,43**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(800.833.000,00)**	**(742.455.384,00)**	**58.377.616,00**	**92,71**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(800.833.000,00)**	**(742.455.384,00)**	**58.377.616,00**	**92,71**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Umbu Riri.

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4	PENDAPATAN DAERAH	102.000.000,00	36.600.000,00	(65.400.000,00)	35,88	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.000.000,00	36.600.000,00	(65.400.000,00)	35,88	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000,00	36.600.000,00	(63.400.000,00)	36,60	
				JUMLAH PENDAPATAN	102.000.000,00	36.600.000,00	(65.400.000,00)	35,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	(77.334.048,00)	94,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.691.000,00	190.691.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.486.000,00	36.486.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.486.000,00	21.486.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.486.000,00	21.486.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.486.000,00	21.486.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	52.205.000,00	52.205.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPE	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.169.924.000,00	1.092.589.952,00	(77.334.048,00)	93,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.169.924.000,00	1.092.589.952,00	(77.334.048,00)	93,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	59.841.000,00	59.841.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.841.000,00	59.841.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.841.000,00	59.841.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	49.455.000,00	49.455.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.455.000,00	49.455.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.455.000,00	49.455.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	30.000.000,00	79.574.000,00	49.574.000,00	265,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	79.574.000,00	49.574.000,00	265,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	79.574.000,00	49.574.000,00	265,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	49.574.000,00	0,00	(49.574.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	49.574.000,00	0,00	(49.574.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.574.000,00	0,00	(49.574.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0013		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	267.623.000,00	263.623.000,00	(4.000.000,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	267.623.000,00	263.623.000,00	(4.000.000,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.623.000,00	263.623.000,00	(4.000.000,00)	98,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	115.920.000,00	115.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	115.920.000,00	115.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.920.000,00	115.920.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	109.600.000,00	47.323.622,00	(62.276.378,00)	43,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	109.600.000,00	47.323.622,00	(62.276.378,00)	43,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00	47.323.622,00	(62.276.378,00)	43,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	347.935.000,00	336.877.330,00	(11.057.670,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	347.935.000,00	336.877.330,00	(11.057.670,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.935.000,00	336.877.330,00	(11.057.670,00)	96,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN O	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**1.360.615.000,00**	**1.283.280.952,00**	**(77.334.048,00)**	**94,31**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.258.615.000,00)**	**(1.246.680.952,00)**	**11.934.048,00**	**99,05**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.258.615.000,00)**	**(1.246.680.952,00)**	**11.934.048,00**	**99,05**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Tanambanas

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		5	BELANJA DAERAH	817.841.700,00	756.049.172,00	(61.792.528,00)	92,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.199.700,00	224.040.654,00	(159.046,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	56.116.700,00	56.111.000,00	(5.700,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.186.700,00	22.181.000,00	(5.700,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.186.700,00	22.181.000,00	(5.700,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.186.700,00	22.181.000,00	(5.700,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.483.000,00	74.329.654,00	(153.346,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	58.483.000,00	58.329.654,00	(153.346,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.483.000,00	58.329.654,00	(153.346,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.483.000,00	58.329.654,00	(153.346,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.2.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	584.654.000,00	523.020.518,00	(61.633.482,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	584.654.000,00	523.020.518,00	(61.633.482,00)	89,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	15.600.000,00	15.000.000,00	(600.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.000.000,00	(600.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.000.000,00	(600.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	13.200.000,00	4.600.000,00	(8.600.000,00)	34,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	4.600.000,00	(8.600.000,00)	34,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	4.600.000,00	(8.600.000,00)	34,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	215.253.000,00	199.653.000,00	(15.600.000,00)	92,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	215.253.000,00	199.653.000,00	(15.600.000,00)	92,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.253.000,00	199.653.000,00	(15.600.000,00)	92,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.100.000,00	4.800.000,00	(300.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	4.800.000,00	(300.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	4.800.000,00	(300.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	14.360.000,00	8.600.000,00	(5.760.000,00)	59,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	14.360.000,00	8.600.000,00	(5.760.000,00)	59,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.360.000,00	8.600.000,00	(5.760.000,00)	59,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	75.543.000,00	72.543.000,00	(3.000.000,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	75.543.000,00	72.543.000,00	(3.000.000,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.543.000,00	72.543.000,00	(3.000.000,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	165.344.000,00	143.224.518,00	(22.119.482,00)	86,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	165.344.000,00	143.224.518,00	(22.119.482,00)	86,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.344.000,00	143.224.518,00	(22.119.482,00)	86,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	12.854.000,00	7.200.000,00	(5.654.000,00)	56,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	12.854.000,00	7.200.000,00	(5.654.000,00)	56,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.854.000,00	7.200.000,00	(5.654.000,00)	56,01	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.2.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**817.841.700,00**	**756.049.172,00**	**(61.792.528,00)**	**92,44**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(817.841.700,00)**	**(756.049.172,00)**	**61.792.528,00**	**92,44**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(817.841.700,00)**	**(756.049.172,00)**	**61.792.528,00**	**92,44**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,57	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,57	
	1.03.1.04.2.10.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,57	
				JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,00	216.865.362,00	66.865.362,00	144,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.083.007.792,00	24.547.119.462,00	(535.888.330,00)	97,86	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.391.639.848,00	4.314.968.001,00	(76.671.847,00)	98,25	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.117.000,00	24.746.500,00	(370.500,00)	98,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.117.000,00	24.746.500,00	(370.500,00)	98,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.117.000,00	24.746.500,00	(370.500,00)	98,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.117.000,00	24.746.500,00	(370.500,00)	98,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.125.482.848,00	4.057.890.154,00	(67.592.694,00)	98,36	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.086.432.848,00	4.020.676.154,00	(65.756.694,00)	98,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.086.432.848,00	4.020.676.154,00	(65.756.694,00)	98,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.086.432.848,00	4.020.676.154,00	(65.756.694,00)	98,39	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	37.550.000,00	35.750.000,00	(1.800.000,00)	95,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.550.000,00	35.750.000,00	(1.800.000,00)	95,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.550.000,00	35.750.000,00	(1.800.000,00)	95,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.500.000,00	1.464.000,00	(36.000,00)	97,60	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.464.000,00	(36.000,00)	97,60	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.464.000,00	(36.000,00)	97,60	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	116.495.000,00	116.475.120,00	(19.880,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.000.000,00	99.980.120,00	(19.880,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.980.120,00	(19.880,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.980.120,00	(19.880,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.995.000,00	21.981.400,00	(13.600,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	17.986.400,00	(13.600,00)	99,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.986.400,00	(13.600,00)	99,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.986.400,00	(13.600,00)	99,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	102.550.000,00	93.874.827,00	(8.675.173,00)	91,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	102.550.000,00	93.874.827,00	(8.675.173,00)	91,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.550.000,00	93.874.827,00	(8.675.173,00)	91,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.550.000,00	93.874.827,00	(8.675.173,00)	91,54	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	515.312.456,00	515.152.918,00	(159.538,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	515.312.456,00	515.152.918,00	(159.538,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	515.312.456,00	515.152.918,00	(159.538,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	189.006.496,00	188.946.958,00	(59.538,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.006.496,00	188.946.958,00	(59.538,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	326.305.960,00	326.205.960,00	(100.000,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.305.960,00	326.205.960,00	(100.000,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.405.388.496,00	13.005.124.396,00	(400.264.100,00)	97,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.405.388.496,00	13.005.124.396,00	(400.264.100,00)	97,01	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	74.006.496,00	74.006.496,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	74.006.496,00	74.006.496,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.006.496,00	74.006.496,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	13.331.382.000,00	12.931.117.900,00	(400.264.100,00)	96,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	351.319.100,00	351.260.000,00	(59.100,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.319.100,00	351.260.000,00	(59.100,00)	99,98	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	(400.205.000,00)	96,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	(400.205.000,00)	96,91	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	(17.306.888,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOT	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	(17.306.888,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0022		PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	(17.306.888,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	(17.306.888,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	(17.306.888,00)	99,66	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	118.000.000,00	114.224.400,00	(3.775.600,00)	96,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	118.000.000,00	114.224.400,00	(3.775.600,00)	96,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	118.000.000,00	114.224.400,00	(3.775.600,00)	96,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	118.000.000,00	114.224.400,00	(3.775.600,00)	96,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.000.000,00	114.224.400,00	(3.775.600,00)	96,80	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	304.337.664,00	295.835.236,00	(8.502.428,00)	97,20	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	304.337.664,00	295.835.236,00	(8.502.428,00)	97,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	255.000.000,00	254.720.516,00	(279.484,00)	99,89	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	154.820.516,00	(179.484,00)	99,88	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	154.820.516,00	(179.484,00)	99,88	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.900.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046		PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	49.337.664,00	41.114.720,00	(8.222.944,00)	83,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	49.337.664,00	41.114.720,00	(8.222.944,00)	83,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.337.664,00	41.114.720,00	(8.222.944,00)	83,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.000,00	171.541.315,00	(28.458.685,00)	85,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	200.000.000,00	171.541.315,00	(28.458.685,00)	85,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.2.01.0016		PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS	200.000.000,00	171.541.315,00	(28.458.685,00)	85,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	171.541.315,00	(28.458.685,00)	85,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	171.541.315,00	(28.458.685,00)	85,77	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.3.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	950.000.000,00	949.250.756,00	(749.244,00)	99,92	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	850.000.000,00	849.598.957,00	(401.043,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003		PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	850.000.000,00	849.598.957,00	(401.043,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	849.598.957,00	(401.043,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	849.598.957,00	(401.043,00)	99,95	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	99.651.799,00	(348.201,00)	99,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	100.000.000,00	99.651.799,00	(348.201,00)	99,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.651.799,00	(348.201,00)	99,65	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.651.799,00	(348.201,00)	99,65	
				JUMLAH BELANJA	**25.083.007.792,00**	**24.547.119.462,00**	**(535.888.330,00)**	**97,86**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(24.933.007.792,00)**	**(24.330.254.100,00)**	**602.753.692,00**	**97,58**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(24.933.007.792,00)**	**(24.330.254.100,00)**	**602.753.692,00**	**97,58**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		5	BELANJA DAERAH	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.4.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP KUMUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	(5.000,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.118.500,00	255.113.500,00	(5.000,00)	99,99	
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.200.000.000,00	18.200.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**18.455.118.500,00**	**18.455.113.500,00**	**(5.000,00)**	**99,99**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(18.455.118.500,00)**	**(18.455.113.500,00)**	**5.000,00**	**99,99**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(18.455.118.500,00)**	**(18.455.113.500,00)**	**5.000,00**	**99,99**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : UPTD Pengelola Air Minum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.1.04.2.10.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43	
	1.03.1.04.2.10.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43	
	1.03.1.04.2.10.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43	
				JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,00	158.147.600,00	8.147.600,00	105,43	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001		5	BELANJA DAERAH	970.680.098,00	964.200.127,00	(6.479.971,00)	99,33	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380.300.934,00	376.628.907,00	(3.672.027,00)	99,03	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.015.000,00	21.015.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	21.015.000,00	21.015.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.015.000,00	21.015.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.215.000,00	7.215.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	345.535.934,00	343.264.500,00	(2.271.434,00)	99,34	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	335.934.934,00	335.814.500,00	(120.434,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	335.934.934,00	335.814.500,00	(120.434,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.934.934,00	335.814.500,00	(120.434,00)	99,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.601.000,00	1.950.000,00	(651.000,00)	74,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.601.000,00	1.950.000,00	(651.000,00)	74,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.601.000,00	1.950.000,00	(651.000,00)	74,97	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.750.000,00	12.349.407,00	(1.400.593,00)	89,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	13.750.000,00	12.349.407,00	(1.400.593,00)	89,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.750.000,00	12.349.407,00	(1.400.593,00)	89,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	12.349.407,00	(1.400.593,00)	89,81	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.3.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	590.379.164,00	587.571.220,00	(2.807.944,00)	99,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	590.379.164,00	587.571.220,00	(2.807.944,00)	99,52	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0024		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	29.820.000,00	29.705.000,00	(115.000,00)	99,61	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	29.820.000,00	29.705.000,00	(115.000,00)	99,61	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.820.000,00	29.705.000,00	(115.000,00)	99,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0027		PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA	302.495.000,00	302.475.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	302.495.000,00	302.475.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.495.000,00	302.475.000,00	(20.000,00)	99,99	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	258.064.164,00	255.391.220,00	(2.672.944,00)	98,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	258.064.164,00	255.391.220,00	(2.672.944,00)	98,96	
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.064.164,00	255.391.220,00	(2.672.944,00)	98,96	
				JUMLAH BELANJA	**970.680.098,00**	**964.200.127,00**	**(6.479.971,00)**	**99,33**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(820.680.098,00)**	**(806.052.527,00)**	**14.627.571,00**	**98,21**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(820.680.098,00)**	**(806.052.527,00)**	**14.627.571,00**	**98,21**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	(114.822.381,00)	93,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.245.039.060,00	1.138.285.739,00	(106.753.321,00)	91,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	4.843.500,00	4.843.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.993.500,00	2.993.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.993.500,00	2.993.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.993.500,00	2.993.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	833.402.680,00	743.427.901,00	(89.974.779,00)	89,20	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	810.670.180,00	720.695.401,00	(89.974.779,00)	88,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	810.670.180,00	720.695.401,00	(89.974.779,00)	88,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	810.670.180,00	720.695.401,00	(89.974.779,00)	88,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	22.732.500,00	22.732.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.732.500,00	22.732.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.732.500,00	22.732.500,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	34.000.000,00	33.721.458,00	(278.542,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34.000.000,00	33.721.458,00	(278.542,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	33.721.458,00	(278.542,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	33.721.458,00	(278.542,00)	99,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	189.528.880,00	189.528.880,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	183.528.880,00	183.528.880,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	183.528.880,00	183.528.880,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.528.880,00	183.528.880,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	183.264.000,00	166.764.000,00	(16.500.000,00)	90,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	183.264.000,00	166.764.000,00	(16.500.000,00)	90,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.264.000,00	166.764.000,00	(16.500.000,00)	90,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.264.000,00	166.764.000,00	(16.500.000,00)	90,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.5.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	623.828.300,00	615.759.240,00	(8.069.060,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	455.790.000,00	447.774.740,00	(8.015.260,00)	98,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0008		PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA	455.790.000,00	447.774.740,00	(8.015.260,00)	98,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	455.790.000,00	447.774.740,00	(8.015.260,00)	98,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	455.790.000,00	447.774.740,00	(8.015.260,00)	98,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	168.038.300,00	167.984.500,00	(53.800,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	168.038.300,00	167.984.500,00	(53.800,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	168.038.300,00	167.984.500,00	(53.800,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.038.300,00	167.984.500,00	(53.800,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	**1.868.867.360,00**	**1.754.044.979,00**	**(114.822.381,00)**	**93,85**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.868.867.360,00)**	**(1.754.044.979,00)**	**114.822.381,00**	**93,85**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.868.867.360,00)**	**(1.754.044.979,00)**	**114.822.381,00**	**93,85**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.989.151.770,00	3.673.839.113,00	(315.312.657,00)	92,09	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.516.324.410,00	2.264.486.753,00	(251.837.657,00)	89,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.999.518.416,00	1.770.438.415,00	(229.080.001,00)	88,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.978.818.416,00	1.753.338.415,00	(225.480.001,00)	88,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.978.818.416,00	1.753.338.415,00	(225.480.001,00)	88,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.978.818.416,00	1.753.338.415,00	(225.480.001,00)	88,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	20.700.000,00	17.100.000,00	(3.600.000,00)	82,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.700.000,00	17.100.000,00	(3.600.000,00)	82,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	12.000.000,00	8.400.000,00	(3.600.000,00)	70,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	609.000,00	0,00	(609.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	609.000,00	0,00	(609.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	609.000,00	0,00	(609.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.000,00	0,00	(609.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	95.918.360,00	95.798.360,00	(120.000,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	28.418.360,00	28.418.360,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.418.360,00	28.418.360,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.418.360,00	28.418.360,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.000.000,00	59.880.000,00	(120.000,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.880.000,00	(120.000,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.880.000,00	(120.000,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	154.507.104,00	150.879.984,00	(3.627.120,00)	97,65	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.650.000,00	10.022.880,00	(3.627.120,00)	73,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.650.000,00	10.022.880,00	(3.627.120,00)	73,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	10.022.880,00	(3.627.120,00)	73,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	140.857.104,00	140.857.104,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.857.104,00	140.857.104,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.857.104,00	140.857.104,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	258.171.530,00	241.869.994,00	(16.301.536,00)	93,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	250.174.360,00	233.872.824,00	(16.301.536,00)	93,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	239.674.360,00	223.372.824,00	(16.301.536,00)	93,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.674.360,00	223.372.824,00	(16.301.536,00)	93,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.997.170,00	4.997.170,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.997.170,00	4.997.170,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.170,00	4.997.170,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.466.727.360,00	1.403.252.360,00	(63.475.000,00)	95,67	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.416.212.360,00	1.358.997.360,00	(57.215.000,00)	95,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004		PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	19.860.000,00	(140.000,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.860.000,00	(140.000,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.860.000,00	(140.000,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA	64.500.000,00	64.400.000,00	(100.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.500.000,00	64.400.000,00	(100.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	64.400.000,00	(100.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	157.100.000,00	146.890.000,00	(10.210.000,00)	93,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	157.100.000,00	146.890.000,00	(10.210.000,00)	93,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.100.000,00	146.890.000,00	(10.210.000,00)	93,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	1.174.612.360,00	1.127.847.360,00	(46.765.000,00)	96,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.174.612.360,00	1.127.847.360,00	(46.765.000,00)	96,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.174.612.360,00	1.127.847.360,00	(46.765.000,00)	96,01	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	50.515.000,00	44.255.000,00	(6.260.000,00)	87,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	50.515.000,00	44.255.000,00	(6.260.000,00)	87,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	50.515.000,00	44.255.000,00	(6.260.000,00)	87,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.515.000,00	44.255.000,00	(6.260.000,00)	87,60	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.5.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001		PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**3.989.151.770,00**	**3.673.839.113,00**	**(315.312.657,00)**	**92,09**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.989.151.770,00)**	**(3.673.839.113,00)**	**315.312.657,00**	**92,09**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.989.151.770,00)**	**(3.673.839.113,00)**	**315.312.657,00**	**92,09**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	(106.137.619,00)	96,42	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.6.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.004.400.880,00	1.918.885.694,00	(85.515.186,00)	95,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.663.136.549,00	1.585.325.816,00	(77.810.733,00)	95,32	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.644.335.549,00	1.566.524.816,00	(77.810.733,00)	95,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.644.335.549,00	1.566.524.816,00	(77.810.733,00)	95,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.644.335.549,00	1.566.524.816,00	(77.810.733,00)	95,26	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	18.801.000,00	18.801.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.801.000,00	18.801.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.801.000,00	18.801.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	90.232.520,00	89.874.250,00	(358.270,00)	99,60	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.033.520,00	12.033.250,00	(270,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.033.520,00	12.033.250,00	(270,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.033.520,00	12.033.250,00	(270,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.109.000,00	12.109.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.109.000,00	12.109.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.109.000,00	12.109.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.000.000,00	59.642.000,00	(358.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.642.000,00	(358.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.642.000,00	(358.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	236.627.811,00	229.281.628,00	(7.346.183,00)	96,89	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.250.000,00	17.981.000,00	(7.269.000,00)	71,21	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	17.981.000,00	(7.269.000,00)	71,21	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	17.981.000,00	(7.269.000,00)	71,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	211.377.811,00	211.300.628,00	(77.183,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	211.377.811,00	211.300.628,00	(77.183,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.377.811,00	211.300.628,00	(77.183,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.6.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	173.654.500,00	172.622.500,00	(1.032.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01		PEMBERDAYAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)	74.150.000,00	73.994.000,00	(156.000,00)	99,78	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0001		FASILITASI PEMBERDAYAAN SOSIAL KAT	51.435.000,00	51.415.000,00	(20.000,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.435.000,00	51.415.000,00	(20.000,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.435.000,00	51.415.000,00	(20.000,00)	99,96	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KAT	22.715.000,00	22.579.000,00	(136.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.715.000,00	22.579.000,00	(136.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.715.000,00	22.579.000,00	(136.000,00)	99,40	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.504.500,00	98.628.500,00	(876.000,00)	99,11	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.882.000,00	26.857.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.882.000,00	26.857.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.882.000,00	26.857.000,00	(25.000,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	23.745.000,00	22.970.000,00	(775.000,00)	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.745.000,00	22.970.000,00	(775.000,00)	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.745.000,00	22.970.000,00	(775.000,00)	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	34.372.500,00	34.371.500,00	(1.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.372.500,00	34.371.500,00	(1.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.372.500,00	34.371.500,00	(1.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0005		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	14.505.000,00	14.430.000,00	(75.000,00)	99,48	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.505.000,00	14.430.000,00	(75.000,00)	99,48	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.505.000,00	14.430.000,00	(75.000,00)	99,48	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.6.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	470.883.400,00	457.400.317,00	(13.483.083,00)	97,13	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	408.320.000,00	394.997.074,00	(13.322.926,00)	96,73	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	386.269.000,00	373.556.074,00	(12.712.926,00)	96,70	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	386.269.000,00	373.556.074,00	(12.712.926,00)	96,70	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.269.000,00	373.556.074,00	(12.712.926,00)	96,70	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	22.051.000,00	21.441.000,00	(610.000,00)	97,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.051.000,00	21.441.000,00	(610.000,00)	97,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.051.000,00	21.441.000,00	(610.000,00)	97,23	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	62.563.400,00	62.403.243,00	(160.157,00)	99,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.02.0003		PENYEDIAAN PERMAKANAN	62.563.400,00	62.403.243,00	(160.157,00)	99,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	62.563.400,00	62.403.243,00	(160.157,00)	99,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.563.400,00	62.403.243,00	(160.157,00)	99,74	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.6.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	131.909.000,00	131.254.000,00	(655.000,00)	99,50	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.909.000,00	131.254.000,00	(655.000,00)	99,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.699.000,00	106.599.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	106.699.000,00	106.599.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.699.000,00	106.599.000,00	(100.000,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.210.000,00	24.655.000,00	(555.000,00)	97,79	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.210.000,00	24.655.000,00	(555.000,00)	97,79	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.210.000,00	24.655.000,00	(555.000,00)	97,79	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.6.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	185.375.000,00	179.922.650,00	(5.452.350,00)	97,05	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	185.375.000,00	179.922.650,00	(5.452.350,00)	97,05	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0001		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA	134.355.000,00	128.902.650,00	(5.452.350,00)	95,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	134.355.000,00	128.902.650,00	(5.452.350,00)	95,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.355.000,00	128.902.650,00	(5.452.350,00)	95,94	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	51.020.000,00	51.020.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.020.000,00	51.020.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.020.000,00	51.020.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**2.966.222.780,00**	**2.860.085.161,00**	**(106.137.619,00)**	**96,42**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.966.222.780,00)**	**(2.860.085.161,00)**	**106.137.619,00**	**96,42**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.966.222.780,00)**	**(2.860.085.161,00)**	**106.137.619,00**	**96,42**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	687.739.000,00	627.260.625,00	(60.478.375,00)	91,20	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.8.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.750.000,00	66.811.937,00	(938.063,00)	98,61	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	67.750.000,00	66.811.937,00	(938.063,00)	98,61	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	67.750.000,00	66.811.937,00	(938.063,00)	98,61	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.750.000,00	66.811.937,00	(938.063,00)	98,61	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	66.811.937,00	(938.063,00)	98,61	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.8.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	50.000.000,00	49.948.000,00	(52.000,00)	99,89	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	49.948.000,00	(52.000,00)	99,89	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	49.948.000,00	(52.000,00)	99,89	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.948.000,00	(52.000,00)	99,89	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.948.000,00	(52.000,00)	99,89	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.8.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	134.876.500,00	134.876.500,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.376.500,00	33.376.500,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.03.0004		PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	33.376.500,00	33.376.500,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.376.500,00	33.376.500,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.376.500,00	33.376.500,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.8.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	72.042.500,00	67.042.500,00	(5.000.000,00)	93,05	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.292.500,00	10.292.500,00	(5.000.000,00)	67,30	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.292.500,00	10.292.500,00	(5.000.000,00)	67,30	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.292.500,00	10.292.500,00	(5.000.000,00)	67,30	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.292.500,00	10.292.500,00	(5.000.000,00)	67,30	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	100,00	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.8.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	363.070.000,00	308.581.688,00	(54.488.312,00)	84,99	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.140.000,00	181.285.000,00	(48.855.000,00)	78,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0005		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.140.000,00	181.285.000,00	(48.855.000,00)	78,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	230.140.000,00	181.285.000,00	(48.855.000,00)	78,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.140.000,00	181.285.000,00	(48.855.000,00)	78,77	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.930.000,00	127.296.688,00	(5.633.312,00)	95,76	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0007		PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.910.000,00	61.051.000,00	(2.859.000,00)	95,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	63.910.000,00	61.051.000,00	(2.859.000,00)	95,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.910.000,00	61.051.000,00	(2.859.000,00)	95,52	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0009		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.020.000,00	66.245.688,00	(2.774.312,00)	95,98	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	66.245.688,00	(2.774.312,00)	95,98	
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	66.245.688,00	(2.774.312,00)	95,98	
				JUMLAH BELANJA	**687.739.000,00**	**627.260.625,00**	**(60.478.375,00)**	**91,20**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(687.739.000,00)**	**(627.260.625,00)**	**60.478.375,00**	**91,20**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(687.739.000,00)**	**(627.260.625,00)**	**60.478.375,00**	**91,20**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.602.089.454,00	3.207.004.258,00	(395.085.196,00)	89,03	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.081.634.954,00	1.904.281.685,00	(177.353.269,00)	91,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.458.081.302,00	1.323.652.633,00	(134.428.669,00)	90,78	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.438.071.302,00	1.303.642.633,00	(134.428.669,00)	90,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.438.071.302,00	1.303.642.633,00	(134.428.669,00)	90,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.438.071.302,00	1.303.642.633,00	(134.428.669,00)	90,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.793.100,00	80.709.785,00	(83.315,00)	99,89	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.793.100,00	10.793.000,00	(100,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.793.100,00	10.793.000,00	(100,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.793.100,00	10.793.000,00	(100,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.000.000,00	69.916.785,00	(83.215,00)	99,88	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.916.785,00	(83.215,00)	99,88	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.916.785,00	(83.215,00)	99,88	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	333.010.552,00	328.648.552,00	(4.362.000,00)	98,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.260.000,00	5.898.000,00	(4.362.000,00)	57,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.260.000,00	5.898.000,00	(4.362.000,00)	57,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	5.898.000,00	(4.362.000,00)	57,48	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	322.750.552,00	322.750.552,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	322.750.552,00	322.750.552,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.750.552,00	322.750.552,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	209.750.000,00	171.270.715,00	(38.479.285,00)	81,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	209.750.000,00	171.270.715,00	(38.479.285,00)	81,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	176.250.000,00	138.355.715,00	(37.894.285,00)	78,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.250.000,00	138.355.715,00	(37.894.285,00)	78,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09.0006	5.2	BELANJA MODAL	33.500.000,00	32.915.000,00	(585.000,00)	98,25	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.500.000,00	32.915.000,00	(585.000,00)	98,25	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	20.454.500,00	20.351.750,00	(102.750,00)	99,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.454.500,00	20.351.750,00	(102.750,00)	99,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0020		PENYUSUNAN PROFIL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA)	20.454.500,00	20.351.750,00	(102.750,00)	99,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	20.454.500,00	20.351.750,00	(102.750,00)	99,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.454.500,00	20.351.750,00	(102.750,00)	99,49	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	999.400.000,00	783.270.825,00	(216.129.175,00)	78,37	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	225.000.000,00	146.446.625,00	(78.553.375,00)	65,08	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.988.000,00	(12.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	95.000.000,00	82.000.000,00	(13.000.000,00)	86,31	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	82.000.000,00	(13.000.000,00)	86,31	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	82.000.000,00	(13.000.000,00)	86,31	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	100.000.000,00	34.458.625,00	(65.541.375,00)	34,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	34.458.625,00	(65.541.375,00)	34,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	34.458.625,00	(65.541.375,00)	34,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	462.464.000,00	331.608.200,00	(130.855.800,00)	71,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	9.900.000,00	8.172.000,00	(1.728.000,00)	82,54	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	8.172.000,00	(1.728.000,00)	82,54	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	8.172.000,00	(1.728.000,00)	82,54	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	420.914.000,00	292.986.200,00	(127.927.800,00)	69,60	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	420.914.000,00	292.986.200,00	(127.927.800,00)	69,60	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.914.000,00	292.986.200,00	(127.927.800,00)	69,60	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	31.650.000,00	30.450.000,00	(1.200.000,00)	96,20	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	31.650.000,00	30.450.000,00	(1.200.000,00)	96,20	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	30.450.000,00	(1.200.000,00)	96,20	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	311.936.000,00	305.216.000,00	(6.720.000,00)	97,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	311.936.000,00	305.216.000,00	(6.720.000,00)	97,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	311.936.000,00	305.216.000,00	(6.720.000,00)	97,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.936.000,00	305.216.000,00	(6.720.000,00)	97,84	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	500.600.000,00	499.099.998,00	(1.500.002,00)	99,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	500.600.000,00	499.099.998,00	(1.500.002,00)	99,70	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	65.000.000,00	63.499.998,00	(1.500.002,00)	97,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	63.499.998,00	(1.500.002,00)	97,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	63.499.998,00	(1.500.002,00)	97,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0024		PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	435.600.000,00	435.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	435.600.000,00	435.600.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.600.000,00	435.600.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**3.602.089.454,00**	**3.207.004.258,00**	**(395.085.196,00)**	**89,03**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.602.089.454,00)**	**(3.207.004.258,00)**	**395.085.196,00**	**89,03**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.602.089.454,00)**	**(3.207.004.258,00)**	**395.085.196,00**	**89,03**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.11.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,07	
	2.11.0.00.0.00.11.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,07	
	2.11.0.00.0.00.11.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,07	
				JUMLAH PENDAPATAN	70.000.000,00	42.752.500,00	(27.247.500,00)	61,07	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	(214.842.599,00)	94,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.086.191.422,00	1.876.520.673,00	(209.670.749,00)	89,94	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.759.110,00	13.660.000,00	(99.110,00)	99,27	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.249.110,00	11.150.000,00	(99.110,00)	99,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.249.110,00	11.150.000,00	(99.110,00)	99,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.249.110,00	11.150.000,00	(99.110,00)	99,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.660.370.000,00	1.467.397.693,00	(192.972.307,00)	88,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.647.170.000,00	1.455.997.693,00	(191.172.307,00)	88,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.647.170.000,00	1.455.997.693,00	(191.172.307,00)	88,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.647.170.000,00	1.455.997.693,00	(191.172.307,00)	88,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	13.200.000,00	11.400.000,00	(1.800.000,00)	86,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	11.400.000,00	(1.800.000,00)	86,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	11.400.000,00	(1.800.000,00)	86,36	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	486.000,00	486.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	486.000,00	486.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	486.000,00	486.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.000,00	486.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	73.886.000,00	70.715.810,00	(3.170.190,00)	95,70	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	15.386.000,00	12.811.000,00	(2.575.000,00)	83,26	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.386.000,00	12.811.000,00	(2.575.000,00)	83,26	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.386.000,00	12.811.000,00	(2.575.000,00)	83,26	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	58.500.000,00	57.904.810,00	(595.190,00)	98,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	58.500.000,00	57.904.810,00	(595.190,00)	98,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.500.000,00	57.904.810,00	(595.190,00)	98,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	72.656.000,00	72.643.000,00	(13.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.000.000,00	49.987.000,00	(13.000,00)	99,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.987.000,00	(13.000,00)	99,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.987.000,00	(13.000,00)	99,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.034.312,00	161.934.312,00	(8.100.000,00)	95,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.350.000,00	14.250.000,00	(8.100.000,00)	63,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.350.000,00	14.250.000,00	(8.100.000,00)	63,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	14.250.000,00	(8.100.000,00)	63,75	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	147.684.312,00	147.684.312,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	147.684.312,00	147.684.312,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.684.312,00	147.684.312,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95.000.000,00	89.683.858,00	(5.316.142,00)	94,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.000.000,00	89.683.858,00	(5.316.142,00)	94,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	89.683.858,00	(5.316.142,00)	94,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	89.683.858,00	(5.316.142,00)	94,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	773.645.000,00	771.607.000,00	(2.038.000,00)	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	773.645.000,00	771.607.000,00	(2.038.000,00)	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0006		PENYELENGGARAAN KLHS UNTUK KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK/RESIKO LINGKUNGAN HIDUP	773.645.000,00	771.607.000,00	(2.038.000,00)	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	773.645.000,00	771.607.000,00	(2.038.000,00)	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.645.000,00	771.607.000,00	(2.038.000,00)	99,73	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	188.357.500,00	186.117.500,00	(2.240.000,00)	98,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	180.102.500,00	177.897.500,00	(2.205.000,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	135.470.000,00	133.377.000,00	(2.093.000,00)	98,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.470.000,00	133.377.000,00	(2.093.000,00)	98,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.470.000,00	133.377.000,00	(2.093.000,00)	98,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	44.632.500,00	44.520.500,00	(112.000,00)	99,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.632.500,00	44.520.500,00	(112.000,00)	99,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.632.500,00	44.520.500,00	(112.000,00)	99,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.02		PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	8.255.000,00	8.220.000,00	(35.000,00)	99,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.02.0001		PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	8.255.000,00	8.220.000,00	(35.000,00)	99,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.255.000,00	8.220.000,00	(35.000,00)	99,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.255.000,00	8.220.000,00	(35.000,00)	99,57	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	531.026.500,00	530.852.650,00	(173.850,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	531.026.500,00	530.852.650,00	(173.850,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	531.026.500,00	530.852.650,00	(173.850,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	531.026.500,00	530.852.650,00	(173.850,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	531.026.500,00	530.852.650,00	(173.850,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	6.574.400,00	6.294.400,00	(280.000,00)	95,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05.2.02		PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.574.400,00	6.294.400,00	(280.000,00)	95,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	6.574.400,00	6.294.400,00	(280.000,00)	95,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.574.400,00	6.294.400,00	(280.000,00)	95,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.574.400,00	6.294.400,00	(280.000,00)	95,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.670.000,00	23.540.000,00	(130.000,00)	99,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.670.000,00	23.540.000,00	(130.000,00)	99,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	12.800.000,00	12.685.000,00	(115.000,00)	99,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.685.000,00	(115.000,00)	99,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.685.000,00	(115.000,00)	99,10	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	10.870.000,00	10.855.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.870.000,00	10.855.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.870.000,00	10.855.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	5.384.400,00	5.359.400,00	(25.000,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01		PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	5.384.400,00	5.359.400,00	(25.000,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, PENYEDIAAN DATA, DAN INFORMASI PENGAKUAN KEBERADAAN MHA KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	5.384.400,00	5.359.400,00	(25.000,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.384.400,00	5.359.400,00	(25.000,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.384.400,00	5.359.400,00	(25.000,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	37.267.000,00	37.262.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.267.000,00	37.262.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK	37.267.000,00	37.262.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.267.000,00	37.262.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.267.000,00	37.262.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	38.880.000,00	38.840.000,00	(40.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09.2.01		PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.880.000,00	38.840.000,00	(40.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09.2.01.0001		PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	38.880.000,00	38.840.000,00	(40.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.880.000,00	38.840.000,00	(40.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.880.000,00	38.840.000,00	(40.000,00)	99,89	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6.195.000,00	6.145.000,00	(50.000,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	6.195.000,00	6.145.000,00	(50.000,00)	99,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	6.195.000,00	6.145.000,00	(50.000,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.195.000,00	6.145.000,00	(50.000,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	6.145.000,00	(50.000,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	86.134.000,00	85.944.000,00	(190.000,00)	99,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	86.134.000,00	85.944.000,00	(190.000,00)	99,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	86.134.000,00	85.944.000,00	(190.000,00)	99,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	86.134.000,00	85.944.000,00	(190.000,00)	99,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.134.000,00	85.944.000,00	(190.000,00)	99,77	
				JUMLAH BELANJA	**3.783.325.222,00**	**3.568.482.623,00**	**(214.842.599,00)**	**94,32**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.713.325.222,00)**	**(3.525.730.123,00)**	**187.595.099,00**	**94,94**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.713.325.222,00)**	**(3.525.730.123,00)**	**187.595.099,00**	**94,94**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	2.761.103.764,00	2.571.027.065,00	(190.076.699,00)	93,11	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.453.178.764,00	2.269.662.065,00	(183.516.699,00)	92,51	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.002.367.500,00	1.821.284.201,00	(181.083.299,00)	90,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.974.300.000,00	1.793.216.701,00	(181.083.299,00)	90,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.974.300.000,00	1.793.216.701,00	(181.083.299,00)	90,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.974.300.000,00	1.793.216.701,00	(181.083.299,00)	90,82	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	10.867.500,00	10.867.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.867.500,00	10.867.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.867.500,00	10.867.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	98.500.000,00	98.484.430,00	(15.570,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	90.000.000,00	89.984.430,00	(15.570,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.984.430,00	(15.570,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.984.430,00	(15.570,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	21.250.000,00	21.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.250.000,00	21.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	277.311.264,00	277.249.764,00	(61.500,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.600.000,00	21.538.500,00	(61.500,00)	99,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.538.500,00	(61.500,00)	99,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.538.500,00	(61.500,00)	99,71	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	255.711.264,00	255.711.264,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	255.711.264,00	255.711.264,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.711.264,00	255.711.264,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.750.000,00	51.413.670,00	(2.336.330,00)	95,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	53.750.000,00	51.413.670,00	(2.336.330,00)	95,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.750.000,00	51.413.670,00	(2.336.330,00)	95,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.750.000,00	51.413.670,00	(2.336.330,00)	95,65	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	65.995.000,00	65.515.000,00	(480.000,00)	99,27	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	65.995.000,00	65.515.000,00	(480.000,00)	99,27	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001		PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN DAN RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	16.970.000,00	16.590.000,00	(380.000,00)	97,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.970.000,00	16.590.000,00	(380.000,00)	97,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.970.000,00	16.590.000,00	(380.000,00)	97,76	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	25.000.000,00	24.980.000,00	(20.000,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.980.000,00	(20.000,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.980.000,00	(20.000,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0003		PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK	14.500.000,00	14.460.000,00	(40.000,00)	99,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	14.460.000,00	(40.000,00)	99,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.460.000,00	(40.000,00)	99,72	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	9.525.000,00	9.485.000,00	(40.000,00)	99,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.525.000,00	9.485.000,00	(40.000,00)	99,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.525.000,00	9.485.000,00	(40.000,00)	99,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.000.000,00	33.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	34.000.000,00	33.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	18.000.000,00	17.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.995.000,00	(5.000,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	187.630.000,00	181.595.000,00	(6.035.000,00)	96,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	39.830.000,00	39.815.000,00	(15.000,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	12.220.000,00	12.210.000,00	(10.000,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.220.000,00	12.210.000,00	(10.000,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.220.000,00	12.210.000,00	(10.000,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002		KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	27.610.000,00	27.605.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.610.000,00	27.605.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.610.000,00	27.605.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.02		PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.02.0001		PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	136.000.000,00	129.980.000,00	(6.020.000,00)	95,57	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	125.500.000,00	119.480.000,00	(6.020.000,00)	95,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.500.000,00	119.480.000,00	(6.020.000,00)	95,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.500.000,00	119.480.000,00	(6.020.000,00)	95,20	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0007		KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.300.000,00	20.260.000,00	(40.000,00)	99,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.300.000,00	20.260.000,00	(40.000,00)	99,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	10.200.000,00	10.190.000,00	(10.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	10.190.000,00	(10.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	10.190.000,00	(10.000,00)	99,90	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LA	10.100.000,00	10.070.000,00	(30.000,00)	99,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.100.000,00	10.070.000,00	(30.000,00)	99,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.070.000,00	(30.000,00)	99,70	
				JUMLAH BELANJA	**2.761.103.764,00**	**2.571.027.065,00**	**(190.076.699,00)**	**93,11**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.761.103.764,00)**	**(2.571.027.065,00)**	**190.076.699,00**	**93,11**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.761.103.764,00)**	**(2.571.027.065,00)**	**190.076.699,00**	**93,11**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	2.711.872.657,00	2.599.682.796,00	(112.189.861,00)	95,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.873.793.687,00	1.765.858.250,00	(107.935.437,00)	94,23	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.875.000,00	10.860.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.875.000,00	10.860.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.875.000,00	10.860.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.875.000,00	10.860.000,00	(15.000,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.607.980.996,00	1.500.915.375,00	(107.065.621,00)	93,34	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.590.980.996,00	1.483.915.375,00	(107.065.621,00)	93,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.590.980.996,00	1.483.915.375,00	(107.065.621,00)	93,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.590.980.996,00	1.483.915.375,00	(107.065.621,00)	93,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	71.952.667,00	71.922.249,00	(30.418,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.353.667,00	1.353.667,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.353.667,00	1.353.667,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.667,00	1.353.667,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	14.599.000,00	14.599.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.599.000,00	14.599.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.599.000,00	14.599.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	52.000.000,00	51.969.582,00	(30.418,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	51.969.582,00	(30.418,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	51.969.582,00	(30.418,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	67.000.000,00	66.996.940,00	(3.060,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	67.000.000,00	66.996.940,00	(3.060,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	66.500.000,00	66.496.940,00	(3.060,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.500.000,00	66.496.940,00	(3.060,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.485.024,00	85.702.974,00	(782.050,00)	99,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.900.000,00	14.310.450,00	(589.550,00)	96,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.900.000,00	14.310.450,00	(589.550,00)	96,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.310.450,00	(589.550,00)	96,04	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	71.585.024,00	71.392.524,00	(192.500,00)	99,73	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.585.024,00	71.392.524,00	(192.500,00)	99,73	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.585.024,00	71.392.524,00	(192.500,00)	99,73	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.500.000,00	29.460.712,00	(39.288,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	29.500.000,00	29.460.712,00	(39.288,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.500.000,00	29.460.712,00	(39.288,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.460.712,00	(39.288,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	553.078.970,00	549.215.045,00	(3.863.925,00)	99,30	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	553.078.970,00	549.215.045,00	(3.863.925,00)	99,30	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	116.035.000,00	114.235.000,00	(1.800.000,00)	98,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	116.035.000,00	114.235.000,00	(1.800.000,00)	98,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.035.000,00	114.235.000,00	(1.800.000,00)	98,44	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	20.312.000,00	18.312.000,00	(2.000.000,00)	90,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.312.000,00	18.312.000,00	(2.000.000,00)	90,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.312.000,00	18.312.000,00	(2.000.000,00)	90,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0006		FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA	30.995.000,00	30.990.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.995.000,00	30.990.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.995.000,00	30.990.000,00	(5.000,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	45.599.970,00	45.555.000,00	(44.970,00)	99,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	45.599.970,00	45.555.000,00	(44.970,00)	99,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.599.970,00	45.555.000,00	(44.970,00)	99,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015		FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	340.137.000,00	340.123.045,00	(13.955,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	340.137.000,00	340.123.045,00	(13.955,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.137.000,00	340.123.045,00	(13.955,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	285.000.000,00	284.609.501,00	(390.499,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	285.000.000,00	284.609.501,00	(390.499,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	285.000.000,00	284.609.501,00	(390.499,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	285.000.000,00	284.609.501,00	(390.499,00)	99,86	
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	284.609.501,00	(390.499,00)	99,86	
				JUMLAH BELANJA	**2.711.872.657,00**	**2.599.682.796,00**	**(112.189.861,00)**	**95,86**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.711.872.657,00)**	**(2.599.682.796,00)**	**112.189.861,00**	**95,86**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.711.872.657,00)**	**(2.599.682.796,00)**	**112.189.861,00**	**95,86**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26	
	2.15.0.00.0.00.15.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26	
				JUMLAH PENDAPATAN	110.000.000,00	122.387.000,00	12.387.000,00	111,26	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	(281.499.094,00)	86,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.018.308,00	1.648.454.214,00	(280.564.094,00)	85,45	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.336.684.500,00	1.254.463.997,00	(82.220.503,00)	93,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.324.000.000,00	1.241.779.997,00	(82.220.003,00)	93,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.324.000.000,00	1.241.779.997,00	(82.220.003,00)	93,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.324.000.000,00	1.241.779.997,00	(82.220.003,00)	93,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.684.500,00	12.684.000,00	(500,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.684.500,00	12.684.000,00	(500,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.684.500,00	12.684.000,00	(500,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	176.352.120,00	176.334.681,00	(17.439,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	9.405.000,00	9.399.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.405.000,00	9.399.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.405.000,00	9.399.000,00	(6.000,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.549.000,00	11.549.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.549.000,00	11.549.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.549.000,00	11.549.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	12.398.120,00	12.390.000,00	(8.120,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.398.120,00	12.390.000,00	(8.120,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.398.120,00	12.390.000,00	(8.120,00)	99,93	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	140.000.000,00	139.996.681,00	(3.319,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	139.996.681,00	(3.319,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.996.681,00	(3.319,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.981.688,00	154.362.536,00	(16.619.152,00)	90,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.499.000,00	9.900.000,00	(599.000,00)	94,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.499.000,00	9.900.000,00	(599.000,00)	94,29	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.499.000,00	9.900.000,00	(599.000,00)	94,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	160.482.688,00	144.462.536,00	(16.020.152,00)	90,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	160.482.688,00	144.462.536,00	(16.020.152,00)	90,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.482.688,00	144.462.536,00	(16.020.152,00)	90,01	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	245.000.000,00	63.293.000,00	(181.707.000,00)	25,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	245.000.000,00	63.293.000,00	(181.707.000,00)	25,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	245.000.000,00	63.293.000,00	(181.707.000,00)	25,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.000.000,00	63.293.000,00	(181.707.000,00)	25,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	124.635.000,00	124.425.000,00	(210.000,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	22.335.000,00	22.180.000,00	(155.000,00)	99,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010		MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	22.335.000,00	22.180.000,00	(155.000,00)	99,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.335.000,00	22.180.000,00	(155.000,00)	99,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.335.000,00	22.180.000,00	(155.000,00)	99,30	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017		PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1	BELANJA OPERASI	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08		AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	60.000.000,00	59.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007		PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM	60.000.000,00	59.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.945.000,00	(55.000,00)	99,90	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	54.185.000,00	53.460.000,00	(725.000,00)	98,66	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.02		PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT BAGI ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BERDOMISILI DAN YANG BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.14		PENERBITAN IZIN USAHA UNTUK BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	47.185.000,00	46.460.000,00	(725.000,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.14.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN UNTUK BADAN USAHA PELABUHAN DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL	47.185.000,00	46.460.000,00	(725.000,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.185.000,00	46.460.000,00	(725.000,00)	98,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.185.000,00	46.460.000,00	(725.000,00)	98,46	
				JUMLAH BELANJA	**2.107.838.308,00**	**1.826.339.214,00**	**(281.499.094,00)**	**86,64**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.997.838.308,00)**	**(1.703.952.214,00)**	**293.886.094,00**	**85,28**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.997.838.308,00)**	**(1.703.952.214,00)**	**293.886.094,00**	**85,28**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.31.3.30.15.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,62	
	2.17.3.31.3.30.15.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,62	
	2.17.3.31.3.30.15.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	120.000.000,00	162.001.000,00	42.001.000,00	135,00	
	2.17.3.31.3.30.15.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	70.000,00	(5.930.000,00)	1,16	
				JUMLAH PENDAPATAN	126.000.000,00	162.071.000,00	36.071.000,00	128,62	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000		5	BELANJA DAERAH	3.638.075.556,00	3.511.482.693,00	(126.592.863,00)	96,52	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.143.496.056,00	3.025.436.750,00	(118.059.306,00)	96,24	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.941.000,00	18.941.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.941.000,00	18.941.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.941.000,00	18.941.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.941.000,00	18.941.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.748.958.132,00	2.640.374.942,00	(108.583.190,00)	96,05	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.714.028.132,00	2.607.639.942,00	(106.388.190,00)	96,08	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.714.028.132,00	2.607.639.942,00	(106.388.190,00)	96,08	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.714.028.132,00	2.607.639.942,00	(106.388.190,00)	96,08	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	34.930.000,00	32.735.000,00	(2.195.000,00)	93,71	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.930.000,00	32.735.000,00	(2.195.000,00)	93,71	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	28.595.000,00	26.400.000,00	(2.195.000,00)	92,32	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.335.000,00	6.335.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	84.255.000,00	84.246.385,00	(8.615,00)	99,98	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	74.000.000,00	73.991.385,00	(8.615,00)	99,98	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	73.991.385,00	(8.615,00)	99,98	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	73.991.385,00	(8.615,00)	99,98	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	201.091.924,00	193.054.487,00	(8.037.437,00)	96,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	171.691.924,00	163.654.487,00	(8.037.437,00)	95,31	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.491.924,00	150.480.452,00	(8.011.472,00)	94,94	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.491.924,00	150.480.452,00	(8.011.472,00)	94,94	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0004	5.2	BELANJA MODAL	13.200.000,00	13.174.035,00	(25.965,00)	99,80	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.174.035,00	(25.965,00)	99,80	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.250.000,00	88.819.936,00	(1.430.064,00)	98,41	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	24.750.000,00	23.401.158,00	(1.348.842,00)	94,55	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	23.401.158,00	(1.348.842,00)	94,55	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	23.401.158,00	(1.348.842,00)	94,55	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	65.500.000,00	65.418.778,00	(81.222,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	64.918.778,00	(81.222,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	64.918.778,00	(81.222,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19.894.000,00	19.789.000,00	(105.000,00)	99,47	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	19.894.000,00	19.789.000,00	(105.000,00)	99,47	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.894.000,00	19.789.000,00	(105.000,00)	99,47	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.894.000,00	19.789.000,00	(105.000,00)	99,47	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.894.000,00	19.789.000,00	(105.000,00)	99,47	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24.115.000,00	24.085.000,00	(30.000,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04.2.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.115.000,00	24.085.000,00	(30.000,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04.2.01.0001		PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	24.115.000,00	24.085.000,00	(30.000,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.115.000,00	24.085.000,00	(30.000,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.115.000,00	24.085.000,00	(30.000,00)	99,87	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	251.194.000,00	244.176.443,00	(7.017.557,00)	97,20	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.194.000,00	244.176.443,00	(7.017.557,00)	97,20	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	251.194.000,00	244.176.443,00	(7.017.557,00)	97,20	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	251.194.000,00	244.176.443,00	(7.017.557,00)	97,20	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.194.000,00	244.176.443,00	(7.017.557,00)	97,20	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	55.773.500,00	55.753.500,00	(20.000,00)	99,96	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	55.773.500,00	55.753.500,00	(20.000,00)	99,96	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0002		PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	16.795.000,00	16.795.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.795.000,00	16.795.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.795.000,00	16.795.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0003		FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	20.563.500,00	20.558.500,00	(5.000,00)	99,97	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.563.500,00	20.558.500,00	(5.000,00)	99,97	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.563.500,00	20.558.500,00	(5.000,00)	99,97	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	18.415.000,00	18.400.000,00	(15.000,00)	99,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.415.000,00	18.400.000,00	(15.000,00)	99,91	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.415.000,00	18.400.000,00	(15.000,00)	99,91	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	143.603.000,00	142.242.000,00	(1.361.000,00)	99,05	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	143.603.000,00	142.242.000,00	(1.361.000,00)	99,05	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08.2.01.0003		PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN	143.603.000,00	142.242.000,00	(1.361.000,00)	99,05	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	143.603.000,00	142.242.000,00	(1.361.000,00)	99,05	
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.603.000,00	142.242.000,00	(1.361.000,00)	99,05	
				JUMLAH BELANJA	**3.638.075.556,00**	**3.511.482.693,00**	**(126.592.863,00)**	**96,52**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.512.075.556,00)**	**(3.349.411.693,00)**	**162.663.863,00**	**95,36**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.512.075.556,00)**	**(3.349.411.693,00)**	**162.663.863,00**	**95,36**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000		5	BELANJA DAERAH	338.700.000,00	338.570.000,00	(130.000,00)	99,96	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	303.700.000,00	303.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	303.700.000,00	303.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0002		FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	268.700.000,00	268.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	268.700.000,00	268.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.700.000,00	268.690.000,00	(10.000,00)	99,99	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	20.000.000,00	19.880.000,00	(120.000,00)	99,40	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	20.000.000,00	19.880.000,00	(120.000,00)	99,40	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.880.000,00	(120.000,00)	99,20	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0002		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**338.700.000,00**	**338.570.000,00**	**(130.000,00)**	**99,96**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(338.700.000,00)**	**(338.570.000,00)**	**130.000,00**	**99,96**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(338.700.000,00)**	**(338.570.000,00)**	**130.000,00**	**99,96**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000		5	BELANJA DAERAH	266.587.000,00	264.635.985,00	(1.951.015,00)	99,26	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	251.587.000,00	249.725.985,00	(1.861.015,00)	99,26	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	251.587.000,00	249.725.985,00	(1.861.015,00)	99,26	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	52.442.000,00	51.642.000,00	(800.000,00)	98,47	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	52.442.000,00	51.642.000,00	(800.000,00)	98,47	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.442.000,00	51.642.000,00	(800.000,00)	98,47	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	176.645.000,00	175.612.600,00	(1.032.400,00)	99,41	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	176.645.000,00	175.612.600,00	(1.032.400,00)	99,41	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.645.000,00	175.612.600,00	(1.032.400,00)	99,41	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0006		EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	22.500.000,00	22.471.385,00	(28.615,00)	99,87	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.471.385,00	(28.615,00)	99,87	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.471.385,00	(28.615,00)	99,87	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.000.000,00	14.910.000,00	(90.000,00)	99,40	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	14.910.000,00	(90.000,00)	99,40	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04.2.01.0002		DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS	15.000.000,00	14.910.000,00	(90.000,00)	99,40	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.910.000,00	(90.000,00)	99,40	
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.910.000,00	(90.000,00)	99,40	
				JUMLAH BELANJA	**266.587.000,00**	**264.635.985,00**	**(1.951.015,00)**	**99,26**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(266.587.000,00)**	**(264.635.985,00)**	**1.951.015,00**	**99,26**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(266.587.000,00)**	**(264.635.985,00)**	**1.951.015,00**	**99,26**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	178.766.500,00	178.396.426,00	(370.074,00)	99,79	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.742.000,00	7.722.000,00	(20.000,00)	99,74	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.742.000,00	7.722.000,00	(20.000,00)	99,74	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017		KOORDINASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	7.742.000,00	7.722.000,00	(20.000,00)	99,74	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.742.000,00	7.722.000,00	(20.000,00)	99,74	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.742.000,00	7.722.000,00	(20.000,00)	99,74	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.410.000,00	87.289.954,00	(120.046,00)	99,86	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	87.410.000,00	87.289.954,00	(120.046,00)	99,86	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0008		PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	60.000.000,00	59.959.960,00	(40.040,00)	99,93	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.959.960,00	(40.040,00)	99,93	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.959.960,00	(40.040,00)	99,93	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0009		PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	27.410.000,00	27.329.994,00	(80.006,00)	99,70	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	27.410.000,00	27.329.994,00	(80.006,00)	99,70	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.410.000,00	27.329.994,00	(80.006,00)	99,70	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.614.500,00	83.384.472,00	(230.028,00)	99,72	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.614.500,00	83.384.472,00	(230.028,00)	99,72	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007		PENGINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN STATISTIK SEKTORAL	60.714.500,00	60.684.472,00	(30.028,00)	99,95	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.714.500,00	60.684.472,00	(30.028,00)	99,95	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.714.500,00	60.684.472,00	(30.028,00)	99,95	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	22.900.000,00	22.700.000,00	(200.000,00)	99,12	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.900.000,00	22.700.000,00	(200.000,00)	99,12	
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	22.700.000,00	(200.000,00)	99,12	
				JUMLAH BELANJA	**178.766.500,00**	**178.396.426,00**	**(370.074,00)**	**99,79**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(178.766.500,00)**	**(178.396.426,00)**	**370.074,00**	**99,79**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(178.766.500,00)**	**(178.396.426,00)**	**370.074,00**	**99,79**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14	
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14	
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14	
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004		PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14	
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14	
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.734.000,00	11.633.500,00	(100.500,00)	99,14	
				JUMLAH BELANJA	**11.734.000,00**	**11.633.500,00**	**(100.500,00)**	**99,14**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(11.734.000,00)**	**(11.633.500,00)**	**100.500,00**	**99,14**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(11.734.000,00)**	**(11.633.500,00)**	**100.500,00**	**99,14**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	2.525.014.068,00	2.306.689.047,00	(218.325.021,00)	91,35	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.219.768,00	1.546.097.175,00	(212.122.593,00)	87,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.818.500,00	5.812.000,00	(6.500,00)	99,88	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	4.023.500,00	4.017.000,00	(6.500,00)	99,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.023.500,00	4.017.000,00	(6.500,00)	99,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.500,00	4.017.000,00	(6.500,00)	99,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.601.504.100,00	1.433.828.398,00	(167.675.702,00)	89,53	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.600.000.000,00	1.432.324.298,00	(167.675.702,00)	89,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.432.324.298,00	(167.675.702,00)	89,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.600.000.000,00	1.432.324.298,00	(167.675.702,00)	89,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.504.100,00	1.504.100,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.504.100,00	1.504.100,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.504.100,00	1.504.100,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	34.022.668,00	33.991.648,00	(31.020,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.761.168,00	3.760.448,00	(720,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.761.168,00	3.760.448,00	(720,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.761.168,00	3.760.448,00	(720,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.261.500,00	15.261.200,00	(300,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.261.500,00	15.261.200,00	(300,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.261.500,00	15.261.200,00	(300,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.624.500,00	49.140.877,00	(24.483.623,00)	66,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	20.524.500,00	20.522.600,00	(1.900,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.524.500,00	20.522.600,00	(1.900,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.524.500,00	20.522.600,00	(1.900,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.100.000,00	23.619.277,00	(24.480.723,00)	49,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.100.000,00	23.619.277,00	(24.480.723,00)	49,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	23.619.277,00	(24.480.723,00)	49,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.250.000,00	23.324.252,00	(19.925.748,00)	53,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	43.250.000,00	23.324.252,00	(19.925.748,00)	53,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.250.000,00	23.324.252,00	(19.925.748,00)	53,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.250.000,00	23.324.252,00	(19.925.748,00)	53,92	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	766.794.300,00	760.591.872,00	(6.202.428,00)	99,19	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	623.768.600,00	618.189.306,00	(5.579.294,00)	99,10	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	137.849.900,00	137.424.690,00	(425.210,00)	99,69	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	137.849.900,00	137.424.690,00	(425.210,00)	99,69	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.849.900,00	137.424.690,00	(425.210,00)	99,69	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0011		PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.250.000,00	265.824.572,00	(4.425.428,00)	98,36	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	232.750.000,00	228.324.572,00	(4.425.428,00)	98,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.750.000,00	228.324.572,00	(4.425.428,00)	98,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0016		PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	113.478.700,00	113.109.542,00	(369.158,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	113.478.700,00	113.109.542,00	(369.158,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.478.700,00	113.109.542,00	(369.158,00)	99,67	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0018		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN	102.190.000,00	101.830.502,00	(359.498,00)	99,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	102.190.000,00	101.830.502,00	(359.498,00)	99,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.190.000,00	101.830.502,00	(359.498,00)	99,64	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.025.700,00	142.402.566,00	(623.134,00)	99,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	143.025.700,00	142.402.566,00	(623.134,00)	99,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	143.025.700,00	142.402.566,00	(623.134,00)	99,56	
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.025.700,00	142.402.566,00	(623.134,00)	99,56	
				JUMLAH BELANJA	**2.525.014.068,00**	**2.306.689.047,00**	**(218.325.021,00)**	**91,35**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.525.014.068,00)**	**(2.306.689.047,00)**	**218.325.021,00**	**91,35**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.525.014.068,00)**	**(2.306.689.047,00)**	**218.325.021,00**	**91,35**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		5	BELANJA DAERAH	309.285.452,00	304.836.448,00	(4.449.004,00)	98,56	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.521.952,00	131.365.480,00	(4.156.472,00)	96,93	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	135.521.952,00	131.365.480,00	(4.156.472,00)	96,93	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	135.521.952,00	131.365.480,00	(4.156.472,00)	96,93	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.521.952,00	131.365.480,00	(4.156.472,00)	96,93	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.321.952,00	115.165.480,00	(4.156.472,00)	96,51	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	173.763.500,00	173.470.968,00	(292.532,00)	99,83	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.02		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.244.500,00	71.238.900,00	(5.600,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.02.0004		AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	71.244.500,00	71.238.900,00	(5.600,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	71.244.500,00	71.238.900,00	(5.600,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.244.500,00	71.238.900,00	(5.600,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03		PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA	102.519.000,00	102.232.068,00	(286.932,00)	99,72	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0001		PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN	76.464.000,00	76.457.068,00	(6.932,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	76.464.000,00	76.457.068,00	(6.932,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.464.000,00	76.457.068,00	(6.932,00)	99,99	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0002		PEMBERDAYAAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.055.000,00	25.775.000,00	(280.000,00)	98,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.055.000,00	25.775.000,00	(280.000,00)	98,92	
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.055.000,00	25.775.000,00	(280.000,00)	98,92	
				JUMLAH BELANJA	**309.285.452,00**	**304.836.448,00**	**(4.449.004,00)**	**98,56**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(309.285.452,00)**	**(304.836.448,00)**	**4.449.004,00**	**98,56**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(309.285.452,00)**	**(304.836.448,00)**	**4.449.004,00**	**98,56**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.25.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00	
	3.25.0.00.0.00.25.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00	
	3.25.0.00.0.00.25.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	80,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		5	BELANJA DAERAH	2.636.314.294,00	2.590.749.883,00	(45.564.411,00)	98,27	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.142.356.794,00	2.097.202.383,00	(45.154.411,00)	97,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.799.177.910,00	1.757.016.147,00	(42.161.763,00)	97,65	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.784.177.910,00	1.742.016.147,00	(42.161.763,00)	97,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.784.177.910,00	1.742.016.147,00	(42.161.763,00)	97,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.784.177.910,00	1.742.016.147,00	(42.161.763,00)	97,63	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	102.245.600,00	102.132.100,00	(113.500,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.745.600,00	29.726.600,00	(19.000,00)	99,93	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.945.600,00	9.926.600,00	(19.000,00)	99,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.945.600,00	9.926.600,00	(19.000,00)	99,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	60.000.000,00	59.905.500,00	(94.500,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.905.500,00	(94.500,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.905.500,00	(94.500,00)	99,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	167.183.284,00	166.660.764,00	(522.520,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.000.000,00	17.477.480,00	(522.520,00)	97,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.477.480,00	(522.520,00)	97,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.477.480,00	(522.520,00)	97,09	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	149.183.284,00	149.183.284,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	149.183.284,00	149.183.284,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.183.284,00	149.183.284,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.750.000,00	71.393.372,00	(2.356.628,00)	96,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	73.750.000,00	71.393.372,00	(2.356.628,00)	96,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.750.000,00	71.393.372,00	(2.356.628,00)	96,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.750.000,00	71.393.372,00	(2.356.628,00)	96,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	493.957.500,00	493.547.500,00	(410.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	293.235.000,00	292.825.000,00	(410.000,00)	99,86	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	111.515.000,00	111.415.000,00	(100.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.515.000,00	111.415.000,00	(100.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.515.000,00	111.415.000,00	(100.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	181.720.000,00	181.410.000,00	(310.000,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.720.000,00	181.410.000,00	(310.000,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.720.000,00	181.410.000,00	(310.000,00)	99,82	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	200.722.500,00	200.722.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.04.0011		PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN AIR UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	200.722.500,00	200.722.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.04.0011	5.1	BELANJA OPERASI	200.722.500,00	200.722.500,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.04.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.722.500,00	200.722.500,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**2.636.314.294,00**	**2.590.749.883,00**	**(45.564.411,00)**	**98,27**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.561.314.294,00)**	**(2.530.749.883,00)**	**30.564.411,00**	**98,80**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.561.314.294,00)**	**(2.530.749.883,00)**	**30.564.411,00**	**98,80**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	(104.725.058,00)	95,95	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.249.206.335,00	2.153.297.577,00	(95.908.758,00)	95,73	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	(95.846.886,00)	95,45	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	(95.846.886,00)	95,45	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	(95.846.886,00)	95,45	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	(95.846.886,00)	95,45	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	80.389.000,00	80.379.430,00	(9.570,00)	99,98	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.389.000,00	15.389.000,00	0,00	100,00	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.389.000,00	15.389.000,00	0,00	100,00	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.389.000,00	15.389.000,00	0,00	100,00	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.000.000,00	64.990.430,00	(9.570,00)	99,98	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.990.430,00	(9.570,00)	99,98	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.990.430,00	(9.570,00)	99,98	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.850.000,00	3.828.500,00	(21.500,00)	99,44	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.850.000,00	3.828.500,00	(21.500,00)	99,44	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	3.828.500,00	(21.500,00)	99,44	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.828.500,00	(21.500,00)	99,44	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.210.000,00	55.179.198,00	(30.802,00)	99,94	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	55.210.000,00	55.179.198,00	(30.802,00)	99,94	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.210.000,00	55.179.198,00	(30.802,00)	99,94	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.210.000,00	55.179.198,00	(30.802,00)	99,94	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	85.099.496,00	85.030.596,00	(68.900,00)	99,91	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02.2.02		PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.099.496,00	85.030.596,00	(68.900,00)	99,91	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02.2.02.0001		PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	85.099.496,00	85.030.596,00	(68.900,00)	99,91	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.099.496,00	85.030.596,00	(68.900,00)	99,91	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.099.496,00	85.030.596,00	(68.900,00)	99,91	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	134.509.000,00	134.375.600,00	(133.400,00)	99,90	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.509.000,00	134.375.600,00	(133.400,00)	99,90	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	134.509.000,00	134.375.600,00	(133.400,00)	99,90	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	134.509.000,00	134.375.600,00	(133.400,00)	99,90	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.509.000,00	134.375.600,00	(133.400,00)	99,90	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	122.595.000,00	113.981.000,00	(8.614.000,00)	92,97	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05.2.01		PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	122.595.000,00	113.981.000,00	(8.614.000,00)	92,97	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05.2.01.0001		PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	122.595.000,00	113.981.000,00	(8.614.000,00)	92,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	122.595.000,00	113.981.000,00	(8.614.000,00)	92,97	
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.595.000,00	113.981.000,00	(8.614.000,00)	92,97	
				JUMLAH BELANJA	**2.591.409.831,00**	**2.486.684.773,00**	**(104.725.058,00)**	**95,95**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.591.409.831,00)**	**(2.486.684.773,00)**	**104.725.058,00**	**95,95**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.591.409.831,00)**	**(2.486.684.773,00)**	**104.725.058,00**	**95,95**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	737.746.000,00	673.357.514,00	(64.388.486,00)	91,27	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.882.500,00	74.856.614,00	(7.025.886,00)	91,41	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.100.000,00	15.074.114,00	(7.025.886,00)	68,20	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	22.100.000,00	15.074.114,00	(7.025.886,00)	68,20	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.100.000,00	15.074.114,00	(7.025.886,00)	68,20	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	15.074.114,00	(7.025.886,00)	68,20	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	188.037.500,00	131.002.900,00	(57.034.600,00)	69,66	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.01		PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	41.715.000,00	41.715.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA	41.715.000,00	41.715.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	41.715.000,00	41.715.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.715.000,00	41.715.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	89.802.500,00	89.287.900,00	(514.600,00)	99,42	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.02.0002		PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	89.802.500,00	89.287.900,00	(514.600,00)	99,42	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.802.500,00	89.287.900,00	(514.600,00)	99,42	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.802.500,00	89.287.900,00	(514.600,00)	99,42	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	56.520.000,00	0,00	(56.520.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	56.520.000,00	0,00	(56.520.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.520.000,00	0,00	(6.520.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	0,00	(6.520.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	188.776.000,00	188.456.000,00	(320.000,00)	99,83	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	188.776.000,00	188.456.000,00	(320.000,00)	99,83	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	128.236.000,00	128.236.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	128.236.000,00	128.236.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.236.000,00	128.236.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGE	60.540.000,00	60.220.000,00	(320.000,00)	99,47	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	60.540.000,00	60.220.000,00	(320.000,00)	99,47	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.540.000,00	60.220.000,00	(320.000,00)	99,47	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	279.050.000,00	279.042.000,00	(8.000,00)	99,99	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	279.050.000,00	279.042.000,00	(8.000,00)	99,99	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0006		FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	54.645.000,00	54.639.000,00	(6.000,00)	99,98	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.645.000,00	54.639.000,00	(6.000,00)	99,98	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.645.000,00	54.639.000,00	(6.000,00)	99,98	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0008		PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI	90.095.000,00	90.095.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	90.095.000,00	90.095.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.095.000,00	90.095.000,00	0,00	100,00	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0009		PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA	134.310.000,00	134.308.000,00	(2.000,00)	99,99	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.310.000,00	134.308.000,00	(2.000,00)	99,99	
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.310.000,00	134.308.000,00	(2.000,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	**737.746.000,00**	**673.357.514,00**	**(64.388.486,00)**	**91,27**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(737.746.000,00)**	**(673.357.514,00)**	**64.388.486,00**	**91,27**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(737.746.000,00)**	**(673.357.514,00)**	**64.388.486,00**	**91,27**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40	
	3.27.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.500.000,00	1.760.000,00	(740.000,00)	70,40	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	(176.582.964,00)	96,75	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.219.546.384,00	4.049.249.571,00	(170.296.813,00)	95,96	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.689.993.496,00	3.522.575.771,00	(167.417.725,00)	95,46	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.671.993.496,00	3.504.575.771,00	(167.417.725,00)	95,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.671.993.496,00	3.504.575.771,00	(167.417.725,00)	95,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.671.993.496,00	3.504.575.771,00	(167.417.725,00)	95,44	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	117.000.000,00	116.811.717,00	(188.283,00)	99,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	90.000.000,00	89.811.717,00	(188.283,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	89.811.717,00	(188.283,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.811.717,00	(188.283,00)	99,79	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	293.652.888,00	293.602.888,00	(50.000,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.250.000,00	15.200.000,00	(50.000,00)	99,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.250.000,00	15.200.000,00	(50.000,00)	99,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	15.200.000,00	(50.000,00)	99,67	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	278.402.888,00	278.402.888,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	278.402.888,00	278.402.888,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.402.888,00	278.402.888,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	108.900.000,00	106.259.195,00	(2.640.805,00)	97,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	106.400.000,00	103.834.195,00	(2.565.805,00)	97,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	106.400.000,00	103.834.195,00	(2.565.805,00)	97,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.400.000,00	103.834.195,00	(2.565.805,00)	97,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.500.000,00	2.425.000,00	(75.000,00)	97,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.425.000,00	(75.000,00)	97,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.425.000,00	(75.000,00)	97,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	79.640.500,00	79.545.500,00	(95.000,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	79.640.500,00	79.545.500,00	(95.000,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0007		PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK	79.640.500,00	79.545.500,00	(95.000,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	79.640.500,00	79.545.500,00	(95.000,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.640.500,00	79.545.500,00	(95.000,00)	99,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.414.000,00	8.379.000,00	(35.000,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	8.414.000,00	8.379.000,00	(35.000,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	8.414.000,00	8.379.000,00	(35.000,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.414.000,00	8.379.000,00	(35.000,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.414.000,00	8.379.000,00	(35.000,00)	99,58	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.126.330.500,00	1.120.174.349,00	(6.156.151,00)	99,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.830.500,00	148.373.919,00	(3.456.581,00)	97,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.830.500,00	148.373.919,00	(3.456.581,00)	97,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	151.830.500,00	148.373.919,00	(3.456.581,00)	97,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.830.500,00	148.373.919,00	(3.456.581,00)	97,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	974.500.000,00	971.800.430,00	(2.699.570,00)	99,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	974.500.000,00	971.800.430,00	(2.699.570,00)	99,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	974.500.000,00	971.800.430,00	(2.699.570,00)	99,72	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.500.000,00	971.800.430,00	(2.699.570,00)	99,72	
				JUMLAH BELANJA	**5.433.931.384,00**	**5.257.348.420,00**	**(176.582.964,00)**	**96,75**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.431.431.384,00)**	**(5.255.588.420,00)**	**175.842.964,00**	**96,76**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(5.431.431.384,00)**	**(5.255.588.420,00)**	**175.842.964,00**	**96,76**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83	
	3.27.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83	
	3.27.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83	
				JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	509.163.000,00	9.163.000,00	101,83	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	1.144.396.600,00	999.903.000,00	(144.493.600,00)	87,37	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.196.600,00	89.965.000,00	(18.231.600,00)	83,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	30.396.600,00	25.451.200,00	(4.945.400,00)	83,73	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.896.600,00	3.761.200,00	(4.135.400,00)	47,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.896.600,00	3.761.200,00	(4.135.400,00)	47,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.896.600,00	3.761.200,00	(4.135.400,00)	47,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.000.000,00	19.190.000,00	(810.000,00)	95,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.190.000,00	(810.000,00)	95,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.190.000,00	(810.000,00)	95,95	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.250.000,00	7.963.800,00	(13.286.200,00)	37,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.250.000,00	7.963.800,00	(13.286.200,00)	37,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.250.000,00	7.963.800,00	(13.286.200,00)	37,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	7.963.800,00	(13.286.200,00)	37,47	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.036.200.000,00	909.938.000,00	(126.262.000,00)	87,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	1.036.200.000,00	909.938.000,00	(126.262.000,00)	87,81	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	1.036.200.000,00	909.938.000,00	(126.262.000,00)	87,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.036.200.000,00	909.938.000,00	(126.262.000,00)	87,81	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.036.200.000,00	909.938.000,00	(126.262.000,00)	87,81	
				JUMLAH BELANJA	**1.144.396.600,00**	**999.903.000,00**	**(144.493.600,00)**	**87,37**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(644.396.600,00)**	**(490.740.000,00)**	**153.656.600,00**	**76,15**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(644.396.600,00)**	**(490.740.000,00)**	**153.656.600,00**	**76,15**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.0.00.27.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10	
	3.27.2.09.0.00.27.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10	
	3.27.2.09.0.00.27.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10	
				JUMLAH PENDAPATAN	30.000.000,00	30.030.000,00	30.000,00	100,10	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	(1.038.562.320,00)	79,55	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.9.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.249.550.000,00	819.842.680,00	(429.707.320,00)	65,61	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02.2.01		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.249.550.000,00	819.842.680,00	(429.707.320,00)	65,61	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02.2.01.0003		PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	1.249.550.000,00	819.842.680,00	(429.707.320,00)	65,61	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.249.550.000,00	819.842.680,00	(429.707.320,00)	65,61	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.249.550.000,00	819.842.680,00	(429.707.320,00)	65,61	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.9.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.788.541.500,00	3.180.379.500,00	(608.162.000,00)	83,94	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	192.084.500,00	186.898.500,00	(5.186.000,00)	97,30	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0002		PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	146.219.500,00	144.413.500,00	(1.806.000,00)	98,76	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.219.500,00	144.413.500,00	(1.806.000,00)	98,76	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.219.500,00	144.413.500,00	(1.806.000,00)	98,76	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	22.695.000,00	20.135.000,00	(2.560.000,00)	88,71	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.695.000,00	20.135.000,00	(2.560.000,00)	88,71	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.695.000,00	20.135.000,00	(2.560.000,00)	88,71	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0012		PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA	23.170.000,00	22.350.000,00	(820.000,00)	96,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	23.170.000,00	22.350.000,00	(820.000,00)	96,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	22.350.000,00	(820.000,00)	96,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	17.531.000,00	16.560.000,00	(971.000,00)	94,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.02.0005		PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA	17.531.000,00	16.560.000,00	(971.000,00)	94,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.531.000,00	16.560.000,00	(971.000,00)	94,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.531.000,00	16.560.000,00	(971.000,00)	94,46	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	3.578.926.000,00	2.976.921.000,00	(602.005.000,00)	83,17	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	3.528.926.000,00	2.926.926.000,00	(602.000.000,00)	82,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.528.926.000,00	2.926.926.000,00	(602.000.000,00)	82,94	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.528.926.000,00	2.926.926.000,00	(602.000.000,00)	82,94	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.9.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42.699.100,00	42.006.100,00	(693.000,00)	98,37	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	42.699.100,00	42.006.100,00	(693.000,00)	98,37	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	42.699.100,00	42.006.100,00	(693.000,00)	98,37	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.699.100,00	42.006.100,00	(693.000,00)	98,37	
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.699.100,00	42.006.100,00	(693.000,00)	98,37	
				JUMLAH BELANJA	**5.080.790.600,00**	**4.042.228.280,00**	**(1.038.562.320,00)**	**79,55**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.050.790.600,00)**	**(4.012.198.280,00)**	**1.038.592.320,00**	**79,43**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(5.050.790.600,00)**	**(4.012.198.280,00)**	**1.038.592.320,00**	**79,43**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000		5	BELANJA DAERAH	18.872.886.448,00	16.623.668.480,00	(2.249.217.968,00)	88,08	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.684.137.448,00	11.311.409.512,00	(372.727.936,00)	96,80	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	80.700.000,00	69.142.000,00	(11.558.000,00)	85,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	80.700.000,00	69.142.000,00	(11.558.000,00)	85,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.700.000,00	69.142.000,00	(11.558.000,00)	85,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.700.000,00	69.142.000,00	(11.558.000,00)	85,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.334.300.000,00	10.011.566.230,00	(322.733.770,00)	96,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.311.500.000,00	9.988.766.230,00	(322.733.770,00)	96,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.311.500.000,00	9.988.766.230,00	(322.733.770,00)	96,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.311.500.000,00	9.988.766.230,00	(322.733.770,00)	96,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	281.150.000,00	278.475.018,00	(2.674.982,00)	99,04	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	225.000.000,00	222.325.018,00	(2.674.982,00)	98,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	222.325.018,00	(2.674.982,00)	98,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	222.325.018,00	(2.674.982,00)	98,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	727.737.448,00	718.735.048,00	(9.002.400,00)	98,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.000.000,00	10.997.600,00	(9.002.400,00)	54,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	10.997.600,00	(9.002.400,00)	54,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.997.600,00	(9.002.400,00)	54,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	707.737.448,00	707.737.448,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	707.737.448,00	707.737.448,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.737.448,00	707.737.448,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	260.250.000,00	233.491.216,00	(26.758.784,00)	89,71	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	238.100.000,00	211.341.216,00	(26.758.784,00)	88,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	238.100.000,00	211.341.216,00	(26.758.784,00)	88,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.100.000,00	211.341.216,00	(26.758.784,00)	88,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.731.485.000,00	1.723.363.623,00	(8.121.377,00)	99,53	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.731.485.000,00	1.723.363.623,00	(8.121.377,00)	99,53	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	816.588.000,00	812.399.623,00	(4.188.377,00)	99,48	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	816.588.000,00	812.399.623,00	(4.188.377,00)	99,48	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.588.000,00	812.399.623,00	(4.188.377,00)	99,48	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	914.897.000,00	910.964.000,00	(3.933.000,00)	99,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	914.897.000,00	910.964.000,00	(3.933.000,00)	99,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	914.897.000,00	910.964.000,00	(3.933.000,00)	99,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	(1.747.415.320,00)	39,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	(1.747.415.320,00)	39,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03.2.02.0009		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	(1.747.415.320,00)	39,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	(1.747.415.320,00)	39,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	(1.747.415.320,00)	39,46	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	278.413.000,00	263.815.665,00	(14.597.335,00)	94,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	278.413.000,00	263.815.665,00	(14.597.335,00)	94,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	278.413.000,00	263.815.665,00	(14.597.335,00)	94,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	278.413.000,00	263.815.665,00	(14.597.335,00)	94,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.413.000,00	263.815.665,00	(14.597.335,00)	94,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.292.021.000,00	2.185.665.000,00	(106.356.000,00)	95,35	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	2.292.021.000,00	2.185.665.000,00	(106.356.000,00)	95,35	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0001		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	1.935.306.000,00	1.831.450.000,00	(103.856.000,00)	94,63	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.935.306.000,00	1.831.450.000,00	(103.856.000,00)	94,63	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.306.000,00	1.831.450.000,00	(103.856.000,00)	94,63	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	356.715.000,00	354.215.000,00	(2.500.000,00)	99,29	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	356.715.000,00	354.215.000,00	(2.500.000,00)	99,29	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.715.000,00	354.215.000,00	(2.500.000,00)	99,29	
				JUMLAH BELANJA	**18.872.886.448,00**	**16.623.668.480,00**	**(2.249.217.968,00)**	**88,08**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(18.872.886.448,00)**	**(16.623.668.480,00)**	**2.249.217.968,00**	**88,06**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(18.872.886.448,00)**	**(16.623.668.480,00)**	**2.249.217.968,00**	**88,06**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.0.00.27.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,63	
	3.27.2.09.0.00.27.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,63	
	3.27.2.09.0.00.27.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,63	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	766.356.502,00	(233.643.498,00)	76,63	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001		5	BELANJA DAERAH	1.972.709.504,00	1.968.301.851,00	(4.407.653,00)	99,77	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	472.709.504,00	469.798.422,00	(2.911.082,00)	99,38	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	48.621.000,00	48.616.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.000.000,00	44.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	44.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	44.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.000.000,00	108.983.250,00	(16.750,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	109.000.000,00	108.983.250,00	(16.750,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.983.250,00	(16.750,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.983.250,00	(16.750,00)	99,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	292.739.004,00	290.448.004,00	(2.291.000,00)	99,21	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00	6.709.000,00	(2.291.000,00)	74,54	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	6.709.000,00	(2.291.000,00)	74,54	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.709.000,00	(2.291.000,00)	74,54	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	283.739.004,00	283.739.004,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	283.739.004,00	283.739.004,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.739.004,00	283.739.004,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.349.500,00	21.751.168,00	(598.332,00)	97,32	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	22.349.500,00	21.751.168,00	(598.332,00)	97,32	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.349.500,00	21.751.168,00	(598.332,00)	97,32	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.349.500,00	21.751.168,00	(598.332,00)	97,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	(1.496.571,00)	99,90	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	(1.496.571,00)	99,90	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	(1.496.571,00)	99,90	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	(1.496.571,00)	99,90	
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	(1.496.571,00)	99,90	
				JUMLAH BELANJA	**1.972.709.504,00**	**1.968.301.851,00**	**(4.407.653,00)**	**99,77**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(972.709.504,00)**	**(1.201.945.349,00)**	**(229.235.845,00)**	**123,56**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(972.709.504,00)**	**(1.201.945.349,00)**	**(229.235.845,00)**	**123,56**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000		5	BELANJA DAERAH	875.770.000,00	874.747.830,00	(1.022.170,00)	99,88	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.7.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	113.255.000,00	113.002.830,00	(252.170,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	113.255.000,00	113.002.830,00	(252.170,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	113.255.000,00	113.002.830,00	(252.170,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	113.255.000,00	113.002.830,00	(252.170,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.255.000,00	113.002.830,00	(252.170,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.7.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	75.375.000,00	74.965.000,00	(410.000,00)	99,45	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04.2.04		PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.375.000,00	74.965.000,00	(410.000,00)	99,45	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04.2.04.0001		PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)	75.375.000,00	74.965.000,00	(410.000,00)	99,45	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.375.000,00	74.965.000,00	(410.000,00)	99,45	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.375.000,00	74.965.000,00	(410.000,00)	99,45	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.7.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	687.140.000,00	686.780.000,00	(360.000,00)	99,94	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	687.140.000,00	686.780.000,00	(360.000,00)	99,94	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	687.140.000,00	686.780.000,00	(360.000,00)	99,94	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	687.140.000,00	686.780.000,00	(360.000,00)	99,94	
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	687.140.000,00	686.780.000,00	(360.000,00)	99,94	
				JUMLAH BELANJA	**875.770.000,00**	**874.747.830,00**	**(1.022.170,00)**	**99,88**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(875.770.000,00)**	**(874.747.830,00)**	**1.022.170,00**	**99,88**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(875.770.000,00)**	**(874.747.830,00)**	**1.022.170,00**	**99,88**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000		5	BELANJA DAERAH	135.083.966,00	132.551.800,00	(2.532.166,00)	98,12	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	26.254.500,00	26.149.500,00	(105.000,00)	99,60	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.254.500,00	26.149.500,00	(105.000,00)	99,60	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	26.254.500,00	26.149.500,00	(105.000,00)	99,60	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.254.500,00	26.149.500,00	(105.000,00)	99,60	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.254.500,00	26.149.500,00	(105.000,00)	99,60	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	40.235.000,00	37.948.300,00	(2.286.700,00)	94,31	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	40.235.000,00	37.948.300,00	(2.286.700,00)	94,31	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	16.055.000,00	15.022.300,00	(1.032.700,00)	93,56	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.055.000,00	15.022.300,00	(1.032.700,00)	93,56	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.055.000,00	15.022.300,00	(1.032.700,00)	93,56	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	24.180.000,00	22.926.000,00	(1.254.000,00)	94,81	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.180.000,00	22.926.000,00	(1.254.000,00)	94,81	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.000,00	22.926.000,00	(1.254.000,00)	94,81	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	68.594.466,00	68.454.000,00	(140.466,00)	99,79	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.594.466,00	68.454.000,00	(140.466,00)	99,79	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0004		PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA	19.529.466,00	19.489.000,00	(40.466,00)	99,79	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.529.466,00	19.489.000,00	(40.466,00)	99,79	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.529.466,00	19.489.000,00	(40.466,00)	99,79	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	34.065.000,00	34.065.000,00	0,00	100,00	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.065.000,00	34.065.000,00	0,00	100,00	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.065.000,00	34.065.000,00	0,00	100,00	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.900.000,00	(100.000,00)	99,33	
				JUMLAH BELANJA	**135.083.966,00**	**132.551.800,00**	**(2.532.166,00)**	**98,12**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(135.083.966,00)**	**(132.551.800,00)**	**2.532.166,00**	**98,12**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(135.083.966,00)**	**(132.551.800,00)**	**2.532.166,00**	**98,12**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.045.711.641,00	1.936.540.382,00	(109.171.259,00)	94,66	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.019.034.641,00	1.910.113.382,00	(108.921.259,00)	94,60	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.767.160.325,00	1.660.660.451,00	(106.499.874,00)	93,97	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.752.760.325,00	1.646.260.451,00	(106.499.874,00)	93,92	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.752.760.325,00	1.646.260.451,00	(106.499.874,00)	93,92	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.752.760.325,00	1.646.260.451,00	(106.499.874,00)	93,92	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	126.482.500,00	125.358.870,00	(1.123.630,00)	99,11	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.982.500,00	36.064.500,00	(918.000,00)	97,51	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.982.500,00	6.982.500,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.982.500,00	6.982.500,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	29.082.000,00	(918.000,00)	96,94	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	29.082.000,00	(918.000,00)	96,94	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	80.000.000,00	79.794.370,00	(205.630,00)	99,74	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.794.370,00	(205.630,00)	99,74	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.794.370,00	(205.630,00)	99,74	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.591.816,00	73.147.216,00	(444.600,00)	99,39	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.600.000,00	9.155.400,00	(444.600,00)	95,36	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.155.400,00	(444.600,00)	95,36	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.155.400,00	(444.600,00)	95,36	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	63.991.816,00	63.991.816,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	63.991.816,00	63.991.816,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.991.816,00	63.991.816,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	51.800.000,00	50.946.845,00	(853.155,00)	98,35	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	51.800.000,00	50.946.845,00	(853.155,00)	98,35	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.800.000,00	50.946.845,00	(853.155,00)	98,35	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.800.000,00	50.946.845,00	(853.155,00)	98,35	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	26.677.000,00	26.427.000,00	(250.000,00)	99,06	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02.2.01		PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI	26.677.000,00	26.427.000,00	(250.000,00)	99,06	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02.2.01.0004		PENATAUSAHAAN PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI	26.677.000,00	26.427.000,00	(250.000,00)	99,06	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.677.000,00	26.427.000,00	(250.000,00)	99,06	
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.677.000,00	26.427.000,00	(250.000,00)	99,06	
				JUMLAH BELANJA	**2.045.711.641,00**	**1.936.540.382,00**	**(109.171.259,00)**	**94,66**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(2.045.711.641,00)**	**(1.936.540.382,00)**	**109.171.259,00**	**94,66**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(2.045.711.641,00)**	**(1.936.540.382,00)**	**109.171.259,00**	**94,66**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	1.285.035.700,00	1.182.804.850,00	(102.230.850,00)	92,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.005.500,00	119.583.054,00	(10.422.446,00)	91,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.732.000,00	15.684.000,00	(48.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.732.000,00	15.684.000,00	(48.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.732.000,00	15.684.000,00	(48.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.732.000,00	15.684.000,00	(48.000,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	76.237.500,00	74.854.500,00	(1.383.000,00)	98,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	6.237.500,00	6.237.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.237.500,00	6.237.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.237.500,00	6.237.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.000.000,00	68.617.000,00	(1.383.000,00)	98,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	68.617.000,00	(1.383.000,00)	98,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.617.000,00	(1.383.000,00)	98,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.500.000,00	12.508.554,00	(8.991.446,00)	58,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	19.500.000,00	10.508.554,00	(8.991.446,00)	53,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	10.508.554,00	(8.991.446,00)	53,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	10.508.554,00	(8.991.446,00)	53,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.155.030.200,00	1.063.221.796,00	(91.808.404,00)	92,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	74.573.500,00	74.454.000,00	(119.500,00)	99,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	4.573.500,00	4.494.000,00	(79.500,00)	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.573.500,00	4.494.000,00	(79.500,00)	98,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.573.500,00	4.494.000,00	(79.500,00)	98,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	70.000.000,00	69.960.000,00	(40.000,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.960.000,00	(40.000,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.960.000,00	(40.000,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.080.456.700,00	988.767.796,00	(91.688.904,00)	91,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	313.549.500,00	226.438.840,00	(87.110.660,00)	72,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	264.849.500,00	177.803.040,00	(87.046.460,00)	67,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	138.616.000,00	104.658.000,00	(33.958.000,00)	75,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.233.500,00	73.145.040,00	(53.088.460,00)	57,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001	5.2	BELANJA MODAL	48.700.000,00	48.635.800,00	(64.200,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.700.000,00	48.635.800,00	(64.200,00)	99,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	766.907.200,00	762.328.956,00	(4.578.244,00)	99,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	766.907.200,00	762.328.956,00	(4.578.244,00)	99,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	58.142.500,00	58.136.500,00	(6.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	708.764.700,00	704.192.456,00	(4.572.244,00)	99,35	
				JUMLAH BELANJA	**1.285.035.700,00**	**1.182.804.850,00**	**(102.230.850,00)**	**92,04**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.285.035.700,00)**	**(1.182.804.850,00)**	**102.230.850,00**	**92,04**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.285.035.700,00)**	**(1.182.804.850,00)**	**102.230.850,00**	**92,04**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Perekonomian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	397.620.900,00	388.153.917,00	(9.466.983,00)	97,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	154.247.900,00	145.436.900,00	(8.811.000,00)	94,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	15.577.000,00	15.577.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	15.577.000,00	15.577.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.577.000,00	15.577.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.577.000,00	15.577.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.530.900,00	51.170.900,00	(3.360.000,00)	93,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	12.121.000,00	12.121.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.121.000,00	12.121.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.121.000,00	12.121.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.409.900,00	2.049.900,00	(3.360.000,00)	37,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.409.900,00	2.049.900,00	(3.360.000,00)	37,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.409.900,00	2.049.900,00	(3.360.000,00)	37,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.600.000,00	41.649.000,00	(951.000,00)	97,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.600.000,00	35.649.000,00	(951.000,00)	97,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.600.000,00	35.649.000,00	(951.000,00)	97,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	35.649.000,00	(951.000,00)	97,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.500.000,00	35.000.000,00	(4.500.000,00)	88,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	39.500.000,00	35.000.000,00	(4.500.000,00)	88,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.500.000,00	35.000.000,00	(4.500.000,00)	88,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	35.000.000,00	(4.500.000,00)	88,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.1.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	243.373.000,00	242.717.017,00	(655.983,00)	99,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	222.248.000,00	221.677.017,00	(570.983,00)	99,74	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	30.926.000,00	30.926.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.926.000,00	30.926.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.926.000,00	30.926.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	174.322.000,00	173.800.537,00	(521.463,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	174.322.000,00	173.800.537,00	(521.463,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.322.000,00	173.800.537,00	(521.463,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	17.000.000,00	16.950.480,00	(49.520,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.950.480,00	(49.520,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.950.480,00	(49.520,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	21.125.000,00	21.040.000,00	(85.000,00)	99,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	15.870.000,00	15.785.000,00	(85.000,00)	99,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.870.000,00	15.785.000,00	(85.000,00)	99,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.870.000,00	15.785.000,00	(85.000,00)	99,46	
				JUMLAH BELANJA	**397.620.900,00**	**388.153.917,00**	**(9.466.983,00)**	**97,61**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(397.620.900,00)**	**(388.153.917,00)**	**9.466.983,00**	**97,61**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(397.620.900,00)**	**(388.153.917,00)**	**9.466.983,00**	**97,61**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56	
	4.01.0.00.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56	
	4.01.0.00.0.00.01.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56	
				JUMLAH PENDAPATAN	100.000.000,00	94.560.000,00	(5.440.000,00)	94,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	16.329.911.823,00	15.930.762.563,00	(399.149.260,00)	97,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.329.911.823,00	15.930.762.563,00	(399.149.260,00)	97,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	13.818.000,00	13.818.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	13.818.000,00	13.818.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.818.000,00	13.818.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.818.000,00	13.818.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.817.513.389,00	6.505.849.843,00	(311.663.546,00)	95,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.442.016.509,00	5.148.031.643,00	(293.984.866,00)	94,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.442.016.509,00	5.148.031.643,00	(293.984.866,00)	94,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.442.016.509,00	5.148.031.643,00	(293.984.866,00)	94,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	1.232.996.880,00	1.222.718.200,00	(10.278.680,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.232.996.880,00	1.222.718.200,00	(10.278.680,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.232.996.880,00	1.222.718.200,00	(10.278.680,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	142.500.000,00	135.100.000,00	(7.400.000,00)	94,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	142.500.000,00	135.100.000,00	(7.400.000,00)	94,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	135.100.000,00	(7.400.000,00)	94,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	171.750.000,00	171.712.000,00	(38.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	171.750.000,00	171.712.000,00	(38.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.750.000,00	171.712.000,00	(38.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.750.000,00	171.712.000,00	(38.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.373.142.860,00	1.371.058.380,00	(2.084.480,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	156.644.860,00	155.302.096,00	(1.342.764,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	156.644.860,00	155.302.096,00	(1.342.764,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.644.860,00	155.302.096,00	(1.342.764,00)	99,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	251.100.000,00	251.010.950,00	(89.050,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	251.100.000,00	251.010.950,00	(89.050,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.100.000,00	251.010.950,00	(89.050,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	272.148.000,00	272.095.000,00	(53.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	272.148.000,00	272.095.000,00	(53.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.148.000,00	272.095.000,00	(53.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	672.500.000,00	671.900.334,00	(599.666,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	672.500.000,00	671.900.334,00	(599.666,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	672.500.000,00	671.900.334,00	(599.666,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.705.528.200,00	3.704.555.100,00	(973.100,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	2.956.783.200,00	2.956.208.200,00	(575.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.955.683.200,00	2.955.108.200,00	(575.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.955.683.200,00	2.955.108.200,00	(575.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	748.745.000,00	748.346.900,00	(398.100,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	276.245.000,00	276.120.500,00	(124.500,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.245.000,00	276.120.500,00	(124.500,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	472.500.000,00	472.226.400,00	(273.600,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	472.500.000,00	472.226.400,00	(273.600,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.660.816.000,00	1.654.023.694,00	(6.792.306,00)	99,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	529.000.000,00	526.114.626,00	(2.885.374,00)	99,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	529.000.000,00	526.114.626,00	(2.885.374,00)	99,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.000.000,00	526.114.626,00	(2.885.374,00)	99,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	596.976.000,00	593.197.068,00	(3.778.932,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	596.976.000,00	593.197.068,00	(3.778.932,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.976.000,00	593.197.068,00	(3.778.932,00)	99,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	484.840.000,00	484.712.000,00	(128.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	484.840.000,00	484.712.000,00	(128.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.840.000,00	484.712.000,00	(128.000,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	558.843.374,00	481.622.012,00	(77.221.362,00)	86,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	181.843.374,00	133.332.592,00	(48.510.782,00)	73,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	181.843.374,00	133.332.592,00	(48.510.782,00)	73,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	181.843.374,00	133.332.592,00	(48.510.782,00)	73,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	100.000.000,00	71.289.420,00	(28.710.580,00)	71,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	71.289.420,00	(28.710.580,00)	71,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	71.289.420,00	(28.710.580,00)	71,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	1.185.000.000,00	1.184.623.534,00	(376.466,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	1.185.000.000,00	1.184.623.534,00	(376.466,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.185.000.000,00	1.184.623.534,00	(376.466,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.000.000,00	1.184.623.534,00	(376.466,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	**16.329.911.823,00**	**15.930.762.563,00**	**(399.149.260,00)**	**97,55**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(16.229.911.823,00)**	**(15.836.202.563,00)**	**393.709.260,00**	**97,57**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(16.229.911.823,00)**	**(15.836.202.563,00)**	**393.709.260,00**	**97,57**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Hukum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	306.635.000,00	294.427.000,00	(12.208.000,00)	96,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.365.000,00	146.275.000,00	(5.090.000,00)	96,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.749.000,00	18.359.000,00	(1.390.000,00)	92,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.749.000,00	18.359.000,00	(1.390.000,00)	92,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.749.000,00	18.359.000,00	(1.390.000,00)	92,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.749.000,00	18.359.000,00	(1.390.000,00)	92,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	19.725.000,00	19.681.000,00	(44.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	19.725.000,00	19.681.000,00	(44.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.725.000,00	19.681.000,00	(44.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.725.000,00	19.681.000,00	(44.000,00)	99,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	58.741.000,00	56.805.000,00	(1.936.000,00)	96,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.741.000,00	8.700.000,00	(41.000,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.741.000,00	8.700.000,00	(41.000,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.741.000,00	8.700.000,00	(41.000,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.000.000,00	48.105.000,00	(1.895.000,00)	96,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.105.000,00	(1.895.000,00)	96,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.105.000,00	(1.895.000,00)	96,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.400.000,00	10.099.000,00	(301.000,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00	8.399.000,00	(1.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.399.000,00	(1.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.399.000,00	(1.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42.750.000,00	41.331.000,00	(1.419.000,00)	96,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.750.000,00	39.331.000,00	(1.419.000,00)	96,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.750.000,00	39.331.000,00	(1.419.000,00)	96,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.750.000,00	39.331.000,00	(1.419.000,00)	96,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	155.270.000,00	148.152.000,00	(7.118.000,00)	95,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	155.270.000,00	148.152.000,00	(7.118.000,00)	95,41	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	81.720.000,00	75.913.000,00	(5.807.000,00)	92,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.720.000,00	75.913.000,00	(5.807.000,00)	92,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.720.000,00	75.913.000,00	(5.807.000,00)	92,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	39.100.000,00	38.407.000,00	(693.000,00)	98,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.100.000,00	38.407.000,00	(693.000,00)	98,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.100.000,00	38.407.000,00	(693.000,00)	98,22	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	34.450.000,00	33.832.000,00	(618.000,00)	98,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	34.450.000,00	33.832.000,00	(618.000,00)	98,20	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.450.000,00	33.832.000,00	(618.000,00)	98,20	
				JUMLAH BELANJA	**306.635.000,00**	**294.427.000,00**	**(12.208.000,00)**	**96,01**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(306.635.000,00)**	**(294.427.000,00)**	**12.208.000,00**	**96,01**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(306.635.000,00)**	**(294.427.000,00)**	**12.208.000,00**	**96,01**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	978.132.500,00	955.394.410,00	(22.738.090,00)	97,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.177.000,00	73.954.120,00	(2.222.880,00)	97,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	44.267.500,00	43.968.070,00	(299.430,00)	99,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.717.500,00	11.422.440,00	(295.060,00)	97,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.717.500,00	11.422.440,00	(295.060,00)	97,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.717.500,00	11.422.440,00	(295.060,00)	97,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	30.000.000,00	29.995.630,00	(4.370,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.995.630,00	(4.370,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.995.630,00	(4.370,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	939.500,00	939.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	939.500,00	939.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	939.500,00	939.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	939.500,00	939.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.500.000,00	14.576.550,00	(1.923.450,00)	88,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	16.500.000,00	14.576.550,00	(1.923.450,00)	88,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	14.576.550,00	(1.923.450,00)	88,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.576.550,00	(1.923.450,00)	88,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	901.955.500,00	881.440.290,00	(20.515.210,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	901.955.500,00	881.440.290,00	(20.515.210,00)	97,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	16.670.000,00	16.655.000,00	(15.000,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.670.000,00	16.655.000,00	(15.000,00)	99,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.670.000,00	16.655.000,00	(15.000,00)	99,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	76.457.000,00	76.437.783,00	(19.217,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.457.000,00	76.437.783,00	(19.217,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.457.000,00	76.437.783,00	(19.217,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	808.828.500,00	788.347.507,00	(20.480.993,00)	97,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	808.828.500,00	788.347.507,00	(20.480.993,00)	97,46	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	808.828.500,00	788.347.507,00	(20.480.993,00)	97,46	
				JUMLAH BELANJA	**978.132.500,00**	**955.394.410,00**	**(22.738.090,00)**	**97,67**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(978.132.500,00)**	**(955.394.410,00)**	**22.738.090,00**	**97,67**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(978.132.500,00)**	**(955.394.410,00)**	**22.738.090,00**	**97,67**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Organisasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	513.878.000,00	513.282.342,00	(595.658,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	513.878.000,00	513.282.342,00	(595.658,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	23.596.000,00	23.456.000,00	(140.000,00)	99,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	20.000.000,00	19.860.000,00	(140.000,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.860.000,00	(140.000,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.860.000,00	(140.000,00)	99,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.800.000,00	7.572.400,00	(227.600,00)	97,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.800.000,00	7.572.400,00	(227.600,00)	97,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.572.400,00	(227.600,00)	97,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.572.400,00	(227.600,00)	97,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.000.000,00	20.838.942,00	(161.058,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	20.000.000,00	19.838.942,00	(161.058,00)	99,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.838.942,00	(161.058,00)	99,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.838.942,00	(161.058,00)	99,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	447.707.000,00	447.640.000,00	(67.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	157.980.000,00	157.928.000,00	(52.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	157.980.000,00	157.928.000,00	(52.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.980.000,00	157.928.000,00	(52.000,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	40.000.000,00	39.985.000,00	(15.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.985.000,00	(15.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.985.000,00	(15.000,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	249.727.000,00	249.727.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	249.727.000,00	249.727.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.727.000,00	249.727.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**513.878.000,00**	**513.282.342,00**	**(595.658,00)**	**99,88**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(513.878.000,00)**	**(513.282.342,00)**	**595.658,00**	**99,88**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(513.878.000,00)**	**(513.282.342,00)**	**595.658,00**	**99,88**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	376.007.000,00	372.660.320,00	(3.346.680,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	376.007.000,00	372.660.320,00	(3.346.680,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.857.000,00	6.857.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.03.0007		PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	14.220.000,00	14.212.000,00	(8.000,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	11.720.000,00	11.712.000,00	(8.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.720.000,00	11.712.000,00	(8.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.720.000,00	11.712.000,00	(8.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.000.000,00	10.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.995.000,00	(5.000,00)	99,93	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.000.000,00	21.814.000,00	(186.000,00)	99,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERAS	17.000.000,00	16.814.000,00	(186.000,00)	98,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.814.000,00	(186.000,00)	98,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.814.000,00	(186.000,00)	98,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	304.035.000,00	300.887.320,00	(3.147.680,00)	98,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	210.935.000,00	210.830.880,00	(104.120,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	210.935.000,00	210.830.880,00	(104.120,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.935.000,00	210.830.880,00	(104.120,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	47.500.000,00	47.466.440,00	(33.560,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.500.000,00	47.466.440,00	(33.560,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	47.466.440,00	(33.560,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	45.600.000,00	42.590.000,00	(3.010.000,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.600.000,00	42.590.000,00	(3.010.000,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	42.590.000,00	(3.010.000,00)	93,39	
				JUMLAH BELANJA	**376.007.000,00**	**372.660.320,00**	**(3.346.680,00)**	**99,10**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(376.007.000,00)**	**(372.660.320,00)**	**3.346.680,00**	**99,10**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(376.007.000,00)**	**(372.660.320,00)**	**3.346.680,00**	**99,10**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055		5	BELANJA DAERAH	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	(1.087.611.600,00)	78,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.406.000,00	70.401.000,00	(5.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	48.521.000,00	48.516.000,00	(5.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.906.000,00	10.906.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.906.000,00	10.906.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.906.000,00	10.906.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.1.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.030.867.000,00	3.943.260.400,00	(1.087.606.600,00)	78,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.030.867.000,00	3.943.260.400,00	(1.087.606.600,00)	78,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	4.434.829.500,00	3.347.222.900,00	(1.087.606.600,00)	75,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.434.829.500,00	3.347.222.900,00	(1.087.606.600,00)	75,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.829.500,00	228.222.900,00	(606.600,00)	99,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.275.000.000,00	599.000.000,00	(676.000.000,00)	46,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.931.000.000,00	2.520.000.000,00	(411.000.000,00)	85,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	138.431.500,00	138.431.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	138.431.500,00	138.431.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.431.500,00	138.431.500,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	457.606.000,00	457.606.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	457.606.000,00	457.606.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.606.000,00	457.606.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**5.101.273.000,00**	**4.013.661.400,00**	**(1.087.611.600,00)**	**78,67**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(5.101.273.000,00)**	**(4.013.661.400,00)**	**1.087.611.600,00**	**78,67**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(5.101.273.000,00)**	**(4.013.661.400,00)**	**1.087.611.600,00**	**78,67**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	20.167.650.379,00	20.082.240.754,00	(85.409.625,00)	99,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.238.440.383,00	12.165.196.307,00	(73.244.076,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.302.024.750,00	1.279.175.904,00	(22.848.846,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.302.024.750,00	1.279.175.904,00	(22.848.846,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.302.024.750,00	1.279.175.904,00	(22.848.846,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.302.024.750,00	1.279.175.904,00	(22.848.846,00)	98,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	860.100.000,00	857.819.625,00	(2.280.375,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	531.550.000,00	531.313.468,00	(236.532,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	175.550.000,00	175.548.268,00	(1.732,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.550.000,00	175.548.268,00	(1.732,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	356.000.000,00	355.765.200,00	(234.800,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.000.000,00	355.765.200,00	(234.800,00)	99,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	255.550.000,00	253.549.987,00	(2.000.013,00)	99,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.550.000,00	55.550.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.999.987,00	(2.000.013,00)	98,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	197.999.987,00	(2.000.013,00)	98,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	38.000.000,00	37.956.170,00	(43.830,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	37.956.170,00	(43.830,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.956.170,00	(43.830,00)	99,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	294.742.464,00	294.742.459,00	(5,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	220.742.464,00	220.742.459,00	(5,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	220.742.464,00	220.742.459,00	(5,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.742.464,00	199.742.459,00	(5,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	613.660.451,00	598.417.619,00	(15.242.832,00)	97,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS AT	173.309.415,00	158.128.018,00	(15.181.397,00)	91,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	173.309.415,00	158.128.018,00	(15.181.397,00)	91,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.309.415,00	158.128.018,00	(15.181.397,00)	91,24	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPER	229.289.610,00	229.286.890,00	(2.720,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	229.289.610,00	229.286.890,00	(2.720,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.289.610,00	229.286.890,00	(2.720,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	211.061.426,00	211.002.711,00	(58.715,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	136.061.426,00	136.045.521,00	(15.905,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.061.426,00	136.045.521,00	(15.905,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.957.190,00	(42.810,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.957.190,00	(42.810,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	7.442.293.428,00	7.415.995.890,00	(26.297.538,00)	99,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	7.179.743.428,00	7.153.474.790,00	(26.268.638,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.179.743.428,00	7.153.474.790,00	(26.268.638,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.179.743.428,00	7.153.474.790,00	(26.268.638,00)	99,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	262.550.000,00	262.521.100,00	(28.900,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	262.550.000,00	262.521.100,00	(28.900,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.550.000,00	262.521.100,00	(28.900,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.725.619.290,00	1.719.044.810,00	(6.574.480,00)	99,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	926.809.875,00	920.239.475,00	(6.570.400,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	926.809.875,00	920.239.475,00	(6.570.400,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.809.875,00	920.239.475,00	(6.570.400,00)	99,29	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	798.809.415,00	798.805.335,00	(4.080,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	798.809.415,00	798.805.335,00	(4.080,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	798.809.415,00	798.805.335,00	(4.080,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.929.209.996,00	7.917.044.447,00	(12.165.549,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	172.710.000,00	172.650.000,00	(60.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	172.710.000,00	172.650.000,00	(60.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	172.710.000,00	172.650.000,00	(60.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.710.000,00	172.650.000,00	(60.000,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	1.972.000.000,00	1.971.775.665,00	(224.335,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	724.000.000,00	723.951.027,00	(48.973,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	724.000.000,00	723.951.027,00	(48.973,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.000.000,00	723.951.027,00	(48.973,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	824.000.000,00	823.975.700,00	(24.300,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	824.000.000,00	823.975.700,00	(24.300,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.000.000,00	823.975.700,00	(24.300,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005		PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	424.000.000,00	423.848.938,00	(151.062,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	424.000.000,00	423.848.938,00	(151.062,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.000.000,00	423.848.938,00	(151.062,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	884.999.996,00	873.193.482,00	(11.806.514,00)	98,66	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	794.000.000,00	783.193.482,00	(10.806.518,00)	98,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	794.000.000,00	783.193.482,00	(10.806.518,00)	98,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.000.000,00	783.193.482,00	(10.806.518,00)	98,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	90.999.996,00	90.000.000,00	(999.996,00)	98,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	90.999.996,00	90.000.000,00	(999.996,00)	98,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.999.996,00	90.000.000,00	(999.996,00)	98,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	1.619.500.000,00	1.619.455.000,00	(45.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	535.000.000,00	534.955.000,00	(45.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	535.000.000,00	534.955.000,00	(45.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.000.000,00	534.955.000,00	(45.000,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	1.084.500.000,00	1.084.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.084.500.000,00	1.084.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.084.500.000,00	1.084.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	3.280.000.000,00	3.279.970.300,00	(29.700,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	3.280.000.000,00	3.279.970.300,00	(29.700,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.280.000.000,00	3.279.970.300,00	(29.700,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000.000,00	3.279.970.300,00	(29.700,00)	99,99	
				JUMLAH BELANJA	**20.167.650.379,00**	**20.082.240.754,00**	**(85.409.625,00)**	**99,57**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(20.167.650.379,00)**	**(20.082.240.754,00)**	**85.409.625,00**	**99,57**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(20.167.650.379,00)**	**(20.082.240.754,00)**	**85.409.625,00**	**99,57**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	4.196.594.441,00	4.031.217.810,00	(165.376.631,00)	96,05	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.366.078.941,00	2.243.556.344,00	(122.522.597,00)	94,82	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.897.000,00	19.885.000,00	(12.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	19.897.000,00	19.885.000,00	(12.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.897.000,00	19.885.000,00	(12.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.897.000,00	19.885.000,00	(12.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.955.074.849,00	1.885.173.467,00	(69.901.382,00)	96,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.923.279.849,00	1.853.390.467,00	(69.889.382,00)	96,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.923.279.849,00	1.853.390.467,00	(69.889.382,00)	96,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.923.279.849,00	1.853.390.467,00	(69.889.382,00)	96,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	22.460.000,00	22.449.000,00	(11.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.460.000,00	22.449.000,00	(11.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.860.000,00	12.849.000,00	(11.000,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.335.000,00	9.334.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.335.000,00	9.334.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.335.000,00	9.334.000,00	(1.000,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	153.119.592,00	153.104.812,00	(14.780,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	96.619.592,00	96.619.592,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.619.592,00	96.619.592,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.619.592,00	96.619.592,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	50.000.000,00	49.985.220,00	(14.780,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.985.220,00	(14.780,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.985.220,00	(14.780,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	118.000.000,00	117.199.999,00	(800.001,00)	99,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	118.000.000,00	117.199.999,00	(800.001,00)	99,32	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.400.000,00	(600.000,00)	98,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.400.000,00	(600.000,00)	98,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	63.000.000,00	62.799.999,00	(200.001,00)	99,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.000.000,00	62.799.999,00	(200.001,00)	99,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.000.000,00	22.322.141,00	(1.677.859,00)	93,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00	22.322.141,00	(1.677.859,00)	93,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	22.322.141,00	(1.677.859,00)	93,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.322.141,00	(1.677.859,00)	93,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	95.987.500,00	45.870.925,00	(50.116.575,00)	47,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.987.500,00	45.870.925,00	(50.116.575,00)	47,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.987.500,00	45.870.925,00	(50.116.575,00)	47,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.987.500,00	45.870.925,00	(50.116.575,00)	47,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.002.141.000,00	985.899.866,00	(16.241.134,00)	98,37	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	265.588.000,00	265.531.000,00	(57.000,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	52.368.000,00	52.365.000,00	(3.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.368.000,00	52.365.000,00	(3.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.368.000,00	52.365.000,00	(3.000,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	85.900.000,00	85.846.000,00	(54.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.900.000,00	85.846.000,00	(54.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.900.000,00	85.846.000,00	(54.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	127.320.000,00	127.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	127.320.000,00	127.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.320.000,00	127.320.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	736.553.000,00	720.368.866,00	(16.184.134,00)	97,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	736.553.000,00	720.368.866,00	(16.184.134,00)	97,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	736.553.000,00	720.368.866,00	(16.184.134,00)	97,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.553.000,00	720.368.866,00	(16.184.134,00)	97,80	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.1.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	828.374.500,00	801.761.600,00	(26.612.900,00)	96,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	309.294.500,00	308.999.680,00	(294.820,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	52.577.000,00	52.559.000,00	(18.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.577.000,00	52.559.000,00	(18.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.577.000,00	52.559.000,00	(18.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	44.493.500,00	44.432.080,00	(61.420,00)	99,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.493.500,00	44.432.080,00	(61.420,00)	99,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.493.500,00	44.432.080,00	(61.420,00)	99,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	35.832.000,00	35.687.540,00	(144.460,00)	99,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.832.000,00	35.687.540,00	(144.460,00)	99,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.832.000,00	35.687.540,00	(144.460,00)	99,59	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	27.585.000,00	27.575.000,00	(10.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.585.000,00	27.575.000,00	(10.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.585.000,00	27.575.000,00	(10.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	85.802.000,00	85.761.060,00	(40.940,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.802.000,00	85.761.060,00	(40.940,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.802.000,00	85.761.060,00	(40.940,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	28.197.000,00	28.197.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.197.000,00	28.197.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.197.000,00	28.197.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	34.808.000,00	34.788.000,00	(20.000,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	34.808.000,00	34.788.000,00	(20.000,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.808.000,00	34.788.000,00	(20.000,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	435.426.500,00	409.143.420,00	(26.283.080,00)	93,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	229.900.000,00	204.101.990,00	(25.798.010,00)	88,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	229.900.000,00	204.101.990,00	(25.798.010,00)	88,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.900.000,00	204.101.990,00	(25.798.010,00)	88,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	20.054.000,00	20.054.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.054.000,00	20.054.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.054.000,00	20.054.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	14.667.000,00	14.617.000,00	(50.000,00)	99,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.667.000,00	14.617.000,00	(50.000,00)	99,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.667.000,00	14.617.000,00	(50.000,00)	99,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	19.975.000,00	19.962.000,00	(13.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.975.000,00	19.962.000,00	(13.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.975.000,00	19.962.000,00	(13.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	18.288.000,00	18.038.000,00	(250.000,00)	98,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.288.000,00	18.038.000,00	(250.000,00)	98,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.288.000,00	18.038.000,00	(250.000,00)	98,63	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	14.915.500,00	14.915.500,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.915.500,00	14.915.500,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.915.500,00	14.915.500,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	15.928.000,00	15.918.000,00	(10.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.928.000,00	15.918.000,00	(10.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.928.000,00	15.918.000,00	(10.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	101.699.000,00	101.536.930,00	(162.070,00)	99,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	101.699.000,00	101.536.930,00	(162.070,00)	99,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.699.000,00	101.536.930,00	(162.070,00)	99,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	83.653.500,00	83.618.500,00	(35.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	18.287.500,00	18.272.500,00	(15.000,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.287.500,00	18.272.500,00	(15.000,00)	99,91	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.287.500,00	18.272.500,00	(15.000,00)	99,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	18.791.500,00	18.781.500,00	(10.000,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.791.500,00	18.781.500,00	(10.000,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.791.500,00	18.781.500,00	(10.000,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	23.932.000,00	23.932.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	23.932.000,00	23.932.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.932.000,00	23.932.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	22.642.500,00	22.632.500,00	(10.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.642.500,00	22.632.500,00	(10.000,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.642.500,00	22.632.500,00	(10.000,00)	99,95	
				JUMLAH BELANJA	**4.196.594.441,00**	**4.031.217.810,00**	**(165.376.631,00)**	**96,05**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.196.594.441,00)**	**(4.031.217.810,00)**	**165.376.631,00**	**96,05**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(4.196.594.441,00)**	**(4.031.217.810,00)**	**165.376.631,00**	**96,05**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,06	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.5.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	374.438.200,00	355.959.828,00	(18.478.372,00)	95,06	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	85.149.000,00	68.281.138,00	(16.867.862,00)	80,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.01.0013		PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN	85.149.000,00	68.281.138,00	(16.867.862,00)	80,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	85.149.000,00	68.281.138,00	(16.867.862,00)	80,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.149.000,00	68.281.138,00	(16.867.862,00)	80,19	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	289.289.200,00	287.678.690,00	(1.610.510,00)	99,44	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	103.130.200,00	101.936.930,00	(1.193.270,00)	98,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	103.130.200,00	101.936.930,00	(1.193.270,00)	98,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.130.200,00	101.936.930,00	(1.193.270,00)	98,84	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0003		DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF	94.158.000,00	94.097.000,00	(61.000,00)	99,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	94.158.000,00	94.097.000,00	(61.000,00)	99,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.158.000,00	94.097.000,00	(61.000,00)	99,93	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0004		SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	92.001.000,00	91.644.760,00	(356.240,00)	99,61	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	92.001.000,00	91.644.760,00	(356.240,00)	99,61	
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.001.000,00	91.644.760,00	(356.240,00)	99,61	
				JUMLAH BELANJA	**374.438.200,00**	**355.959.828,00**	**(18.478.372,00)**	**95,06**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(374.438.200,00)**	**(355.959.828,00)**	**18.478.372,00**	**95,06**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(374.438.200,00)**	**(355.959.828,00)**	**18.478.372,00**	**95,06**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	(16.040.380.819,87)	97,25	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.722.276.468,00	13.743.154.734,36	1.020.878.266,36	108,02	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	4.924.214.886,00	5.473.094.162,67	548.879.276,67	111,14	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	30.222.000,00	34.292.000,00	4.070.000,00	113,46	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.671.142.115,00	4.671.142.115,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.096.697.467,00	3.564.626.456,69	467.928.989,69	115,11	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	561.408.707.201,00	545.105.020.037,00	(16.303.687.164,00)	97,09	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543.665.259.373,00	527.681.963.405,00	(15.983.295.968,00)	97,06	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.743.447.828,00	17.423.056.632,00	(320.391.196,00)	98,19	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	(757.571.922,23)	92,49	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	(757.571.922,23)	92,49	
				JUMLAH PENDAPATAN	**584.231.286.840,00**	**568.190.906.020,13**	**(16.040.380.819,87)**	**97,25**	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	113.505.959.529,15	93.879.321.592,00	(19.626.637.937,15)	82,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.754.591.029,15	4.327.452.856,00	(427.138.173,15)	91,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	16.866.000,00	16.847.000,00	(19.000,00)	99,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.056.000,00	15.037.000,00	(19.000,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.056.000,00	15.037.000,00	(19.000,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.056.000,00	15.037.000,00	(19.000,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.455.986.257,15	3.043.935.736,00	(412.050.521,15)	88,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.369.817.257,15	2.957.851.736,00	(411.965.521,15)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.369.817.257,15	2.957.851.736,00	(411.965.521,15)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.369.817.257,15	2.957.851.736,00	(411.965.521,15)	87,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	40.569.000,00	40.484.000,00	(85.000,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.569.000,00	40.484.000,00	(85.000,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.569.000,00	40.484.000,00	(85.000,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	181.750.000,00	181.136.056,00	(613.944,00)	99,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	120.000.000,00	119.386.056,00	(613.944,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	119.386.056,00	(613.944,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	119.386.056,00	(613.944,00)	99,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	101.000.000,00	100.923.400,00	(76.600,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	101.000.000,00	100.923.400,00	(76.600,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	100.500.000,00	100.423.400,00	(76.600,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.500.000,00	100.423.400,00	(76.600,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	842.488.772,00	830.183.664,00	(12.305.108,00)	98,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.288.000,00	5.288.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.288.000,00	5.288.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.288.000,00	5.288.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.350.000,00	32.167.500,00	(2.182.500,00)	93,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.350.000,00	32.167.500,00	(2.182.500,00)	93,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.350.000,00	32.167.500,00	(2.182.500,00)	93,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	802.850.772,00	792.728.164,00	(10.122.608,00)	98,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	802.850.772,00	792.728.164,00	(10.122.608,00)	98,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.850.772,00	792.728.164,00	(10.122.608,00)	98,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	156.500.000,00	154.427.000,00	(2.073.000,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	156.500.000,00	154.427.000,00	(2.073.000,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	156.500.000,00	154.427.000,00	(2.073.000,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.500.000,00	154.427.000,00	(2.073.000,00)	98,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	107.341.577.500,00	88.429.058.374,00	(18.912.519.126,00)	82,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.211.560.000,00	2.198.965.483,00	(12.594.517,00)	99,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	119.330.000,00	119.316.000,00	(14.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	119.330.000,00	119.316.000,00	(14.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.330.000,00	119.316.000,00	(14.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	119.330.000,00	119.320.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.330.000,00	119.320.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.330.000,00	119.320.000,00	(10.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	60.290.000,00	60.238.000,00	(52.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.290.000,00	60.238.000,00	(52.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.290.000,00	60.238.000,00	(52.000,00)	99,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	68.400.000,00	67.500.000,00	(900.000,00)	98,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	68.400.000,00	67.500.000,00	(900.000,00)	98,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	67.500.000,00	(900.000,00)	98,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.131.635.000,00	1.121.070.701,00	(10.564.299,00)	99,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.131.635.000,00	1.121.070.701,00	(10.564.299,00)	99,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.131.635.000,00	1.121.070.701,00	(10.564.299,00)	99,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	674.575.000,00	674.520.782,00	(54.218,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	674.575.000,00	674.520.782,00	(54.218,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.575.000,00	674.520.782,00	(54.218,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	38.000.000,00	37.000.000,00	(1.000.000,00)	97,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	37.000.000,00	(1.000.000,00)	97,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.000.000,00	(1.000.000,00)	97,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	714.439.500,00	706.465.002,00	(7.974.498,00)	98,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	174.125.000,00	173.280.600,00	(844.400,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.125.000,00	173.280.600,00	(844.400,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.125.000,00	173.280.600,00	(844.400,00)	99,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	81.655.000,00	81.627.000,00	(28.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	81.655.000,00	81.627.000,00	(28.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.655.000,00	81.627.000,00	(28.000,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	34.387.000,00	34.379.000,00	(8.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.387.000,00	34.379.000,00	(8.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.387.000,00	34.379.000,00	(8.000,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	39.335.000,00	38.577.000,00	(758.000,00)	98,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	39.335.000,00	38.577.000,00	(758.000,00)	98,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.335.000,00	38.577.000,00	(758.000,00)	98,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL AKIBAT PENGELOLAAN KAS, PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS	33.770.000,00	33.764.000,00	(6.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.770.000,00	33.764.000,00	(6.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.770.000,00	33.764.000,00	(6.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	60.297.500,00	60.291.500,00	(6.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	60.297.500,00	60.291.500,00	(6.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.297.500,00	60.291.500,00	(6.000,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	290.870.000,00	284.545.902,00	(6.324.098,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	290.870.000,00	284.545.902,00	(6.324.098,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.870.000,00	284.545.902,00	(6.324.098,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	747.637.000,00	713.840.500,00	(33.796.500,00)	95,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	178.683.000,00	170.253.400,00	(8.429.600,00)	95,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	178.683.000,00	170.253.400,00	(8.429.600,00)	95,28	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.683.000,00	170.253.400,00	(8.429.600,00)	95,28	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002		REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	90.540.000,00	83.735.200,00	(6.804.800,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.540.000,00	83.735.200,00	(6.804.800,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.540.000,00	83.735.200,00	(6.804.800,00)	92,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	119.020.000,00	117.858.900,00	(1.161.100,00)	99,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	119.020.000,00	117.858.900,00	(1.161.100,00)	99,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.020.000,00	117.858.900,00	(1.161.100,00)	99,02	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	195.754.000,00	194.004.600,00	(1.749.400,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	195.754.000,00	194.004.600,00	(1.749.400,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.754.000,00	194.004.600,00	(1.749.400,00)	99,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006		PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	27.040.000,00	24.332.000,00	(2.708.000,00)	89,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	27.040.000,00	24.332.000,00	(2.708.000,00)	89,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.040.000,00	24.332.000,00	(2.708.000,00)	89,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	136.600.000,00	123.656.400,00	(12.943.600,00)	90,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	136.600.000,00	123.656.400,00	(12.943.600,00)	90,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.600.000,00	123.656.400,00	(12.943.600,00)	90,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	103.667.941.000,00	84.809.787.389,00	(18.858.153.611,00)	81,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	103.667.941.000,00	84.809.787.389,00	(18.858.153.611,00)	81,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00	(15.358.153.611,00)	84,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.329.300.000,00	1.087.482.549,00	(241.817.451,00)	81,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.838.641.000,00	83.722.304.840,00	(15.116.336.160,00)	84,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	908.041.000,00	704.070.412,00	(203.970.588,00)	77,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	908.041.000,00	704.070.412,00	(203.970.588,00)	77,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	85.080.000,00	78.559.000,00	(6.521.000,00)	92,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.080.000,00	78.559.000,00	(6.521.000,00)	92,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.080.000,00	78.559.000,00	(6.521.000,00)	92,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	622.630.000,00	429.337.212,00	(193.292.788,00)	68,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	622.630.000,00	429.337.212,00	(193.292.788,00)	68,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	622.630.000,00	429.337.212,00	(193.292.788,00)	68,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	33.155.000,00	32.669.000,00	(486.000,00)	98,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	33.155.000,00	32.669.000,00	(486.000,00)	98,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.155.000,00	32.669.000,00	(486.000,00)	98,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	106.616.000,00	104.322.000,00	(2.294.000,00)	97,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	106.616.000,00	104.322.000,00	(2.294.000,00)	97,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.616.000,00	104.322.000,00	(2.294.000,00)	97,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	16.695.000,00	15.835.000,00	(860.000,00)	94,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.695.000,00	15.835.000,00	(860.000,00)	94,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.695.000,00	15.835.000,00	(860.000,00)	94,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013		PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	43.865.000,00	43.348.200,00	(516.800,00)	98,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	43.865.000,00	43.348.200,00	(516.800,00)	98,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.865.000,00	43.348.200,00	(516.800,00)	98,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	501.750.000,00	418.739.950,00	(83.010.050,00)	83,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	501.750.000,00	418.739.950,00	(83.010.050,00)	83,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	100.818.000,00	85.338.000,00	(15.480.000,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	100.818.000,00	85.338.000,00	(15.480.000,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.818.000,00	85.338.000,00	(15.480.000,00)	84,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	309.660.000,00	245.800.968,00	(63.859.032,00)	79,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	309.660.000,00	245.800.968,00	(63.859.032,00)	79,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.660.000,00	245.800.968,00	(63.859.032,00)	79,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	91.272.000,00	87.600.982,00	(3.671.018,00)	95,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	91.272.000,00	87.600.982,00	(3.671.018,00)	95,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.272.000,00	87.600.982,00	(3.671.018,00)	95,97	
				JUMLAH BELANJA	**113.505.959.529,15**	**93.879.321.592,00**	**(19.626.637.937,15)**	**82,70**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**470.725.327.310,85**	**474.311.584.428,13**	**3.586.257.117,28**	**100,76**	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	38.220.373.155,15	38.223.289.821,15	2.916.666,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.220.373.155,15	38.223.289.821,15	2.916.666,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.220.373.155,15	38.220.373.155,15	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.916.666,00	2.916.666,00	0,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**38.220.373.155,15**	**38.223.289.821,15**	**2.916.666,00**	**100,00**	
				PEMBIAYAAN NETTO	**38.220.373.155,15**	**38.223.289.821,15**	**2.916.666,00**	**100,00**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**508.945.700.466,00**	**512.534.874.249,28**	**3.589.173.783,28**	**100,70**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	(9.459.639.148,00)	76,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.902.978.970,00	29.488.756.236,00	(9.414.222.734,00)	75,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.989.000,00	(11.000,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.000.000,00	4.989.000,00	(11.000,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.989.000,00	(11.000,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.989.000,00	(11.000,00)	99,78	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	38.606.375.058,00	29.194.862.626,00	(9.411.512.432,00)	75,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	38.605.420.058,00	29.193.907.626,00	(9.411.512.432,00)	75,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.605.420.058,00	29.193.907.626,00	(9.411.512.432,00)	75,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	38.605.420.058,00	29.193.907.626,00	(9.411.512.432,00)	75,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	132.106.500,00	131.924.072,00	(182.428,00)	99,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.606.500,00	6.606.500,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.606.500,00	6.606.500,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.606.500,00	6.606.500,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	500.000,00	430.000,00	(70.000,00)	86,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	430.000,00	(70.000,00)	86,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	430.000,00	(70.000,00)	86,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	125.000.000,00	124.887.572,00	(112.428,00)	99,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	124.887.572,00	(112.428,00)	99,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.887.572,00	(112.428,00)	99,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.497.412,00	133.349.194,00	(1.148.218,00)	99,14	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.400.000,00	28.251.782,00	(1.148.218,00)	96,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.400.000,00	28.251.782,00	(1.148.218,00)	96,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	28.251.782,00	(1.148.218,00)	96,09	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	105.097.412,00	105.097.412,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.097.412,00	105.097.412,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.097.412,00	105.097.412,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.000.000,00	23.631.344,00	(1.368.656,00)	94,52	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.750.000,00	23.381.344,00	(1.368.656,00)	94,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	23.381.344,00	(1.368.656,00)	94,47	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	23.381.344,00	(1.368.656,00)	94,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.3.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.094.068.000,00	1.048.651.586,00	(45.416.414,00)	95,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	188.399.000,00	187.890.812,00	(508.188,00)	99,73	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN A	146.848.000,00	146.625.812,00	(222.188,00)	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	146.848.000,00	146.625.812,00	(222.188,00)	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.848.000,00	146.625.812,00	(222.188,00)	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007		EVALUASI PEMBERHENTIAN ASN	17.413.000,00	17.355.000,00	(58.000,00)	99,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.413.000,00	17.355.000,00	(58.000,00)	99,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.413.000,00	17.355.000,00	(58.000,00)	99,66	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008		FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	8.540.000,00	8.470.000,00	(70.000,00)	99,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.540.000,00	8.470.000,00	(70.000,00)	99,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	8.470.000,00	(70.000,00)	99,18	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	15.598.000,00	15.440.000,00	(158.000,00)	98,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.598.000,00	15.440.000,00	(158.000,00)	98,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.598.000,00	15.440.000,00	(158.000,00)	98,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	174.826.000,00	167.784.086,00	(7.041.914,00)	95,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	7.334.000,00	7.320.000,00	(14.000,00)	99,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.334.000,00	7.320.000,00	(14.000,00)	99,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.334.000,00	7.320.000,00	(14.000,00)	99,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	62.847.000,00	61.732.086,00	(1.114.914,00)	98,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.847.000,00	61.732.086,00	(1.114.914,00)	98,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.847.000,00	61.732.086,00	(1.114.914,00)	98,22	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	104.645.000,00	98.732.000,00	(5.913.000,00)	94,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	104.645.000,00	98.732.000,00	(5.913.000,00)	94,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.645.000,00	98.732.000,00	(5.913.000,00)	94,34	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	615.295.000,00	599.613.208,00	(15.681.792,00)	97,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	615.295.000,00	599.613.208,00	(15.681.792,00)	97,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	615.295.000,00	599.613.208,00	(15.681.792,00)	97,45	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.295.000,00	179.613.208,00	(15.681.792,00)	91,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	115.548.000,00	93.363.480,00	(22.184.520,00)	80,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	6.463.000,00	6.375.000,00	(88.000,00)	98,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.463.000,00	6.375.000,00	(88.000,00)	98,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.463.000,00	6.375.000,00	(88.000,00)	98,63	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006		EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN TANDA JASA APARATUR	16.315.000,00	12.305.440,00	(4.009.560,00)	75,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.315.000,00	12.305.440,00	(4.009.560,00)	75,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.315.000,00	12.305.440,00	(4.009.560,00)	75,42	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010		EVALUASI DISIPLIN ASN	92.770.000,00	74.683.040,00	(18.086.960,00)	80,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	92.770.000,00	74.683.040,00	(18.086.960,00)	80,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.770.000,00	74.683.040,00	(18.086.960,00)	80,50	
				JUMLAH BELANJA	**39.997.046.970,00**	**30.537.407.822,00**	**(9.459.639.148,00)**	**76,34**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(39.997.046.970,00)**	**(30.537.407.822,00)**	**9.459.639.148,00**	**76,34**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(39.997.046.970,00)**	**(30.537.407.822,00)**	**9.459.639.148,00**	**76,34**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,81	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.4.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,81	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,81	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,81	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,81	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	967.115.500,00	713.901.565,00	(253.213.935,00)	73,81	
				JUMLAH BELANJA	**967.115.500,00**	**713.901.565,00**	**(253.213.935,00)**	**73,81**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(967.115.500,00)**	**(713.901.565,00)**	**253.213.935,00**	**73,81**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(967.115.500,00)**	**(713.901.565,00)**	**253.213.935,00**	**73,81**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	(91.441.826,00)	98,03	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.885.255.254,00	2.795.964.068,00	(89.291.186,00)	96,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.401.194.662,00	2.317.670.819,00	(83.523.843,00)	96,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.327.223.262,00	2.243.699.819,00	(83.523.443,00)	96,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.327.223.262,00	2.243.699.819,00	(83.523.443,00)	96,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.327.223.262,00	2.243.699.819,00	(83.523.443,00)	96,41	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	73.971.400,00	73.971.000,00	(400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	73.971.400,00	73.971.000,00	(400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.171.400,00	72.171.000,00	(400,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	234.668.456,00	234.668.456,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	234.668.456,00	234.668.456,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	234.668.456,00	234.668.456,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.668.456,00	234.668.456,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	107.005.500,00	106.657.011,00	(348.489,00)	99,67	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	18.000.000,00	17.656.371,00	(343.629,00)	98,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.656.371,00	(343.629,00)	98,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.656.371,00	(343.629,00)	98,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.007.500,00	7.007.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.007.500,00	7.007.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.007.500,00	7.007.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	80.000.000,00	79.995.140,00	(4.860,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.995.140,00	(4.860,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.995.140,00	(4.860,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0007		PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.636.636,00	64.167.060,00	(4.469.576,00)	93,48	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	61.636.636,00	57.167.060,00	(4.469.576,00)	92,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.636.636,00	57.167.060,00	(4.469.576,00)	92,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.636.636,00	57.167.060,00	(4.469.576,00)	92,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.750.000,00	69.800.722,00	(949.278,00)	98,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	70.750.000,00	69.800.722,00	(949.278,00)	98,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	70.750.000,00	69.800.722,00	(949.278,00)	98,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.750.000,00	69.800.722,00	(949.278,00)	98,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.472.733.000,00	1.472.601.820,00	(131.180,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.110.401.500,00	1.110.335.040,00	(66.460,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	734.400.500,00	734.400.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	734.400.500,00	734.400.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.400.500,00	734.400.500,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	88.068.000,00	88.048.000,00	(20.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.068.000,00	88.048.000,00	(20.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.068.000,00	88.048.000,00	(20.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	49.873.000,00	49.873.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.873.000,00	49.873.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.873.000,00	49.873.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	73.487.500,00	73.450.500,00	(37.000,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	73.487.500,00	73.450.500,00	(37.000,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.487.500,00	73.450.500,00	(37.000,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	81.428.500,00	81.419.040,00	(9.460,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	81.428.500,00	81.419.040,00	(9.460,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.428.500,00	27.419.040,00	(9.460,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	83.144.000,00	83.144.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	83.144.000,00	83.144.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.144.000,00	83.144.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	362.331.500,00	362.266.780,00	(64.720,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	101.675.500,00	101.665.780,00	(9.720,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	101.675.500,00	101.665.780,00	(9.720,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.875.500,00	48.865.780,00	(9.720,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	260.656.000,00	260.601.000,00	(55.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	260.656.000,00	260.601.000,00	(55.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.656.000,00	260.601.000,00	(55.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.1.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	306.609.500,00	304.590.040,00	(2.019.460,00)	99,34	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	197.597.500,00	196.378.040,00	(1.219.460,00)	99,38	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	114.857.000,00	114.857.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	114.857.000,00	114.857.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.857.000,00	114.857.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	82.740.500,00	81.521.040,00	(1.219.460,00)	98,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.740.500,00	81.521.040,00	(1.219.460,00)	98,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	49.000.000,00	47.800.000,00	(1.200.000,00)	97,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.740.500,00	33.721.040,00	(19.460,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	109.012.000,00	108.212.000,00	(800.000,00)	99,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.041.000,00	26.241.000,00	(800.000,00)	97,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.041.000,00	26.241.000,00	(800.000,00)	97,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.041.000,00	8.241.000,00	(800.000,00)	91,15	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	32.008.000,00	32.008.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.008.000,00	32.008.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.858.000,00	2.858.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	42.979.000,00	42.979.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.979.000,00	42.979.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.379.000,00	5.379.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	6.984.000,00	6.984.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.984.000,00	6.984.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.984.000,00	6.984.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**4.664.597.754,00**	**4.573.155.928,00**	**(91.441.826,00)**	**98,03**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.664.597.754,00)**	**(4.573.155.928,00)**	**91.441.826,00**	**98,03**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(4.664.597.754,00)**	**(4.573.155.928,00)**	**91.441.826,00**	**98,03**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Katiku Tana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	(155.990.147,00)	88,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.122.636.270,00	966.654.123,00	(155.982.147,00)	86,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	920.538.150,00	770.676.196,00	(149.861.954,00)	83,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	904.088.150,00	754.226.196,00	(149.861.954,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	904.088.150,00	754.226.196,00	(149.861.954,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	904.088.150,00	754.226.196,00	(149.861.954,00)	83,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	30.910.000,00	30.408.807,00	(501.193,00)	98,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.910.000,00	2.760.000,00	(150.000,00)	94,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.910.000,00	2.760.000,00	(150.000,00)	94,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	2.760.000,00	(150.000,00)	94,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.000.000,00	24.648.807,00	(351.193,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.648.807,00	(351.193,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.648.807,00	(351.193,00)	98,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.798.120,00	129.458.120,00	(5.340.000,00)	96,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.990.000,00	16.650.000,00	(5.340.000,00)	75,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.990.000,00	16.650.000,00	(5.340.000,00)	75,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.990.000,00	16.650.000,00	(5.340.000,00)	75,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	112.808.120,00	112.808.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	112.808.120,00	112.808.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.808.120,00	112.808.120,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	36.390.000,00	36.111.000,00	(279.000,00)	99,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	31.582.500,00	31.303.500,00	(279.000,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.582.500,00	31.303.500,00	(279.000,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.582.500,00	31.303.500,00	(279.000,00)	99,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.807.500,00	4.807.500,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.807.500,00	4.807.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.807.500,00	4.807.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175.350.500,00	175.350.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	91.810.500,00	91.810.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	84.435.500,00	84.435.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	84.435.500,00	84.435.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.435.500,00	84.435.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03		KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001		KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.274.500,00	49.274.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	49.274.500,00	49.274.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	35.387.500,00	35.387.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.387.500,00	35.387.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.387.500,00	35.387.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002		SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN	6.409.500,00	6.409.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.409.500,00	6.409.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.409.500,00	6.409.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	7.477.500,00	7.477.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.477.500,00	7.477.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.477.500,00	7.477.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.566.000,00	54.558.000,00	(8.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	54.566.000,00	54.558.000,00	(8.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	34.266.000,00	34.266.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.266.000,00	34.266.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.266.000,00	34.266.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.300.000,00	7.292.000,00	(8.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.292.000,00	(8.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.292.000,00	(8.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0007		PELAKSANAAN SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN YANG BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**1.401.827.270,00**	**1.245.837.123,00**	**(155.990.147,00)**	**88,87**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.401.827.270,00)**	**(1.245.837.123,00)**	**155.990.147,00**	**88,87**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.401.827.270,00)**	**(1.245.837.123,00)**	**155.990.147,00**	**88,87**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Katiku Tana Selatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	(156.021.566,00)	88,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.199.988.218,00	1.044.121.652,00	(155.866.566,00)	87,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.123.650.218,00	968.849.502,00	(154.800.716,00)	86,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.030.561.486,00	875.760.770,00	(154.800.716,00)	84,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.030.561.486,00	875.760.770,00	(154.800.716,00)	84,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.030.561.486,00	875.760.770,00	(154.800.716,00)	84,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	92.187.732,00	92.187.732,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.187.732,00	92.187.732,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.187.732,00	92.187.732,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	901.000,00	901.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	901.000,00	901.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.000,00	901.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	53.838.000,00	53.590.200,00	(247.800,00)	99,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	507.500,00	507.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	507.500,00	507.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.500,00	507.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	7.927.000,00	7.927.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.927.000,00	7.927.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.927.000,00	7.927.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.028.500,00	3.028.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.028.500,00	3.028.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.028.500,00	3.028.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	40.000.000,00	39.752.200,00	(247.800,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.752.200,00	(247.800,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.752.200,00	(247.800,00)	99,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.000.000,00	4.976.000,00	(24.000,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5.000.000,00	4.976.000,00	(24.000,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.976.000,00	(24.000,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.976.000,00	(24.000,00)	99,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.500.000,00	16.705.950,00	(794.050,00)	95,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	17.500.000,00	16.705.950,00	(794.050,00)	95,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	16.705.950,00	(794.050,00)	95,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.705.950,00	(794.050,00)	95,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.878.000,00	110.753.000,00	(125.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	110.878.000,00	110.753.000,00	(125.000,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	60.113.000,00	60.088.000,00	(25.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.113.000,00	60.088.000,00	(25.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.113.000,00	60.088.000,00	(25.000,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	50.765.000,00	50.665.000,00	(100.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.765.000,00	50.665.000,00	(100.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.765.000,00	50.665.000,00	(100.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.1.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.275.000,00	7.255.000,00	(20.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.275.000,00	7.255.000,00	(20.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	7.275.000,00	7.255.000,00	(20.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	7.275.000,00	7.255.000,00	(20.000,00)	99,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.275.000,00	7.255.000,00	(20.000,00)	99,72	
				JUMLAH BELANJA	**1.376.696.218,00**	**1.220.674.652,00**	**(156.021.566,00)**	**88,66**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.376.696.218,00)**	**(1.220.674.652,00)**	**156.021.566,00**	**88,66**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.376.696.218,00)**	**(1.220.674.652,00)**	**156.021.566,00**	**88,66**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Mamboro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.666.698.062,00	1.516.158.960,00	(150.539.102,00)	90,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.555.048.062,00	1.404.593.846,00	(150.454.216,00)	90,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.322.325.545,00	1.171.955.151,00	(150.370.394,00)	88,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.087.361.793,00	941.102.871,00	(146.258.922,00)	86,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.087.361.793,00	941.102.871,00	(146.258.922,00)	86,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.087.361.793,00	941.102.871,00	(146.258.922,00)	86,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	219.963.752,00	215.852.280,00	(4.111.472,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	219.963.752,00	215.852.280,00	(4.111.472,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.963.752,00	215.852.280,00	(4.111.472,00)	98,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	81.247.000,00	81.163.178,00	(83.822,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	10.545.500,00	10.545.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.545.500,00	10.545.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.545.500,00	10.545.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.201.500,00	65.117.678,00	(83.822,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	65.201.500,00	65.117.678,00	(83.822,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.201.500,00	65.117.678,00	(83.822,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	130.325.517,00	130.325.517,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS AT	73.275.000,00	73.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.275.000,00	73.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.275.000,00	73.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	57.050.517,00	57.050.517,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.600.517,00	16.600.517,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.600.517,00	16.600.517,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.650.000,00	81.575.114,00	(74.886,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DA	54.650.000,00	54.600.000,00	(50.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001		PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN	54.650.000,00	54.600.000,00	(50.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.650.000,00	54.600.000,00	(50.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.650.000,00	54.600.000,00	(50.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	27.000.000,00	26.975.114,00	(24.886,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	27.000.000,00	26.975.114,00	(24.886,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	26.975.114,00	(24.886,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	26.975.114,00	(24.886,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.990.000,00	(10.000,00)	99,96	
				JUMLAH BELANJA	**1.666.698.062,00**	**1.516.158.960,00**	**(150.539.102,00)**	**90,96**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.666.698.062,00)**	**(1.516.158.960,00)**	**150.539.102,00**	**90,96**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.666.698.062,00)**	**(1.516.158.960,00)**	**150.539.102,00**	**90,96**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	(85.077.445,00)	94,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.402.756,00	1.233.653.911,00	(84.748.845,00)	93,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.111.102.756,00	1.026.353.911,00	(84.748.845,00)	92,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	970.103.096,00	893.509.751,00	(76.593.345,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	970.103.096,00	893.509.751,00	(76.593.345,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	970.103.096,00	893.509.751,00	(76.593.345,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	140.999.660,00	132.844.160,00	(8.155.500,00)	94,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.999.660,00	132.844.160,00	(8.155.500,00)	94,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.999.660,00	123.844.160,00	(8.155.500,00)	93,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109.200.000,00	108.871.400,00	(328.600,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	109.200.000,00	108.871.400,00	(328.600,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	109.200.000,00	108.871.400,00	(328.600,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.200.000,00	108.871.400,00	(328.600,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	108.871.400,00	(328.600,00)	99,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003		PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**1.576.502.756,00**	**1.491.425.311,00**	**(85.077.445,00)**	**94,60**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.576.502.756,00)**	**(1.491.425.311,00)**	**85.077.445,00**	**94,60**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.576.502.756,00)**	**(1.491.425.311,00)**	**85.077.445,00**	**94,60**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Umbu Ratu Nggay

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.848.123.061,00	1.697.804.523,00	(150.318.538,00)	91,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.599.522.561,00	1.449.244.023,00	(150.278.538,00)	90,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.144.081.997,00	993.932.353,00	(150.149.644,00)	86,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.144.081.997,00	993.932.353,00	(150.149.644,00)	86,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.144.081.997,00	993.932.353,00	(150.149.644,00)	86,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.144.081.997,00	993.932.353,00	(150.149.644,00)	86,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	170.401.064,00	170.391.064,00	(10.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	163.161.064,00	163.151.064,00	(10.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	163.161.064,00	163.151.064,00	(10.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.161.064,00	163.151.064,00	(10.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	281.550.000,00	281.431.106,00	(118.894,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	80.500.000,00	80.401.106,00	(98.894,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.500.000,00	80.401.106,00	(98.894,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.500.000,00	80.401.106,00	(98.894,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	201.050.000,00	201.030.000,00	(20.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.980.000,00	(20.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	59.990.000,00	(10.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.000.000,00	139.990.000,00	(10.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	64.980.000,00	(20.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	65.000.000,00	64.980.000,00	(20.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	65.000.000,00	64.980.000,00	(20.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	64.980.000,00	(20.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.980.000,00	(20.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	183.600.500,00	183.580.500,00	(20.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	183.600.500,00	183.580.500,00	(20.000,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	91.000.500,00	90.980.500,00	(20.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	91.000.500,00	90.980.500,00	(20.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.000.500,00	90.980.500,00	(20.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**1.848.123.061,00**	**1.697.804.523,00**	**(150.318.538,00)**	**91,86**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.848.123.061,00)**	**(1.697.804.523,00)**	**150.318.538,00**	**91,86**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.848.123.061,00)**	**(1.697.804.523,00)**	**150.318.538,00**	**91,86**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	1.598.709.150,00	1.451.797.191,00	(146.911.959,00)	90,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.453.051.006,00	1.306.757.855,00	(146.293.151,00)	89,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.181.840.336,00	1.045.554.047,00	(136.286.289,00)	88,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.009.546.216,00	900.827.515,00	(108.718.701,00)	89,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.009.546.216,00	900.827.515,00	(108.718.701,00)	89,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.546.216,00	900.827.515,00	(108.718.701,00)	89,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	172.294.120,00	144.726.532,00	(27.567.588,00)	83,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	172.294.120,00	144.726.532,00	(27.567.588,00)	83,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.294.120,00	144.726.532,00	(27.567.588,00)	83,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	145.978.670,00	144.945.200,00	(1.033.470,00)	99,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	45.500.000,00	44.475.000,00	(1.025.000,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	45.500.000,00	44.475.000,00	(1.025.000,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	44.475.000,00	(1.025.000,00)	97,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	4.984.670,00	4.984.000,00	(670,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.984.670,00	4.984.000,00	(670,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.984.670,00	4.984.000,00	(670,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0007		PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	80.000.000,00	79.992.200,00	(7.800,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.992.200,00	(7.800,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.992.200,00	(7.800,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	25.500.000,00	23.144.378,00	(2.355.622,00)	90,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	25.500.000,00	23.144.378,00	(2.355.622,00)	90,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	23.144.378,00	(1.855.622,00)	92,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	23.144.378,00	(1.855.622,00)	92,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.400.000,00	18.400.000,00	(5.000.000,00)	78,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.400.000,00	18.400.000,00	(5.000.000,00)	78,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	18.400.000,00	(5.000.000,00)	78,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	18.400.000,00	(5.000.000,00)	78,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76.332.000,00	74.714.230,00	(1.617.770,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	66.356.000,00	65.833.230,00	(522.770,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.356.000,00	65.833.230,00	(522.770,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.356.000,00	65.833.230,00	(522.770,00)	99,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	7.476.000,00	7.256.000,00	(220.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.476.000,00	7.256.000,00	(220.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.476.000,00	7.256.000,00	(220.000,00)	97,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.500.000,00	1.625.000,00	(875.000,00)	65,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.625.000,00	(875.000,00)	65,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.625.000,00	(875.000,00)	65,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.240.000,00	53.040.000,00	(200.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	53.240.000,00	53.040.000,00	(200.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	53.240.000,00	53.040.000,00	(200.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.240.000,00	53.040.000,00	(200.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.240.000,00	53.040.000,00	(200.000,00)	99,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.1.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.818.144,00	64.399.336,00	(418.808,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	64.818.144,00	64.399.336,00	(418.808,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001		PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	64.818.144,00	64.399.336,00	(418.808,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.818.144,00	64.399.336,00	(418.808,00)	99,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.818.144,00	64.399.336,00	(418.808,00)	99,35	
				JUMLAH BELANJA	**1.598.709.150,00**	**1.451.797.191,00**	**(146.911.959,00)**	**90,81**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(1.598.709.150,00)**	**(1.451.797.191,00)**	**146.911.959,00**	**90,81**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(1.598.709.150,00)**	**(1.451.797.191,00)**	**146.911.959,00**	**90,81**	

PEMERINTAH KAB. SUMBA TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	(159.972.742,00)	95,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.721.735.580,00	1.566.870.762,00	(154.864.818,00)	91,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	25.155.000,00	25.155.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.484.110.000,00	1.338.342.299,00	(145.767.701,00)	90,17	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.434.995.000,00	1.290.727.799,00	(144.267.201,00)	89,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.434.995.000,00	1.290.727.799,00	(144.267.201,00)	89,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.434.995.000,00	1.290.727.799,00	(144.267.201,00)	89,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	21.200.000,00	19.700.000,00	(1.500.000,00)	92,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.200.000,00	19.700.000,00	(1.500.000,00)	92,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.500.000,00	4.499.500,00	(500,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.499.500,00	(500,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.499.500,00	(500,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	144.257.180,00	143.746.900,00	(510.280,00)	99,64	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	69.257.180,00	68.784.720,00	(472.460,00)	99,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	69.257.180,00	68.784.720,00	(472.460,00)	99,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.257.180,00	68.784.720,00	(472.460,00)	99,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	75.000.000,00	74.962.180,00	(37.820,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.962.180,00	(37.820,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.962.180,00	(37.820,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.964.000,00	20.092.703,00	(5.871.297,00)	77,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.600.000,00	3.730.203,00	(5.869.797,00)	38,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	3.730.203,00	(5.869.797,00)	38,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	3.730.203,00	(5.869.797,00)	38,85	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	16.364.000,00	16.362.500,00	(1.500,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.364.000,00	16.362.500,00	(1.500,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.364.000,00	16.362.500,00	(1.500,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.250.000,00	32.534.460,00	(2.715.540,00)	92,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	35.250.000,00	32.534.460,00	(2.715.540,00)	92,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.250.000,00	32.534.460,00	(2.715.540,00)	92,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.250.000,00	32.534.460,00	(2.715.540,00)	92,29	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.1.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	860.251.800,00	856.566.750,00	(3.685.050,00)	99,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	860.251.800,00	856.566.750,00	(3.685.050,00)	99,57	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	31.670.000,00	31.050.000,00	(620.000,00)	98,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.670.000,00	31.050.000,00	(620.000,00)	98,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.670.000,00	31.050.000,00	(620.000,00)	98,04	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	828.581.800,00	825.516.750,00	(3.065.050,00)	99,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	828.581.800,00	825.516.750,00	(3.065.050,00)	99,63	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	828.581.800,00	825.516.750,00	(3.065.050,00)	99,63	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.1.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	536.669.654,00	535.382.580,00	(1.287.074,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	536.669.654,00	535.382.580,00	(1.287.074,00)	99,76	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI	31.188.000,00	29.973.000,00	(1.215.000,00)	96,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.188.000,00	29.973.000,00	(1.215.000,00)	96,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.188.000,00	29.973.000,00	(1.215.000,00)	96,10	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	505.481.654,00	505.409.580,00	(72.074,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	505.481.654,00	505.409.580,00	(72.074,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.374.400,00	36.302.326,00	(72.074,00)	99,80	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	469.107.254,00	469.107.254,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.1.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	52.990.800,00	52.990.000,00	(800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	52.990.800,00	52.990.000,00	(800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	52.990.800,00	52.990.000,00	(800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.990.800,00	52.990.000,00	(800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.990.800,00	52.990.000,00	(800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.1.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	134.404.000,00	134.269.000,00	(135.000,00)	99,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	134.404.000,00	134.269.000,00	(135.000,00)	99,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI	32.920.000,00	32.905.000,00	(15.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.920.000,00	32.905.000,00	(15.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.920.000,00	32.905.000,00	(15.000,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	15.910.000,00	15.790.000,00	(120.000,00)	99,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.910.000,00	15.790.000,00	(120.000,00)	99,24	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.910.000,00	15.790.000,00	(120.000,00)	99,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.574.000,00	85.574.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	85.574.000,00	85.574.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.574.000,00	85.574.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	**3.306.051.834,00**	**3.146.079.092,00**	**(159.972.742,00)**	**95,16**	
				SURPLUS / (DEFISIT)	**(3.306.051.834,00)**	**(3.146.079.092,00)**	**159.972.742,00**	**95,16**	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.306.051.834,00)**	**(3.146.079.092,00)**	**159.972.742,00**	**95,16**	

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	295.825.656.440,00	279.771.752.452,94	49.193.454.829,00	44.295.230.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	156.113.059.818,00	149.745.022.973,00	1.949.805.846,00	1.673.619.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	155.256.075.818,00	148.910.407.773,00	1.935.805.846,00	1.659.619.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.869.608.024,00	116.399.860.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	122.346.905.883,00	115.881.887.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122.310.330.883,00	115.845.312.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.575.000,00	36.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.000.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.000.000,00	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.000.000,00	7.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.667.501,00	137.645.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.196.001,00	4.196.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.465.000,00	27.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.836.500,00	10.836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	47.977.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.534.640,00	277.777.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.800.000,00	36.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.734.640,00	241.658.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.500.000,00	77.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.500.000,00	72.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	32.039.351.794,00	32.165.585.014,00	1.935.805.846,00	1.659.619.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.647.184.605,00	14.528.238.051,00	1.231.925.729,00	1.225.819.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	50.208.000,00	48.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.082.269.392,00	4.995.292.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	423.822.000,00	404.294.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	8.812.151.621,00	8.801.149.629,00	306.532.379,00	300.426.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00	49.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	225.483.592,00	225.483.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.250.000,00	3.250.000,00	925.393.350,00	925.393.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.141.601.706,00	9.331.815.216,00	703.880.117,00	433.799.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	108.158.400,00	108.158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.028.423.628,00	2.952.720.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.055.000,00	81.259.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.366.142.283,00	5.635.102.669,00	595.721.717,00	325.641.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	113.960.000,00	112.731.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130.425.000,00	130.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	315.015.300,00	315.015.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	104.580.495,00	104.580.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.990.275.683,00	8.048.906.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.588.695.488,00	4.582.864.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	133.367.200,00	129.592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	170.856.000,00	169.430.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.844.650.000,00	2.914.335.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	252.706.995,00	252.684.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	260.289.800,00	256.625.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	260.289.800,00	256.625.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	347.116.000,00	344.961.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	347.116.000,00	344.961.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	347.116.000,00	344.961.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060		Sanggar Kegiatan Belajar	856.984.000,00	834.615.200,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.362.000,00	99.703.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.537.000,00	14.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.537.000,00	14.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.025.000,00	35.892.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.000.000,00	26.867.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.800.000,00	19.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000,00	14.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	29.715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.715.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	754.622.000,00	734.912.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	309.850.000,00	294.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	309.850.000,00	294.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	444.772.000,00	440.562.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.19.0.00.01.0060	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	444.772.000,00	440.562.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	99.796.417.182,00	90.788.790.997,94	33.826.780.123,00	29.605.147.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	71.013.142.248,00	65.534.654.122,94	29.772.561.123,00	26.291.105.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.324.697.671,00	43.106.355.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.135.599.671,00	42.918.461.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.123.399.671,00	42.906.355.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	4.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.200.000,00	7.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.498.000,00	22.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22.498.000,00	22.493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.000.000,00	107.835.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	54.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.000.000,00	47.836.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.800.000,00	5.666.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.800.000,00	5.666.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.800.000,00	51.898.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.800.000,00	51.898.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	23.332.644.801,00	19.227.044.775,94	29.772.561.123,00	26.291.105.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.498.841.120,00	5.373.935.458,00	29.530.561.123,00	26.056.105.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	255.150.000,00	255.070.000,00	22.740.754.323,00	19.266.714.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.400.000,00	1.400.000,00	628.929.900,00	628.929.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	11.580.104,00	11.580.104,00	4.731.751.900,00	4.731.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	700.000,00	700.000,00	1.106.125.000,00	1.105.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	313.110.016,00	222.685.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.717.937.000,00	4.686.654.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	13.887.000,00	13.767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	182.377.000,00	179.377.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.505.105.681,00	13.564.181.617,94	242.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.818.000,00	33.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	390.351.000,00	384.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	45.675.000,00	45.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	61.663.400,00	61.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18.090.000,00	18.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.833.400,00	37.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	37.010.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.757.000,00	8.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00	7.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.674.000,00	14.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	15.064.000,00	15.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	30.000.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	91.345.000,00	90.411.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	82.000.000,00	80.830.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	19.029.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	181.105.000,00	178.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	25.762.000,00	25.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	194.811.000,00	194.614.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	12.000.000,00	11.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	445.504.000,00	443.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.440.167.757,00	9.791.147.464,94	242.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	129.829.000,00	78.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.756.601.124,00	1.540.315.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	104.142.000,00	97.457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	13.008.000,00	12.578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	7.736.000,00	7.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	43.718.000,00	43.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	12.635.000,00	12.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	231.806.000,00	230.942.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	293.524.000,00	253.753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	293.524.000,00	253.753.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.174.000,00	35.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	35.174.000,00	35.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.038.915.776,00	2.929.986.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.177.785.776,00	2.144.073.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.035.600,00	30.943.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.106.282.276,00	2.077.672.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.467.900,00	35.457.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	861.130.000,00	785.912.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	861.130.000,00	785.912.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	265.774.000,00	220.322.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	244.774.000,00	200.054.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	244.774.000,00	200.054.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.000.000,00	20.268.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	21.000.000,00	20.268.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.110.000,00	50.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.420.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4.420.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.690.000,00	46.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	46.690.000,00	46.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah	15.317.988.284,00	13.156.184.218,00	4.031.719.000,00	3.291.541.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.923.889.200,00	1.838.918.210,00	1.199.500.000,00	459.438.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	832.294.000,00	818.474.610,00	81.000.000,00	64.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000,00	21.500.000,00	81.000.000,00	64.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.100.000,00	83.073.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	464.050.000,00	454.597.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.676.000,00	107.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.988.000,00	131.684.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.600.000,00	1.600.000,00	1.068.500.000,00	344.712.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	500.000,00	500.000,00	160.000.000,00	159.784.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.100.000,00	1.100.000,00	908.500.000,00	184.927.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.400.000,00	264.991.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.400.000,00	255.191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.495.200,00	727.752.500,00	50.000.000,00	49.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	339.995.200,00	286.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	125.000.000,00	124.997.000,00	50.000.000,00	49.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	317.500.000,00	316.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.530.845.500,00	7.459.870.524,00	2.832.219.000,00	2.832.103.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.183.342.000,00	5.030.384.940,00	2.832.219.000,00	2.832.103.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.832.219.000,00	2.832.103.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	170.000.000,00	144.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	552.622.000,00	551.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.458.220.000,00	4.332.449.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000,00	2.333.506.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4.200.000.000,00	2.333.506.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147.503.500,00	95.979.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	147.503.500,00	95.979.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.863.253.584,00	3.857.395.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.713.253.584,00	3.711.573.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3.713.253.584,00	3.711.573.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	145.821.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	145.821.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Malinjak	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.456.200,00	169.107.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.066.200,00	51.066.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.812.500,00	10.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.046.000,00	5.046.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.217.700,00	17.217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.190.000,00	63.840.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.500.000,00	55.177.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	4.690.000,00	4.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.636.128.250,00	1.457.683.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.636.128.250,00	1.457.683.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.966.000,00	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	469.623.000,00	404.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.600.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.612.000,00	6.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	42.865.000,00	35.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	186.444.000,00	181.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	256.105.250,00	201.493.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	431.313.000,00	395.459.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Mananga	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	262.270.000,00	249.261.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.580.500,00	22.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.580.500,00	14.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.000.000,00	44.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.000.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.599.500,00	39.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.550.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.390.000,00	8.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.659.500,00	15.659.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.090.000,00	85.731.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.090.000,00	75.731.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.571.339.000,00	1.349.226.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.571.339.000,00	1.349.226.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.700.000,00	43.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.211.000,00	6.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	235.200.000,00	235.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.700.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.600.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.400.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.820.000,00	249.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	17.576.000,00	17.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.300.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.600.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	445.200.000,00	273.416.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	304.232.000,00	261.903.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	19.380.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.380.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.380.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Wairasa	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	177.172.500,00	176.609.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	20.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.172.500,00	39.611.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.172.500,00	39.611.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.564.110.000,00	1.346.310.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.564.110.000,00	1.346.310.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	135.251.000,00	133.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	76.445.000,00	76.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24.576.000,00	24.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.400.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.500.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38.400.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	7.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	268.495.000,00	179.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.612.000,00	27.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	75.975.000,00	75.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8.375.000,00	8.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	335.600.000,00	254.654.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	347.805.000,00	307.601.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.376.000,00	17.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Maradesa	1.178.523.500,00	1.118.210.488,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.007.500,00	116.007.500,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.957.500,00	53.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.957.500,00	53.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.062.516.000,00	1.002.202.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.062.516.000,00	1.002.202.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	149.155.000,00	146.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.679.000,00	29.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.000.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.387.000,00	182.486.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	108.939.000,00	108.939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.340.000,00	41.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	162.395.000,00	125.604.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	200.621.000,00	193.398.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Lawonda	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	240.668.000,00	234.832.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.350.000,00	48.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.918.000,00	99.582.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.918.000,00	61.582.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.432.464.000,00	1.274.356.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.432.464.000,00	1.274.356.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.600.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.549.000,00	2.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	243.408.000,00	243.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	34.500.000,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.600.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.892.000,00	43.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	434.500.000,00	285.727.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	303.665.000,00	299.296.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Weluri	973.415.600,00	872.287.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.364.000,00	79.877.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.230.000,00	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.500.000,00	32.013.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	28.513.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	878.744.600,00	779.103.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	878.744.600,00	779.103.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.980.000,00	35.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	24.200.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	48.800.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.600.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.150.000,00	116.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.600.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	42.864.000,00	42.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	154.644.600,00	115.636.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	200.088.000,00	186.957.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.278.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.307.000,00	13.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Lendiwacu	1.084.269.900,00	949.181.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.330.000,00	139.813.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.680.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.550.000,00	47.663.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.050.000,00	46.663.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	930.144.900,00	805.972.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	930.144.900,00	805.972.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.933.000,00	67.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	217.886.000,00	186.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.000.000,00	120.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	169.628.900,00	142.745.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	244.529.000,00	181.869.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.595.000,00	5.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.347.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.795.000,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.795.000,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.795.000,00	3.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Pahar	972.833.000,00	850.554.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.663.000,00	151.247.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.185.000,00	28.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.965.000,00	11.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.465.000,00	4.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.113.000,00	108.897.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.713.000,00	92.497.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	819.170.000,00	699.307.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	819.170.000,00	699.307.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.460.000,00	26.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.165.000,00	37.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.600.000,00	84.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.657.000,00	13.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	5.400.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.000.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	138.796.000,00	133.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.800.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13.597.000,00	9.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	8.800.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	177.000.000,00	111.483.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	179.795.000,00	157.216.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Umbu Riri.	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	190.691.000,00	190.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.486.000,00	36.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.486.000,00	21.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.205.000,00	52.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.105.000,00	11.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.169.924.000,00	1.092.589.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.169.924.000,00	1.092.589.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.841.000,00	59.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	49.455.000,00	49.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000,00	79.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	49.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	267.623.000,00	263.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115.920.000,00	115.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	109.600.000,00	47.323.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	347.935.000,00	336.877.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Tanambanas	817.841.700,00	756.049.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.199.700,00	224.040.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.116.700,00	56.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.930.000,00	33.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.186.700,00	22.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.483.000,00	74.329.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.483.000,00	58.329.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	584.654.000,00	523.020.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	584.654.000,00	523.020.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.600.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.200.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.253.000,00	199.653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.100.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14.360.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	75.543.000,00	72.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	165.344.000,00	143.224.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12.854.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.988.000,00	8.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.647.319.030,00	12.505.355.729,00	13.406.368.860,00	13.005.963.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.676.638.932,00	11.541.155.602,00	13.406.368.860,00	13.005.963.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.391.639.848,00	4.314.968.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.117.000,00	24.746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.117.000,00	24.746.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.125.482.848,00	4.057.890.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.086.432.848,00	4.020.676.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.550.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.495.000,00	116.475.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	99.980.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.995.000,00	21.981.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.986.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.550.000,00	93.874.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.550.000,00	93.874.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	189.006.496,00	188.946.958,00	326.305.960,00	326.205.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	189.006.496,00	188.946.958,00	326.305.960,00	326.205.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	189.006.496,00	188.946.958,00	326.305.960,00	326.205.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	425.325.596,00	425.266.496,00	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	425.325.596,00	425.266.496,00	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	74.006.496,00	74.006.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	351.319.100,00	351.260.000,00	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	5.198.329.328,00	5.181.022.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	118.000.000,00	114.224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	118.000.000,00	114.224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	118.000.000,00	114.224.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	204.337.664,00	195.935.236,00	100.000.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	204.337.664,00	195.935.236,00	100.000.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	155.000.000,00	154.820.516,00	100.000.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	49.337.664,00	41.114.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.000,00	171.541.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	171.541.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	200.000.000,00	171.541.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	950.000.000,00	949.250.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	850.000.000,00	849.598.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	850.000.000,00	849.598.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.651.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	99.651.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001		UPTD Pengelola Air Minum	970.680.098,00	964.200.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	380.300.934,00	376.628.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.015.000,00	21.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.015.000,00	21.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.535.934,00	343.264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.934.934,00	335.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.601.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.750.000,00	12.349.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.750.000,00	12.349.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	590.379.164,00	587.571.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	590.379.164,00	587.571.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	29.820.000,00	29.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Des	302.495.000,00	302.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.1.04.2.10.01.0001	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	258.064.164,00	255.391.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.03.1.04.2.10.01.0000	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	18.455.118.500,00	18.455.113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5.847.519.130,00	5.417.384.092,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.245.039.060,00	1.138.285.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.843.500,00	4.843.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.993.500,00	2.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	833.402.680,00	743.427.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	810.670.180,00	720.695.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.732.500,00	22.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.000.000,00	33.721.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.000.000,00	33.721.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.528.880,00	189.528.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.528.880,00	183.528.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.264.000,00	166.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.264.000,00	166.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	623.828.300,00	615.759.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	455.790.000,00	447.774.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	455.790.000,00	447.774.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	168.038.300,00	167.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	168.038.300,00	167.984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.978.651.770,00	3.663.339.113,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.505.824.410,00	2.253.986.753,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.999.518.416,00	1.770.438.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.978.818.416,00	1.753.338.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.700.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.918.360,00	95.798.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.418.360,00	28.418.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.507.104,00	150.879.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.650.000,00	10.022.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.857.104,00	140.857.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.671.530,00	231.369.994,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.674.360,00	223.372.824,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.997.170,00	4.997.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.466.727.360,00	1.403.252.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.416.212.360,00	1.358.997.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	64.500.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	157.100.000,00	146.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.174.612.360,00	1.127.847.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	50.515.000,00	44.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	50.515.000,00	44.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.966.222.780,00	2.860.085.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.004.400.880,00	1.918.885.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.663.136.549,00	1.585.325.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.644.335.549,00	1.566.524.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.801.000,00	18.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.232.520,00	89.874.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.033.520,00	12.033.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.109.000,00	12.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.627.811,00	229.281.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.250.000,00	17.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211.377.811,00	211.300.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	173.654.500,00	172.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	74.150.000,00	73.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	51.435.000,00	51.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	22.715.000,00	22.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	99.504.500,00	98.628.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	26.882.000,00	26.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.745.000,00	22.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34.372.500,00	34.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	14.505.000,00	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	470.883.400,00	457.400.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	408.320.000,00	394.997.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	386.269.000,00	373.556.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	22.051.000,00	21.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	62.563.400,00	62.403.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	62.563.400,00	62.403.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	131.909.000,00	131.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	131.909.000,00	131.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	106.699.000,00	106.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.210.000,00	24.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	185.375.000,00	179.922.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	185.375.000,00	179.922.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	134.355.000,00	128.902.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.2.08.0.00.06.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	51.020.000,00	51.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.982.543.558,00	30.181.455.231,00	300.700.000,00	299.954.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	875.770.000,00	874.747.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	875.770.000,00	874.747.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	113.255.000,00	113.002.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	113.255.000,00	113.002.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	113.255.000,00	113.002.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	75.375.000,00	74.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	75.375.000,00	74.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	75.375.000,00	74.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	687.140.000,00	686.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	687.140.000,00	686.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	687.140.000,00	686.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	687.739.000,00	627.260.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	687.739.000,00	627.260.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.750.000,00	66.811.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.750.000,00	66.811.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.750.000,00	66.811.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	50.000.000,00	49.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	134.876.500,00	134.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.376.500,00	33.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.376.500,00	33.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	72.042.500,00	67.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.292.500,00	10.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.292.500,00	10.292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	56.750.000,00	56.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.240.000,00	29.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.510.000,00	27.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	363.070.000,00	308.581.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.140.000,00	181.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.140.000,00	181.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.930.000,00	127.296.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	63.910.000,00	61.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	1.06.2.08.0.00.06.0000	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	69.020.000,00	66.245.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.080.790.600,00	4.042.228.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.249.550.000,00	819.842.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.249.550.000,00	819.842.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.249.550.000,00	819.842.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.788.541.500,00	3.180.379.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	192.084.500,00	186.898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	146.219.500,00	144.413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	22.695.000,00	20.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	23.170.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	17.531.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	17.531.000,00	16.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	3.578.926.000,00	2.976.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	50.000.000,00	49.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3.528.926.000,00	2.926.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	42.699.100,00	42.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	42.699.100,00	42.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	3.27.2.09.0.00.27.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	42.699.100,00	42.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000		Dinas Lingkungan Hidup	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.086.191.422,00	1.876.520.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.759.110,00	13.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.249.110,00	11.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.660.370.000,00	1.467.397.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.647.170.000,00	1.455.997.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.200.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.886.000,00	70.715.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.386.000,00	12.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.500.000,00	57.904.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.656.000,00	72.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.356.000,00	10.356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.034.312,00	161.934.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.350.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.684.312,00	147.684.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000,00	89.683.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000,00	89.683.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	773.645.000,00	771.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	773.645.000,00	771.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	773.645.000,00	771.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDU	188.357.500,00	186.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	180.102.500,00	177.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	135.470.000,00	133.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	44.632.500,00	44.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	8.255.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	8.255.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	531.026.500,00	530.852.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	531.026.500,00	530.852.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	531.026.500,00	530.852.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	6.574.400,00	6.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.574.400,00	6.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	6.574.400,00	6.294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.670.000,00	23.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.670.000,00	23.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.800.000,00	12.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10.870.000,00	10.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	5.384.400,00	5.359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.384.400,00	5.359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5.384.400,00	5.359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	37.267.000,00	37.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.267.000,00	37.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	37.267.000,00	37.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	38.880.000,00	38.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.880.000,00	38.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	38.880.000,00	38.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	6.195.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	6.195.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	6.195.000,00	6.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	86.134.000,00	85.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	86.134.000,00	85.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.11.0000	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	86.134.000,00	85.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.741.103.764,00	2.551.047.065,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.741.103.764,00	2.551.047.065,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.433.178.764,00	2.249.682.065,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.002.367.500,00	1.821.284.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.974.300.000,00	1.793.216.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.867.500,00	10.867.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.500.000,00	98.484.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	89.984.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.000,00	1.250.000,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.311.264,00	277.249.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000,00	21.538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	255.711.264,00	255.711.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.750.000,00	51.413.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.750.000,00	51.413.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	65.995.000,00	65.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	65.995.000,00	65.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16.970.000,00	16.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	25.000.000,00	24.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	14.500.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.525.000,00	9.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	34.000.000,00	33.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	34.000.000,00	33.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	18.000.000,00	17.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	187.630.000,00	181.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependu	39.830.000,00	39.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12.220.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	27.610.000,00	27.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	136.000.000,00	129.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	125.500.000,00	119.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.300.000,00	20.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	20.300.000,00	20.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	10.200.000,00	10.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.12.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	10.100.000,00	10.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.645.372.657,00	2.533.185.856,00	66.500.000,00	66.496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	2.645.372.657,00	2.533.185.856,00	66.500.000,00	66.496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.807.293.687,00	1.699.361.310,00	66.500.000,00	66.496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.875.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.875.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.607.980.996,00	1.500.915.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.590.980.996,00	1.483.915.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.952.667,00	71.922.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.353.667,00	1.353.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.599.000,00	14.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.000.000,00	51.969.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	500.000,00	66.500.000,00	66.496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	66.500.000,00	66.496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.485.024,00	85.702.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.900.000,00	14.310.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.585.024,00	71.392.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.500.000,00	29.460.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.500.000,00	29.460.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	553.078.970,00	549.215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	553.078.970,00	549.215.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.035.000,00	114.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	20.312.000,00	18.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	30.995.000,00	30.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	45.599.970,00	45.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	340.137.000,00	340.123.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	285.000.000,00	284.609.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	285.000.000,00	284.609.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.13.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	285.000.000,00	284.609.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.568.589.454,00	3.174.089.258,00	33.500.000,00	32.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.568.589.454,00	3.174.089.258,00	33.500.000,00	32.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.048.134.954,00	1.871.366.685,00	33.500.000,00	32.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.458.081.302,00	1.323.652.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.438.071.302,00	1.303.642.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.793.100,00	80.709.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.793.100,00	10.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	69.916.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.010.552,00	328.648.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.260.000,00	5.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.750.552,00	322.750.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.250.000,00	138.355.715,00	33.500.000,00	32.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.250.000,00	138.355.715,00	33.500.000,00	32.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	20.454.500,00	20.351.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.454.500,00	20.351.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	20.454.500,00	20.351.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	999.400.000,00	783.270.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	225.000.000,00	146.446.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	30.000.000,00	29.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	95.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000,00	34.458.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	462.464.000,00	331.608.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.900.000,00	8.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	420.914.000,00	292.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.650.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	311.936.000,00	305.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualit	311.936.000,00	305.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	500.600.000,00	499.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	500.600.000,00	499.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	65.000.000,00	63.499.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	435.600.000,00	435.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000		Dinas Perhubungan	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.929.018.308,00	1.648.454.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.336.684.500,00	1.254.463.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.324.000.000,00	1.241.779.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.684.500,00	12.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.352.120,00	176.334.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.405.000,00	9.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.549.000,00	11.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.398.120,00	12.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00	139.996.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.981.688,00	154.362.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.499.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.482.688,00	144.462.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.000.000,00	63.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.000.000,00	63.293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	124.635.000,00	124.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.335.000,00	22.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	22.335.000,00	22.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	60.000.000,00	59.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	60.000.000,00	59.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	54.185.000,00	53.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	47.185.000,00	46.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.15.0000	2.15.03.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	47.185.000,00	46.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.869.043.680,00	1.827.601.106,00	65.000.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	1.869.043.680,00	1.827.601.106,00	65.000.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.636.623.680,00	1.595.453.118,00	65.000.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	944.800,00	943.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	944.800,00	943.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.415.590.981,00	1.377.111.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.805.981,00	1.361.376.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.625.000,00	14.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.940.667,00	88.841.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.492.667,00	3.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.522.500,00	8.522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	925.500,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.000.000,00	75.951.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.387.232,00	99.287.232,00	65.000.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.050.000,00	21.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	65.000.000,00	64.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.337.232,00	77.837.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.760.000,00	29.269.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.250.000,00	25.769.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.510.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	56.151.000,00	56.128.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	56.151.000,00	56.128.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	21.669.000,00	21.659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	29.272.000,00	29.259.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	176.269.000,00	176.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	155.000.000,00	154.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	155.000.000,00	154.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.269.000,00	21.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21.269.000,00	21.169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.559.875.556,00	3.433.389.880,00	78.200.000,00	78.092.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.559.875.556,00	3.433.389.880,00	78.200.000,00	78.092.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.065.296.056,00	2.947.343.937,00	78.200.000,00	78.092.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.941.000,00	18.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.941.000,00	18.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.748.958.132,00	2.640.374.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.714.028.132,00	2.607.639.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.930.000,00	32.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.255.000,00	84.246.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.000.000,00	73.991.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.891.924,00	179.880.452,00	13.200.000,00	13.174.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.491.924,00	150.480.452,00	13.200.000,00	13.174.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.250.000,00	23.901.158,00	65.000.000,00	64.918.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.750.000,00	23.401.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000,00	500.000,00	65.000.000,00	64.918.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	19.894.000,00	19.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	19.894.000,00	19.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	19.894.000,00	19.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24.115.000,00	24.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.115.000,00	24.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.115.000,00	24.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	251.194.000,00	244.176.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.194.000,00	244.176.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	251.194.000,00	244.176.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (U	55.773.500,00	55.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	55.773.500,00	55.753.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.795.000,00	16.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.563.500,00	20.558.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	18.415.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	143.603.000,00	142.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	143.603.000,00	142.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.31.3.30.15.0000	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	143.603.000,00	142.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	135.083.966,00	132.551.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.083.966,00	132.551.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	26.254.500,00	26.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.254.500,00	26.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	26.254.500,00	26.149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	40.235.000,00	37.948.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	40.235.000,00	37.948.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	16.055.000,00	15.022.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.180.000,00	22.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	68.594.466,00	68.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	68.594.466,00	68.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	19.529.466,00	19.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	34.065.000,00	34.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	3.32.2.07.2.18.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	15.000.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	349.301.500,00	339.791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	349.301.500,00	339.791.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	38.701.500,00	29.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten	38.701.500,00	29.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	38.701.500,00	29.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	310.600.000,00	309.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.600.000,00	309.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	1.01.2.19.0.00.01.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	310.600.000,00	309.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	178.766.500,00	178.396.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	178.766.500,00	178.396.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.742.000,00	7.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.742.000,00	7.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	7.742.000,00	7.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.410.000,00	87.289.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.410.000,00	87.289.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	60.000.000,00	59.959.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	27.410.000,00	27.329.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.614.500,00	83.384.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83.614.500,00	83.384.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	60.714.500,00	60.684.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	22.900.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	11.734.000,00	11.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	11.734.000,00	11.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	11.734.000,00	11.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.734.000,00	11.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.20.2.16.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.734.000,00	11.633.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.591.409.831,00	2.486.684.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.249.206.335,00	2.153.297.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.109.757.335,00	2.013.910.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.389.000,00	80.379.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.389.000,00	15.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	64.990.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.850.000,00	3.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.850.000,00	3.828.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.210.000,00	55.179.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.210.000,00	55.179.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	85.099.496,00	85.030.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/	85.099.496,00	85.030.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	85.099.496,00	85.030.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	134.509.000,00	134.375.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	134.509.000,00	134.375.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	134.509.000,00	134.375.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	122.595.000,00	113.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	122.595.000,00	113.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	3.26.2.22.0.00.16.0000	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	122.595.000,00	113.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.487.514.068,00	2.269.189.047,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.487.514.068,00	2.269.189.047,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.758.219.768,00	1.546.097.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.818.500,00	5.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.023.500,00	4.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.601.504.100,00	1.433.828.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.600.000.000,00	1.432.324.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.504.100,00	1.504.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.022.668,00	33.991.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.761.168,00	3.760.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.261.500,00	15.261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.624.500,00	49.140.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.524.500,00	20.522.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.100.000,00	23.619.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	4.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.250.000,00	23.324.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.250.000,00	23.324.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	729.294.300,00	723.091.872,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	586.268.600,00	580.689.306,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	137.849.900,00	137.424.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232.750.000,00	228.324.572,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.478.700,00	113.109.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	102.190.000,00	101.830.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.025.700,00	142.402.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	143.025.700,00	142.402.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	309.285.452,00	304.836.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	309.285.452,00	304.836.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.521.952,00	131.365.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.521.952,00	131.365.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.521.952,00	131.365.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	173.763.500,00	173.470.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	71.244.500,00	71.238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	71.244.500,00	71.238.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	102.519.000,00	102.232.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	76.464.000,00	76.457.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.18.0000	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	26.055.000,00	25.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.340.182.871,00	30.595.193.515,00	108.800.000,00	57.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.616.514.294,00	2.570.949.883,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000		Dinas Kelautan dan Perikanan	2.616.514.294,00	2.570.949.883,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.122.556.794,00	2.077.402.383,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.799.177.910,00	1.757.016.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.784.177.910,00	1.742.016.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.445.600,00	82.332.100,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.945.600,00	9.926.600,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.183.284,00	166.660.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	17.477.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.183.284,00	149.183.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.750.000,00	71.393.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.750.000,00	71.393.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	493.957.500,00	493.547.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	293.235.000,00	292.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	111.515.000,00	111.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	181.720.000,00	181.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	200.722.500,00	200.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.25.0000	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Dara	200.722.500,00	200.722.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	687.746.000,00	673.357.514,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	687.746.000,00	673.357.514,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.882.500,00	74.856.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.502.500,00	43.502.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.100.000,00	15.074.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.100.000,00	15.074.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	138.037.500,00	131.002.900,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	41.715.000,00	41.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	41.715.000,00	41.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	89.802.500,00	89.287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	89.802.500,00	89.287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.520.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.520.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	188.776.000,00	188.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	188.776.000,00	188.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	128.236.000,00	128.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	60.540.000,00	60.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	279.050.000,00	279.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	279.050.000,00	279.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	54.645.000,00	54.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	90.095.000,00	90.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.22.0.00.16.0000	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	134.310.000,00	134.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.414.923.936,00	24.840.221.751,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.219.546.384,00	4.049.249.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.689.993.496,00	3.522.575.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.671.993.496,00	3.504.575.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.000.000,00	116.811.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	89.811.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.652.888,00	293.602.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.250.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.402.888,00	278.402.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.900.000,00	106.259.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.400.000,00	103.834.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	79.640.500,00	79.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.640.500,00	79.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	79.640.500,00	79.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.414.000,00	8.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.414.000,00	8.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	8.414.000,00	8.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.126.330.500,00	1.120.174.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	151.830.500,00	148.373.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	151.830.500,00	148.373.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	974.500.000,00	971.800.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	974.500.000,00	971.800.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001		UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.144.396.600,00	999.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.196.600,00	89.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.150.000,00	36.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.396.600,00	25.451.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.896.600,00	3.761.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	19.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.250.000,00	7.963.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.250.000,00	7.963.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.036.200.000,00	909.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.036.200.000,00	909.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0001	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.036.200.000,00	909.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.872.886.448,00	16.623.668.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.684.137.448,00	11.311.409.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.700.000,00	69.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.700.000,00	69.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.334.300.000,00	10.011.566.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.311.500.000,00	9.988.766.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.150.000,00	278.475.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000,00	222.325.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.737.448,00	718.735.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	10.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707.737.448,00	707.737.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.250.000,00	233.491.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.100.000,00	211.341.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.150.000,00	22.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.731.485.000,00	1.723.363.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.731.485.000,00	1.723.363.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	816.588.000,00	812.399.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	914.897.000,00	910.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.886.830.000,00	1.139.414.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	278.413.000,00	263.815.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	278.413.000,00	263.815.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	278.413.000,00	263.815.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.292.021.000,00	2.185.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.292.021.000,00	2.185.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.935.306.000,00	1.831.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	356.715.000,00	354.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001		UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1.963.709.504,00	1.959.301.851,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	463.709.504,00	460.798.422,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.621.000,00	48.616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000,00	44.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	99.983.250,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.983.250,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.739.004,00	290.448.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000,00	6.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	283.739.004,00	283.739.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.349.500,00	21.751.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.349.500,00	21.751.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.0.00.27.0001	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.500.000.000,00	1.498.503.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	338.700.000,00	338.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	338.700.000,00	338.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	303.700.000,00	303.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	303.700.000,00	303.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	268.700.000,00	268.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	20.000.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	266.587.000,00	264.635.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000		Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	266.587.000,00	264.635.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	251.587.000,00	249.725.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	251.587.000,00	249.725.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	52.442.000,00	51.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	176.645.000,00	175.612.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	22.500.000,00	22.471.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.000.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	2.17.3.31.3.30.15.0000	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15.000.000,00	14.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	2.015.711.641,00	1.907.458.382,00	30.000.000,00	29.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000		Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.015.711.641,00	1.907.458.382,00	30.000.000,00	29.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.989.034.641,00	1.881.031.382,00	30.000.000,00	29.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.767.160.325,00	1.660.660.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.752.760.325,00	1.646.260.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.482.500,00	96.276.870,00	30.000.000,00	29.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.982.500,00	6.982.500,00	30.000.000,00	29.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.794.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.591.816,00	73.147.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	9.155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.991.816,00	63.991.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.800.000,00	50.946.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.800.000,00	50.946.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	26.677.000,00	26.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	26.677.000,00	26.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32	3.32.2.07.2.18.01.0000	3.32.02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	26.677.000,00	26.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	41.348.261.102,00	39.628.694.779,00	4.107.883.200,00	4.104.692.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	21.811.610.723,00	20.175.176.402,00	3.476.883.200,00	3.475.970.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		Bagian Administrasi Pembangunan	1.236.335.700,00	1.134.169.050,00	48.700.000,00	48.635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.005.500,00	119.583.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.732.000,00	15.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.732.000,00	15.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.237.500,00	74.854.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.237.500,00	6.237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	68.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.500.000,00	12.508.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.500.000,00	10.508.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.106.330.200,00	1.014.585.996,00	48.700.000,00	48.635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	74.573.500,00	74.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4.573.500,00	4.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70.000.000,00	69.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.031.756.700,00	940.131.996,00	48.700.000,00	48.635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	264.849.500,00	177.803.040,00	48.700.000,00	48.635.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	766.907.200,00	762.328.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Perekonomian	397.620.900,00	388.153.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	154.247.900,00	145.436.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.577.000,00	15.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.577.000,00	15.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.530.900,00	51.170.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.121.000,00	12.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.409.900,00	2.049.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.600.000,00	41.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.600.000,00	35.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.500.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	243.373.000,00	242.717.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	222.248.000,00	221.677.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLU	30.926.000,00	30.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	174.322.000,00	173.800.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	17.000.000,00	16.950.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	21.125.000,00	21.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5.255.000,00	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	15.870.000,00	15.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		Bagian Umum	12.901.728.623,00	12.503.427.963,00	3.428.183.200,00	3.427.334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.901.728.623,00	12.503.427.963,00	3.428.183.200,00	3.427.334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.818.000,00	13.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.818.000,00	13.818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.817.513.389,00	6.505.849.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.442.016.509,00	5.148.031.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.232.996.880,00	1.222.718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	142.500.000,00	135.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.750.000,00	171.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	171.750.000,00	171.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.373.142.860,00	1.371.058.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	156.644.860,00	155.302.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	251.100.000,00	251.010.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	272.148.000,00	272.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	672.500.000,00	671.900.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.345.000,00	277.220.500,00	3.428.183.200,00	3.427.334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000,00	1.100.000,00	2.955.683.200,00	2.955.108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276.245.000,00	276.120.500,00	472.500.000,00	472.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.000.000,00	171.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.816.000,00	1.654.023.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	529.000.000,00	526.114.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	596.976.000,00	593.197.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	484.840.000,00	484.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	558.843.374,00	481.622.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	181.843.374,00	133.332.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	71.289.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.185.000.000,00	1.184.623.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.185.000.000,00	1.184.623.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		Bagian Hukum	306.635.000,00	294.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	151.365.000,00	146.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.749.000,00	18.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.749.000,00	18.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.725.000,00	19.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.725.000,00	19.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.741.000,00	56.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.741.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	48.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.400.000,00	10.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	8.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.750.000,00	41.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.750.000,00	39.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	155.270.000,00	148.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	155.270.000,00	148.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	81.720.000,00	75.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	39.100.000,00	38.407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	34.450.000,00	33.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	978.132.500,00	955.394.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.177.000,00	73.954.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.267.500,00	43.968.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.717.500,00	11.422.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	29.995.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.500,00	939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	939.500,00	939.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.500.000,00	14.576.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.500.000,00	14.576.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	901.955.500,00	881.440.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	901.955.500,00	881.440.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	16.670.000,00	16.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	76.457.000,00	76.437.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	808.828.500,00	788.347.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Organisasi	513.878.000,00	513.282.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	513.878.000,00	513.282.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.596.000,00	23.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.436.000,00	2.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	19.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.800.000,00	7.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000,00	7.572.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.000.000,00	20.838.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	19.838.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	447.707.000,00	447.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	157.980.000,00	157.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40.000.000,00	39.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	249.727.000,00	249.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	376.007.000,00	372.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	376.007.000,00	372.660.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.857.000,00	6.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.965.000,00	2.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14.495.000,00	14.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.220.000,00	14.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.720.000,00	11.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.000.000,00	10.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	7.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000,00	21.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.000.000,00	16.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	304.035.000,00	300.887.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	210.935.000,00	210.830.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	47.500.000,00	47.466.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	45.600.000,00	42.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055		Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.406.000,00	70.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.385.000,00	10.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.521.000,00	48.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.906.000,00	10.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	34.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.030.867.000,00	3.943.260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.030.867.000,00	3.943.260.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.434.829.500,00	3.347.222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	138.431.500,00	138.431.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0055	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	457.606.000,00	457.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	19.536.650.379,00	19.453.518.377,00	631.000.000,00	628.722.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	19.536.650.379,00	19.453.518.377,00	631.000.000,00	628.722.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.607.440.383,00	11.536.473.930,00	631.000.000,00	628.722.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.302.024.750,00	1.279.175.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.302.024.750,00	1.279.175.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.100.000,00	304.054.438,00	556.000.000,00	553.765.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.550.000,00	175.548.268,00	356.000.000,00	355.765.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.550.000,00	55.550.000,00	200.000.000,00	197.999.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.000.000,00	37.956.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.742.464,00	294.742.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	220.742.464,00	220.742.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.660.451,00	523.460.429,00	75.000.000,00	74.957.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.309.415,00	158.128.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.289.610,00	229.286.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.061.426,00	136.045.521,00	75.000.000,00	74.957.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7.442.293.428,00	7.415.995.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.179.743.428,00	7.153.474.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	262.550.000,00	262.521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.725.619.290,00	1.719.044.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	926.809.875,00	920.239.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	798.809.415,00	798.805.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	7.929.209.996,00	7.917.044.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	172.710.000,00	172.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	172.710.000,00	172.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.972.000.000,00	1.971.775.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	724.000.000,00	723.951.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	824.000.000,00	823.975.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	424.000.000,00	423.848.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	884.999.996,00	873.193.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	794.000.000,00	783.193.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	90.999.996,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.619.500.000,00	1.619.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	535.000.000,00	534.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.084.500.000,00	1.084.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.280.000.000,00	3.279.970.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.280.000.000,00	3.279.970.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	55.209.713.640,15	44.544.797.829,00	163.500.000,00	163.223.399,00	3.500.000.000,00	0,00	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00
5.01			PERENCANAAN	4.133.594.441,00	3.968.417.811,00	63.000.000,00	62.799.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000		Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.133.594.441,00	3.968.417.811,00	63.000.000,00	62.799.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.303.078.941,00	2.180.756.345,00	63.000.000,00	62.799.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.897.000,00	19.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.897.000,00	19.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.955.074.849,00	1.885.173.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.923.279.849,00	1.853.390.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.460.000,00	22.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.335.000,00	9.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.119.592,00	153.104.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.619.592,00	96.619.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.985.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000,00	54.400.000,00	63.000.000,00	62.799.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	54.400.000,00	63.000.000,00	62.799.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.000.000,00	22.322.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	22.322.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.987.500,00	45.870.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.987.500,00	45.870.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.002.141.000,00	985.899.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	265.588.000,00	265.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	52.368.000,00	52.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	85.900.000,00	85.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	127.320.000,00	127.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	736.553.000,00	720.368.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	736.553.000,00	720.368.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	828.374.500,00	801.761.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	309.294.500,00	308.999.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.577.000,00	52.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	44.493.500,00	44.432.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35.832.000,00	35.687.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	27.585.000,00	27.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	85.802.000,00	85.761.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.197.000,00	28.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.808.000,00	34.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	435.426.500,00	409.143.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	229.900.000,00	204.101.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.054.000,00	20.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.667.000,00	14.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	19.975.000,00	19.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.288.000,00	18.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	14.915.500,00	14.915.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.928.000,00	15.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	101.699.000,00	101.536.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83.653.500,00	83.618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.287.500,00	18.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	18.791.500,00	18.781.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	23.932.000,00	23.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.642.500,00	22.632.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	9.737.518.529,15	8.969.110.803,00	100.500.000,00	100.423.400,00	3.500.000.000,00	0,00	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	9.737.518.529,15	8.969.110.803,00	100.500.000,00	100.423.400,00	3.500.000.000,00	0,00	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.654.091.029,15	4.227.029.456,00	100.500.000,00	100.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.866.000,00	16.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.056.000,00	15.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.455.986.257,15	3.043.935.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.369.817.257,15	2.957.851.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.569.000,00	40.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.750.000,00	181.136.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.150.000,00	58.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	119.386.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	500.000,00	100.500.000,00	100.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	500.000,00	100.500.000,00	100.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.488.772,00	830.183.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.288.000,00	5.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.350.000,00	32.167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	802.850.772,00	792.728.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.500.000,00	154.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.500.000,00	154.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.673.636.500,00	3.619.270.985,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.211.560.000,00	2.198.965.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	119.330.000,00	119.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	119.330.000,00	119.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	60.290.000,00	60.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	68.400.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.131.635.000,00	1.121.070.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	674.575.000,00	674.520.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	38.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	714.439.500,00	706.465.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	174.125.000,00	173.280.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	81.655.000,00	81.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	34.387.000,00	34.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	39.335.000,00	38.577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	33.770.000,00	33.764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.297.500,00	60.291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	290.870.000,00	284.545.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	747.637.000,00	713.840.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	178.683.000,00	170.253.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	90.540.000,00	83.735.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	119.020.000,00	117.858.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	195.754.000,00	194.004.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	27.040.000,00	24.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	136.600.000,00	123.656.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	100.167.941.000,00	84.809.787.389,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	908.041.000,00	704.070.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	908.041.000,00	704.070.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	85.080.000,00	78.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	622.630.000,00	429.337.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	33.155.000,00	32.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	106.616.000,00	104.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	16.695.000,00	15.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	43.865.000,00	43.348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	501.750.000,00	418.739.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	501.750.000,00	418.739.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.818.000,00	85.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	309.660.000,00	245.800.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	91.272.000,00	87.600.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	39.997.046.970,00	30.537.407.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.902.978.970,00	29.488.756.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.606.375.058,00	29.194.862.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.605.420.058,00	29.193.907.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.106.500,00	131.924.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.606.500,00	6.606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	500.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.000.000,00	124.887.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.497.412,00	133.349.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.400.000,00	28.251.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.097.412,00	105.097.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000,00	23.631.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.750.000,00	23.381.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.094.068.000,00	1.048.651.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	188.399.000,00	187.890.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	146.848.000,00	146.625.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	17.413.000,00	17.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	8.540.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	15.598.000,00	15.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	174.826.000,00	167.784.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	7.334.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	62.847.000,00	61.732.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	104.645.000,00	98.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	615.295.000,00	599.613.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	615.295.000,00	599.613.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	115.548.000,00	93.363.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.463.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	16.315.000,00	12.305.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	92.770.000,00	74.683.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	967.115.500,00	713.901.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	967.115.500,00	713.901.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	967.115.500,00	713.901.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	967.115.500,00	713.901.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	967.115.500,00	713.901.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	374.438.200,00	355.959.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000		Badan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	374.438.200,00	355.959.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	374.438.200,00	355.959.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	85.149.000,00	68.281.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	85.149.000,00	68.281.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	289.289.200,00	287.678.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	103.130.200,00	101.936.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	94.158.000,00	94.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.03.0000	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	92.001.000,00	91.644.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.885.255.254,00	2.795.964.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.401.194.662,00	2.317.670.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.327.223.262,00	2.243.699.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.971.400,00	73.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.668.456,00	234.668.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	234.668.456,00	234.668.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.005.500,00	106.657.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000,00	17.656.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.007.500,00	7.007.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.995.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.636.636,00	64.167.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.636.636,00	57.167.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.750.000,00	69.800.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.750.000,00	69.800.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.472.733.000,00	1.472.601.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.110.401.500,00	1.110.335.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	734.400.500,00	734.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	88.068.000,00	88.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	49.873.000,00	49.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	73.487.500,00	73.450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	81.428.500,00	81.419.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	83.144.000,00	83.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	362.331.500,00	362.266.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	101.675.500,00	101.665.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	260.656.000,00	260.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	306.609.500,00	304.590.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	197.597.500,00	196.378.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	114.857.000,00	114.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	82.740.500,00	81.521.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	109.012.000,00	108.212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	27.041.000,00	26.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32.008.000,00	32.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	42.979.000,00	42.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.984.000,00	6.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	9.203.106.517,00	8.360.123.382,00	265.450.000,00	263.574.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	9.203.106.517,00	8.360.123.382,00	265.450.000,00	263.574.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Katiku Tana	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.122.636.270,00	966.654.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	920.538.150,00	770.676.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	904.088.150,00	754.226.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.910.000,00	30.408.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.910.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	24.648.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.798.120,00	129.458.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.990.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.808.120,00	112.808.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.390.000,00	36.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.582.500,00	31.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.807.500,00	4.807.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175.350.500,00	175.350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	91.810.500,00	91.810.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	84.435.500,00	84.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	38.460.000,00	38.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	49.274.500,00	49.274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.274.500,00	49.274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.387.500,00	35.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.409.500,00	6.409.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.477.500,00	7.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.566.000,00	54.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.566.000,00	54.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.266.000,00	34.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.300.000,00	7.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Katiku Tana Selatan	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.199.988.218,00	1.044.121.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.123.650.218,00	968.849.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.030.561.486,00	875.760.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92.187.732,00	92.187.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	901.000,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.838.000,00	53.590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	507.500,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.927.000,00	7.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.028.500,00	3.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	39.752.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.500.000,00	16.705.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.500.000,00	16.705.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.000.000,00	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.000.000,00	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.000.000,00	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.878.000,00	110.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.878.000,00	110.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60.113.000,00	60.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.765.000,00	50.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.555.000,00	19.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.275.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.275.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.275.000,00	7.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Mamboro	1.626.248.062,00	1.475.708.960,00	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.514.598.062,00	1.364.143.846,00	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.322.325.545,00	1.171.955.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.361.793,00	941.102.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.963.752,00	215.852.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.247.000,00	81.163.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.545.500,00	10.545.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.201.500,00	65.117.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.875.517,00	89.875.517,00	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.275.000,00	73.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.600.517,00	16.600.517,00	40.450.000,00	40.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.650.000,00	81.575.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	54.650.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	54.650.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	27.000.000,00	26.975.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	27.000.000,00	26.975.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.000.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.000.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.402.756,00	1.233.653.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.111.102.756,00	1.026.353.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	970.103.096,00	893.509.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.999.660,00	132.844.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	109.200.000,00	108.871.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	109.200.000,00	108.871.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	109.200.000,00	108.871.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Umbu Ratu Nggay	1.648.123.061,00	1.497.824.523,00	200.000.000,00	199.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.399.522.561,00	1.249.264.023,00	200.000.000,00	199.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.144.081.997,00	993.932.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.144.081.997,00	993.932.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.489.500,00	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.401.064,00	170.391.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.240.000,00	7.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.161.064,00	163.151.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.550.000,00	81.451.106,00	200.000.000,00	199.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.500.000,00	80.401.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	1.050.000,00	1.050.000,00	200.000.000,00	199.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.000.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	65.000.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.000.000,00	64.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	183.600.500,00	183.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	183.600.500,00	183.580.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	91.000.500,00	90.980.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	92.600.000,00	92.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah	1.573.709.150,00	1.428.652.813,00	25.000.000,00	23.144.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.428.051.006,00	1.283.613.477,00	25.000.000,00	23.144.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.181.840.336,00	1.045.554.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.009.546.216,00	900.827.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.294.120,00	144.726.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.978.670,00	144.945.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.500.000,00	44.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.984.670,00	4.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.994.000,00	7.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	79.992.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	0,00	25.000.000,00	23.144.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000,00	0,00	25.000.000,00	23.144.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.332.000,00	74.714.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.356.000,00	65.833.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.476.000,00	7.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.240.000,00	53.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.240.000,00	53.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	53.240.000,00	53.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.818.144,00	64.399.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.818.144,00	64.399.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	64.818.144,00	64.399.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.721.735.580,00	1.566.870.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.155.000,00	25.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.484.110.000,00	1.338.342.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.434.995.000,00	1.290.727.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.200.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.875.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,00	4.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.499.400,00	2.499.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.257.180,00	143.746.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.257.180,00	68.784.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.962.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.964.000,00	20.092.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	3.730.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.364.000,00	16.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.250.000,00	32.534.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.250.000,00	32.534.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	860.251.800,00	856.566.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	860.251.800,00	856.566.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31.670.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	828.581.800,00	825.516.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	536.669.654,00	535.382.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	536.669.654,00	535.382.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	31.188.000,00	29.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	505.481.654,00	505.409.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	52.990.800,00	52.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	52.990.800,00	52.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52.990.800,00	52.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	134.404.000,00	134.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	134.404.000,00	134.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32.920.000,00	32.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.910.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.05.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	85.574.000,00	85.574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	**475.880.113.716,15**	**440.801.252.208,94**	**54.139.788.029,00**	**49.184.558.012,00**	**3.500.000.000,00**	**0,00**	**100.167.941.000,00**	**84.809.787.389,00**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**38.220.373.155,15**	**47.866.256.139,91**
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	38.220.373.155,15	47.866.256.139,91
3	**Sub Total**	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	40.961.099.507,34	38.220.373.155,15
5	**Sub Total**	**40.961.099.507,34**	**38.220.373.155,15**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
7	Lain-lain	-	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**40.961.099.507,34**	**38.220.373.155,15**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN - LO**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO**				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.485.256.697,14	7.877.956.492,61	(392.699.795,47)	(4,98)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	10.182.870.544,00	9.940.561.900,46	242.308.643,54	2,44
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	2.469.701.467,27	3.370.382.143,43	(900.680.676,16)	(26,72)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO**	**24.808.970.823,41**	**23.948.030.252,50**	**860.940.570,91**	**3,60**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	3.388.226.000,00	3.151.502.000,00	236.724.000,00	7,51
13	Dana Alokasi Umum - LO	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00	(27.368.922.120,00)	(7,59)
14	Dana Alokasi Khusus - LO	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00	(40.405.397.573,00)	(24,12)
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO**	**463.706.628.665,00**	**531.244.224.358,00**	**(67.537.595.693,00)**	(12,71)
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LO**				
18	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian - LO	-	-	-	-
20	Insentif fiskal - LO	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00	1.139.148.000,00	8,81
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya - LO**	**14.068.155.000,00**	**12.929.007.000,00**	**1.139.148.000,00**	**8,81**
22					
23	**TRANSFER ANTAR DAERAH - LO**				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	13.228.633.435,00	19.323.697.401,00	(6.095.063.966,00)	(31,54)
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00
26	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO**	**13.428.633.435,00**	**19.323.697.401,00**	**(5.895.063.966,00)**	**(30,51)**
27	**Jumlah Pendapatan Transfer - LO**	**491.203.417.100,00**	**563.496.928.759,00**	**(72.293.511.659,00)**	**(12,83)**
28					
29	**LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO**				
30	Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
31	Pendapatan Dana Darurat - LO	-	-	-	-
32	Pendapatan Lainnya - LO	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	(13,71)
33	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah - LO**	**4.723.455.831,99**	**5.474.206.297,58**	**(750.750.465,59)**	**(13,71)**
34	**JUMLAH PENDAPATAN - LO**	**520.735.843.755,40**	**592.919.165.309,08**	**(72.183.321.553,68)**	**(12,17)**
35					
36	**BEBAN - LO**				
37	Beban Pegawai - LO	256.426.801.060,00	212.171.757.998,00	44.255.043.062,00	20,86
38	Beban Persediaan - LO	50.016.567.479,70	62.819.085.737,81	(12.802.518.258,11)	(20,38)
39	Beban Jasa - LO	62.300.551.527,61	81.666.288.199,22	(19.365.736.671,61)	(23,71)
40	Beban Pemeliharaan - LO	2.015.733.879,90	2.297.517.639,00	(281.783.759,10)	(12,26)
41	Beban Perjalanan Dinas - LO	30.138.449.013,00	40.839.878.209,00	(10.701.429.196,00)	(26,20)
42	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	-	-	-	-
43	Beban Barang dan Jasa BOS	8.624.647.948,00	-	8.624.647.948,00	100,00
44	Beban Bunga - LO	-	-	-	-
45	Beban Subsidi - LO	-	-	-	-
46	Beban Hibah - LO	9.226.925.504,00	29.784.636.772,12	(20.557.711.268,12)	(69,00)
47	Beban Bantuan Sosial - LO	17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88
48	Beban Penyusutan - LO	98.474.926.244,91	74.149.512.601,41	24.325.413.643,50	32,81
49	Beban Amortisasi - LO	379.921.705,00	414.703.705,00	(34.782.000,00)	(8,39)
50	Beban Penyisihan Piutang - LO	76.554.633,81	817.149.707,48	(740.595.073,67)	(90,63)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
51	Beban Penyisihan Piutang Lainnya - LO	(291.666,60)	1.991.833,75	(2.283.500,35)	100,00
52	Beban Lain - lain - LO	-	-	-	-
53	Beban Transfer - LO	34.911.401.649,00	37.639.446.235,00	(2.728.044.586,00)	(7,25)
54					
55					
56	**JUMLAH BEBAN - LO**	**570.088.254.859,05**	**546.913.968.637,79**	**23.174.286.221,26**	**4,24**
57	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI - LO**	**(49.352.411.103,65)**	**46.005.196.671,29**	**(95.357.607.774,94)**	**(207,28)**
58					
59	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO**				
60	Surplus Penjualan Aset non Lancar - LO	-	665.539.500,00	(665.539.500,00)	(100,00)
61	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
62	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	146.594.457,00	(146.594.457,00)	(100,00)
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
65	Defisit Penghapusan Aset Tetap - LO	-	-	-	-
66	Defisit Penghapusan Aset Lainnya - LO	-	-	-	-
67	Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya - LO	193.457.307,67	130.902.727,62	62.554.580,05	47,79
68					
69					
70	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO**	**(193.457.307,67)**	**681.231.229,38**	**(874.688.537,05)**	**(128,40)**
71	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - LO**	**(49.545.868.411,32)**	**46.686.427.900,67**	**(96.232.296.311,99)**	**(206,12)**
72					
73	**POS LUAR BIASA - LO**				
74	Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-	-
75	Beban Luar Biasa - LO	-	-	-	-
76	**POS LUAR BIASA - LO**	-	-	-	-
77					
78	**SURPLUS/DEFISIT LO**	**(49.545.868.411,32)**	**46.686.427.900,67**	**(96.232.296.311,99)**	**(206,12)**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
1	**Ekuitas Awal**	**1.405.100.800.771,02**	**1.382.145.304.668,40**
2	**Surplus/Defisit LO**	**(49.545.868.411,32)**	**46.686.427.900,67**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**	**(15.214.114.713,13)**	**(23.730.931.798,05)**
	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(15.214.114.713,13)	(23.730.931.798,05)
	Koreksi Pajak Daerah	-	-
	Koreksi Lain-lain PAD yang Sah	-	-
	Koreksi Kas di kas RKUD	-	-
	Koreksi Kas di Bendahara BOS	-	-
	Koreksi Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	Koreksi Piutang Pajak	13.510.900,00	-
	Koreksi Piutang Retribusi dan PAD Lainnya	-	-
	Koreksi Piutang Transfer Antar Daerah	(1,00)	-
	Koreksi Piutang Lainnya	-	-
	Koreksi Investasi Permanen	-	-
	Koreksi Investasi Non Permanen	-	-
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Tanah	(3.167.500,00)	-
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	2.862.542.690,00	(6.162.270.816,58)
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	-	(50.000.000,00)
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	7.162.151.300,00
	Koreksi Saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	58.362.115,00	-
	Koreksi Saldo KDP	-	-
	Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(15.413.288.414,79)	(24.680.812.281,47)
	Koreksi Saldo Aset Tak Berwujud	-	-
	Koreksi Saldo Amortisasi	-	-
	Koreksi Saldo Aset Lain - Lain	(1.157.749.947,85)	-
	Koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	(1.574.257.000,00)	
	Koreksi Utang PFK	-	-
	Koreksi Beban Penyisihan Piutang	(67.554,49)	-
4	**Ekuitas Akhir**	**1.340.340.817.646,57**	**1.405.100.800.771,02**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Waibakul, 20 Juli 2026
BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	**ASET**		
2	**ASET LANCAR**		
3	Kas di Kas Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	54.000,00	20.638.900,46
6	Kas di Bendahara JKN	618.555.915,41	778.302.345,58
7	Kas di Bendahara BOS	304.788.208,31	299.243.069,31
8	Kas Dana BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
9	Kas Lainnya	68.667.119,61	39.845.265,00
10	Kas di BLUD	-	-
11	Investasi Jangka Pendek	-	-
12	Piutang Pajak	5.441.865.150,47	3.267.899.059,00
13	Penyisihan Piutang Pajak	(2.362.332.370,54)	(2.261.439.596,58)
14	Piutang Retribusi	3.239.575.518,00	2.433.428.250,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.573.734.318,00)	(1.578.032.787,66)
16	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	60.561.659,09	637.219.478,55
17	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	(60.561.659,09)	-
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.321.732.000,00	-
19	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	593.668.746,00	4.588.091.944,00
20	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(2.968.343,73)	(22.940.459,72)
21	Piutang Lainnya		60.561.659,09
22	Penyisihan Piutang Lainnya		(60.561.659,09)
23	Beban dibayar dimuka	3.643.934.119,28	4.542.111.414,00
24	Persediaan	13.039.997.178,61	13.280.961.627,31
28	**Jumlah Aset Lancar**	**64.363.525.107,05**	**63.147.517.349,05**
29	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**67.139.085.752,30**	**67.244.842.392,70**
30	**Investasi Non Permanen**	**77.328.006,30**	**79.953.005,70**
31	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
32	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
33	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
34	Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
35	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-
36	Investasi Non Permanen Lainnya	678.729.573,17	681.646.239,17
37	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(601.401.566,87)	(601.693.233,47)
38	**Investasi Permanen**	**67.061.757.746,00**	**67.164.889.387,00**
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	67.061.757.746,00	67.164.889.387,00
40	Investasi Permanen Lainnya	-	-
41	**ASET TETAP**		
42	Tanah	48.106.295.467,00	48.109.462.967,00
43	Peralatan dan Mesin	321.430.307.691,99	304.678.635.056,79
44	Gedung dan Bangunan	543.387.323.268,57	515.096.308.476,40
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.373.177.973.420,40	1.378.143.756.570,83
46	Aset Tetap Lainnya	26.403.515.247,00	26.218.423.226,20
47	Konstruksi dalam Pengerjaan	15.841.056.183,53	4.867.614.213,53
48	Akumulasi Penyusutan	(1.132.508.596.592,59)	(1.018.620.381.932,89)
49	**Jumlah Aset Tetap**	**1.195.837.874.685,90**	**1.258.493.818.577,86**
50	**DANA CADANGAN**		
51	Dana Cadangan	-	-
52	**Jumlah Dana Cadangan**	**-**	**-**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
53	**ASET LAINNYA**		
54	Tagihan Penjualan Angsuran	1.966.060.000,00	1.966.060.000,00
55	Akumulasi Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(1.966.060.000,00)	(1.966.060.000,00)
56	Tuntutan Perbendaharaan	-	-
57	Tuntutan Ganti Rugi	1.132.420,00	3.682.770,00
58	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
59	Aset Tak Berwujud	6.139.070.050,00	6.139.070.050,00
60	Amortisasi	(4.243.994.795,00)	(3.863.173.090,00)
61	Aset Lain-lain	14.208.194.902,93	14.201.193.946,41
62	**Jumlah Aset Lainnya**	**16.105.301.677,93**	**16.488.773.676,41**
63			
64	**JUMLAH ASET**	**1.343.445.787.223,18**	**1.405.366.951.996,02**
65			
66	**KEWAJIBAN**	**3.104.969.576,61**	**266.151.225,00**
67	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.687.919,61	39.845.265,00
69	Utang Belanja Modal - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	226.305.960,00
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.895.989.000,00	-
71	Pendapatan Diterima Dimuka	148.292.657,00	-
72	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**3.104.969.576,61**	**266.151.225,00**
73			
74	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		
75	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-
76	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
77	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	-
78	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
79	Utang dalam Negeri – Obligasi	-	-
80	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
81	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	-	-
82			
83	**EKUITAS**	**1.340.340.817.646,57**	**1.405.100.800.771,02**
84	EKUITAS	1.340.340.817.646,57	1.405.100.800.771,02
85			
86	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**1.343.445.787.223,18**	**1.405.366.951.996,02**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**		
2	**Arus Kas Masuk**		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.473.094.162,67	7.611.248.292,61
4	Pendapatan Retribusi Daerah	3.076.072.445,00	2.314.742.567,46
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.779.006.287,69	10.885.352.343,43
7	Dana Bagi Hasil Pajak	3.397.020.000,00	3.489.469.000,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Alam (Bukan Pajak)		-
9	Dana Alokasi Umum	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00
10	Dana Alokasi Khusus	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00
11	Dana Insentif Daerah	-	-
12	Dana Penyesuaian	49.898.385.746,00	65.947.240.000,00
13	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00
14	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (Propinsi)	17.223.056.632,00	18.881.588.550,00
15	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
16	Dana dari Bantuan Keuangan	200.000.000,00	-
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.342.731.248,77	5.474.206.297,58
18	Pendapatan Dana Darurat	-	-
19	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**577.447.066.296,13**	**658.384.706.125,08**
20	**Arus Kas Keluar**		
21	Belanja Pegawai	256.553.382.060,00	213.986.839.398,00
22	Belanja Barang dan Jasa	153.880.944.644,94	190.482.106.032,50
23	Bunga	-	-
24	Subsidi	-	-
25	Hibah	9.226.925.504,00	30.093.121.500,00
26	Bantuan Sosial	21.140.000.000,00	4.332.000.000,00
27	Belanja Tidak Terduga	-	-
28	Belanja Bagi Hasil Pajak	777.821.000,00	596.597.165,00
29	Belanja Bagi Hasil Retribusi	309.661.549,00	229.119.070,00
30	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	83.722.304.840,00	102.760.970.000,00
31	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**525.611.039.597,94**	**542.480.753.165,50**
32	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**51.836.026.698,19**	**115.903.952.959,58**
33			
34	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/ASET NON KEUANGAN**		
35	**Arus Kas Masuk**		
36	Pencairan Dana Cadangan	-	-
37	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
38	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
39	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
40	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
41	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
42	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	86.341.000,00	665.539.500,00
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
45	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**86.341.000,00**	**665.539.500,00**
46	**Arus Kas Keluar**		
47	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
48	Belanja Tanah	-	-
49	Belanja Peralatan dan Mesin	13.379.171.304,00	13.143.410.114,45
50	Belanja Gedung dan Bangunan	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.235.963.860,00	98.063.043.920,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	190.349.880,00	166.536.000,00
53	Belanja Aset Lainnya		-
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024
55	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	6.000.000.000,00
56	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**49.184.558.012,00**	**126.264.375.442,34**
57	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**	**(49.098.217.012,00)**	**(125.598.835.942,34)**
58			
59	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**		
60	**Arus Kas Masuk :**		
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah Lainnya	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank	-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
68	Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah	-	-
69	Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Negara	-	-
70	Penerimaan kembali Pinjaman Lainnya	2.916.666,00	48.999.998,00
71	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**2.916.666,00**	**48.999.998,00**
72	**Arus Kas Keluar**		
73	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
74	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah Lainnya	-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank	-	-
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
82	Pemberian Pinjaman Lainnya	-	
83	**Jumlah Arus Kas Keluar**	-	-
84	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	**2.916.666,00**	**48.999.998,00**
85	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**		
86	**Arus Kas Masuk**		
87	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	33.476.189.719,61	42.346.910.767,02
88	**Jumlah Arus Kas Masuk**	**33.476.189.719,61**	**42.346.910.767,02**
89	**Arus Kas Keluar**		
90	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	33.455.347.065,00	42.307.065.502,02
91	**Jumlah Arus Kas Keluar**	**33.455.347.065,00**	**42.307.065.502,02**
92	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	**20.842.654,61**	**39.845.265,00**
93	**Kenaikan/(Penurunan) Kas selama periode**	**2.761.569.006,80**	**(9.606.037.719,76)**
94	**Saldo Awal Kas BUD**	**38.260.218.420,15**	**47.866.256.139,91**
95	**Koreksi Kas Tahun Sebelumnya**	-	-
96	**Saldo Akhir Kas BUD**	**41.021.787.426,95**	**38.260.218.420,15**
97	**Saldo Kas di neraca terdiri dari :**		
98	Kas di Kas Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
99	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
100	Kas di Bendahara Penerimaan	54.000,00	20.638.900,46
101	Kas di Bendahara JKN (Kapitasi)	618.555.915,41	778.302.345,58
102	Kas di BOS	304.788.208,31	299.243.969,31
103	Kas Dana BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
104	Kas Lainnya	68.667.119,61	39.845.265,00
105	Kas di BLUD	-	-
106	Kas di Deposito Berjangka	-	-
107	**Jumlah Saldo Kas di Neraca**	**41.021.787.426,95**	**38.260.218.420,15**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka akuntabilitas, manajemen, transparan dan kesinambungan antar generasi (*intergenerational equity*).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja pengelolaan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil - hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber – sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas dan surplus/defisit - Laporan Operasional (LO) suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah / Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
33. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Tengah;
34. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dan Ternak Bergulir Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
35. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
36. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 tentang Mendahului Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025;
39. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 58 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
40. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sumba Tengah;
41. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
42. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 65 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Makanan dan Minuman;
43. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
44. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 67 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Perhotelan;
45. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik;
46. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 78 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
47. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak;
48. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 81 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah;

49. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan;
50. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Persetujuan Bangunan Gedung;
51. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 84 Tahun 2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya-Biaya Pengelolaan Pada Unit Pengelola Air Minum Kabupaten Sumba Tengah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. EkonomiMakro/Ekonomi Regional
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
3.3 Mandatory Spending dalam Postur APBD

IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 EntitasPelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu.

V. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.2.1. Perubahan SAL
5.3 Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4 Laporan Operasional (LO)
5.4.1. Pendapatan– LO
5.4.2. Beban
5.4.3. Kegiatan Non Operasional
5.4.4. Pos Luar Biasa
5.5 Laporan Arus Kas (LAK)
5.5.1. Arus Kas dari Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Investasi Non Keuangan
5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.6.1. Perubahan Ekuitas

VI. Penjelasan atas informasi - informasi non keuangan.

VII. Penutup.

BAB II
GAMBARAN UMUM, EKONOMI MAKRO, DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Kabupaten Sumba Tengah dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Sumba Barat. Secara administratif baru pada tanggal 22 Mei 2007 menjadi kabupaten yang baru.

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

Kabupaten Sumba Tengah secara administrasi terbentuk sejak tanggal 22 Mei 2007 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Sumba Barat, dimana pengelolaan APBD baru dimulai sejak tahun 2008, dengan potensi penerimaan asli daerah yang masih sangat rendah, juga karena belum optimalnya pengelolaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah masih sangat bergantung dana transfer dari Pemerintah Pusat dan juga dari Pemerintah Provinsi dimana berdasarkan target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 561.408.707.201,00 dibandingkan dengan total pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 545.105.020.037,00 diperoleh proporsi sebesar 97,09 % dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan perhitungan yang rasional, terukur dan dapat dicapai dengan tidak membebani/mematikan usaha masyarakat, perlu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan memaksimalkan peran sumber daya manusia yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.

Kondisi perekonomian daerah tahun 2025 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, maka tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2025 adalah:

1. Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas karena Resesi Ekonomi Global.
2. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana, anomali iklim yang berpengaruh pada produksi pertanian, perkebunan dan kenaikan tarif jasa telekomunikasi yang berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa.
3. Jumlah penduduk yang bertambah dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan peluang dan kesempatan penyerapan tenaga kerja. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
4. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang masih kurang dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
5. Perubahan-perubahan formulasi kebijakan secara berjenjang akibat isu global dan nasional berpengaruh terhadap kebijakan penganggaran pembangunan daerah.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah di tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Sumba Tengah melalui Alokasi anggaran APBN sebagai salah satu sumber pendapatan dalam postur APBD Kabupaten.
2. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Sumba Tengah.

3. Kebijakan formulasi dana desa yang semakin diarahkan pada belanja-belanja produktif berbasis pengembangan potensi kawasan desa yang secara keseluruhan berpengaruh pada perekonomian daerah.

Asumsi dan kondisi perkembangan ekonomi makro yang telah terjadi dan yang akan terjadi dapat berpengaruh pada perubahan kebijakan fiskal dan perkiraan sumber-sumber pendanaan sehingga akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah baik pada kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, yaitu (minimal) :

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 30,84%
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,89%
c. Gini Ratio sebesar 0,356%
d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64,46%
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,71%
f. Tingkat Inflasi sebesar 0,27%
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp 1.527.180.000,00

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kab Sumba Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	30,84	31,78	(0,94)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	23.810	24.490	(680)
3	Provinsi (%)	19,48	20,05	(0,57)
4	Nasional (%)	8,57	9,57	(1,00)
5	Peringkat Provinsi	22	22	
6	Peringkat Nasional	34	32	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024 sebesar 31,78% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin menjadi 30,84% dan diharapkan pada tahun 2026 terus meningkat hingga angka 28,00%. Persentase

penduduk miskin Kabupaten Sumba Tengah masih di atas provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	8,16	7,59	(0,57)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	3,33	3,57	0,24
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,36	(0,17)
4.	Peringkat Provinsi	22	22	
5.	Peringkat Nasional	32	34	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	3,03	2,36	(0,67)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,80	0,96	0,16
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	(0,06)
4.	Peringkat Provinsi	22	22	
5.	Peringkat Nasional	32	34	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka**)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari:

a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
c. mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
d. mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 1,89%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	1,89	1,89	0,00
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,14	3,02	(0,12)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,90	(0,42)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2025 adalah sebesar 1,89% atau tidak mengalami kenaikan di bandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2024. Dengan demikian TPT Kabupaten Sumba Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,02% dan lebih rendah dari TPT Nasional sebesar 4,90%.

2.1.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu

periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 0,355 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Sumba Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,356	0,356	0,000
2	Tingkat Provinsi	0,340	0,325	(0,015)
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,007
4	Peringkat Provinsi	34	32	
5	Peringkat Nasional	16	16	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sumba Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,356 poin. Angka ini tidak mengalami Kenaikan dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 yang sebesar 0,356 dimana nilai ini lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi dan lebih rendah dari Gini Ratio Nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu:

a. harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*);
b. pengetahuan (*knowledge*); dan
c. standar hidup layak (*decent standart of living*).

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. rendah (< 60)
b. sedang (60≤IPM<70)
c. tinggi (70 ≤IPM<80)
d. sangat tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 63,63 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	63,63	64,46	0,83
2	Provinsi	68,40	69,14	0,74
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	0,63
4	Peringkat Provinsi	22	20	
5	Peringkat Nasional	32	34	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 adalah sebesar 64,46 poin dibandingkan Tahun 2024 sebesar 63,63 poin mengalami peningkatan sebesar 0,83 poin.

Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan rata - rata lama sekolah (RLS).
IPM di Kabupaten Sumba Tengah pada saat ini berada pada urutan 20 dari 22 Kab/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB (harga konstan 2010 Dalam ribuan rupiah)	787.040,00	809.490,00	839.520,00	78.044.570,00	12.920.281,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,58	2,85	3,71	3,73	5,00
3	Peringkat Provinsi	19	18	18	-	-
4	Peringkat Nasional	24	20	20	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Selama kurun waktu Tahun 2025 perekonomian Kabupaten Sumba Tengah mengalami peningkatan rata-rata 0,86%. Pada periode Tahun 2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumba Tengah sebesar 3,71% dan pada kurun waktu Tahun 2023 – Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumba Tengah sebesar 2,71%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Sumba Tengah menempati urutan 18 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Sumba Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*Creeping inflation*)
   Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)
   Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
c. Inflasi Berat (*High Inflation*)
   Inflasi ini termasuk yang berat dimana mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*)
   Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Tengah Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 adalah sebesar 0,27% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,27	0,27	(0,00)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,61	0,81	0,20
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	0,41	(1,27)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

Tingkat inflasi di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,27%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,27% atau tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Dengan demikian inflasi Kabupaten Sumba Tengah di Tahun 2025 berada di bawah tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar 0,81% lebih rendah dari tingkat inflasi Indonesia sebesar 0,41%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Tengah

Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Tengah

Dalam jutaan rupiah

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	543,02	595,60	645,77
2	Pertambangan dan Penggalian	46,47	50,17	52,11
3	Industri Pengolahan	7,89	8,73	10,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,12
6	Konstruksi	45,32	50,62	52,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	65,67	73,88	80,61
8	Transportasi dan Pergudangan	6,35	7,00	8,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,33	1,56
10	Informasi dan Komunikasi	71,29	73,15	77,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,97	19,59	20,63
12	Real Estate	35,83	40,02	46,73
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0.13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	344,11	357,92	393,54
15	Jasa Pendidikan	108,14	109,98	126,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	6,60	8,07
17	Jasa lainnya	2,90	3,03	3,18
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**1.303.39**	**1.397.92**	**1.527.18**
19	Peringkat Provinsi	22	22	22
20	Peringkat Nasional	20	20	20

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Sumba Tengah

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan roda pemerintahan daerah melalui perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai tujuan bersama yakni terwujudnya Tana Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera. Harapan ini dapat diwujudkan melalui perencanaan program dan kegiatan secara bertahap setiap tahun yang diikuti dengan

penyediaan dana. Untuk dapat menyelenggarakan itu, maka diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah yang berujung kepada upaya melakukan optimalisasi sumber - sumber pendapatan daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Selisih antara jumlah pendapatan dengan belanja menyebabkan timbulnya surplus atau defisit. Demikian pula selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto.
3. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengarahkan pembangunan daerah pada sektor-sektor kunci yang memiliki *multiplier effect* serta kaitan antar sektor, baik arah hulu maupun hilir yang akan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan terintegrasi sebagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah. Disamping itu memperhatikan skala prioritas, kebutuhan riil masyarakat/daerah, kemampuan fiskal dan jumlah aparatur pelaksana menjadi pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan.
4. Pembangunan bidang ekonomi diprioritaskan pada peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas sektor pertanian padi dan palawija dengan sasaran pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Disamping itu sektor ekonomi lainnya yang juga menjadi prioritas adalah yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, serta peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat.
5. Program pembangunan daerah Kabupaten Sumba Tengah yang dirancang memiliki kaitan baik secara langsung maupun melalui sektor-sektor yang mendukung pelaksanaan program Nasional dan program Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergi program/kegiatan antar jenjang pemerintahan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
6. Kebijakan Umum Belanja daerah lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan atas kebutuhan layanan dasar sesuai urusan dan kewenangan serta peningkatan sarana prasarana dengan tetap menjaga kepentingan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat keterbatasan-keterbatasan sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah menempuh kebijakan anggaran untuk mengalokasikan dana pada program-program dan kegiatan prioritas dan mendesak serta memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menyadari keterbatasan sumber pendanaan yang dimiliki, pemerintah daerah terus berupaya untuk memperoleh bantuan program/kegiatan maupun dana baik melalui Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta menjalin kerjasama dengan lembaga donor/LSM yang tidak mengikat dan tidak membebani APBD.
7. Kebijakan Pendapatan Daerah berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23.958.459.218,00 atau 4,02%, Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp561.408.707.201,00 atau 94,28% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp100.100.303.171,00 atau 1,70% dari total alokasi pendapatan sebesar Rp595.467.469.590,00.
8. Selanjutnya kebijakan Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, dengan proporsi Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp475.880.113.716,15 atau 75,10%, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp54.139.788.029,00 atau 8,54%, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 0,55% dan Belanja Transfer ke pemerintah desa dianggarkan sebesar Rp100.167.941.000,00 atau 15,81% dari total alokasi belanja daerah dan Transfer sebesar Rp633.687.842.745,15.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp595.467.469.590,00 terealisasi sebesar Rp577.533.407.296,13 atau 96,99% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp659.050.245.625,08.

Realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp81.516.838.328,95 atau 12,37% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Sedangkan dari sisi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025, dianggarkan sebesar Rp633.687.842.745,15 terealisasi sebesar Rp574.795.597.609,96 atau 90,70% dibandingkan dengan realisasi belanja dan transfer pada tahun 2024 sebesar Rp662.745.128.607,84 terdapat penurunan sebesar Rp87.949.530.997,90 atau 13,27% dari realisasi belanja dan transfer tahun sebelumnya. Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD beserta realisasi APBD 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Iktisar Realisasi Pendapatan TA. 2025 dan 2024 per SKPD

No	SKPD	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Puskesmas Wairasa	318.000.000,00	250,032.700,00	78,63	171.292.000,00
3	Puskesmas Lendiwacu	167.123.900,00	148.129.000,00	88,63	115.707.400,00
4	Puskesmas Malinjak	249.005.250,00	184.534.500,00	74,11	212.179.000,00
5	Puskesmas Lawonda	432.000.000,00	285.920.400,00	66,19	270.164.000,00
6	Puskesmas Maradesa	159.395.000,00	125.369.900,00	78,65	143.999.900,00
7	Puskesmas Mananga	433.000.000,00	265.649.800,00	61,35	303.102.500,00
8	Puskesmas Weeluri	152.144.600,00	101.784.500,00	66,90	107.068.100,00
9	Puskesmas Pahar	172.000.000,00	108.099.000,00	62,85	140.290.500,00
10	Puskesmas Umbu Riri	102.000.000,00	36.600.000,00	35,88	37.199.500,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	6.738.014.000,00	5.672.288.512,00	84,14	6.222.852.317,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	150.000.000,00	216.865.362,00	144,58	200.208.450,00
13	UPTD Pengelola Air Minum	150.000.000,00	158.147.600,00	105,43	175.254.100,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	42.752.500,00	61,08	48.342.000,00
15	Dinas Perhubungan	110.000.000,00	122.387.000,00	111,26	0,00
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	126.000.000,00	162.001.000,00	128,63	178.384.000,00
17	Dinas Perikanan	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	64.353.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.030.000.000,00	796.386.502,00	77,32	810.228.000,46
19	Dinas Peternakan	2.500.000,00	1.760.000,00	70,40	2.100.000,00
20	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	500.000.000,00	509.163.000,00	101,83	524.380.000,00
21	Bagian Umum	100.000.000,00	94.560.000,00	94.56	60.120.000,00
22	Badan Keuangan Daerah	584.231.286.840,00	568.190.906.020,13	97,25	649.263.020.857,62
TOTAL PENDAPATAN		**595.467.469.590,00**	**577.533.407.296,13**	**96,99**	**659.050.245.625,08**

Tabel 2.11 Iktisar Realisasi Belanja TA. 2025 per SKPD

No.	SKPD	Anggaran TA. 2025	Realisasi TA. 2025	%
1.	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	158,412,167,164.00	151,758,434,136.00	95.80
2.	Dinas Kesehatan	100,785,703,371.00	91,825,759,772.94	91.11
3.	Puskesmas Wairasa	1,745,082,500.00	1,526,720,023.00	87.49
4.	Puskesmas Lendiwacu	1,084,269,900.00	949,181,416.00	87.54
5.	Puskesmas Malinjak	1,806,584,450.00	1,626,790,596.00	90.05
6.	Puskesmas Lawonda	1,673,132,000.00	1,509,189,097.00	90.20

No.	SKPD	Anggaran TA. 2025	Realisasi TA. 2025	%
7.	Puskesmas Maradesa	1,201,023,500.00	1,140,710,488.00	94.98
8.	Puskesmas Mananga	1,852,989,000.00	1,605,688,789.00	86.65
9.	Puskesmas Weeluri	973,415,600.00	872,287,740.00	89.61
10.	Puskesmas Pahar	972,833,000.00	850,554,384.00	87.43
11.	Puskesmas Umbu Riri	1,360,615,000.00	1,283,280,952.00	94.32
12.	Puskesmas Tanambanas	817,841,700.00	756,049,172.00	92.44
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	19,349,707,284.00	16,447,725,750.00	85.00
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43,538,126,292.00	43,002,232,962.00	98.77
15.	UPTD Pengelola Air Minum	970,680,098.00	964,200,127.00	99.33
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,306,051,834.00	3,146,079,092.00	95.16
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3,989,151,770.00	3,673,839,113.00	92.10
18.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,653,961,780.00	3,487,345,786.00	95.44
19.	Dinas Pengendaliaan Penduduk dan Keluarga Berencana	3,602,089,454.00	3,207,004,258.00	89.03
20.	Dinas Lingkungan Hidup	3,783,325,222.00	3,568,482,623.00	94.32
21.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,761,103,764.00	2,571,027,065.00	93.12
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Desa	2,711,872,657.00	2,599,682,796.00	95.86
23.	Dinas Perhubungan	2,107,838,308.00	1,826,339,214.00	86.65
24.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,124,544,180.00	2,082,601,032.00	98.03
25.	Dinas Koperasi, Ukm, Perindustrian dan Perdagangan	4,243,362,556.00	4,114,688,678.00	96.97
26.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3,329,155,831.00	3,160,042,287.00	94.92
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,834,299,520.00	2,611,525,495.00	92.14
28.	Dinas Perikanan	2,636,314,294.00	2,590,749,883.00	98.27
29.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23,953,677,048.00	20,665,896,760.00	86.27
30.	Dinas Peternakan	5,433,931,384.00	5,257,348,420.00	96.75
31.	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1,972,709,504.00	1,968,301,851.00	99.78
32.	UPTD Pembibitan dan Agribisnis	1,144,396,600.00	999,903,000.00	87.37
33.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,056,565,607.00	2,943,840,012.00	96.31
34.	Bagian Pemerintahan	978,132,500.00	955,394,410.00	97.68
35.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	376,007,000.00	372,660,320.00	99.11
36.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5,101,273,000.00	4,013,661,400.00	78.68
37.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	397,620,900.00	388,153,917.00	97.62
38.	Bagian Administrasi Pembangunan	1,285,035,700.00	1,182,804,850.00	92.04
39.	Bagian Umum	16,329,911,823.00	15,930,762,563.00	97.56
40.	Bagian Hukum	306,635,000.00	294,427,000.00	96.02
41.	Bagian Organisasi	513,878,000.00	513,282,342.00	99.88
42.	Sekretariat Dewan	20,167,650,379.00	20,082,240,754.00	99.58

No.	SKPD	Anggaran TA. 2025	Realisasi TA. 2025	%
43.	Kecamatan Katikutana	1,401,827,270.00	1,245,837,123.00	88.87
44.	Kecamatan Mamboro	1,666,698,062.00	1,516,158,960.00	90.97
45.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	1,848,123,061.00	1,697,804,523.00	91.87
46.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1,576,502,756.00	1,491,425,311.00	94.60
47.	Kecamatan Katikutana Selatan	1,376,696,218.00	1,220,674,652.00	88.67
48.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,868,867,360.00	1,754,044,979.00	93.86
49.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	1,598,709,150.00	1,451,797,191.00	90.81
50.	Inspektorat	4,664,597,754.00	4,573,155,928.00	98.04
51.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4,571,032,641.00	4,387,177,638.00	95.98
52.	Badan Keuangan Daerah	16,838,018,529.15	9,069,534,203.00	53.86
53.	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	-	-	0,00
54.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	40,964,162,470.00	31,251,309,387.00	76.29
	Total Belanja	633,687,842,745.15	574,795,597,609.94	90.71

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah dan solusi yang mungkin dilakukan meliputi:

a) Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik;
b) Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/ peningkatan infrastruktur;
c) Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan perbaikan/ peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik;
d) Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur dibidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaan pendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja professional;
e) Kurangnya akurasi informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sehingga informasi tentang dana perimbangan dan dana Bagi Hasil dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah NTT kurang akurat. Kondisi ini perlu komunikasi yang lebih intensif antar para pihak yang berkompeten;
f) Kurang menariknya insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para investor. Solusi masalah ini adalah kreatifitas insentif yang lebih baik dibanding Pemerintah Daerah yang lain, untuk selanjutnya dilakukan promosi yang efektif dalam menarik investor ke Kabupaten Sumba Tengah;
g) Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah; dan
h) Kurangnya pengkajian sumber–sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan:

a) Adanya proses Pembangunan fisik yang tidak bisa di selesaikan karena faktor cuaca/curah hujan yang besar sehingga tidak bisa di realisasikan keuangannya.
b) Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas dan kualitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan. Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:
    1) Mengusahakan kaderisasi SDM baru pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/ instansi lain atau pembinaan secara mandiri;
    2) Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
    3) Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif; dan
    4) Peningkatan dan pengembangan informasi teknologi (IT) untuk menunjang terwujudnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggaraaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
c) Kurang disiplinnya Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan pada anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP). Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, antara lain:
    1) Perlu ditingkatkannya motivasi dan komitmen yang kuat dari Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

2.3.1 *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Sumba Tengah meliputi hal-hal sebagai berikut.

a) *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah kabupaten Sumba Tengah adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, pembangunan baru 5 (lima) unit PUSTU (Puskesmas Pembantu), pembangunan 1 (Satu) unit Kopel paramedis, Rehabilitasi 1 (Satu) Unit PUSTU dan 1 (Satu) unit gedung Puskesmas, pembangunan baru 1 (Satu) unit Laboratorium Kesehatan Masyarakat (LabKesMas).

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 1 RSUD Daerah, 10 Puskesmas, 16 Puskesmas pembantu, 28 Poliklinik Desa. Juga berdampak kepada tenaga kesehatan meliputi dokter 10 orang, perawat 336

orang, bidan 214 orang, Apoteker/asisten Apoteker 20 orang, dan petugas kesehatan lainnya 175 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk T.A. 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp110.183.025.448,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **15,42%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Perubahan T.A. 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp111.950.244.121,00 dari nilai belanja daerah diluar Gaji ASN senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **17,67%**

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Kesehatan	**99,600,254,548.00**	**100,785,703,371.00**
1) BELANJA OPERASI	71,707,966,548.00	71,013,142,248.00
a) Belanja Pegawai	44,123,399,671.00	44,123,399,671.00
b) Belanja Barang dan Jasa	27,584,566,877.00	26,889,742,577.00
c) Belanja Hibah	0,00	0,00
2) BELANJA MODAL	27,892,288,000.00	29,772,561,123.00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,775,791,000.00	4,968,125,000.00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,486,497,000.00	22,574,436,123.00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	630,000,000.00	2,230,000,000.00
b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	**10,582,770,900.00**	**11,164,540,750.00**
1) Belanja Transfer	0,00	0,00
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Wairasa	1,506,365,000.00	1,564,110,000.00
3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Lendiwacu	867,106,900.00	930,144,900.00
4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Mananga	1,535,435,000.00	1,571,339,000.00
5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Lawonda	1,277,163,000.00	1,432,464,000.00
6) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Pahar	773,487,000.00	819,170,000.00
7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Wee Luri	764,760,000.00	878,744,600.00
8) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Maradesa	1,025,237,000.00	1,062,516,000.00
9) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Malinjak	1,567,923,000.00	1,636,128,250.00
10) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Umbu Riri	1,115,294,000.00	1,169,924,000.00
11) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	150,000,000.00	100,000,000.00
Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	110,183,025,448.00	111,950,244,121.00
Total Belanja Daerah	714,528,832,581.00	633,687,842,745.15
Gaji ASN	225,438,330,116.80	226,507,776,102.15
Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	489,090,502,464.20	407,180,066,643.00
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	**22,53%**	**27,49%**

b) *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOS, pembangunan rumah dinas guru, ruang guru/kepala sekolah, laboratorium IPA, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi toilet, pengadaan meubeler sekolah, yang tersebar pada sekolah negeri dan sekolah swasta di Kabupaten Sumba Tengah.

Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional tiga PAUD Negeri, 54 SD Negeri/Inpres, 29 SMP Negeri, 1 pendidikan kesetaraan yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru 2.236 orang dan jumlah peserta didik 20.832 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp155.369.706.440,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **21,74%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp161.879.167.164,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **25,55%.**

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
a. Belanja pada Dinas Pendidikan	**151,364,905,940.00**	**157,541,183,164.00**
1) BELANJA OPERASI	148,658,859,679.00	155,605,377,318.00
a) Belanja Pegawai	121,154,096,674.00	122,938,740,883.00
b) Belanja Barang dan Jasa	19,640,654,005.00	24,652,842,635.00
c) Belanja Hibah	7,864,109,000.00	8,013,793,800.00
2) BELANJA MODAL	2,706,046,261.00	1,935,805,846.00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,228,283,761.00	561,485,696.00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,438,000,000.00	925,393,350.00
c) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39,762,500.00	448,926,800.00
b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	**4,004,800,500.00**	**4,337,984,000.00**
1) Sanggar Kegiatan Belajar	948,800,500.00	856,984,000.00
2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah (Belanja Bantuan Sosial kepada mahasiswa daerah keluarga miskin)	2,346,000,000.00	2,931,000,000.00
3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (Belanja Bantuan Sosial tugas belajar dan ijin belajar PNSD serta mahasiswa ikatan dinas kedokteran)	710,000,000.00	550,000,000.00
Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	155,369,706,440.00	161,879,167,164.00
Total Belanja Daerah	714,528,832,581.00	633,687,842,745.15
Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	**21.74%**	**25.55%**

a) *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah adanya pembangunan jalan dan rehabilitasi jalan kabupaten, rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan dan pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan jembatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp 157.610.554.897,20 dari nilai belanja daerah senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **25,65%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Dalam APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp87.749.893.599,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **16,45%.**

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Insfrastruktur Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Total Belanja Daerah	**714,528,832,581.00**	**633,687,842,745.15**
2	Belanja Bagi Hasil Dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau desa		
	a. Belanja Bagi Hasil	1,329,500,000.00	1,329,500,000.00
	b. Bantuan Keuangan	98,838,441,000.00	98,838,441,000.00
	Jumlah (a+b)	100,167,941,000.00	100,167,941,000.00
3	Selisih (1-2)	614,360,891,581.00	533,519,901,745.15
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	245,744,356,632.40	213,407,960,698.06
5	a) Belanja Modal:	143,099,720,643.20	54,139,788,029.00
	1) Tanah;	0,00	0,00
	2) Peralatan Dan Mesin;	13,414,044,761.00	14,174,662,896.00
	3) Bangunan Dan Gedung;	26,194,497,000.00	23,879,829,473.00
	4) Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;	103,451,416,382.20	15,636,368,860.00
	5) Aset Tetap Lainnya;	39,762,500.00	448,926,800.00
	6) Aset Lainnya.	0,00	0,00
	b) Belanja Pemeliharaan	2,361,618,000.00	2,301,204,516.00
6	1) Belanja Hibah	9,233,216,254.00	9,757,901,054.00
	2) Belanja Bantuan Sosial	2,916,000,000.00	21,551,000,000.00
	3) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (5+6)	**157,610,554,897.20**	**87,749,893,599.00**
	Presentase Belanja Infrastruktur Daerah	**25.65%**	**16.45%**

b) *Mandatory Spending* Fungsi Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* ADD di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah alokasi dana desa yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para perangkat desa, membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Kabupaten Sumba Tengah, alokasi *mandatory spending* ADD membantu kelancaran operasional 65 desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

Sedangkan Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja ADD Dalam APBD Induk dan Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp36.813.730.000,00 dari nilai Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp368.137.289.000,00 atau sebesar **10,00%**.

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Alokasi Dana Desa Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Alokasi Dana Desa	38,362,400,000.00	38,362,400,000.00
2	Perhitungan Dana Perimbangan – Dana Alokasi Khusus	383,623,378,000.00	383,623,378,000.00
3	**Persentase Alokasi ADD**	**10,00%**	**10,00%**

c) *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD sampai dengan Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah memiliki kegiatan berupa Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah memiliki satu Plt. Inspektur, tiga Inspektur Pembantu dan 28 auditor yang melakukan tugas pengawasan.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pegawasan dalam APBD Induk TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp3.027.172.864,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp714.528.832.581,00 atau sebesar **0,42%**.

Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan dalam APBD Perubahan TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah dialokasikan senilai Rp2.337.374.492,00 dari nilai belanja daerah senilai Rp633.687.842.745,15 atau sebesar **0,37%.**

Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan Dalam APBD dan APBD-P TA 2025 Kabupaten Sumba Tengah

No	Komponen Perhitungan	APBD Induk	APBD Perubahan
1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	375.000.000,00	575.000.000,00
2	Reviu Laporan Kinerja	66.358.000,00	86.358.000,00
3	Reviu Laporan Keuangan	65.540.000,00	65.540.000,00
4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15.000.000,00	15.000.000,00
5	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00
6	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	130.000.000,00	110.000.000,00
7	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100.750.000,00	100.750.000,00
8	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	410.000.000,00	410.000.000,00
9	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	110.000.000,00	110.000.000,00
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	74.682.060,00	74.682.060,00
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000,00	140.000.000,00
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.497.280,00	31.497.280,00
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	90.000.000,00
16	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.040.500,00	12.040.500,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.239.780,00	77.239.780,00
20	**Total Alokasi Pengawasan**	**1.883.107.620,00**	**2.103.107.620,00**
21	**Total Belanja Daerah**	**674.249.816.622,00**	**714.620.603.497,91**
22	**Persentase Alokasi Pengawasan**	**0,28%**	**0,29%**

d) Mandatory Spending Hasil Penerimaan PKB/Opsen PKB, PBJT, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah (PAT)

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menerima pendapatan yang berasal dari PKB/Opsen PKB, PBJT atas tenaga listrik, Pajak Rokok sebagai berikut.

1) PKB dan Opsen PKB senilai masing-masing senilai Rp1.428.244.560,00 dan Rp615.900.214,00;
2) PBJT atas Tenaga Listrik senilai Rp804.202.364,00; dan
3) Pajak Rokok senilai Rp7.789.877.352,00.

Tidak terdapat penerimaan Pajak Air Tanah untuk tahun 2025 dan 2024.

Sesuai ketentuan, hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum, hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi

maupun bagian kab/kota paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dan Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum dapat menyajikan penggunaan belanja yang bersumber dana dari penerimaan tersebut, dikarenakan belum melakukan monitoring yang optimal dalam penggunaan belanja per sumber dana. Kedepan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akan lebih serius dan memperhatikan penggunaan belanja per sumber dana agar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

Pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja tahun anggaran 2025 dibandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2024.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun anggaran sebelumnya, walaupun perubahan kinerja positif dimaksud belum begitu signifikan.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp577,533,407,296.13 atau 96,99% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp595,467,469,590.00. Realisasi belanja dan transfer secara keseluruhan sebesar Rp574,795,597,609.94 atau 90,71% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp633,687,842,745.15.

Untuk Belanja Operasi dari alokasi anggaran sebesar Rp.475,880,113,716.15 realisasi sebesar Rp440,801,252,208.94 atau 92,63%. Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp54,139,788,029.00 realisasi sebesar Rp49,184,558,012.00 atau 90,65%. Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp3,500,000,000.00_realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Sedangkan anggaran Transfer yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan dimana Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri atas transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bagi hasil retribusi daerah sedangkan Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas transfer bantuan keuangan ke desa dan transfer bantuan keuangan lainnya dianggarkan sebesar Rp100,167,941,000.00 dengan realisasi sebesar Rp84,809,787,389.00 atau 84,67%.

Untuk Penerimaan Pembiayaan dari target Rp38,220,373,155.15 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 yakni penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan Penerimaan Kembali atas Pemberian Pinjaman Daerah, total realisasi sebesar Rp38,223,289,821.15 atau 100,01%. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp38,220,373,155.15 terealisasi sebesar Rp38,223,289,821.15 atau 100,01%.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

Dalam tahun kedelapan belas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah masih dihadapkan dengan sejumlah hambatan dan kendala dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja pengelolaan Tahun Anggaran 2025 antara lain adalah:

1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pembangunan fisik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan regulasi yang terus berkembang yang menuntut adanya penguasaan terhadap informasi teknologi;
2. Banyaknya kendala terkait Aplikasi penatausahaan keuangan yang menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sekalipun sudah berbasis website;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pejabat Pengelolaan Keuangan di tingkat SKPD belum optimal sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan;
4. Kemampuan atau kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masih belum optimal;
5. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
6. Pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun kesembilan dalam penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual, dimana laporan keuangan yang semula terdiri dari empat laporan bertambah tiga laporan sehingga seluruhnya menjadi tujuh laporan. Dimana penyusunan laporan keuangan berbasis akrual baik di tingkat SKPD maupun PPKD belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka menilai ketertiban laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

Pengungkapan kebijakan akuntansi bertujuan mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Kebijakan Akuntansi mengacu pada Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

4.1 Entitas Pelaporan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos akun laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar kurs/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima berdasarkan SKP-D/SKRD oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah;
3) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah; dan
4) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. PENGUKURAN

1) Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
   a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas
b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro
d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule piutang*) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1) **Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan**

   Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan–LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) **Pendapatan–LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan**

   a) **Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas**

      Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/ Permenkeu/ Pergub/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

   b) **Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas**

      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

b. PENGUKURAN

1) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. PENYAJIAN DAN PENGUKAPAN

1) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
   a) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

a. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU/TU Nihil; dan
3) Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. PENGUKURAN

1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Belanja Operasi;
   b. Belanja Modal; dan
   c. Belanja Tak Terduga.
2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah (Rp). Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

a. PENGAKUAN

1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada:
   a. Saat timbulnya kewajiban;
   b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
9) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
   a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
   b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum

terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan; dan
e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

13) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. PENGUKURAN

1) Beban diukur sesuai dengan:
   a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
   b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. PENYAJIAN DAN PENGUKAPAN

1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
   b. Beban Transfer;
   c. Beban Non Operasional; dan
   d. Beban Luar Biasa.
2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
   a. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
   b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

a. PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama

periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

b. PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
    a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
    b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

d. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

c. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

d. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

a. PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

b. PENGUKURAN

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

   Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

   a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
   b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

   Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Pengukuran investasi jangka panjang
   a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b) Investasi jangka panjang non permanen.
   c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
   d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

c. PERLAKUAN AKUNTANSI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1. Metode biaya
   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
   Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
   Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
   Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
   Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.

d. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanent;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

a. PENGAKUAN

1) Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
   a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
   b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   b) jumlah piutang dapat diukur.
3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
   b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
9) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
10) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
11) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. PENGUKURAN

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
   a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
   c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a) Pemberian pinjaman
      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan

harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   a) **Dana Bagi Hasil** disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   b) **Dana Alokasi Umum** sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan
   c) **Dana Alokasi Khusus**, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
   b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (Dua Belas) bulan berikutnya.
5) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.
7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a) Kualitas Piutang Lancar;
   b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   c) Kualitas Piutang Diragukan; dan
   d) Kualitas Piutang Macet.
9) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   a) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan
   b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.
10) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:
   a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
      (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
      (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pmeriksaan; dan/atau

(3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
(4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
(5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
(1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
(3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
(4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
(1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
(3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
(4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(4) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

11) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
(3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
(4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
(1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
(1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
(3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
(1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
(2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
(3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*.

12) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan/tahun;
b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan/tahun;
c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan/tahun; dan
d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan/tahun.

13) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

14) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
   a) Kualitas Piutang lancar taksiran piutang tak tertagih 0,5%;
   b) Kualitas Piutang kurang lancar taksiran piutang tak tertagih 10%;
   c) Kualitas Piutang taksiran piutang tak tertagih 50%; dan
   d) Kualitas Piutang taksiran piutang tak tertagih 100%.

c. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
   a) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
   b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c) Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
   a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
   b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
   a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
   b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
   a) 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
   b) 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c) 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
5) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
6) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
7) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas

piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3) Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4) Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
5) Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
   a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
   b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
   c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
8) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
9) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
10) Kriteria Penghapus tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
   a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;

b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
d) Penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hokum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
g) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapus bukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnyakesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicilteratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*

e. PENGUNGKAPAN

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
   d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3) Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. PENGAKUAN

1) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2) Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan sebagai berikut:
   a) Pendekatan beban

Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

b) Pendekatan aset

Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan obat-obatan, bahan kimia dan bahan makanan.

b. PENGUKURAN

1) Persediaan disajikan sebesar:
   a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
   b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksidan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
   c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*armlengthtransaction*).
2) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
3) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/ Metode Harga Pembelian Terakhir.
4) Persediaan dicatat dengan metode berikut:
   a) Metode perpetual

   Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan lain sebagainya.
   b) Metode periodic

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stockopname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

c. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari asset lancar.

d. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. PENGAKUAN

1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Berwujud;
   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2) Pengakuan asset tetap akan andal bila asset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat.

b. PENGUKURAN

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Biaya perolehan suatu asset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
3) Sebuah asset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru yang batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
   a) Pengeluaran untuk per satuan alat angkutan dan alat berat yang sama dengan atau lebih besar dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   b) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat yang sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
   c) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan/ternak, tanaman, dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
   d) Aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan sama dengan atau lebih besar dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5) Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, di kecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung serta jalan, irigasi dan jaringan.
6) Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan yang ditetapkan sebagai Aset Tetap adalah:

Tabel 4.1. Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

Uraian	Jumlah Harga per Unit (Rp)
Peralatan dan Mesin	
Alat Berat	≥500.000,00
Alat Angkutan	≥500.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	≥500.000,00
Alat- alat Pertanian dan Peternakan	≥500.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	≥500.000,00
Alat Studio dan Komunikasi	≥500.000,00
Alat- alat Kedokteran	≥500.000,00
Alat-alat Laboratorium	≥500.000,00
Alat Keamanan	≥500.000,00
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung	≥10.000.000,00
Monumen	≥10.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	≥10.000.000,00
Jalan dan Jembatan	≥10.000.000,00
Bangunan Air/Irigasi	≥10.000.000,00
Instalasi	≥10.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	
Buku dan Perpustakaan	≥100.000,00
Barang Bercorak Kebudayaaan	≥300.000,00
Hewan dan Ternak serta Tanaman	≥300.000,00

c. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

1) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan di kelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2) Bila asset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

d. PENYUSUTAN

1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*depreciableassets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
   a) Peralatan dan Mesin;
   b) Gedung dan Bangunan;
   c) Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
   d) Aset Tetap Lainnya berupa buku/barang perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.
4) Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi.
5) Aset tetap yang direklasifikan kedalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
   a) Tanah;
   b) Konstruksi dalam Pengerjaan;
   c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
   d) Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

7) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.
8) Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
9) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.
10) Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{PENYUSUTAN} = \frac{\textbf{NILAI PEROLEHAN}}{\textbf{MASA MANFAAT}}$$

11) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa asset tetap tidak memiliki nilai residu.

e. KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.
2) Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun asset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.
3) Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.
4) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
   a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
5) Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.
6) Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
   a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
   b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
7) Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
8) Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.

f. PENGUNGKAPAN

1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
(1) penambahan;
(2) pelepasan;
(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
(4) mutasi aset tetap lainnya.

2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
e) Retensi

4) Jika asset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b) Tanggal efektif penilaian kembali;
c) Jika ada, nama penilai independen; dan
d) Hak ikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.4.11 Kebijkan Akuntansi Aset Lainnya

a. PENGAKUAN

1) Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
b) Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

2) Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

4) Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5) Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6) Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:
   a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
   b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8) Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 10 tahun.
9) Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

c. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
4. Informasi lainnya yang penting.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. PENGAKUAN

1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2) Kewajiban dapat timbul dari:
   a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-relatedevents*); dan
   d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
4) Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

5) Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
8) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
9) Utang Beban, diakui pada saat:
   a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
   b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
   c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
10) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
   a) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
   b) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
   c) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13) Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

b. PENGUKURAN

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6) Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7) Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9) Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

c. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1) Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
   c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
      (1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
         (a) Pengurangan pinjaman;
         (b) Modifikasi persyaratan utang;
         (c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
         (d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
         (e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
         (f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
      (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
      (3) Biaya pinjaman:
         (a) Perlakuan biaya pinjaman;
         (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
         (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 belum mempunyai Kebijakan Akuntansi Tertentu.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp577.533.407.296,13 atau 96,99% dari target yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp595.467.469.590,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.516.838.328,95 atau 12,37% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp659.050.245.625,08.

Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan TA 2025 dan 2024

Pendapatan	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Lebih/ (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	23.958.459.218,00	23.085.656.010,36	(872.803.207,64)	96,36	24.236.012.419,50
Pendapatan Transfer	561.408.707.201,00	545.105.020.037,00	(16.303.687.164,00)	97,10	629.340.026.908,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.100.303.171,00	9.342.731.248,77	(757.571.922,23)	92,50	5.474.206.297,58
Jumlah	**595.467.469.590,00**	**577.525.374.096,13**	**(17.934.062.293,87)**	**96,99**	**659.050.245.625,08**

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok dan jenis pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dijelaskan dibawah ini.

5.1.1.a Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp23.085.656.010,36 atau 96,36% dari target yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp23.958.459.218,00. Terdapat penurunan atas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp1.150.356.409,14 atau 4,77% bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.236.012.419,50.

5.1.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp4.924.214.886,00	**Rp5.473.094.162,67**	**Rp7.611.248.292,61**

Pendapatan Pajak Daerah LRA direncanakan sebesar Rp4.924.214.886,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp5.473.094.162,67 atau

111,15%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.611.248.292,61 dengan penurunan sebesar Rp2.138.154.129,94 atau 28,09%. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	57.500.000,00	126.447.452,30	219,91	21.530.000,00
2	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.084.792.959,94	101,08	1.156.268.216,00
3	Pajak Reklame	15.000.000,00	12.722.525,00	84,82	240.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	650.000.000,00	804.202.364,00	123,72	734.526.302,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	1.200.237.200,43	160,03	4.496.885.788,61
6	PBB-P2	850.000.000,00	666.123.841,00	78,37	933.467.124,00
7	BPHTB	270.000.000,00	183.851.515,00	68,09	268.330.862,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	861.631.605,00	615.900.214,00	71,48	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	470.083.281,00	778.816.091,00	165,68	0,00
Jumlah		**4.924.214.886,00**	**5.473.094.162,67**	**111,15**	**7.611.248.292,61**

Apabila dirujuk kepada piutang pajak, yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB P2 dan BPHTB, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maka terdapat sejumlah realisasi yang merupakan pelunasan atas saldo per 31 Desember 2024 dan pelunasan atas penetapan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. Realisasi Penerimaan atas Piutang Pajak TA 2025 dan Penetapan TA 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi atas Saldo Piutang TA 2024 (Rp)	Realisasi atas Penetapan TA 2025 (Rp)	Jumlah Realisasi TA 2025 (Rp)
1	PBB-P2	850.000.000,00	242.589.299,00	423.534.542,00	666.123.841,00
Jumlah		**850.000.000,00**	**242.589.299,00**	**423.534.542,00**	**666.123.841,00**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 18 September 2025, penjelasan per akun Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- **Pajak Hotel**
  Penerimaan pajak hotel sebesar Rp126.447.452,30 berasal dari kegiatan penginapan kegiatan pelatihan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Transmigrasi, Penanaman Modal dan PTSP, pajak hotel Bintang Waibakul dan pajak hotel Villa Ajna.

- **Pajak Restoran**
  Penerimaan pajak restoran sebesar Rp1.084.792.959,94 berasal dari Pajak warung/rumah makan juga minum yang disetor oleh SKPD, Sekolah, dan Desa dimana bersumber dari kegiatan-kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk juga pajak makan dan minum dari warung makan yang sudah terdata berdasarkan surat ketetapan pajak daerah atas belanja makan dan minum pada warung tersebut yang disetor ke

Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% dari jumlah belanja makanan dan minuman.

- **Pajak Reklame**
  Penerimaan pajak reklame sebesar Rp12.722.525,00 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 berasal dari pengurusan pajak reklame kain/sunscreen rokok dan stiker berupa brand rokok, papan reklame merek dan thin plat, billboard, dan reklame neon sign/neon box yang ada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

- **Pajak Penerangan Jalan**
  Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp804.202.364,00 berasal dari pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut dari pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan menyetorkannya ke Kas Pendapatan Daerah yaitu ke Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun Anggaran 2025 ini jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) melewati target sebesar Rp154.202.364,00.
  Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Sumba Tengah berasal dari penjualan tenaga listrik rumah tangga dan bisnis selama Tahun Anggaran 2025. Penerimaan ini merupakan mekanisme kerja sama Perusahan Listrik Negara (PLN) dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**
  Penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp1.200.237.200,43 berasal dari pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan fisik yang dilakukan melalui proyek pemerintah baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipungut oleh petugas palang untuk lokasi Patembu, Guara Mamboro, Wawarongu dan Lowa.

- **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2)**
  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2) sebesar Rp666.123.841,00 berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan sektor perkotaan di Kabupaten Sumba Tengah dari 64 desa dan 1 kota pada 6 kecamatan. Penerimaan PBB–P2 sebesar Rp666.123.841,00 berasal dari pembayaran atas:
  a. PBB–P2 sampai dengan Tahun 2002 sebesar Rp1.000,00,
  b. PBB–P2 Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp1.319.882,00,
  c. PBB–P2 Tahun 2013 sebesar Rp995.987,00,
  d. PBB–P2 Tahun 2014 sebesar Rp627.358,00,
  e. PBB–P2 Tahun 2015 sebesar Rp481.200,00,
  f. PBB–P2 Tahun 2016 sebesar Rp487.100,00,
  g. PBB–P2 Tahun 2017 sebesar Rp377.636,00,
  h. PBB–P2 Tahun 2018 sebesar Rp230.350,00,
  i. PBB–P2 Tahun 2019 sebesar Rp377.036,00,
  j. PBB–P2 Tahun 2020 sebesar Rp490.896,00,
  k. PBB–P2 Tahun 2021 sebesar Rp931.336,00,
  l. PPB–P2 Tahun 2022 sebesar Rp112.912,00,
  m. PPB–P2 Tahun 2023 sebesar Rp235.998,00,
  n. PPB–P2 Tahun 2024 sebesar Rp235.920.608,00 dan
  o. PBB–P2 Tahun 2025 sebesar Rp423.534.542,00.

- **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
  Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp183.851.515,00 berasal dari transaksi jual beli tanah oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Tengah yaitu pada Desa Anakalang, Desa Ngadu Mbolu, Desa Umbu Mamijuk, Desa Lenang, Desa Wendewa Selatan, Desa Wairasa, Desa Tana Modu, Desa Kabelawuntu, Desa Konda Maloba, Desa Dasa Elu dan Desa Wendewa Utara.

- **Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**
  Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp615.900.214,00 berasal pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana wilayah pungutan Opsen PKB berdasarkan tempat kendaraan bermotor terdaftar.

- **Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**
  Penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp778.816.091,00 berasal pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana wilayah pungutan Opsen BBNKB berdasarkan tempat kendaraan bermotor terdaftar.

5.1.1.a.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp3.125.736.000,00	Rp3.076.072.445,00	Rp2.314.742.567,46

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

Retribusi Daerah LRA direncanakan sebesar Rp3.125.736.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp3.076.072.445,00 atau sebesar 98,41%. Hal ini berarti lebih besar dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.314.742.567,46 dengan peningkatan sebesar Rp761.329.877,54 atau 32,89%. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	**Retribusi Jasa Umum**				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	15.350.000,00	30,70	20.725.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	738.014.000,00	862.407.481,00	116,86	188.160.017,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.000.000,00	40.469.500,00	101,17	30.714.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	122.387.000,00	111,26	52.468.000,00
5	Retribusi Los	0,00	0,00	0,00	7.239.000,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium	15.000.000,00	2.283.000,00	15,22	12.728.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	130.222.000,00	128.852.000,00	98,95	103.712.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	1.165.000.000,00	924.504.102,00	79,36	990.382.100,46
4	Retribusi Penyediaan Fasilitasi/ Pertokoan yang Dikontrakkan	120.000.000,00	162.001.000,00	135,00	117.573.000,00

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa-Bibit atau Benih Tanaman	30.000.000,00	30.030.000,00	100,10	0,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah- Bibit Ternak	500.000.000,00	509.163.000,00	101,83	524.380.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah-Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00	60.000.000,00	80,00	64.353.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Selain Bibit Atau Benih Tanaman, Ternak, Dan Ikan	2.500.000,00	1.760.000,00	70,40	2.100.000,00
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**				
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	150.000.000,00	216.865.362,00	144,58	200.208.450,00
Jumlah		**3.125.736.000,00**	**3.076.072.445,00**	**98,41**	**2.314.742.567,46**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanggal 18 September 2025, penjelasan per akun retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**
  Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp15.350.000,00 adalah retribusi jasa umum pada yang dikelola oleh Puskesmas yang berasal dari pembayaran atau penyetoran oleh pasien yang melakukan pengobatan pada puskesmas yaitu :
  - Puskesmas Lawonda sebesar Rp950.000,00,
  - Puskesmas Lendiwacu sebesar Rp325.000,00,
  - Puskesmas Mananga sebesar Rp825.000,00,
  - Puskesmas Maradesa sebesar Rp975.000,00,
  - Puskesmas Wairasa sebesar Rp10.400.000,00, dan
  - Puskesmas Weeluri sebesar Rp1.875.000,00

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**
  Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp862.407.481,00 adalah retribusi jasa umum yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul berasal dari pembayaran atau penyetoran tunai dan non tunai oleh pasien yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul yang bukan merupakan tanggungan BPJS.

- **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**
  Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp40.469.500,00 adalah retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup atas penyediaan tempat sampah dan pengangkutan sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah.

- **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**
  Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp122.387.000,00 berasal dari pemungutan parkir yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025. Retribusi jasa umum ini dikelola oleh Dinas Perhubungan yang berasal dari pungutan tempat parkir di lokasi Pasar Waibakul dan Pasar Mananga Mamboro.

- **Retribusi Los**
  Retribusi Los sebesar Rp0,00 adalah retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian pada yang berada pada Pasar Waibakul-Kecamatan Katikutana dan Pasar Mananga-Kecamatan Mamboro sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.239.000,00.

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium**
  Retribusi pemakaian kekayaan daerah-laboratorium sebesar Rp2.283.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa penerimaan dari hasil kegiatan laboratorium pengujian kualitas air.

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan**
  Retribusi pemakaian kekayaan daerah–pemakaian ruangan sebesar Rp128.852.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Bagian Umum sebesar Rp94.560.000,00 merupakan pemungutan retribusi atas sewa ruangan pada gedung alfa dan omega dan sebesar Rp34.292.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas sewa Kantor Unit Simpan Pinjam Daerah (USPD) Mamboro dan pemakaian ruangan ATM pada RSUD Waibakul oleh Bank NTT Cabang Anakalang TA 2025.

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat**
  Retribusi pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sebesar Rp924.504.102,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui UPTD Pengelola Air Minum Rp158.147.600,00 merupakan pemungutan retribusi atas pelayanan air bersih dan air minum dari SPAM Waipalu, SPAM Laigoli, SPAM Sotu dan SPAM Mamboro dan retribusi sewa alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor besar dan mesin potong padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT sebesar Rp766.356.502,00.

- **Retribusi Penyediaan Fasilitasi/ Pertokoan yang Dikontrakkan**
  Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoaan yang Dikontrakkan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp162.001.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas pengelolaan sepuluh los pasar sebesar Rp122.689.000,00 yang berada pada Pasar Waibakul-Kecamatan Katikutana, Pasar Mananga-Kecamatan Mamboro, Pasar Maderi-Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Pasar Maradesa-Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Pasar Ole Ate-Kecamatan Mamboro, Pasar Sambali Loku-Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Pasar Tanambanas-Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Pasar Candana-Kecamatan Mamboro, Pasar Weluk Praimemang-Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan Pasar Lenang-Kecamatan Umbu Ratu Nggay dan retribusi pelayanan pasar-kios sebesar Rp39.312.000,00 yang berada pada Pasar Waibakul-Kecamatan Katikutana, Pasar Mananga-Kecamatan Mamboro, Pasar Ole Ate-Kecamatan Mamboro.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman**
  Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp30.030.000,00 dari targer sebesar Rp30.000.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan retribusi atas penjualan kopi dari kebun kebun dinas yang berlokasi di Oka Wacu Kecamatan Katikutana Selatan Kabupaten Sumba Tengah.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah-Bibit Ternak**
  Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah-bibit ternak sebesar Rp509.163.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Peternakan melalui UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak sebesar Rp322.158.000,00 merupakan retribusi atas penjualan hasil

telur ayam (ayam petelur), dan sebesar Rp187.005.000,00 merupakan retribusi atas penjualan hasil penjualan Ayam Joper, Ayam Afkir dan Ayam Ras.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah-Bibit atau Benih Ikan**
  Retribusi penjualan produksi usaha daerah-bibit atau benih ikan sebesar Rp60.000.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Perikanan merupakan retribusi atas penjualan benih ikan di Balai Benih Ikan (BBI) Prailiang.

- **Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan**
  Retribusi penjualan produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebesar Rp1.760.000,00 adalah retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atas pungutan retribusi penjualan DOC.

- **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**
  Retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp216.865.362,00 adalah retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pungutan pemberian izin mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

5.1.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp4.671.142.115,00	**Rp4.671.142.115,00**	**Rp2.759.129.716,00**

Selain Pajak dan Retribusi Daerah, bagian laba Badan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan Daerah dari keuntungan/laba bersih Badan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang disetor ke Kas Daerah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA direncanakan sebesar Rp4.671.142.115,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp4.671.142.115,00 atau 100%. Hal ini berarti lebih tinggi dari pendapatan di tahun 2024 sebesar Rp2.759.129.716,00 dengan peningkatan sebesar Rp1.912.012.399,00 atau 69,30%. Realisasi atas akun penerimaan merupakan deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT.

5.1.1.a.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp11.237.366.217,00	**Rp9.865.347.287,69**	**Rp11.550.891.843,43**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LRA direncanakan sebesar Rp11.237.366.217,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp9.865.347.287,69 atau sebesar 87,79%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.550.891.843,43 dengan penurunan sebesar Rp1.685.544.555,74 (14,59) %. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	86.341.000,00	86.341.000,00	100,00	665.539.500,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	300.000.000,00	327.073.953,69	109,02	525.164.779,88

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000,00	70.000,00	1,17	1.104.000,00
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	850.000.000,00	1.029.800.827,04	121,15	897.842.577,52
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.750.000.000,00	1.723.252.261,41	98,47	1.729.132.476,29
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	302,00	354.885,84	117.511,87	219.687,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	303.650.869,31	303,65	129.184.182,37
8	Pendapatan Denda Pajak	10.344.645,00	39.879.365,40	385,51	37.483.376,02
9	Pendapatan Denda Retribusi	11.520,00	11.520,00	100,00	1.116.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	54.261.774,00	100,00	49.135.064,35
11	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.134.668.750,00	6.300.650.831,00	77,45	7.514.970.200,00
Jumlah		**11.237.366.217,00**	**9.865.347.287,69**	**87,79**	**11.550.891.843,43**

Penjelasan per akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

- **Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan**

  Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp86.341.000,00 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan penerimaan atas hasil penjualan aset tetap (lelang kendaraan dinas) yang dilaksanakan pada Tahun 2025.

- **Jasa Giro Kas Daerah**

  Jasa giro kas daerah di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp327.073.953,69 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas penerimaan jasa giro dari rekening giro Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rekening giro Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas, rekening giro Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul, rekening giro pajak penerangan jalan, rekening giro dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rekening giro Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang ditampung pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

- **Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir**

  Hasil dari pengelolaan dana bergulir di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp70.000,00 yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas pengembalian bunga dari dana bergulir yang digulirkan pada Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2022.

- **Pendapatan Bunga Deposito**

  Pendapatan bunga deposito di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.029.800.827,04 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas penerimaan bunga deposito dari tiga deposito yaitu pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebanyak dua buah deposito dan pendapatan bunga atas remunerasi DBH TDF. Bunga deposito yang diperoleh dari tiga deposito ini berbeda-beda sesuai dengan jumlah uang yang didepositokan dengan suku bunga dari 6,25%-8,50%. Untuk bunga deposito yang didepositokan di PT. BPD NTT langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sumba Tengah

- **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

  Tuntutan ganti kerugian daerah di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.723.252.261,41 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sumba Tengah atas penerimaan kerugian daerah atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK), Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah.

- **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

  Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp354.885,84 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) kelebihan pembayaran atas pajak dan denda pajak serta retribusi.

- **Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

  Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp303.650.869,31 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas penerimaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada pekerjaan fisik yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik pada Tahun Anggaran 2025 berasal dari pekerjaan pengadaan barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan.

- **Pendapatan Denda Pajak**

  Pendapatan denda pajak di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp39.879.365,40 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah atas denda:

  a. Pajak hotel sebesar Rp372.635,00,
  b. Pajak restoran (makan dan minum) sebesar Rp2.857.332,40,
  c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp1.635.511,00,
  d. PBB-P2 sebesar Rp31.744.800,00
  e. Opsen PKB sebesanr Rp2.276.522,00, dan
  f. Opsen BBNKB sebesar Rp992.565,00.

- **Pendapatan Denda Retribusi**

  Pendapatan denda retribusi di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.520,00 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas denda retribusi Pasar Mamboro.

- **Pendapatan dari Pengembalian**

  Pendapatan dari pengembalian di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp54.261.774,00 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

- **Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**

  Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan adalah pendapatan dana kapitasi JKN di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp6.300.650.831,00 merupakan pendapatan dana non kapitasi klaim BPJS yang di kelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul sebesar Rp4.809.881.031,00 dan non kapitasi yang dikelola oleh puskesmas sebesar Rp1.490.769.800,00. Dana non kapitasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul dan dana non kapitasi untuk 9 (sembilan) Puskesmas di transfer dari BPJS ke rekening penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah kemudian dipindahbukukan ke rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumba Tengah dan ke Rekening Kapitasi yang dikelola di Dinas Kesehatan kemudian dipindahbukukan ke Rekening Pendapatan Asli Daerah sesuai peruntukan tiap Puskesmas.

5.1.1.b Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LRA direncanakan sebesar Rp561.408.707.201,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp545.105.020.037,00 atau 97,10%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp629.340.026.908,00 dengan penurunan sebesar Rp84.235.006.871,00 atau 13,38%. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**				
a	Dana Bagi Hasil	2.508.055.000,00	3.397.020.000,00	135,44	3.489.469.000,00
b	Dana Alokasi Umum	337.161.768.620,00	333.239.140.981,00	98,84	360.608.063.101,00
c	Dana Alokasi Khusus	129.451.039.753,00	127.079.261.684,00	98,17	167.484.659.257,00
	Sub Jumlah	**469.120.863.373,00**	**463.715.422.665,00**	**98,85**	**531.582.191.358,00**
2	**Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya**				
a	Dana Desa	60.476.241.000,00	49.898.385.740,00	82,51	65.947.240.000,00
b	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	14.068.155.000,00	100,00	12.929.007.000,00
	Sub Jumlah	**74.544.396.000,00**	**63.966.540.740,00**	**85,81**	**78.876.247.000,00**
3	**Transfer Antar Daerah**				
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	17.743.447.828,00	17.223.056.632,00	97,07	18.881.588.550,00
b	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	Sub Jumlah	**17.743.447.828,00**	**17.423.056.632,00**	**98,19**	**18.881.588.550,00**
Jumlah		**561.408.707.201,00**	**545.105.020.037,00**	**97,10**	**629.340.026.908,00**

5.1.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

5.1.1.b.1.a Dana Bagi Hasil

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp2.508.055.000,00	**Rp3.397.020.000,00**	**Rp3.489.469.000,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak LRA direncanakan sebesar Rp2.508.055.000,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp3.397.020.000,00 atau 135,44%. Hal ini berarti lebih kecil dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.489.469.000,00 dengan penurunan sebesar Rp92.449.000,00 atau 2,65%. Adapun rincian Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.7. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	**DBH Pajak**				
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	334.463.030,00	740.257.900,00	221,32	789.859.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	930.478.660,00	1.309.613.100,00	140,74	1.039.312.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	28.992.000,00	43.488.000,00	150,00	32.405.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	56.509.310,00	136.497.000,00	241,54	100.634.000,00
Jumlah A		**1.350.443.000,00**	**2.229.856.000,00**	**165,00**	**1.962.210.000,00**
B	**DBH SDA**				
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	36.625.000,00	44.636.000,00	121,87	32.343.000,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	11.000,00	1.081.000,00	9.827,27	683.000,00
3	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	9.058.000,00	9.529.000,00	105,20	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.111.918.000,00	1.111.918.000,00	100,00	1.494.233.000,00
Jumlah B		**1.157.612.000,00**	**1.167.164.000,00**	**101,00**	**1.527.259.000,00**
	Jumlah (A + B)	**2.508.055.000,00**	**3.397.020.000,00**	**135,44**	**3.489.469.000,00**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan per akun penerimaan adalah sebagai berikut:

- **Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp334.463.030,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp740.257.900,00 terdiri dari realisasi DBH PBB untuk Prov/Kab/Kota Migas dan Non Migas, DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Prov/Kab/Kota Migas dan Non Migas dan DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke Kab/Kota serta DBH TDF Pokok.

- **Bagi Hasil PPh Pasal 21**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp930.478.660,00 dan realisasi transfer DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp1.309.613.100,00.

- **Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp28.992.000,00 dan realisasi transfer DBH PPh Pasal 25/29 WPOPDN sebesar Rp43.488.000,00.

- **Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (CHT)**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp56.509.310,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp136.497.000,00.

- **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp36.625.000,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp44.636.000,00.

- **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent***
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.000,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp1.081.000,00.

- **DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp9.058.000,00 dan realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp9.529.000,00.

- **Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan**
  Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.111.918.000,00 terdiri atas realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum (RKUD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp1.111.918.000,00.

		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
5.1.1.b.1.b	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Rp337.161.768.620,00**	**Rp333.239.140.981,00**	**Rp360.608.063.101,00**

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) LRA direncanakan sebesar Rp337.161.768.620,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2025 seluruhnya sebesar Rp333.239.140.981,00 atau 98,84%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp360.608.063.101,00 dengan penurunan sebesar Rp27.368.922.120,00 atau 7,59%. Adapun rincian pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.8. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	283.289.641.620,00	288.629.729.620,00	101,89	265.769.689.000,00
2	DAU Bidang Kesehatan	5.652.852.000,00	5.652.852.000,00	100,00	17.324.378.000,00
3	DAU Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	30.465.566.000,00
4	DAU Bidang Pendidikan	18.297.263.000,00	18.297.263.000,00	100,00	38.308.975.000,00
5	DAU Penggajian Formasi PPPK	29.922.012.000,00	20.659.296.361,00	69,04	8.739.455.101,00
Jumlah		**337.161.768.620,00**	**333.239.140.981,00**	**98,84**	**360.608.063.101,00**

5.1.1.b.1.c Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp129.451.039.753,00	**Rp127.079.261.684,00**	**Rp167.484.659.257,00**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) LRA direncanakan sebesar Rp129.451.039.753,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp127.079.261.684,00 atau 98,17%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp167.484.659.257,00 dengan penurunan sebesar Rp40.405.397.573,00 atau 24,12%. Adapun rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik TA 2025 dan 2024

NO	URAIAN		Transfer TA.2025 Rp	Transfer TA.2024 Rp
A	**DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**		**48.566.299.405,00**	**112.784.340.291,00**
	1	Bidang Pendidikan PAUD	249.684.995,00	515.503.384,00
	2	Bidang Pendidikan SD	223.603.592,00	1.857.855.398,00
	3	Bidang Pendidikan SMP	414.195.795,00	5.596.385.808,00
	4	Bidang Kesehatan dan KB-KB	0,00	189.993.887,00
	5	Bidang Pertanian Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	12.935.668.350,00
	6	Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	3.807.887.750,00
	7	Bidang Jalan	0,00	44.625.717.750,00
	8	Bidang Air Minum	12.926.380.900,00	14.096.539.700,00
	9	Bidang Sanitasi	4.999.654.000,00	6.370.016.000,00
	10	Bidang Irigasi	0,00	5.039.676.000,00
	11	Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	9.519.227.364,00
	12	Bidang Transportasi Perdesaan	0,00	8.229.868.900,00
B	**DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK**		**78.512.962.279,00**	**54.700.318.966,00**
	1	BOSP Reguler	14.300.449.350,00	14.571.324.000,00
	2	BOSP Kinerja	755.000.000,00	767.500.000,00
	3	Tunjangan Profesi Guru	29.406.438.900,00	14.580.387.000,00
	4	Tambahan Penghasilan Guru	320.750.000,00	1.319.210.000,00
	5	Tunjangan Khusus Guru	8.161.017.060,00	7.105.670.000,00
	6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.858.555.100,00	2.485.775.000,00
	7	BOP Pendidikan Kesetaraan	179.684.800,00	137.360.000,00

NO	URAIAN		Transfer TA.2025	Transfer TA.2024
			Rp	Rp
	8	BOKKB-BOK	6.914.830.361,00	4.465.664.894,00
	9	BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	232.204.000,00	0,00
	10	BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.264.542.136,00	7.378.592.869,00
	11	BOKKB-Bantuan Operasional KB	615.009.572,00	1.238.835.203,00
	12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00
	13	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.447.115.000,00	0,00
	14	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	656.706.000,00	650.000.000,00
JUMLAH			**127.079.261.684,00**	**167.484.659.257,00**

Rincian realisasi transfer Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada **Lampiran 1 dan Lampiran 1a.**

5.1.1.b.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

5.1.1.b.2.a Dana Desa

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp60.476.241.000,00	**Rp49.898.385.740,00**	**Rp65.947.240.000,00**

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.476.241.000,00 dan realisasi penerimaannya sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya sebesar Rp49.898.385.740,00 atau 82,51% dari target anggaran Tahun Anggaran 2025. Dana Penyesuaian berupa Dana Desa ini untuk 65 (enam puluh lima) desa pada enam kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Rincian dana desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 2** laporan realisasi penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah dan **Lampiran 2a** Laporan Realiasasi penyaluran Dana Desa ke Rekening Desa**.**

5.1.1.b.2.b Insentif Fiskal

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp14.068.155.000,00	**Rp14.068.155.000,00**	**Rp12.929.007.000,00**

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14.068.155.000,00 dan realisasinya penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran seluruhnya sebesar Rp14.068.155.000,00 atau 100,00% mengalami peningkatan sebesar Rp1.139.148.000,00 atau 8,81% dibandingkan dengan penerimaan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.929.007.000,00.

5.1.1.b.3 Transfer Pemerintah Provinsi

5.1.1.b.3.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp17.743.447.828,00	**Rp17.223.056.632,00**	**Rp18.881.588.550,00**

Pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp17.743.447.828,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 seluruhnya sebesar Rp17.223.056.632,00 atau 97,07%. Hal ini berarti lebih rendah dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.881.588.550,00 dengan penurunan sebesar Rp1.658.531.918,00 atau 8,78%. Adapun rincian pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.10. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.712.784.757,00	1.428.244.560,00	83,38	3.492.243.475,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.527.267.058,00	1.527.267.058,00	100,00	1.886.466.699,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.561.367.033,00	6.475.262.449,00	98,68	5.935.973.021,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.282.479,00	2.405.213,00	105,37	2.337.546,00
5	Pajak Rokok	7.939.746.501,00	7.789.877.352,00	98,11	7.564.567.809,00
Jumlah		**17.743.447.828,00**	**17.223.056.632,00**	**97,07**	**18.881.588.550,00**

Realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.223.056.632,00. Sedangkan piutang Tahun Anggaran 2024 sudah ditransfer sebesar Rp4.303.551.746,00 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 31 Oktober 2025 dan tanggal 18 Desember 2025. Apabila dirujuk kepada piutang transfer pemerintah daerah lainnya pada neraca, maka terdapat sejumlah realisasi yang merupakan pelunasan atas saldo per 31 Desember 2024 dan pelunasan atas penetapan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.11. Realisasi Penerimaan atas Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Tahun 2024 dan Penetapan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi atas Saldo Piutang 2024 (Rp)	Realisasi atas Penetapan 2025 (Rp)	Jumlah Realisasi TA 2025 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.712.784.757,00	1.428.244.560,00	0,00	1.428.244.560,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.527.267.058,00	1.527.267.058,00	0,00	1.527.267.058,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.561.367.033,00	1.347.675.831,00	5.127.586.618,00	6.475.262.449,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.282.479,00	364.297,00	2.040.916,00	2.405.213,00
5	Pajak Rokok	7.939.746.501,00	0,00	7.789.877.352,00	7.789.877.352,00
Jumlah		**17.743.447.828,00**	**4.303.551.746,00**	**12.919.504.886,00**	**17.223.056.632,00**

5.1.1.b.3.b Bantuan Keuangan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp0,00	**Rp200.000.000,00**	**Rp0,00**

Pendapatan bagi hasil lainnya merupakan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00% dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.1.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

5.1.1.c.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp10.100.303.171,00	**Rp9.342.731.248,77**	**Rp5.474.206.297,58**

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp9.342.731.248,77 atau 92,50% dari target Anggaran sebesar Rp10.100.303.171,00 terdiri dari realisasi atas pengembalian sisa dana hibah Pilkada tahun 2024 sebesar Rp4.542.111.414,00 dan realisasi atas dana kapitasi sebesar Rp4.800.619.834,77.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengalokasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk sembilan puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.558.191.757,00 dan terealisasi sebesar Rp4.800.619.834,77 atau 86,37%. Sedangkan pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.474.206.297,58.

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp574.795.597.609,94 atau 90,71% dari yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp633.687.842.745,15. Terdapat penurunan atas realisasi Belanja Daerah sebesar Rp87.949.530.997,90 atau 13,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp662.745.128.607,84. Dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.12. Realisasi Anggaran per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	157.541.183.164,00	150.909.818.936,00	95,79	143.822.005.722,00
2.	Sanggar Kegiatan Belajar	870.984.000,00	848.615.200,00	97,43	915.177.980,00
3.	Dinas Kesehatan	100.785.703.371,00	91.825.759.772,94	91,11	73.208.378.520,00
4.	Puskesmas Wairasa	1.745.082.500,00	1.526.720.023,00	87,49	1.420.075.910,00
5.	Puskesmas Lendiwacu	1.084.269.900,00	949.181.416,00	87,54	944.218.305,00
6.	Puskesmas Malinjak	1.806.584.450,00	1.626.790.596,00	90,05	1.488.124.233,00
7.	Puskesmas Lawonda	1.673.132.000,00	1.509.189.097,00	90,20	1.331.000.197,00
8.	Puskesmas Maradesa	1.201.023.500,00	1.140.710.488,00	94,98	1.039.821.680,00
9.	Puskesmas Mananga	1.852.989.000,00	1.605.688.789,00	86,65	1.499.226.731,00
10.	Puskesmas Weeluri	973.415.600,00	872.287.740,00	89,61	828.143.061,00
11.	Puskesmas Pahar	972.833.000,00	850.554.384,00	87,43	1.087.117.549,00
12.	Puskesmas Umbu Riri	1.360.615.000,00	1.283.280.952,00	94,32	1.076.483.999,00
13.	Puskesmas Tana Mbanas	817.841.700,00	756.049.172,00	92,44	193.056.000,00
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.349.707.284,00	16.447.725.750,00	85,00	19.112.310.313,00
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.538.126.292,00	43.002.232.962,00	98,77	113.320.842.184,00
16.	UPTD Pengelola Air Minum	970.680.098,00	964.200.127,00	99,33	1.184.455.920,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	3.989.151.770,00	3.673.839.113,00	92,10	5.126.911.123,00
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.868.867.360,00	1.754.044.979,00	93,86	2.397.453.356,50
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.653.961.780,00	3.487.345.786,00	95,44	3.941.931.269,00
20.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.602.089.454,00	3.207.004.258,00	89,03	4.303.398.894,00
21.	Dinas Lingkungan Hidup	3.783.325.222,00	3.568.482.623,00	94,32	4.187.247.568,00
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.761.103.764,00	2.571.027.065,00	93,12	3.327.249.117,00
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.711.872.657,00	2.599.682.796,00	95,86	2.865.882.901,00
24.	Dinas Perhubungan	2.107.838.308,00	1.826.339.214,00	86,65	2.623.238.630,00
25.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.124.544.180,00	2.082.601.032,00	98,03	2.852.843.026,00

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
26.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4.243.362.556,00	4.114.688.678,00	96,97	4.133.014.002,00
27.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.834.299.520,00	2.611.525.495,00	92,14	3.641.603.019,34
28.	Dinas Perikanan	2.636.314.294,00	2.590.749.883,00	98,27	7.262.747.279,00
29.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.329.155.831,00	3.160.042.287,00	94,92	4.134.739.454,00
30.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	23.953.677.048,00	20.665.896.760,00	86,27	22.405.274.265,00
31.	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	1.972.709.504,00	1.968.301.851,00	99,78	447.456.200,00
32.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.433.931.384,00	5.257.348.420,00	96,75	9.094.660.988,00
33.	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.144.396.600,00	999.903.000,00	87,37	1.432.798.270,00
34.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.056.565.607,00	2.943.840.012,00	96,31	2.758.221.178,00
35.	Bagian Tata Pemerintahan	978.132.500,00	955.394.410,00	97,68	912.409.582,00
36.	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	376.007.000,00	372.660.320,00	99,11	542.858.990,00
37.	Bagian Kesejahteraan Sosial	5.101.273.000,00	4.013.661.400,00	78,68	5.858.368.763,00
38.	Bagian Perekonomian	397.620.900,00	388.153.917,00	97,62	1.086.207.396,00
39.	Bagian Administrasi Pembangunan	1.285.035.700,00	1.182.804.850,00	92,04	1.062.987.576,00
40.	Bagian Umum	16.329.911.823,00	15.930.762.563,00	97,56	14.014.729.553,00
41.	Bagian Hukum	306.635.000,00	294.427.000,00	96,02	616.216.590,00
42.	Bagian Organisasi	513.878.000,00	513.282.342,00	99,88	445.359.512,00
43.	Inspektorat	4.664.597.754,00	4.573.155.928,00	98,04	4.274.022.779,00
44.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.571.032.641,00	4.387.177.638,00	95,98	6.769.257.658,00
45.	Badan Keuangan Daerah	113.505.959.529,15	93.879.321.592,00	82,71	112.280.299.205,00
46.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	40.964.162.470,00	31.251.309.387,00	76,29	6.905.690.614,00
47.	Sekretariat DPRD	20.167.650.379,00	20.082.240.754,00	99,58	22.816.140.619,00
48.	Kecamatan Katiku Tana	1.401.827.270,00	1.245.837.123,00	88,87	1.629.816.453,00
49.	Kecamatan Mamboro	1.666.698.062,00	1.516.158.960,00	90,97	1.720.514.709,00
50.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	1.848.123.061,00	1.697.804.523,00	91,87	1.598.657.676,00
51.	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.576.502.756,00	1.491.425.311,00	94,60	1.630.120.687,00
52.	Kecamatan Katiku Tana Selatan	1.376.696.218,00	1.220.674.652,00	88,67	1.561.995.056,00
53.	Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah	1.598.709.150,00	1.451.797.191,00	90,81	1.565.081.938,00
54.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.306.051.834,00	3.146.079.092,00	95,16	26.047.284.408,00
Total Belanja		**633.687.842.745,15**	**574.795.597.609,94**	**90,71**	**662.745.128.607,84**

5.1.2.a Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp440.801.252.208,94 atau 92,63% dari yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp475.880.113.716,15. Terdapat peningkatan atas realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.907.185.278,44 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp438.894.066.930,50. Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
5.1.2.a.1	Belanja Pegawai	**Rp277.794.002.749,15**	**Rp256.553.382.060,00**	**Rp213.986.839.398,00**

Jumlah sebesar Rp256.553.382.060,00 merupakan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp277.794.002.749,15 atau 92,35% mengalami peningkatan

sebesar Rp42.566.542.662,00 atau 19,89% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp213.986.839.398,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.13. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	Gaji dan Tunjangan	226.507.776.102,15	208.008.399.672,00	91,83	180.191.231.212,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	42.857.349.845,00	40.231.166.018,00	93,87	769.850.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	23.661.479.749,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.179.743.428,00	7.153.474.790,00	99,63	7.307.723.981,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	232.843.374,00	158.851.580,00	68,22	33.674.456,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.880.000,00	387.880.000,00	100,00	281.820.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	628.410.000,00	613.610.000,00	97,64	1.741.060.000,00
TOTAL BELANJA		**277.794.002.749,15**	**256.553.382.060,00**	**92,35**	**213.986.839.398,00**

Dari tabel diatas dapat dirinci dan dijelaskan hal-hal terkait belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- **Gaji dan Tunjangan**

  Gaji dan tunjangan per 31 Desember 2025 dibayarkan sebesar Rp208.008.399.672,00 kepada 4059 (empat ribu lima puluh sembilan) Aparatur Sipil Negara yang bekerja di 18 (delapan belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 8 (delapan) bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 6 (enam) Kecamatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 3 (tiga) UPTD, 22 (dua puluh dua) Taman Kanak - Kanak, 88 (delapan puluh delapan) Sekolah Dasar, 34 (tiga puluh empat) Sekolah Menengah Pertama. Realisasi gaji dan tunjangan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.14. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan per SKPD Tahun Aggaran 2025 dan 2024

NO	Nama SKPD	Realiasi TA. 2025 (RP)	Realiasi TA. 2024 (RP)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	76.473.510.624,00	77.027.661.363,00
2	Dinas Kesehatan	42.869.454.853,00	41.139.649.198,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.012.930.794,00	3.954.020.034,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.753.338.415,00	1.764.238.138,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	720.695.401,00	692.944.066,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.566.524.816,00	1.515.768.019,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.303.642.633,00	1.301.231.668,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.448.577.693,00	1.526.747.962,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.793.216.701,00	1.857.211.902,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.483.915.375,00	1.476.638.008,00
11	Dinas Perhubungan	1.236.279.997,00	1.213.291.642,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.361.376.718,00	1.343.320.678,00
13	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2.607.639.942,00	2.639.399.192,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.432.324.298,00	1.562.886.146,00
15	Dinas Perikanan	1.742.016.147,00	1.705.168.292,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.013.910.449,00	2.026.174.904,00
17	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.953.070.730,00	9.982.023.264,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.504.575.771,00	3.573.891.816,00
19	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.646.260.451,00	1.658.637.218,00
20	Sekretariat Daerah	5.148.031.643,00	5.309.151.892,00

NO	Nama SKPD	Realiasi TA. 2025 (RP)	Realiasi TA. 2024 (RP)
21	Inspektorat	2.243.699.819,00	2.173.152.034,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.853.390.467,00	1.810.905.397,00
23	Badan Keuangan Daerah	2.827.725.150,00	2.840.746.720,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	29.193.907.626,00	1.848.345.743,00
25	Sekretariat DPRD	1.168.295.904,00	1.150.835.903,00
26	Kecamatan Katiku Tana	754.226.196,00	906.677.753,00
27	Kecamatan Mamboro	941.102.871,00	1.023.939.642,00
28	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	993.932.353,00	1.034.821.366,00
29	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	893.509.751,00	935.417.227,00
30	Kecamatan Katiku Tana Selatan	875.760.770,00	987.804.146,00
31	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	900.827.515,00	881.277.276,00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.290.727.799,00	1.327.252.603,00
	Jumlah	**208.008.399.672,00**	**180.191.231.212,00**

- **Tambahan Penghasilan PNS**
  Tambahan penghasilan PNS per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.231.166.018,00 adalah realisasi pembayaran atas bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, pengurus barang, Tim ULP dan Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, Survei Penilaian Integritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi & Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi serta Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp619.344.500,00, pembayaran atas biaya pemungutan pajak Daerah sebesar Rp110.607.598,00, biaya pemungutan retribusi daerah sebesar Rp129.411.560,00, pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp30.890.035.300,00, tunjangan khusus guru sebesar Rp8.161.017.060,00, dan tambahan penghasilan guru sebesar Rp320.750.000,00.

- **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**
  Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbanguan objektif lainnya ASN per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.661.479.749,00.

- **Gaji dan Tunjangan DPRD**
  Gaji dan tunjangan DPRD per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.153.474.790,00 adalah realisasi pembayaran atas gaji dan tunjangan Pimpinan adan anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 20 Orang.

- **Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**
  Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember 2025 sebesar Rp158.851.580,00 adalah realisasi pembayaran atas gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah.

- **Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**
  Penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH per 31 Desember 2025 sebesar Rp387.880.000,00 adalah realisasi pembayaran atas belanja penunjang operasional KDH/WKDH sebesar Rp277.000.000,00 dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD atas 1 (satu) orang pimpinan DPRD dan 2 (dua) wakil pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00.

- **Belanja Pegawai BOS**

Belanja pegawai BOS per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp613.610.000,00 adalah realisasi belanja pegawai BOS pada Sekolah Dasar (SD) Negeri sebesar Rp0,00 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp613.610.000,00.

5.1.2.a.2	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		Rp166.777.209.913,00	**Rp153.880.944.644,94**	**Rp190.482.106.032,50**

Jumlah sebesar Rp153.880.944.644,94 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp166.777.209.913,00 atau 92,27%. Terdapat penurunan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp36.601.161.387,56 atau 19,22% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp190.482.106.032,50 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.15. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
I	**Barang/persedian**				
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	148.313.607,00	147.311.187,00	99,32	341.962.805,50
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.284.390.000,00	1.272.722.139,00	99,09	1.317.566.278,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.920.723.200,00	2.745.235.998,00	93,99	2.334.257.518,00
4	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	902.580.000,00	901.266.523,00	99,85	275.581.000,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	180.000.000,00
6	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.429.725.827,00	8.883.381.900,00	94,21	7.705.552.360,00
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.551.270.000,00	1.510.436.256,00	97,37	1.211.544.000,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.101.200.000,00	1.099.713.029,00	99,86	107.500.000,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	100.000.000,00	99.983.250,00	99,98	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00	16.935.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.937.513.900,00	2.934.272.544,00	99,89	1.939.606.347,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.265.552.900,00	2.227.033.354,00	98,30	4.555.189.120,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	46.650.000,00	46.650.000,00	100,00	43.970.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	264.891.553,00	264.857.866,00	99,99	416.616.494,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	15.000.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	250.000,00	250.000,00	100,00	42.300.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	398.000.000,00	398.000.000,00	100,00	199.700.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	388.790.500,00	374.071.768,00	96,21	961.674.900,00
19	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.109.144.000,00	3.108.390.441,00	99,98	1.513.527.936,00
20	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.383.875.000,00	2.308.185.513,00	96,82	3.142.530.626,00
21	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.480.222.500,00	6.062.035.528,00	93,55	16.605.735.244,00
22	Belanja Natura dan Pakan-Natura	813.400.000,00	791.920.000,00	97,36	1.174.396.700,00
23	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
24	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.705.555.000,00	6.516.621.500,00	97,18	6.781.203.000,00
25	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.578.000.000,00	1.577.985.000,00	100,00	1.097.000.000,00
26	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	802.664.000,00	717.426.889,00	89,38	651.228.755,00

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
27	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	408.360.000,00	405.432.567,00	99,28	638.818.670,00
28	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	69.960.000,00	66.760.000,00	95,43	74.000.000,00
29	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	10.000.000,00	9.962.000,00	99,62	4.995.000,00
30	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
31	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.400.000,00	180.393.200,00	100,00	155.144.700,00
32	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00	105.700.000,00
33	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	84.000.000,00	83.994.400,00	99,99	115.485.840,00
34	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.900.000,00	50.550.000,00	77,89	0,00
35	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	61.000.000,00	60.989.300,00	99,98	52.392.000,00
36	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	130.000.000,00	129.600.000,00	99,69	26.862.000,00
37	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	23.750.000,00
38	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.200.000,00	32.194.200,00	99,98	29.304.000,00
39	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	56.080.000,00
40	Belanja Pakaian Paskibraka	320.265.000,00	318.986.250,00	99,60	647.370.400,00
41	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	185.934.934,00	185.934.500,00	100,00	0,00
42	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	30.000.000,00	29.942.250,00	99,81	0,00
43	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000,00	34.700.000,00	99,14	0,00
44	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	0,00
45	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	492.000.000,00	453.885.000,00	92,25	438.675.000,00
46	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	45.000.000,00	44.680.000,00	99,29	15.000.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	147.933.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	2.210.000,00	2.210.000,00	100,00	0,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	255.000.000,00	254.910.000,00	99,96	166.555.500,00
51	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	295.376.550,00
52	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	447.220.000,00	436.258.200,00	97,55	410.465.000,00
53	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	408.055.000,00	407.903.850,00	99,96	0,00
54	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	0,00	0,00	0,00	28.999.860,00
55	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	13.280.000,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	2.844.750.000,00	1.115.767.680,00	39,22	1.211.400.000,00
57	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
58	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	50.000.000,00	49.952.000,00	99,90	49.999.395,00
59	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	331.530.495,00	331.530.495,00	100,00	170.727.000,00
60	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	449.682.987,00	449.682.987,00	100,00	299.458.500,00
61	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	13.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
62	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	34.995.969,00
63	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	37.514.000,00	37.353.165,00	99,57	149.905.500,00
64	Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	218.710.800,00
65	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
66	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	1.016.342.850,00
67	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.330.000.000,00
68	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00	228.000.000,00
69	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00
70	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	106.270.900,00	106.270.900,00	100,00	52.400.000,00
II	**Belanja Jasa**				
71	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.860.730.000,00	1.601.220.000,00	86,05	2.088.250.000,00
72	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	874.270.000,00	807.600.000,00	92,37	2.304.015.000,00
73	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00	97.200.000,00
74	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	800.400.000,00	753.500.000,00	94,14	62.500.000,00
75	Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00	0,00	0,00	400.000,00
76	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	37.650.000,00	37.650.000,00	100,00	250.120.000,00
77	Honorarium Penyelenggara Ujian	14.040.000,00	14.040.000,00	100,00	12.675.000,00
78	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	109.200.000,00	84.550.000,00	77,43	1.382.875.000,00
79	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	455.450.000,00	451.945.000,00	99,23	369.600.000,00
80	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3.714.350.000,00	3.676.146.580,00	98,97	592.280.000,00
81	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.697.945.604,00	13.863.265.120,94	83,02	16.659.634.605,00
82	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	111.645.000,00	79.800.000,00	71,48	121.175.000,00
83	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.570.580.104,00	1.486.130.104,00	94,62	2.049.995.669,00
84	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	20.400.000,00	19.650.000,00	96,32	75.000.000,00
85	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	732.100.000,00	695.500.000,00	95,00	571.600.000,00

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
86	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.419.850.000,00	15.135.885.856,00	98,16	23.059.800.000,00
87	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.756.100.000,00	1.614.821.400,00	91,95	5.552.061.006,00
88	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	844.800.000,00	801.910.000,00	94,92	781.330.000,00
89	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	41.500.000,00
90	Belanja Jasa Tata Rias	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	16.500.000,00
91	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	84.000.000,00	42.000.000,00	50,00	41.625.000,00
92	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
93	Belanja Jasa Kalibrasi	81.360.000,00	72.646.000,00	89,29	199.500.000,00
94	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
95	Belanja Tagihan Air	67.400.000,00	65.700.000,00	97,48	81.300.000,00
96	Belanja Tagihan Listrik	1.003.950.000,00	911.974.100,00	90,84	957.368.400,00
97	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00
98	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.451.250.000,00	1.386.546.533,00	95,54	1.151.437.513,00
99	Belanja Paket/Pengiriman	142.000.000,00	118.659.311,00	83,56	32.863.500,00
100	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	479.750.000,00	310.818.119,00	64,79	217.235.291,00
101	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	28.800.000,00	28.626.000,00	99,40	490.499.479,00
102	Belanja Lembur	2.290.546.000,00	2.250.513.000,00	98,25	2.740.284.157,00
103	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	71.289.420,00	71,29	16.271.855,00
104	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
105	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.109.900.000,00	1.095.500.000,00	98,70	0,00
106	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	76.200.000,00	72.150.000,00	94,69	0,00
107	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
108	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	691.900.000,00	681.777.392,00	98,54	0,00
110	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	8.123.976.000,00	5.065.781.200,00	62,36	6.571.205.000,00
111	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.417.355.765,00	1.211.437.266,00	85,47	1.238.029.361,00
112	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	67.410.598,00	65.888.357,00	97,74	83.118.371,00
113	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	83.768.017,00	82.294.572,00	98,24	103.870.370,00
114	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	390.000.000,00	390.000.000,00	100,00	0,00
115	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	265.200.000,00	265.200.000,00	100,00	0,00
116	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	25.000.000,00
117	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	700.000,00
118	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	223.600.000,00	213.610.000,00	95,53	117.200.000,00
119	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	59.600.000,00
120	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	170.100.000,00	170.100.000,00	100,00	193.900.000,00
121	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	2.000.000,00
122	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.340.000,00	179.153.500,00	99,34	139.750.000,00
123	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
124	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
125	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63.500.000,00	51.500.000,00	81,10	120.100.000,00
126	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	115.500.000,00	100.500.000,00	87,01	191.950.000,00
127	Belanja Sewa Hotel	198.600.000,00	98.600.000,00	49,65	146.200.000,00
128	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	33.055.000,00	33.055.000,00	100,00	30.479.000,00
129	Belanja Sewa Musik Lainnya	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	75.000.000,00
130	Belanja Sewa Alat Musik	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	34.000.000,00
131	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	45.000.000,00
132	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	39.930.000,00
133	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	1.426.674.000,00
134	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	44.850.000,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
136	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	80.000.000,00
137	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	210.000.000,00	205.819.900,00	98,01	261.216.200,00
138	Belanja Sosialisasi	2.035.500.000,00	1.943.550.000,00	95,48	1.703.997.270,00
139	Belanja Bimbingan Teknis	2.097.217.931,00	1.807.920.431,00	86,21	691.810.600,00
140	Belanja Diklat Kepemimpinan	188.500.000,00	188.500.000,00	100,00	0,00
141	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	171.250.000,00	171.250.000,00	100,00	238.200.000,00
III	**Belanja Pemeliharaan**				
142	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	35.000.000,00	34.408.000,00	98,31	34.563.000,00
143	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.000.000,00	35.627.502,00	98,97	17.700.000,00
144	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	410.000.000,00	259.925.000,00	63,40	163.782.500,00
145	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	132.500.000,00	127.040.000,00	95,88	118.185.000,00
146	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00
147	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
148	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
149	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	163.500.000,00	161.076.500,00	98,52	348.800.136,00
150	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	98.304.500,00	89.999.500,00	91,55	103.227.000,00
151	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	31.000.000,00
152	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90.000.000,00	89.175.000,00	99,08	0,00
153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

NO	BELANJA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
154	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	141.210.016,00	63.146.000,00	44,72	60.948.000,00
155	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	170.000.000,00	169.862.400,00	99,92	69.900.000,00
156	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	50.000.000,00	49.112.600,00	98,23	30.016.400,00
157	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
158	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	275.000.000,00	274.977.000,00	99,99	299.783.000,00
159	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00
160	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	333.190.000,00	333.082.000,00	99,97	1.700.834.603,00
161	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	19.000.000,00	18.994.000,00	99,97	32.892.000,00
162	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	45.000.000,00
163	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	150.000.000,00	149.880.000,00	99,92	0,00
164	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
165	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Unggas	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	52.000.000,00
IV	**Belanja Perjalanan Dinas**				
166	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.902.139.171,00	30.737.853.070,00	96,35	40.596.912.087,00
167	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	199.960.000,00
168	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	480.000.000,00	479.470.334,00	99,89	489.955.983,00
V	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**				
169	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	441.650.000,00	440.650.000,00	99,77	377.900.000,00
170	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	61.125.000,00	29.250.000,00	47,85	7.750.000,00
VI	**Belanja Barang dan Jasa BOSP**				
171	Belanja Barang dan Jasa BOSP	8.426.413.904,00	8.624.647.948,00	102,35	7.782.614.059,00
	JUMLAH	**166.777.209.913,00**	**153.880.944.644,94**	**92,27**	**190.482.106.032,50**

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.1.16. Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun Aggaran 2025 dan 2024

NO	Nama SKPD	Realiasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	24.632.458.039,00	25.805.909.369,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	834.615.200,00	746.577.980,00
3	Dinas Kesehatan	22.628.298.569,94	23.876.691.573,00
4	Puskesmas Wairasa	1.526.720.023,00	1.408.675.910,00
5	Puskesmas Lendiwacu	949.181.416,00	932.818.305,00
6	Puskesmas Malinjak	1.626.790.596,00	1.476.424.233,00
7	Puskesmas Lawonda	1.509.189.097,00	1.319.000.197,00
8	Puskesmas Maradesa	1.106.810.488,00	1.028.421.680,00
9	Puskesmas Mananga	1.605.688.789,00	1.487.226.731,00
10	Puskesmas Weeluri	872.287.740,00	817.343.061,00

NO	Nama SKPD	Realiasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
11	Puskesmas Pahar	850.554.384,00	1.074.517.549,00
12	Puskesmas Umbu Riri	1.283.280.952,00	1.065.383.999,00
13	Puskesmas Tana Mbanas	756.049.172,00	187.056.000,00
14	Rumah Sakit Umum Daerah	13.138.484.218,00	15.637.974.544,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.775.592.948,00	15.855.602.580,00
16	UPTD Pengelola Air Minum	950.400.127,00	824.450.420,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.901.600.698,00	3.329.222.985,00
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.033.349.578,00	1.656.105.290,50
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.920.820.970,00	2.385.213.250,00
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.870.446.625,00	2.526.883.339,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	2.112.484.930,00	2.530.336.906,00
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	757.830.364,00	1.340.098.715,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.049.270.481,00	1.381.444.893,00
24	Dinas Perhubungan	584.559.217,00	1.394.346.988,00
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	656.254.314,00	1.502.322.348,00
26	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.402.555.923,00	1.471.014.810,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.125.501.197,00	1.464.020.555,00
28	Dinas Perikanan	816.333.736,00	4.240.293.887,00
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.146.131.838,00	1.963.353.750,00
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.677.130.530,00	12.262.290.101,00
31	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	1.959.301.851,00	117.606.200,00
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.734.772.649,00	5.470.669.172,00
33	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	949.953.000,00	1.401.498.270,00
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.261.297.561,00	1.091.583.960,00
35	Bagian Tata Pemerintahan	955.394.410,00	879.709.582,00
36	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	372.660.320,00	472.114.990,00
37	Bagian Kesejahteraan Sosial	894.661.400,00	1.052.368.763,00
38	Bagian Perekonomian	388.153.917,00	1.079.557.396,00
39	Bagian Administrasi Pembangunan	971.374.550,00	758.037.576,00
40	Bagian Umum	6.945.063.728,00	6.815.281.161,00
41	Bagian Hukum	294.427.000,00	609.016.590,00
42	Bagian Organisasi	513.282.342,00	438.359.512,00
43	Inspektorat	2.088.306.109,00	1.813.470.745,00
44	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.461.387.172,00	4.821.602.261,00
45	Badan Keuangan Daerah	5.976.459.067,00	5.402.624.716,00
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.637.401.761,00	4.466.844.871,00
47	Sekretariat DPRD	10.999.867.683,00	13.830.606.005,00
48	Kecamatan Katiku Tana	491.610.927,00	680.921.200,00
49	Kecamatan Mamboro	534.606.089,00	688.775.067,00
50	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	503.892.170,00	556.636.310,00
51	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	588.915.560,00	685.153.460,00
52	Kecamatan Katiku Tana Selatan	344.913.882,00	566.390.910,00
53	Kecamatan Umbu Ratunggay Tengah	527.825.298,00	461.909.062,00
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.384.744.039,00	3.330.346.305,00
	JUMLAH	**153.880.944.644,94**	**190.482.106.032,50**

5.1.2.a.3 Belanja Hibah	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp9.757.901.054,00	**Rp9.226.925.504,00**	**Rp30.093.121.500,00**

Jumlah sebesar Rp9.226.925.504,00 merupakan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp9.757.901.054,00 atau 94,56%. Nilai tersebut menurun sebesar Rp20.866.195.996,00 atau 69,34% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp30.093.121.500,00. Belanja hibah per 31 Desember 2025 terdiri atas

- Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp469.107.254,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- Hibah BOP PAUD masyarakat/swasta sebesar Rp2.765.725.100,00,
- Hibah BOP Kesetaraan sebesar Rp114.684.800,00,
- Hibah dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebesar Rp5.278.408.350,00 terdiri dari
  - Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.005.050.350,00,
  - Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp1.273.358.000,00, dan
- Hibah kepada Lembaga lain sebesar Rp599.000.000,00 pada Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. Rincian belanja hibah di Tahun Anggaran 2025 untuk belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17. Realisasi Belanja Hibah Organisasi Politik dan Realisasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Penerima Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	75.743.646,00	75.743.646,00	61.046.500,00
2.	PDI-Perjuangan	60.254.887,00	60.254.887,00	45.978.000,00
3.	Partai Solidaritas Indonesia	63.748.894,00	63.748.894,00	34.874.000,00
4.	Partai Nasdem	72.918.989,00	72.918.989,00	55.502.000,00
5.	Partai Hanura	36.814.250,00	36.814.250,00	37.108.000,00
6.	Partai Golkar	39.143.588,00	39.143.588,00	34.545.500,00
7.	Partai Gerindra	60.228.113,00	60.228.113,00	39.267.500,00
8.	Partai Perindo	31.044.453,00	31.044.453,00	9.738.000,00
9.	Partai Demokrat	29.210.434,00	29.210.434,00	42.165.500,00
10.	Partai Keadilan Sejahtera	0,00	0,00	21.240.500,00
11.	Partai Bulan Bintang	0,00	0,00	14.806.000,00
JUMLAH		**469.107.254,00**	**469.107.254,00**	**396.271.500,00**

Tabel 5.1.17.a. Realisasi Belanja Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025

No	Penerima Hibah	Realisasi (Rp)
1	GKS Waikalaisung	50.000.000,00
2	Pramuka	100.000.000,00
3	KONI	115.000.000,00
4	GKS Liangu Dowu	75.000.000,00
5	GKS Anamanu	50.000.000,00
6	Yayasan Pendidikan Masehi di Sumba (YAPMAS)	25.000.000,00
7	Palang Merah Indonesia Sumba Tengah	50.000.000,00
8	Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumba Tengah	10.000.000,00
9	Stasi Kristus Raja Mamboro (Stasi Yakobus Dasaelu)	50.000.000,00
10	Panitia Pacuan Kuda Bupati Cup	35.000.000,00

No	Penerima Hibah	Realisasi (Rp)
11	Beasiswa Miskin Angkatan Tahun 2024 Tahap IV	39.000.000,00
TOTAL		**599.000.000,00**

Belanja hibah di Tahun Anggaran 2025 untuk BOP PAUD masyarakat/swasta adalah dua tahap yaitu tahap pertama berjumlah 138 Satuan Pendidikan sebesar Rp1.427.445.000,00 dan tahap kedua berjumlah 133 Satuan Pendidikan sebesar Rp1.338.280.100,00 yg terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Rincian belanja hibah BOP PAUD masyarakat/swasta dan BOP Kesetaraan dapat dilihat dalam **Lampiran 3**.

Belanja hibah pada Tahun Anggaran 2025 untuk BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta (SD dan SMP Swasta) terdiri dari 32 SD Swasta dan 5 SMP Swasta. Rincian Belanja hibah BOS Satuan Pendidikan Dasar Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 4**

		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
5.1.2.a.4	**Belanja Bantuan Sosial**	**Rp21.551.000.000,00**	**Rp21.140.000.000,00**	**Rp4.332.000.000,00**

Jumlah sebesar Rp21.140.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp21.551.000.000,00 atau 98,09%. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp16.808.000.000,00 atau 388,00% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp4.332.000.000,00. Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 terdiri atas belanja bantuan sosial kepada masyarakat, keluarga dan organisasi sosial kemasyarakatan. Rincian belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.18. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025

NO	Nama SKPD	Penerima Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bantuan Rumah Mandiri	18.200.000.000,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Beasiswa Miskin (Belanja Batuan Uang)	2.520.000.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Biaya Pendidikan Lanjutan ASN dan Ikatan Dinas TA. 2024	420.000.000,00
		TOTAL	**21.140.000.000,00**

5.1.2.b Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp49.184.558.012,00 atau 90,85% dari target anggaran sebesar Rp54.139.788.029,00. Nilai realisasi tersebut menurun sebesar Rp71.212.664.012,34 atau 59,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp120.264.375.442,34. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

		Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
5.1.2.b.1	**Belanja Peralatan dan Mesin**	**Rp14.174.662.896,00**	**Rp13.379.171.304,00**	**Rp13.143.410.114,45**

Jumlah sebesar Rp13.379.171.304,00 merupakan realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp14.174.662.896,00 atau 94,39%. Mengalami peningkatan sebesar Rp235.761.189,55 atau 1,79% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.143.410.114,45.

Pada belanja peralatan dan mesin ada penambahan belanja modal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp435.718.033,00 dengan rincian Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebesar Rp300.426.582,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebesar Rp135.291.451,00.

Belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2025 tersebar pada 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.19. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	108.158.400,00	1.167.531.300,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	14.000.000,00	0,00
3	BOS	435.718.033,00	424.337.500,00
4	Dinas Kesehatan	4.937.290.000,00	3.934.823.828,00
5	Puskesmas Maradesa	22.500.000,00	0,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	3.241.543.532,00	2.250.457.482,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	140.500.000,00
8	UPTD Pengelola Air Minum	0,00	14.650.000,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	10.500.000,00	23.450.000,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	37.854.000,00
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	31.500.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.915.000,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	114.962.700,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.980.000,00	119.788.500,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	7.000.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66.496.940,00	0,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	64.970.000,00	0,00
18	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	13.174.035,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.500.000,00	370.305.074,45
20	Dinas Perikanan	19.800.000,00	1.295.385.100,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	133.960.800,00
22	UPTD Mekanisasi, Perbenihan Dan POPT	9.000.000,00	329.500.000,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	34.000.000,00
24	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.082.000,00	0,00
25	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	25.600.000,00
26	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	0,00	61.944.000,00
27	Bagian Administrasi Pembangunan	48.635.800,00	52.500.000,00
28	Bagian Umum	3.427.334.600,00	1.682.796.500,00
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	62.799.999,00	123.900.000,00
30	Badan Keuangan Daerah	100.423.400,00	54.445.500,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	21.100.000,00
32	Sekretariat DPRD	553.765.187,00	401.504.730,00
33	Kecamatan Katiku Tana	0,00	33.917.500,00
34	Kecamatan Mamboro	40.450.000,00	0,00
35	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	59.990.000,00	0,00
36	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	23.144.378,00	214.695.600,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	41.000.000,00
	TOTAL	**13.379.171.304,00**	**13.143.410.114,45**

Untuk realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp435.718.033,00 ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan rincian per sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.20. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dari Dana BOS

Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	SD Negeri Laimajori	6.500.000,00	6.000.000,00
2	SD Negeri Waisumar	2.700.000,00	0,00
3	SD Negeri Anakalang	2.800.000,00	0,00
4	SD Negeri Dameka	8.000.000,00	0,00
5	SD Negeri Maloba	6.750.000,00	0,00
6	SD Inpres Taupopu	4.090.796,00	0,00
7	SD Negeri Liangu Dowu	18.871.006,00	14.000.000,00
8	SD Negeri Taman Mas	2.000.000,00	8.500.000,00
9	SD Negeri Karanggirowa	8.990.796,00	0,00
10	SD Negeri Kapalas	10.700.000,00	0,00
11	SD Negeri Waihibur	32.620.796,00	10.250.000,00
12	SD Inpres Piduwacu	17.000.000,00	15.200.000,00
13	SD Inpres Madidi Palamedu	1.950.000,00	11.500.000,00
14	SD Negeri Utapambapang	2.500.000,00	0,00
15	SD Negeri Praimahala	7.000.000,00	8.000.000,00
16	SD Negeri Waiurang	4.500.000,00	5.600.000,00
17	SD Inpres Waicimung	1.500.000,00	0,00
18	SD Inpres Lokulalang	0,00	16.500.000,00
19	SD Inpres Yerara	1.000.000,00	9.190.000,00
20	SD Negeri Mangacu Api	31.200.000,00	15.000.000,00
21	SD Negeri Kamberalaja	10.600.000,00	6.000.000,00
22	SD Negeri Praiwunga	10.000.000,00	6.000.000,00
23	SD Inpres Praikamaru	10.280.000,00	0,00
24	SD Inpres Sawirara	3.000.000,00	9.000.000,00
25	SD Inpres Binawatu	6.490.797,00	0,00
26	SD Negeri Wee Pabowi	7.000.000,00	7.000.000,00
27	SD Negeri Paleti	0,00	10.000.000,00
28	SD Negeri Wee Paboba	0,00	9.500.000,00
29	SD Inpres Uma Paohi	0,00	15.600.000,00
30	SD Negeri Ngadu Mbolu	0,00	12.000.000,00
31	SD Negeri Pahar	5.860.797,00	0,00
32	SD Negeri Ngadu Mbolu	3.450.000,00	0,00
33	SD Negeri Waimangu	8.100.000,00	0,00
34	SD Negeri Anarita	2.500.000,00	7.000.000,00
35	SD Negeri Parideta	7.500.000,00	0,00
36	SD Negeri Karungguwacu	10.350.798,00	8.885.000,00
37	SD Negeri Pantai Maloba	9.000.000,00	7.000.000,00
38	SD Negeri Manurara	0,00	9.193.000,00
39	SD Negeri Watulade	0,00	10.750.000,00
40	SD Negeri Holur Kambata	0,00	9.750.000,00
41	SD Negeri Tamadesa	11.380.000,00	0,00
42	SD Negeri Wai Kahomba	4.690.796,00	24.900.000,00
43	SD Negeri Wanno Mema	10.350.000,00	0,00
44	SD Negeri Jambamoni	3.700.000,00	13.050.000,00
45	SD Negeri Maharang	3.000.000,00	0,00
46	SD Negeri Manuk	2.500.000,00	0,00

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
47	SMPN 1 Waibakul	15.250.000,00	32.149.500,00
48	SMPN 2 Waibakul	10.935.817,00	18.500.000,00
49	SMPN 3 Waibakul	3.000.000,00	0,00
50	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Barat	7.732.817,00	0,00
51	SMPN 2 Umbu Ratu Nggay	1.500.000,00	0,00
52	SMPN 5 Umbu Ratu Nggay	11.500.000,00	23.060.000,00
53	SMPN 6 Umbu Ratu Nggay	10.950.000,00	0,00
54	SMPN 1 Mamboro	14.500.000,00	0,00
55	SMPN 2 Mamboro	3.000.000,00	15.000.000,00
56	SMPN 3 Mamboro	21.212.817,00	0,00
57	SMPN Satap Lailori	0,00	26.560.000,00
58	SMPN Satap Kambera Laja	0,00	23.700.000,00
59	SMPN Satap Karanggi Rowa	9.800.000,00	0,00
60	SMPN Satap Waikajanga	1.500.000,00	0,00
61	SMPN Satap Watu Lade	2.660.000,00	0,00
62	SMPN Satap Taman Mas	8.400.000,00	0,00
63	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Tengah	3.350.000,00	0,00
64	SMPN 7 Umbu Ratu Nggay	10.000.000,00	0,00
	Total	**435.718.033,00**	**424.337.500,00**

Rincian belanja modal peralatan mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.21. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	74.900.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.230.683.200,00	7.204.832.578,00	4.329.075.500,00
3	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	1.168.885.100,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.341.108.400,00	1.320.552.337,00	3.059.061.330,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	188.200.000,00	187.776.334,00	290.194.130,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.029.844.000,00	3.307.813.182,00	1.796.322.482,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	232.332.828,00
8	Belanja Modal Komputer	831.500.000,00	822.478.940,00	735.471.800,00
9	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	100.000.000,00	99.999.900,00	1.018.839.444,45
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	13.990.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	453.327.296,00	435.718.033,00	424.337.500,00
Jumlah		**14.174.662.896,00**	**13.379.171.304,00**	**13.143.410.114,45**

5.1.2.b.2 **Belanja Gedung dan Bangunan**	**Anggaran TA 2025**	**Realisasi TA 2025**	**Realisasi TA 2024**
	Rp23.879.829.473,00	**Rp20.379.072.968,00**	**Rp8.891.385.407,89**

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp20.379.072.968,00 atau 85,34% dari nilai anggaran perubahan yaitu sebesar Rp23.879.829.473,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp11.487.687.560,11 atau 129,20% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp8.891.385.407,89.

Belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2025 tersebar pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.22. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	925.393.350,00	7.385.004.490,00
2	Dinas Kesehatan	19.123.815.650,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	49.998.000,00	996.879.787,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	189.993.887,00
5	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	64.918.778,00	0,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	229.991.243,89
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	89.516.000,00
8	Sekretariat DPRD	74.957.190,00	0,00
9	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	139.990.000,00	0,00
TOTAL		**20.379.072.968,00**	**8.891.385.407,89**

Rincian belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.1.23. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung	23.879.829.473,00	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
	Jumlah	**23.879.829.473,00**	**20.379.072.968,00**	**8.891.385.407,89**

5.1.2.b.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp15.636.368.860,00	**Rp15.235.963.860,00**	**Rp98.063.043.920,00**

Jumlah sebesar Rp15.235.963.860,00 merupakan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar Rp15.636.368.860,00 atau 97,44%. Nilai tersebut menurun sebesar Rp82.827.080.060,00 atau 84,46% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp98.063.043.920,00.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2025 tersebar pada dua SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.24. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.230.000.000,00	4.220.000.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	206.998.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13.005.963.860,00	93.304.489.920,00
4	UPTD Pengelola Air Minum	0,00	331.555.500,00
TOTAL		**15.235.963.860,00**	**98.063.043.920,00**

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.25. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	100.000.000,00	99.900.000,00	68.902.493.100,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	326.305.960,00	326.205.960,00	7.847.852.320,00
3	Belanja Modal Instalasi	2.230.000.000,00	2.230.000.000,00	4.249.975.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	12.980.062.900,00	12.579.857.900,00	17.062.723.500,00
Jumlah		**15.636.368.860,00**	**15.235.963.860,00**	**98.063.043.920,00**

5.1.2.b.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran TA 2025	Realiasi TA 2025	Realisasi TA 2024
Rp448.926.800,00	**Rp190.349.880,00**	**Rp166.536.000,00**

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp190.349.880,00 atau 42,40% dari anggaran yang direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yakni sebesar Rp448.926.800,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp23.813.880,00 atau 14,30% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp166.536.000,00. Pada belanja aset tetap lainnya, realisasi belanja tersebut merupakan realisasi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp190.349.880,00.

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya ada pada SKPD yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan rincian per sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.26. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Relisasi TA 2024 (Rp)
1	SD Negeri Laimajori	0,00	8.902.300,00
2	SD Negeri Anakalang	0,00	4.950.000,00
3	SD Negeri Dameka	0,00	2.088.800,00
4	SD Negeri Maloba	0,00	4.136.000,00
5	SD Negeri Liangu Dowu	0,00	2.423.000,00
6	SD Negeri Taman Mas	0,00	1.809.800,00
7	SD Negeri Karanggirowa	0,00	5.254.500,00
8	SD Negeri Waihibur	0,00	9.313.300,00
9	SD Negeri Alanga	0,00	8.749.600,00
10	SD Negeri Praimahala	0,00	1.553.000,00
11	SD Inpres Lokulalang	0,00	2.377.400,00
12	SD Negeri Pahar	0,00	1.700.000,00
13	SD Negeri Wee Paboba	0,00	2.245.900,00
14	SD Inpres Uma Paohi	0,00	9.145.700,00
15	SD Negeri Parideta	0,00	6.872.500,00
16	SD Negeri Karungguwacu	0,00	5.284.500,00
17	SD Negeri Pantai Maloba	0,00	4.859.000,00
18	SD Negeri Manurara	0,00	5.327.600,00
19	SD Negeri Watulade	0,00	4.859.300,00
20	SD Negeri Wai Kahomba	0,00	4.227.800,00
21	SMPN 1 Waibakul	6.549.400,00	0,00
22	SMPN 2 Waibakul	11.225.400,00	13.172.800,00
23	SMPN 3 Waibakul	7.133.580,00	4.224.600,00

No	Nama Sekolah	Realisasi TA 2025 (Rp)	Relisasi TA 2024 (Rp)
24	SMPN 4 Waibakul	3.846.000,00	0,00
25	SMPN 5 Waibakul	6.349.900,00	3.322.200,00
26	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Barat	8.033.200,00	4.351.900,00
27	SMPN 2 Umbu Ratu Nggay Barat	9.512.400,00	0,00
28	SMPN 3 Umbu Ratu Nggay Barat	4.028.700,00	1.699.200,00
29	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay	8.070.300,00	0,00
30	SMPN 2 Umbu Ratu Nggay	28.526.600,00	3.283.800,00
31	SMPN 3 Umbu Ratu Nggay	2.773.600,00	0,00
32	SMPN 4 Umbu Ratu Nggay	603.000,00	0,00
33	SMPN 5 Umbu Ratu Nggay	5.286.000,00	0,00
34	SMPN 6 Umbu Ratu Nggay	6.581.000,00	0,00
35	SMPN 1 Mamboro	6.692.800,00	4.551.800,00
36	SMPN 2 Mamboro	18.246.200,00	0,00
37	SMPN 3 Mamboro	6.449.100,00	2.400.000,00
38	SMPN Satap Lailori	681.200,00	0,00
39	SMPN 4 Mamboro	6.830.000,00	0,00
40	SMPN Satap Karanggi Rowa	4.309.000,00	0,00
41	SMPN Satap Waikajanga	4.461.100,00	0,00
42	SMPN Satap Ngadu Bolu	3.530.000,00	0,00
43	SMPN Satap Watu Lade	5.690.400,00	0,00
44	SMPN Satap Taman Mas	4.008.400,00	0,00
45	SMPN Satap Uma Paohi	5.931.800,00	0,00
46	SMPN Satap Kambera Laja	6.034.900,00	0,00
47	SMPN 1 Umbu Ratu Nggay Tengah	6.158.300,00	0,00
48	SMPN Satap Pantai Maloba	2.807.600,00	4.203.300,00
49	SMPN Satap Praimahala	0,00	3.046.400,00
	Jumlah	**190.349.880,00**	**140.336.000,00**

Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.27. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	26.200.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	448.926.800,00	190.349.880,00	140.336.000,00
	Jumlah	**448.926.800,00**	**190.349.880,00**	**166.536.000,00**

5.1.2.c Belanja Tidak Terduga

	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
5.1.2.c.1 Belanja Tidak Terduga	**Rp3.500.000.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi belanja tidak terduga Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 0,00%. Belanja tidak terduga tidak terealisasi oleh karena pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Sumba Tengah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp0,00

5.1.2.d Belanja Transfer

5.1.2.d.1	**Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**	**Anggaran TA 2025**	**Raliasasi TA 2025**	**Realisasi TA 2024**
		Rp777.821.000,00	**Rp777.821.000,00**	**Rp596.597.165,00**

Realisasi transer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp777.821.000,00 ditransfer berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/339/2025 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Desember 2025 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/168/2025 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 Juni 2025, dimana besarnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

a) 10 % (sepuluh persen) alokasi dana bagi hasil tersebut dibagikan kepada setiap desa dengan perhitungan 60% (enam puluh persen) dibagi rata untuk semua desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak dari setiap desa;
b) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa selambat - lambatnya 6 (enam) hari.

5.1.2.d.2	**Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah**	**Anggaran TA 2025**	**Realisasi TA 2025**	**Realisasi TA 2024**
		Rp551.479.000,00	**Rp309.661.549,00**	**Rp229.119.070,00**

Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp309.661.549,00 dari anggaran sebesar Rp551.479.000,00. Realisasi bagi hasil retribusi ditranfer berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/339/2025 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa se Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Desember 2025 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/168/2025 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 16 Juni 2025, dimana besarnya alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total realisasi pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- 10 % (sepuluh persen) alokasi dana bagi hasil tersebut dibagikan kepada setiap desa dengan perhitungan 60% (enam puluh persen) dibagi rata untuk semua desa dan 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak dari setiap desa;
- Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa selambat - lambatnya 6 (enam) hari.

5.1.2.d.3	**Bantuan Keuangan ke Desa**	**Anggaran TA 2025**	**Realisasi TA 2025**	**Realisasi TA 2024**
		Rp98.838.641.000,00	**Rp83.722.304.840,00**	**Rp102.760.970.000,00**

Realisasi transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dan Transfer Dana Desa (DD) sebesar Rp83.722.304.840,00 atau 84,71% dari yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp98.838.641.000,00 yang terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp38.362.400.000,00 terealisasi sebesar Rp33.823.919.100,00 atau 88,17% dan Dana Desa (DD) sebesar Rp60.476.241.000,00 terealisasi sebesar Rp49.898.385.740,00 atau 82,51%. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp19.038.665.160,00 atau 18,53% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp102.760.970.000,00. Untuk lebih rincinya dapat dilihat didalam **Lampiran 5**.

5.1.3 Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Tahun 2025 Kabupaten Sumb Tengah senilai Rp38.223.289.821,15 yang telah direalisasikan senilai Rp38.220.373.155,15 atau sebesar 100,01%. Realisasi tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp41.915.256.137,91 yang disebabkan penurunan SiLPA Tahun 2024.

5.1.3.a Penerimaan Pembiayaan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realiasi TA 2024
	Rp38.220.373.155,15	**Rp38.223.289.821,15**	**Rp47.915.256.137,91**

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.223.289.821,15 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp38.220.373.155,15 yang terdiri dari penggunaan Silpa Rp38.220.373.155,15 dan penerimaan kembali dana bergulir kepada masyarakat sebesar Rp2.916.666,00. Nilai realisasi tersebut menurun sebesar Rp9.691.966.316,76 atau 20,23% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.915.256.137,91. Rincian realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	38.220.373.155,15	38.220.373.155,15	100,00	47.866.256.139,91
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.916.666,00	100,00	48.999.998,00
Jumlah		**38.220.373.155,15**	**38.223.289.821,15**	**100,01**	**47.915.256.137,91**

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 terealisasi 100,00% pada Tahun Anggaran 2024.

5.1.3.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp38.220.373.155,15	**Rp38.220.373.155,15**	**Rp47.866.256.139,91**

Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 terealisasi Rp38.220.373.155,15 atau 100,00% pada Tahun Anggaran 2025. Penggunaan SiLPA terealisasi sebesar 100,00% terdiri atas

- Kas di Kas Daerah Rp36.325.555.154,80,
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00,
- Kas di Bendahara BOS Rp299.243.069,31,
- Kas di Bendahara JKN Rp778.302.345,58,
- Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp796.633.685,00 dan
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp20.638.900,46 berasal dari Kas Tunai pada bendahara penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul, UPTD Pengelola Air Minum, UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak dan Bendahara penerimaan pada Badan Keuangan Daerah.

5.1.3.a.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Anggaran TA 2025	Realiasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp0,00	**Rp2.916.666,00**	**Rp48.999.998,00**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.916.666,00 atau 100% dari anggaran dan mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2024 dengan nilai realisasi sebesar Rp48.999.998,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan pengembalian pokok dana bergulir kepada masyarakat untuk penguatan modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sumba Tengah

5.1.3.b Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**	**Rp6.000.000.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak memiliki anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 nilai realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebesar Rp6.000.000.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.29. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	%	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000.000,00**

5.1.3.b.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2025	Realiasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**	**Rp6.000.000.000,00**

Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00. Anggaran penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ini berupa tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak menganggarkan penyertaan modal.

5.1.3.c Pembiayaan Neto	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realiasasi TA 2024
	Rp38.220.373.155,15	**Rp38.223.289.821,15**	**Rp41.915.256.137,91**

Pembiayaan neto pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.223.289.821,15 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.915.256.137,91. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5.1.3.d Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Anggaran TA 2025	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
	Rp0,00	**Rp40.961.099.507,34**	**Rp38.220.373.155,15**

SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah.
Jumlah sebesar Rp40.961.099.507,34 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari surplus anggaran pendapatan daerah sebesar Rp2.737.809.686,19 ditambah pembiayaan netto sebesar Rp38.223.289.821,15. Mengalami peningkatan sebesar Rp2.740.726.352,19 atau 7,17% dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.220.373.155,15. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	**Surplus/Defisit**	**2.737.809.686,19**	**(3.694.882.982,76)**
1	Pendapatan Daerah	577.533.407.296,13	659.050.245.625,08
2	Belanja Daerah	489.985.810.220,94	559.158.442.372,84
3	Transfer Bantuan Keuangan	84.809.787.389,00	103.586.686.235,00
B	**Pembiayaan Netto**	**38.223.289.821,15**	**47.915.256.137,91**
1	Penerimaan Pembiayaan	38.223.289.821,15	47.915.256.137,91
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah (A + B)	**40.961.099.507,34**	**38.220.373.155,15**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai surplus sebesar Rp2.737.809.686,19 diperoleh dari pendapatan daerah sebesar Rp577.533.407.296,13 dikurangi dengan belanja daerah sebesar Rp489.985.810.220,94 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp84.809.787.389,00.

Pembiayaan netto sebesar Rp38.223.289.821,15 diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp38.223.289.821,15 dikurangi dangan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00. Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.31. Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	Uraian	Jumlah Tahun 2025 (Rp)	Jumlah Tahun 2024 (Rp)
1	Sisa Belanja Operasi	31.932.882.758,62	29.869.588.683,26
2	Sisa Belanja DAK Fisik	5.156.801.673,00	3.256.305.960,00
3	Sisa Belanja DAK Non Fisik	2.334.447.761,00	3.220.299.412,00
4	Dana Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)	618.555.915,41	778.302.345,58
5	Dana BOS SD	125.687.295,26	121.262.156,26
6	Dana BOS SMP	179.082.232,00	177.962.232,00
7	Dana BOP PAUD	18.681,05	18.681,05
8	Dana BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
TOTAL		**40.961.099.507,34**	**38.220.373.155,15**

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 2024 menunjukkan SiLPA masing-masing sebesar Rp40.961.099.507,34 dan Rp38.220.373.155,15. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sebagai penambah ekuitas dana daerah yang ditunjukkan oleh adanya Sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah.

2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menggambarkan nilai bersih akhir atas saldo anggaran tahun sebelumnya dengan saldo anggaran lebih tahun berjalan termasuk berbagai koreksi - koreksi tahun sebelumnya jika ada. Secara umum Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) diperoleh dari Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya (SILPA) dikurangi penggunaan SILPA ditambah SILPA tahun pelaporan.

2.1.1 Perubahan SAL

	TA 2025	TA 2024
5.2.1.a Saldo Anggaran Lebih Awal	**Rp38.220.373.155,15**	**Rp47.866.256.139,91**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 atau Saldo Anggaran Lebih akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan sebesar Rp38.220.373.155,15 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2024 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Tahun Anggaran 2023 atau Saldo Anggaran Lebih akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan sebesar Rp47.866.256.139,91.

5.2.1.b Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

TA 2025	TA 2024
Rp38.220.373.155,15	**Rp47.866.256.139,91**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SILPA Tahun Anggaran (TA) 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp38.220.373.155,15.

5.2.1.c Sub Total

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Sub total adalah selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp38.220.373.155,15 dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp38.220.373.155,15 sehingga sub total bersaldo Rp0,00. Sedangkan sub total pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.d Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

TA 2025	TA 2024
Rp40.961.099.507,34	**Rp38.220.373.155,15**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran periode pelaporan yaitu pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp40.961.099.507,34 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp38.220.373.155,15. Untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Surplus	2.737.809.686,19
2	Pembiayaan Netto	38.223.289.821,15
3	**SILPA**	**40.961.099.507,34**

5.2.1.e Sub Total

TA 2025	TA 2024
Rp40.961.099.507,34	**Rp38.220.373.155,15**

Sub total dengan nilai sebesar Rp40.961.099.507,34 adalah selisih antaran nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan Sub Total sebesar Rp0,00 dari selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih di Tahun Anggaran (TA) 2025. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 bernilai sebesar Rp38.220.373.155,15 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Tahun Anggaran (TA) 2024.

5.2.1.f Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Koreksi kesalahan pembukuan adalah akibat kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya bersaldo Rp0,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 bersaldo Rp0,00.

5.2.1.g Lain-lain

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Transaksi lain - lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp0,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.h Saldo Anggaran Lebih Akhir

TA 2025	TA 2024
Rp40.961.099.507,34	**Rp38.220.373.155,15**

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp40.961.099.507,34 mengalami peningkatan sebesar Rp2.740.726.352,19 dari Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp38.220.373.155,15. Saldo Anggaran Lebih Akhir akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal periode berikutnya dapat dirinci Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Rincian Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Tahun Anggaran 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
2	Kas di Dana BOS	304.788.208,31	299.243.069,31
3	Kas di Bend. JKN	618.555.915,41	778.302.345,58
4	Kas di Bend Penerimaan	54.000,00	20.638.900,46
5	Kas di Bend BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
6	Kas Lainnya	7.979.200,00	0,00
Jumlah		**40.961.099.507,34**	**38.220.373.155,15**

Kas di Kas Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2025 pada tabel di atas dapat dijelaskan dimana terdiri atas saldo per 31 Desember 2025, yaitu:

a. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp39.416.098.992,62.
b. Kas di Dana BOS merupakan sisa kas di rekening dana BOS
   - SD Negeri sebesar Rp125.687.295,26
   - SMP Negeri sebesar Rp179.082.232,00
   - BOP PAUD sebesar Rp18.681,05
c. Kas di bendahara JKN sebesar Rp618.555.915,41
d. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp54.000,00
e. Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp613.623.191,00
f. Kas Lainnya sebesar Rp7.979.200,00

5.3 Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menggambarkan posisi keuangan pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 dimana kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah.

Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana.

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/ atau social dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

Aset diklasifikasikan kedalam Aset Lancar dan Non Lancar. Suatu Aset diklasifikasikan kedalam Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan kedalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Non Lancar.

Total aset Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.344.507.394.587,20 atau mengalami penurunan senilai Rp(60.859.577.408,82) atau minus 4,33% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp1.405.366.951.996,02 sebagaimana dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.1.a Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 *(Rp)*	2024 *(Rp)*	Tren (%)
1	Aset	1.343.445.787.223,18	1.405.366.951.996,02	(4,41)
Jumlah		**1.343.445.787.223,18**	**1.405.366.951.996,02**	**(4,41)**

Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak memiliki Dana Cadangan. Rincian aset dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.b Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tren (%)
1	Aset Lancar	64.363.525.107,05	63.147.517.349,05	1,93
2	Investasi Jangka Panjang	67.139.085.752,30	67.244.842.392,70	(0,16)
3	Aset Tetap	1.195.837.874.685,90	1.258.493.818.577,86	(4,98)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	16.105.301.677,93	16.480.773.676,41	(2,28)
Jumlah		**1.343.445.787.223,18**	**1.405.366.951.996,02**	**(4,33)**

Untuk uraian saldo masing - masing akun Neraca tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos investasi jangka pendek dalam bentuk deposito berjangka. Pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya sedangkan pos persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Untuk uraian saldo masing - masing akun Aset Lancar tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.a Kas di Kas Daerah	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp39.416.098.992,62	**Rp36.325.555.154,80**

Kas di Kas Daerah tahun 2025 merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang berada di Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor rekening 044.01.04.000002.8, Rekening PAD dengan nomor rekening 044.01.04.000003.1.

Rekening giro bank dirinci dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.2 Kas di Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Tren (%)
A	**Saldo Rekening Koran**			
1	Rekening Kas Umum Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80	8,51
Jumlah		**39.416.098.992,62**	**36.325.555.154,80**	**8,51**

Saldo masing - masing rekening Kas di Bank per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

		31 Des 2025	31 Des 2024
1)	**Rekening Kas Umum Daerah**	**Rp39.416.098.992,62**	**Rp36.325.555.154,80**

Rekening Kas Umum Daerah adalah dana milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank. Saldo rekening giro per 31 Desember 2025 senilai Rp39.416.098.992,62 mengalami kenaikkan senilai Rp3.090.543.837,82 atau 8,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.325.555.154,80 dimana di Tahun Anggaran 2025 sudah menggunakan rekening tunggal sehingga per 31 Desember 2025 dilakukan pemindahbukuan dari rekening PAD. Berikut ini tabel Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3 Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	PT. BPD NTT-RKUD	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80	8,51
2	PT. BPD NTT-PAD	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**39.416.098.992,62**	**36.325.555.154,80**	**8,51**

Penggunaan masing - masing rekening giro bank tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Rekening Giro 044.01.04.000002-8 pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dalam rekening giro ini berupa transferan dari Pemerintah Pusat dan Transfer dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk transferan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang dipindahbukukan setiap akhir bulan di tahun berjalan dari Rekening PAD dengan nomor rekening giro 044.01.04.000003-1. Saldo Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp39.416.098.992,62 mengalami kenaikkan senilai Rp3.090.543.837,82 atau 8,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp36.325.555.154,80

Tabel 5.3.4 Rincian Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.

NO	Uraian	Jumlah Tahun 2025 (Rp)
1	Sisa Belanja DAU	31.924.849.488,62
2	Sisa Belanja DAK Fisik	5.156.801.673,00
3	Sisa Belanja DAK Non Fisik	2.334.447.831,00
TOTAL		**39.416.098.992,62**

b) Saldo Rekening Giro 044.01.04.000002-8 per 31 Desember 2026 sesuai rekening koran sebesar Rp39.416.098.992,62. Saldo tersebut sesuai dengan saldo buku RKUD per 31 Desember 2025 sehingga tidak terdapat *reconcile item*.

c) Rekening Giro 044.01.04.000003-1 pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT merupakan Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah untuk menampung semua transaksi penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Saldo rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.b	Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp0,00	**Rp0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 sedangkan Kas dibendahara pertanggal 31 Desember 2024 Senilai Rp0,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.5 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024
		(Rp)	**(Rp)**
1	Sisa UP	0,00	0,00
2	Utang PFK	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.3.1.1.c	Kas di Bendahara Penerimaan	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp54.000,00	**Rp20.638.900,46**

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan atas pendapatan daerah yang masih berada di bendahara penerimaan atau belum disetor ke Kas Umum Daerah.

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 bersaldo senilai Rp54.000,00 dan per 31 Desember 2024 bersaldo Rp20.638.900,46. Dari jumlah Kas Dibendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp54.000,00 merupakan Saldo Kas dibendahara penerimaan pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul dan atas nilai tersebut diatas telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 19 Februari Tahun 2026.

Tabel 5.3.6 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	RSUD Waibakul	54.000,00	10.332.100,00
2	SMPN 1 Waibakul		1.812.400,00
3	SMPN 2 Waibakul		3.297.800,00
4	SMPN 3 Waibakul		1.657.500,00
5	SDN Wee Paboba		595.700,00
6	UPTD PAM		2.943.400,00
7	UPTD Mekanisasi Alsintan		0,46
Jumlah		**54.000,00**	**20.638.900,46**

5.3.1.1.d	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp618.555.915,41	**Rp778.302.345,58**

Kas Dana Kapitasi pada FKTP adalah sisa kas berupa saldo rekening koran dan saldo tunai di bendahara yang berasal dari penggunan dana kapitasi pada Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan SPB yang diterbitkan yang belum dibelanjakan.

Jumlah Kas Dana Kapitasi Pada FKTP per 31 Desember 2025 bersaldo senilai Rp618.555.915,41 dan per 31 Desember 2024 bersaldo Rp778.302.345,58 Saldo senilai

Rp618.555.915,41 per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah merupakan sisa kas dana Kapitasi JKN pada 9 (sembilan) puskesmas/FKTP dimana per tanggal 31 Desember 2025 belum digunakan atau dibelanjakan yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.7 Rincian Saldo Dana Kapitasi di Rekening Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Nama FKTP	Saldo per 31 Des 2025 (Rp)
1	PUSKESMAS WAIRASA	106.559.355,20
2	PUSKESMAS LENDIWACU	40.679.076,92
3	PUSKESMAS MALINJAK	100.510.519,91
4	PUSKESMAS LAWONDA	82.127.379,71
5	PUSKESMAS MARADESA	50.767.333,27
6	PUSKESMAS MANANGA	81.448.480,77
7	PUSKESMAS WEE LURI	39.711.806,85
8	PUSKESMAS PAHAR	64.561.204,35
9	PUSKESMAS UMBU RIRI	52.190.758,43
Jumlah		**618.555.915,41**

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sudah menggunakan mekanisme SPB (Surat Pengesahan Belanja) sehingga pada Tahun Anggaran 2025 dana JKN untuk Dana Kapitasi pada FKTP tidak dipindahbukukan lagi ke Rekening Pendapatan Asli Daerah namun langsung digunakan dari rekening FKTP atau Puskesmas sesuai dengan yang sudah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Tahun Anggaran 2025 pada masing - masing FKTP.

Untuk realisasi penggunaan dana Kapitasi per 31 Desember 2025 dan Saldo keseluruhan dana Kapitasi yang berada di Rekening Puskesmas untuk sembilan Puskesmas dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Rincian Saldo dan Realisasi Dana JKN per 31 Desember 2025

No	Nama FKTP	Saldo Awal Rp	Penerimaan per 31 Des 2025 Rp	Realisasi SP2B Rp	Saldo per 31 Des 2025 Rp
1	PUSKESMAS WAIRASA	115.594.649,42	895.512.238,78	904.547.533,00	106.559.355,20
2	PUSKESMAS LENDIWACU	44.157.150,10	298.084.915,82	301.562.989,00	40.679.076,92
3	PUSKESMAS MALINJAK	158.312.734,94	828.164.082,97	885.966.298,00	100.510.519,91
4	PUSKESMAS LAWONDA	89.325.386,00	555.926.644,71	563.124.651,00	82.127.379,71
5	PUSKESMAS MARADESA	64.361.252,03	285.832.769,24	299.426.688,00	50.767.333,27
6	PUSKESMAS MANANGA	120.673.721,77	699.069.164,00	738.294.405,00	81.448.480,77
7	PUSKESMAS WEE LURI	43.108.639,68	297.389.454,17	300.786.287,00	39.711.806,85
8	PUSKESMAS PAHAR	77.182.418,83	448.635.863,46	461.257.077,94	64.561.204,35
9	PUSKESMAS UMBU RIRI	65.586.392,81	492.004.701,62	505.400.336,00	52.190.758,43
Jumlah		**778.302.345,58**	**4.800.619.834,77**	**4.960.366.264,94**	**618.555.915,41**

	31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.1.e Kas Dana BOSP	**Rp304.788.208,31**	**Rp299.243.069,31**

Kas dana BOSP adalah sisa kas yang berasal dari penerimaan yang diterima oleh satuan pendidikan pengelola dana BOS dan BOP PAUD yang belum dibelanjakan dan masih berada di

rekning giro BOS serta di rekening giro BOP PAUD dan sebagian dalam bentuk tunai di bendahara BOS dan Bendahara BOP PAUD.

Jumlah Kas Dana BOS dan BOP PAUD per 31 Desember 2025 bersaldo Rp304.788.208,31. Kas Dana BOS dan BOP PAUD ini merupakan sisa dari Uang Dana BOS dan BOP PAUD per 31 Desember 2025, dimana terdapat Kas Tunai TA.2025 dengan rincian Sekolah Dasar Negeri senilai Rp18.195.139,00 dan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp0,00. Sedangkan total Saldo Rekening giro Bank masing-masing pada SD Negeri senilai Rp107.492.156,26, SMP Negeri senilai Rp179.082.232,00 dan TK Negeri senilai Rp18.681,05 Rincian penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menegah Pertama Negeri dan Dana BOP PAUD/ Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.9 Rincian Saldo Dana BOSP per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan		Realisasi Belanja + Koreksi	Saldo Per Tanggal 31 Desember 2025
			BOS Reguler 2025	BOS Kinerja + BOP PAUD		
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	SD Negeri/SD Inpres	121.262.156,26	4.863.535.000,00	225.000.000,00	5.084.109.861,00	125.687.295,26
2	SMP Negeri/ SATAP	177.962.232,00	4.373.506.000,00	315.000.000,00	4.687.386.000,00	179.082.232,00
3	BOP PAUD	18.681,05	0,00	92.830.000,00	92.830.000,00	18.681,05
JUMLAH		**299.243.069,31**	**9.237.041.000,00**	**632.830.000,00**	**9.864.325.861,00**	**304.788.208,31**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Total penerimaan SD Negeri, SMP Negeri dan TK Negeri di Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp10.169.095.388,26 yang terdiri atas saldo awal senilai Rp299.243.069,31, Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2025 senilai Rp9.237.041.000,00, dana BOS KINERJA serta BOP PAUD senilai Rp632.830.000,00.
Total realisasi belanja SD Negeri, SMP Negeri dan TK Negeri di Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp9.864.325.861,00 yang terdiri dari realisasi SD Negeri senilai Rp5.084.109.861,00, SMP Negeri senilai Rp4.687.386.000,00 dan TK Negeri senilai Rp92.830.000,00. Realisasi belanja ini terdiri atas realisasi saldo awal dan realisasi belanja dana BOS Tahun Anggaran 2025.

Sehingga berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran pada rekening giro dana BOS Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat sisa dana BOS dan BOP PAUD yang diperoleh dari saldo rekening giro dan kas tunai. Kas tunai per 31 Desember 2025 pada bendahara dana BOS dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Rincian Saldo Dana BOS per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Akhir Bank	Saldo Kas Tunai	Jumlah Saldo
		Rp.	Rp.	Rp.
1	SD Negeri/ SD Inpres	107.492.156,26	18.195.139,00	125.687.295,26
2	SMP Negeri/SATAP	179.082.232,00	0,00	179.082.232,00
3	TK Negeri	18.681,05	0,00	18.681,05
JUMLAH		**286.593.069,31**	**18.195.139,00**	**304.788.208,31**

Rincian kas tunai pada bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.11 Rincian Kas Tunai SD di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Kas Tunai (Rp)
1	SD Negeri Liangu Dowu	400.000,00
2	SD Negeri Kapalas	2.100.000,00
3	SD Negeri Pogu Laba	9.000,00
4	SD Inpres Lokulalang	45.000,00

5	SD Negeri Alala	364.200,00
6	SD Negeri Wee Paboba	7.345.797,00
7	SD Inpres Uma Paohi	925.000,00
8	SD Negeri Waimoru	2.331.000,00
9	SD Negeri Karungguwacu	642,00
10	SD Negeri Wanno Mema	1.228.500,00
11	SD Negeri Jambamoni	45.000,00
12	SD Negeri Maharang	3.401.000,00
JUMLAH		**Rp.18.195.139,00**

Kas tunai pada bendahara dana BOS Sekolah Dasar Negeri belum dilakukan penyetoran ke Kas Rekening Giro Dana BOS masing - masing Sekolah Dasar Negeri dimana ada kas tunai senilai Rp18.195.139,00 yang merupakan kas tunai pada Bendahara Pengelola Dana BOS per Tanggal 31 Desember 2025.
Rincian Penerimaan, Belanja, Koreksi dan Saldo dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri/Inpres dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Satu Atap dapat dilihat pada **Lampiran 4a.**

5.3.1.1.f Kas Dana BOK Puskesmas	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
	Rp613.623.191,00	**Rp796.633.685,00**

Kas Dana BOK Puskesmas adalah sisa kas berupa saldo rekening koran dan saldo tunai di bendahara yang berasal dari penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang perubahan Permenkes Nomor 42 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 serta didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimana sisa kas dana Bantuan Operasional Kesehatan dikategorikan kedalam akun Kas Dana BOK Puskesmas.

Pertanggal 31 Desember 2025 Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp613.623.191,00 dimana per 31 Desember 2024 senilai Rp796.633.685,00, nilai Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 terdiri dari 9 (Sembilan) Puskesmas sesuai dengan SPB yang diterbitkan yang belum dibelanjakan. Dari Sembilan puskesmas di tahun anggaran 2024 mendapatkan alokasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dimana Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi total senilai Rp9.061.176.000,00 (termasuk saldo awal) dan terealisasi sesuai dengan SP2B yang dibuat oleh Puskesmas dan disahkan menjadi SPB oleh Fungsi Pengelola Keuangan Daerah dengan nilai Rp8.447.552.630,00 dan atas sisa Dana BOK senilai Rp613.623.191,00 yang tersebar di 9 (Sembilan) Rekening Giro pada PT. Bank Negara Indonesia 46 (BNI) Kantor Cabang Pembantu Waikabubak, Total Penerimaan, Realisasi Belanja dan Sisa Dana BOK dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3.12 Rincian Saldo dan Realisasi Dana BOK per 31 Desember 2025

No	FKTP Puskesmas	Saldo Awal TA.2025	Realisasi Transfer Ke Rekening FKTP dari RKUN	Realisasi Belanja FKTP/ Puskesmas	Sisa Dana BOK per 31-12-2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	PUSKESMAS WAIRASA	113.196.228,00	1.079.368.658,00	1.055.711.576,00	136.853.310,00

No	FKTP Puskesmas	Saldo Awal TA.2025	Realisasi Transfer Ke Rekening FKTP dari RKUN	Realisasi Belanja FKTP/ Puskesmas	Sisa Dana BOK per 31-12-2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
2	PUSKESMAS LENDIWACU	36.000.000,00	665.278.000,00	626.062.640,00	75.215.360,00
3	PUSKESMAS MALINJAK	108.946.036,00	1.221.876.964,00	1.207.989.596,00	122.833.404,00
4	PUSKESMAS LAWONDA	121.474.078,00	828.188.922,00	940.360.787,00	9.302.213,00
5	PUSKESMAS MARADESA	21.236.000,00	846.605.935,00	844.319.582,00	23.522.353,00
6	PUSKESMAS MANANGA	224.513.666,00	885.101.334,00	1.047.106.092,00	62.508.908,00
7	PUSKESMAS WEE LURI	29.060.000,00	664.507.000,00	633.534.412,00	60.032.588,00
8	PUSKESMAS PAHAR	14.955.001,00	601.531.999,00	569.823.097,00	46.663.903,00
9	PUSKESMAS UMBU RIRI	127.252.676,00	878.441.324,00	990.636.330,00	15.057.670,00
JUMLAH		**796.633.685,00**	**8.264.542.136,00**	**8.447.552.630,00**	**613.623.191,00**

5.3.1.1.g Kas Lainnya

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp68.667.119,61	**Rp39.845.265,00**

Pada Akun Kas Lainnya ada sejumlah Pajak atas dana APBD yang sudah dipotong namum belum disetorkan ke kas Negara, Jumlah Kas Lainnya pertanggal 31 Desember 2025 senilai Rp68.667.119,61 dan Pertanggal 31 Desember 2024 senilai Rp39.845.265,00. Kas Lainnya pertanggal 31 Desember 2025 Senilai Rp68.667.119,61 yang terdiri dari Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN dan PBJT Restoran pada 13 (tiga belas) SKPD, UPTD dan 11 (sebelas) Sekolah, atas Uang Pajak tersebut sudah disetor pada Kas Negara pada Tahun 2026, rincian tanggal setor dan jenis pajak dapat dilihat didalam **Lampiran 6**, untuk selanjutnya dapat digambarkan didalam rekapitulasi masing-masing tabel dibawah ini :

Tabel 5.3.13 Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Dana Kapitasi	Bendahara Dana BOSP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
PPh 21	119.000,00	0,00	1.363.800,00	1.482.800,00
PPh 22	672.311,73	0,00	16.000,00	688.311,73
PPh 23	1.637.942,00	5.940.792,78	198.840,00	7.777.574,78
PPN	6.637.459,87	41.983.957,23	2.117.816,00	50.739.233,10
Pajak Restoran	1.542.000,00	0,00	6.437.200,00	7.979.200,00
Total	**10.608.713,60**	**47.924.750,01**	**10.133.656,00**	**68.667.119,61**

5.3.1.1.h Investasi Jangka Pendek

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (Dua Belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp0,00. Pada Laporan Keuangan Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ini nilai investasi jangka pendek di Tahun Anggaran 2025 sudah dihitung dalam akun kas di kas daerah dimana pertanggal 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sudah melakukan pencairan atau penutupan deposito secara bertahap selama Tahun Anggaran 2025 atas investasi jangka pendek berupa Deposito berjangka dengan total nilai senilai Rp35.000.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Miliyar). Nilai tersebut terdiri dari 3 (Tiga) bilyet deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Daftar Deposito Berjangka per 31 Desember 2025

No	Bank/Nomor Seri	Jangka Waktu		Nilai Deposito	Keterangan
		Periode	Tanggal Deposito	(Rp)	
A	**PT. BPD NTT**				
1	DB 0052959	9 bulan	14 April 2025	10.000.000.000,00	Diperpanjang Otomatis
2	DB 0052960	9 bulan	14 April 2025	10.000.000.000,00	Diperpanjang Otomatis
3	DB 0052961	9 bulan	14 April 2025	15.000.000.000,00	Diperpanjang Otomatis
Jumlah				**35.000.000.000,00**	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan investasi jangka pendek berupa deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. BPD NTT) dimulai pada tanggal 14 April 2025 dan dilakukan penutupan deposito pada tanggal 14 Desember 2025.

Suku bunga dari masing - masing deposito berjangka ini dengan rincian untuk deposito dengan No seri DB 0052959, DB 0052960 dan DB 0052961 dengan suku bunga senilai 3,75% pada Bank BPD NTT, dengan Perolehan bunga atas deposito berjangka ini adalah per bulan dengan total Rp1.002.604.166,70.

	31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.1.i Piutang Pajak	**Rp5.441.865.150,47**	**Rp3.267.899.059,00**

Piutang pajak merupakan pajak daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah yang sudah jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2025 namun belum dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah.

Jumlah senilai Rp3.267.899.059,00 merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 berupa Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Saldo piutang per 31 Desember 2025 senilai Rp5.441.865.150,47 terdiri dari Piutang atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp56.877.190,87, Piutang PBB-P2 senilai Rp5.333.287.592,00, Piutang Pajak Restoran senilai Rp36.725.200,00, dan Piutang Pajak Hotel senilai Rp14.975.167,60 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.15 Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	56.877.190,87	41.278.000,00	15.599.190,87	37,79
2	Pajak Restoran	36.725.200,00	0,00	36.725.200,00	100,00
3	Pajak Hotel	14.975.167,60	0,00	14.975.167,60	100,00
4	PBB - P2	5.333.287.592,00	3.226.621.059,00	2.106.666.533,00	65,29
Jumlah		**5.441.865.150,47**	**3.267.899.059,00**	**2.173.966.091,47**	**66,52**

Saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.173.966.091,47 atau 66,52% terjadi pada kenaikan Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Mineral bukan logam, Piutang Pajak Hotel, dan piutang PBB - P2.

Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan senilai Rp15.599.190,87 merupakan pengakuan tunggakan pembayaran pajak galian C atas proyek pembangunan di SKB, TK. Kristen Mahamanael Mambitul, dan SMPN 5 Waibakul yang telah dibayar tahun 2026. Sedangkan rincian piutang pajak mineral bukan logam dan batuan tahun sebelumnya yang belum dilunasi dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Pada Tahun Anggaran 2025 PBB-P2 yang ditetapkan senilai Rp2.772.790.374,00 dengan rincian PBB Perkotaan senilai Rp132.675.308,00 dan PBB Pedesaan senilai Rp2.640.115.066,00. Realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun Anggaran 2025 senilai Rp423.534.542,00. Sehingga jumlah piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.3.16 Total Piutang PBB - P2 per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Piutang PBB - P2 Per 31 des 2025
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Piutang PBB-P2 s/d 2002	5.257.260,00	0,00	1.000,00	5.256.260,00
2	Piutang PBB-P2 2003 s/d 2012	529.668.193,00	0,00	1.319.882,00	528.348.311,00
3	Piutang PBB-P2 2013	237.877.954,00	0,00	995.987,00	236.881.967,00
4	Piutang PBB-P2 2014	280.808.965,00	0,00	627.358,00	280.181.607,00
5	Piutang PBB-P2 2015	277.671.293,00	0,00	481.200,00	277.190.093,00
6	Piutang PBB-P2 2016	220.246.648,00	0,00	487.100,00	219.759.548,00
7	Piutang PBB-P2 2017	232.844.303,00	0,00	377.636,00	232.466.667,00
8	Piutang PBB-P2 2018	143.406.062,00	0,00	230.350,00	143.175.712,00
9	Piutang PBB-P2 2019	191.422.304,00	0,00	377.036,00	191.045.268,00
10	Piutang PBB-P2 2020	141.456.802,00	0,00	490.896,00	140.965.906,00
11	Piutang PBB-P2 2021	185.163.065,00	0,00	931.336,00	184.231.729,00
12	Piutang PBB-P2 2022	132.511.119,00	0,00	112.912,00	132.398.207,00
13	Piutang PBB-P2 2023	177.550.376,00	0,00	235.998,00	177.314.378,00
14	Piutang PBB-P2 2024	470.736.715,00	0,00	235.920.608,00	234.816.107,00
15	Piutang PBB-P2 2025		2.772.790.374,00	423.534.542,00	2.349.255.832,00
	Jumlah	**3.226.621.059,00**	**2.772.790.374,00**	**666.123.841,00**	**5.333.287.592,00**

Aplikasi Sismiop per tanggal 31 Desember 2025 mencatat Piutang PBB-P2 senilai Rp5.557.091.017,00 dimana terdapat selisih senilai Rp223.803.425,00 lebih tinggi dibandingkan dengan pencatatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah senilai Rp5.333.287.592,00 yang akan dilakukan rekonsiliasi tahun 2026.

Untuk rincian target dan realisasi piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2002 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.1.j	**Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak**	**Rp(2.362.332.370,54)**	**Rp(2.261.439.596,58)**

Akumulasi penyisihan piutang pajak adalah untuk memprediksi piutang pajak yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Jumlah akumulasi penyisihan piutang pajak Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp(2.362.332.370,54) mengalami peningkatan senilai Rp100.892.773,96 atau 4,46% dari piutang pajak Tahun Anggaran 2024 senilai Rp(2.261.439.596,58). Akumulasi Penyisihan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah merupakan penyisihan atas piutang pajak PBB – P2, Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan, Piutang Pajak Restoran dan Piutang Pajak Hotel dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.3.17 Penyisihan Piutang Pajak PBB – P2 per 31 Desember 2025

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
			0,5%	10%	50%	100%
1	Piutang PBB-P2 s/d 2002	5.256.260,00	-	-	-	5.256.260,00
2	Piutang PBB-P2 2003 s/d 2012	528.348.311,00	-	-	-	528.348.311,00

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
			0,5%	10%	50%	100%
3	Piutang PBB-P2 2013	236.881.967,00	-	-	-	236.881.967,00
4	Piutang PBB-P2 2014	280.181.607,00	-	-	-	280.181.607,00
5	Piutang PBB-P2 2015	277.190.093,00	-	-	-	277.190.093,00
6	Piutang PBB-P2 2016	219.759.548,00	-	-	-	219.759.548,00
7	Piutang PBB-P2 2017	232.466.667,00	-	-	-	232.466.667,00
8	Piutang PBB-P2 2018	143.175.712,00	-	-	-	143.175.712,00
9	Piutang PBB-P2 2019	191.045.268,00	-	-	-	191.045.268,00
10	Piutang PBB-P2 2020	140.965.906,00	-	-	70.482.953,00	-
11	Piutang PBB-P2 2021	184.231.729,00	-	-	92.115.864,50	-
12	Piutang PBB-P2 2022	132.398.207,00	-	13.239.820,70	-	-
13	Piutang PBB-P2 2024	177.314.378,00	-	17.731.437,80	-	-
14	Piutang PBB-P2 2025	234.816.107,00	1.174.080,54			
15	Piutang PBB-P2 2026	2.349.255.832,00	11.746.279,16			
	Jumlah	**5.333.287.592,00**	**12.920.359,70**	**30.971.258,50**	**162.598.817,50**	**2.114.305.433,00**

Tabel 5.3.18 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Batuan dan Logam per 31 Desember 2025

No	Tahun	Pihak ke 3	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
					0,5%	10%	50%	100%
1	2009	CV. RIO RITO	Rehab berat Pustu Tanambanas	479.000,00	-	-	-	479.000,00
2	2009	CV. UMA KII	Rehab Polindes Weluk Priamemang	3.809.000,00	-	-	-	3.809.000,00
3	2009	CV. EKA PATA	Pembangunan Polindes Manurara	4.393.000,00	-	-	-	4.393.000,00
4	2009	CV. SUMBA KARYA SEJATI	Pembangunan Bangsal A	12.883.000,00	-	-	-	12.883.000,00
5	2010	CV. TULUS KARYA	Rehap sedang/berat bangunan SDM Kamberalaja	3.679.000,00	-	-	-	3.679.000,00
6	2010	CV. BUNGA PANDANG	Rehab Berat Puskesmas Rawat Jalan Maradesa	6.011.000,00	-	-	-	6.011.000,00

No	Tahun	Pihak ke 3	Uraian	Per 31 Des 2025	Penyisihan Piutang			
					0,5%	10%	50%	100%
7	2011	CV. TIKA TANA	Pembangunan Sumur Gali	1.699.000,00	-	-	-	1.699.000,00
8	2011	CV. MILENIUM	Pembangunan Gedung PAUD Mamboro	2.783.000,00	-	-	-	2.783.000,00
9	2011	CV. VERELIA JAYA	Pembangunan Pagar Keliling SLBN Waibakul	5.542.000,00	-	-	-	5.542.000,00
Jumlah				**41.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.278.000,00**

Tabel 5.3.19 Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

No	Tahun	Uraian	31-Des-25	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025				
				0,50%	10%	50%	100%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2025	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	36.725.200,00	183.626,00	-	-	-	183.626,00
2	2025	Piutang Pajak Hotel	14.975.167,60	74.875,84	-	-	-	74.875,84
JUMLAH			**51.700.367,60**	**258.501,84**	**-**	**-**	**-**	**258.501,840**

Penyisihan atas piutang pajak PBB – P2 PBB – P2, Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan, Piutang Pajak Restoran dan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak dilakukan dengan ketentuan kualitas lancar -0,5%, kualitas kurang lancar -10%, kualitas diragukan -50% dan kualitas macet -100%. Untuk Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan logam dan batuan rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 7** dan Penyisihan Piutang Pajak pada **Lampiran 9** sedangkan Akumulasi Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dlihat pada **Lampiran 8a.**

5.3.1.1.k Piutang Retribusi

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp3.239.575.518,00	**Rp2.433.428.250,00**

Piutang Retribusi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 bersaldo Rp3.239.575.518,00 dan Per 31 Desember 2024 bersaldo Rp2.433.428.250,00 Piutang Retribusi terdiri 3 (Tiga) SKPD yaitu atas Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinas Perhubungan atas kendaraan truk senilai Rp248.250.000,00, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPTD PAM atas pelayanan air bersih bagi masyarakat senilai Rp1.325.484.318,00, dan pada Dinas Kesehatan atas Klaim BPJS pada 9 (Sembilan) Puskesmas dan 1 (satu) RSUD yaitu dana Non Kapitasi Tahun 2025 yang baru masuk ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2026 senilai Rp1.665.841.200,00 Rincian atas Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

5.3.1.1.l Penyisihan Piutang Retribusi

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp(1.573.734.318,00)	**Rp(1.578.032.787,66)**

Penyisihan piutang Retribusi per 31 Desember 2025 senilai Rp(1.573.734.318,00) dan pada 31 Desember 2024 bersaldo Rp(1.578.032.787,66) Penyisihan piutang retribusi berupa penyisihan atas piutang retribusi per akhir tahun belum dapat ditagih dan sudah sesuai dengan perhitungan *Net Realizable Value (NRV).* Pada penyisihan Piutang retribusi Pemakaian kekayaan Daerah atas pelayanan Air Bersih dan pemakaian kekayaan daerah berupa truk Tana Waikanena Loku Waikalala, untuk rincian perhitungan penyisihan Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

5.3.1.1.m	**Piutang Lain Lain PAD yang sah**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp60.561.659,09	**Rp637.219.478,55**

Piutang Lain Lain PAD yang sah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 bersaldo Rp60.561.659,09 dan Per 31 Desember 2024 bersaldo Rp637.219.478,55. Piutang Lain Lain PAD yang sah yaitu Piutang lain lain PAD yang sah merupakan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terhadap pihak ke tiga dan perorangan selain piutang pajak dan piutang retribusi dimana belum direalisasikan per 31 Desember 2025.

Piutang lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 senilai Rp60.561.659,09. Piutang dimaksud adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada PT. Taspen, pengembalian uang muka oleh pihak ke tiga, denda keterlambatan pekerjaan dan piutang Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) berdasarkan LHP KNKD semester II Tahun Anggaran 2025. Piutang tersebut berupa kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PT. Taspen senilai Rp24.829.600,00, Piutang Belanja uang muka pada Pihak Ketiga berupa uang muka 30% senilai Rp15.623.000,00, Piutang Denda Keterlambatan pada Pihak Ketiga senilai Rp4.270.500,00 dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi senilai Rp15.838.559,09. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada **Lampiran 11**

5.3.1.1.n	**Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang sah**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp(60.561.659,09)	**Rp0,00**

Penyisihan piutang Lain lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 senilai Rp(60.561.659,09) dan pada 31 Desember 2024 bersaldo Rp0,00. Penyisihan piutang Lain lain PAD yang sah berupa penyisihan atas piutang Lain lain PAD yang sah sudah sesuai dengan perhitungan *Net Realizable Value (NRV)*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

5.3.1.1.o	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp1.321.732.000,00	**Rp0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima dana dari Pemerintah Pusat seperti Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus atau Dana Penyesuaian yang telah ditetapkan jumlahnya, Piutang Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp1.321.732.000,00 dan per tanggal 31 Desember 2024 Senilai Rp.0,00 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 tertanggal 31 Desember 2025. Atas piutang tersebut pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah mencatat sebagai Piutang Transfer Pemerintah Pusat.

5.3.1.1.p	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp593.668.746,00	**Rp4.588.091.944,00**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan nilai bagi hasil pajak Provinsi NTT yang merupakan hak Kabupaten Sumba Tengah dan sudah diakui Pemerintah Provinsi NTT namun belum ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : NIP.900.1.14.3/483/BPAD1.1 tertanggal 11 Februari 2026.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp593.668.746,00 dan pada 31 Desember 2024 bersaldo Rp4.588.091.944,00. Pada Akun Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya di Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Bagi Hasil dari Pemerintah

Provinsi NTT yaitu PKB senilai Rp593.616.285,00, dan Pajak Air Permukaan Senilai Rp52.461,00, Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

5.3.1.1.q Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp(2.968.343,73)	**Rp(22.940.459,72)**

Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp(2.968.343,73) dan per 31 Desember 2024 senilai Rp(22.940.459,72). Di Tahun Anggaran 2025 dilakukan penyisihan Piutang terhadap Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya atas dana bagi hasil dari pemerintah provinsi senilai Rp593.668.746,00 atas PKB dan Pajak Air Permukaan dengan penilaian persentase penyisihan piutang sebesar 0,50%. untuk penjelasan dan perhitungan lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

5.3.1.1.r Piutang Lainnya

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp0,00	**Rp60.561.659,09**

Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah terhadap pihak ke tiga dan perorangan selain piutang pajak dan piutang retribusi dimana belum direalisasikan per 31 Desember 2025.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00. Piutang dimaksud adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pada PT. Taspen, pengembalian uang muka oleh pihak ke tiga, denda keterlambatan pekerjaan dan piutang Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) berdasarkan LHP KNKD semester II Tahun Anggaran 2025, atas akun Piutang Lainnya telah dilakukan reklas ke Akun Piutang Lain Lain PAD yang Sah**.**

5.3.1.1.s Penyisihan Piutang Lainnya

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp0,00	**Rp(60.561.659,09)**

Jumlah akumulasi penyisihan piutang lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Neraca senilai Rp0,00 atas nilai pada akun Penyisihan Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2025 telah direklas ke Akun Penyisihan Piutang lain lain PAD yang Sah, dari penyisihan piutang lainnya di Tahun Anggaran 2024 senilai (Rp60.561.659,09) masih tetap tercatat pada akun Penyisihan Piutang lainnya.

5.3.1.1.t Beban dibayar dimuka

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp3.643.934.119,28	**Rp4.542.111.414,00**

Akun Beban dibayar dimuka merupakan beban atau biaya yang sudah dibayarkan secara tunai tetapi manfaatnya belum dirasakan atau digunakan, untuk Tahun Anggaran 2025 Beban dibayar dimuka pertanggal 31 Desember 2025 senilai Rp3.643.934.119,28 merupakan sisa dana pada rekening Penerima bantuan Sosial Rumah Mandiri sebanyak 254 Penerima dari 260 penerima bantuan rumah mandiri yang belum semuanya dicairkan untuk proses pembangunan rumah mandiri.

Sedangkan untuk Tahun 2024 merupakan Dana Hibah kepada empat Instansi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Instansi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. Empat Instansi dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Sumba Tengah (KPUD Sumba Tengah), Badan Pengawasan Pemilihan

Umum Daerah (Banwasluda), Kepolisian Republik Indonesia Resort Sumba Barat, dan Tentara Nasional Indonesia Komando Rayon Militer 1613 Sumba Barat.

Sesuai dengan Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPUD Nomor :BKD.910/401/53.17/XI/2023 diketahui bahwa Nilai Hibah sebesar Rp14.134.000.000,00 dengan sisa Hibah senilai Rp3.462.310.991,00 per 31 Desember 2024. Sisa dana Hibah pada KPUD telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 25 Maret 2025.

Hibah kepada Banwasluda sesuai NPHD Nomor :BKD.910/139/53.17/IV/2024 dengan Hibah sebesar Rp4.100.000.000,00 dan sisa Hibah senilai Rp422.770.423,00 yang telah disetor ke kas Daerah pada tanggal 10 April 2025.

Hibah kepada TNI Koramil 1613 Sumba Barat sesuai NPHD Nomor :BKD.910/116/53.17/III/2024 dengan nilai Hibah Rp807.545.000,00 dengan sisa hibah per 31 Desember 2024 senilai Rp.0,00.

Hibah kepada Kepolisian Republik Indonesia Resort Sumba Barat sesuai NPHD Nomor : BKD.910/117/53.17/III/2024 dengan nilai Hibah Rp3.386.869.000,00 dan sisa hibah per 31 Desember 2024 senilai Rp657.030.000,00 yang telah disetor Tahun 2025.

5.3.1.1.u Persediaan

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp13.039.997.178,61	**Rp13.280.961.627,31**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah lebih khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Tengah menyatakan bahwa Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama). Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan pencatatan serta menilai persediaan dengan metode fisik dimana penentuan persediaan tidak dilakukan pada saat persediaan dikonsumsi melainkan dihitung setelah melakukan opname fisik secara semesteran ataupun tahunan. Beban pemakaian atau konsumsi barang persediaan dilakukan dengan metode aset. Pengakuan terhadap beban persediaan dilakukan dengan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan ketika persediaan telah dipakai dan penyesuaian dilakukan pada akhir periode dengan perhitungan persediaan awal ditambah pembelian dalam periode dikurangi persediaan akhir.

Jumlah tersebut merupakan stok barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp13.039.997.178,61 mengalami Penurunan senilai Rp240.964.448,70 atau (1,81)% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp13.280.961.627,31 dengan rincian per jenis sebagai berikut.

Tabel 5.3.20 Rincian Persediaan per jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	Bahan	128.700.000,00	669.306.562,00	-80,77
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	78.168.000,00	23.796.000,00	228,49
3	Obat-obatan	12.314.808.049,61	11.549.326.465,91	6,63
4	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	509.850.164,00	411.843.144,00	23,80
5	Natura dan Pakan	8.470.965,00	626.689.455,40	-98,65
	Jumlah	**13.039.997.178,61**	**13.280.961.627,31**	**(1,81)**

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Tengah bahwa pengakuan persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Rincian persediaan per jenis barang dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarkat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp67.139.085.752,30 mengalami penurunan senilai Rp105.756.640,40 atau (0,16)% dari investasi jangka panjang Tahun Anggaran 2024 senilai Rp67.244.842.392,70 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Investasi Jangka Panjang Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Investasi Jangka Panjang		Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	Investasi Non Permanen	77.328.006,30	79.953.005,70	(3,28)
2	Investasi Permanen	67.061.757.746,00	67.164.889.387,00	(0,15)
Jumlah		**67.139.085.752,30**	**67.244.842.392,70**	**(0,16)**

Saldo masing - masing jenis investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.2.a Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi Non Permanen pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Neraca terdiri atas:

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.2.a.1	**Investasi Non Permanen Lainnya**	**Rp678.729.573,17**	**Rp681.646.239,17**

Jumlah tersebut merupakan Investasi Non Permanen Lainnya Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp678.729.573,17 dan untuk Tahun 2024 senilai Rp681.646.239,17 berupa dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai SKPD Pelaksana Teknis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.22 Investasi Non Permanen Lainnya Dana Bergulir

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengembalian	Saldo Akhir per 31-12-2025
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Dana bergulir TA 2009 - 60 KUKM/Pokmas	72.662.878,75			72.662.878,75
2	Dana bergulir TA 2010 - 5	9.050.971,00			9.050.971,00

	KUKM/Pokmas (Perguliran kembali dari dana TA. 2009)				
3	Dana bergulir TA 2011 - 10 KUKM/Pokmas (Perguliran kembali dari dana TA. 2009)	29.700.442,42			29.700.442,42
4	Dana bergulir TA 2018	318.540.564,00			318.540.564,00
5	Dana Bergulir TA. 2022	88.836.673,00		2.916.666,00	85.920.007,00
6	Dana bergulir usaha penggemukan sapi (Umbu Tipuk Marisi) TA. 2010)	143.750.000,00			143.750.000,00
7	Dana bergulir KUD Mamboro TA. 2011	19.104.710,00			19.104.710,00
JUMLAH		**681.646.239,17**		**2.916.666,00**	**678.729.573,17**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mutase kurang merupakan penyetoran atas pencairan Dana Bergulir Tahun 2022 senilai Rp300.000.000,00 dengan saldo awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp88.836.673,00 untuk 19 Pelaku KUKM di wilayah Kabupaten Sumba Tengah sehingga diperoleh saldo akhir per 31 Desember 2025 atas dana bergulir senilai Rp85.920.007,00.

Dana bergulir di Kabupaten Sumba Tengah sudah dilakukan dari Tahun Anggaran 2009 untuk 60 kelompok masyarakat atau UMKM. Pengembalian dari dana bergulir ini digulirkan lagi di Tahun Anggaran 2010 untuk lima kelompok masyarakat atau UMKM dan Tahun Anggaran 2011 untuk sepuluh kelompok masyarakat atau UMKM namun sampai Tahun Anggaran 2024 pengembalian atas dana bergulir ini tergolong diragukan pengembalian atas pokok dan bunga dari dana yang digulirkan. Selain kelompok masyarakat atau UMKM di Tahun Anggaran 2010 untuk dana bergulir ini juga diberikan kepada perorangan untuk usaha penggemukan sapi dan di Tahun Anggaran 2011 untuk Koperasi Unit Desa Mamboro sebagai modal usaha.

Sedangkan di Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengucurkan dana bergulir untuk Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat Kabupaten Sumba Tengah senilai Rp700.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: KEP/HK/409/2016 tentang Penerima Bantuan Dana Bergulir di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2016 untuk 47 (empat puluh tujuh) orang pelaku usaha yang besaran pinjaman senilai Rp5.000.000,00 s/d Rp50.000.000,00 dan tersebar pada lima Kecamatan. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah mencairkan Dana Bergulir untuk 19 Pelaku KUKM senilai Rp300.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor : KEP/HK/276/2022 tertanggal 27 September 2022, Dana Bergulir tersebut ditransfer ke Pelaku KUKM pada Tanggal 07 Desember 2022 dengan masa tenggang/*Grace Periode* (3) tiga Bulan. Penerima dana bergulir ini dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dana bergulir dan sebagai pelaksana teknis oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah. Rincian dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

5.3.1.2.a.2	**Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp(601.401.566,87)	**Rp(601.693.233,47)**

Akumulasi penyisihan investasi non permanen lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Neraca per 31 Desember 2025 senilai (Rp601.401.566,87) merupakan penyisihan dari dana bergulir pada Dinas Koperasi, UKM,

Perindustrian dan Perdagangan. Penyisihan atas dana bergulir untuk dana bergulir dari Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011 dan 2016 dimana pengembalian atas pokok dan bunga dana bergulir masuk dalam kategori macet. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku SKPD teknis pengelola dana bergulir dimana UMKM atau kelompok masyarakat pelaku usaha mengalami kerugian atau meninggal sehingga pengembalian atas dana bergulir macet.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tetap berupaya untuk menyelesaikan kredit macet atas pengembalian pokok dan bunga dana bergulir berdasarkan data penerima yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Rincian penyisihan dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.2.b Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

	31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.2.b.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	**Rp67.061.757.746,00**	**Rp67.164.889.387,00**

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 pada terdiri atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Sola Pora. Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 senilai Rp67.061.757.746,00 mengalami penurunan senilai Rp103.131.641,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp67.164.889.387,00 Di Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak melakukan penyertaan modal ke PT. BPD NTT. Rincian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.23 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	per 31 Desember 2025	per 31 Desember 2024	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1	PT. BPD NTT	66.422.830.000,00	66.422.830.000,00	0,00
2	PD. Sola Pora	638.927.746,00	742.059.387,00	(13,90)
	Jumlah	**67.061.757.746,00**	**67.164.889.387,00**	**(0,15)**

a) PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Daerah Sumba Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada PT. BPD NTT dicatat dengan metode biaya dimana nilai investasi diakui senilai nilai modal yang telah diserahkan. Perkembangan nilai investasi pemerintah pada PT. BPD NTT per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.24 Perkembangan Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada PT. BPD NTT s.d. 31 Desember 2025

No.	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham			Jumlah Salam	Nilai
					(Lembar)	(Rp)
1	13 Oktober 2009	28.872.135	s/d	29.397.134	525.000	5.250.000.000,00
2	01 Nopember 2010	33.772.135	s/d	33.991.572	219.438	2.194.380.000,00
3	29 Oktober 2012	48.345.339	s/d	48.845.338	500.000	5.000.000.000,00
4	09 Desember 2014	67.567.127	s/d	68.567.126	1.000.000	10.000.000.000,00
5	23-Nov-16	103.942.127	s/d	104.242.126	300.000	3.000.000.000,00
6	14 Maret 2017	112.492.127	s/d	112.692.126	200.000	2.000.000.000,00
7	21-Nov-18	124.172.477	s/d	124.339.976	167.500	1.675.000.000,00
8	23-Sep-19	127.539.977	s/d	128.072.476	532.500	5.325.000.000,00
9	25 Oktober 2019		s/d		197.845,00	1.978.450.000,00
10	08 Desember 2020		s/d		600.000,00	6.000.000.000,00
11	14 Juli 2021		s/d		500.000,00	5.000.000.000,00
12	16 Desember 2021		s/d		100.000,00	1.000.000.000,00
13	04 April 2022		s/d		500.000,00	5.000.000.000,00
14	28 November 2022		s/d		400.000,00	4.000.000.000,00
15	17 Oktober 2023		s/d		300.000,00	3.000.000.000,00
16	19 februari 2024		s/d		300.000,00	3.000.000.000,00
17	26 November 2024		s/d		300.000,00	3.000.000.000,00
T O T A L					**6.642.283**	**66.422.830.000,00**

Penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ke PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sudah dilakukan sejak Tahun Anggaran 2009 dengan total perolehan deviden dari PT. BPD NTT mulai Tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp60.995.485.036,80 dapat dirinci penerimaan deviden pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.25 Penerimaan Deviden Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada PT. BPD NTT s.d. 31 Desember 2025

No.	Tahun	Jumlah		Tanggal Transfer
		Penyertaan Modal	Deviden	
1	2009	5.250.000.000,00	989.794.415,63	10-Apr-10
2	2010	2.194.380.000,00	1.932.572.902,16	11 Mei 2011
3	2011	0,00	2.196.127.890,01	12 Juni 2012
4	2012	5.000.000.000,00	2.582.763.894,21	26 Juni 2013
5	2013	0,00	3.996.117.470,00	19 Juni 2014
6	2014	10.000.000.000,00	3.917.483.491,00	18 Juni 2015
7	2015	0,00	5.949.481.030,00	1 Juni 2016
8	2016	3.000.000.000,00	4.302.800.365,00	31 Maret 2017
9	2017	2.000.000.000,00	4.803.778.346,00	29 Juni 2018
10	2018	1.675.000.000,00	4.607.684.523,00	16 Mei 2019
11	2019	5.325.000.000,00	2.328.701.253,00	29 Mei 2019
		0,00	2.328.701.252,79	30 Desember 2019
12	2020	6.000.000.000,00	5.095.758.565,00	28 Mei 2020
		1.978.450.000,00		
13	2021	6.000.000.000,00		
14	2022	5.000.000.000,00	3.056.556.403,00	28 April 2022
		4.000.000.000,00		
15	2023	3.000.000.000,00	5.476.891.405,00	30 Maret 2023

No.	Tahun	Jumlah		Tanggal Transfer
		Penyertaan Modal	Deviden	
16	2024	6.000.000.000,00	2.759.129.716,00	28 Juni 2024
17	2025	0,00	4.671.142.115,00	19 Mei 2025
Jumlah		**66.422.830.000,00**	**60.995.485.036,80**	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa deviden yang diperoleh dari penyertaan modal selama 17 (Tujuh Belas) tahun hampir sama dengan total penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ke PT. BPD NTT yaitu kurang lebih senilai Rp3.587.969.708,05 pertahun yang berkontribusi terhadap pergerakan Pembangunan, perekonomian dan Pendidikan pada Kabupaten Sumba Tengah.

b) Perusahaan Daerah Sola Pora. (PD. Sola Pora)

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Sola Pora bersifat kepemilikan penuh dimana Pemerintah Daerah sebagai pemilik tunggal atau dengan persentase kepemilikan 100%. Berdasarkan kondisi tersebut pengelolaan investasi dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas dimana perkembangan nilai investasi mengikuti perkembangan usaha perusahaan dengan mengakomodir perkembangan modal meliputi laba/rugi dan pembayaran deviden. Adapun perkembangan nilai investasi pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Sola Pora per 31 Desember 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah tidak melakukan investasi. Untuk Tahun Anggaran 2025 pihak Perusahaan Daerah Sola Pora sudah menyampaikan laporan keuangan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo dan Rekan, License Number :440/KM.1/2013 tertanggal 19 June 2013, Laporan Keuangan atas hasil audit oleh KAP Jojo menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat Progress Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3.26 Rincian Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Sola Pora per 31 Desember 2025

No	Tahun	Penyertaan Modal	Mutasi		Jumlah
			Laba	Rugi	
1	2011	1.500.000.000,00	0	319.240.577,00	1.180.759.423,00
2	2012	0	0	53.953.798,00	(53.953.798,00)
3	2013	0	0	21.050.785,00	(21.050.785,00)
4	2014	0	0	330.735.726,00	(330.735.726,00)
5	2015	1.000.000.000,00	0	191.820.057,00	808.179.943,00
6	2016	0	0	524.374.347,00	(524.374.347,00)
7	2017	0	37.400.000,00	170.558.916,00	(133.158.916,00)
8	2018	0	103.283.813,00	0,00	103.283.813,00
9	2019	0	62.019.994,00	145.438.595,00	(83.418.601,00)
10	2020	0	0	303.008.416,00	(303.008.416,00)
11	2021	0	34.664.898,00	72.406.442,00	(37.741.544,00)
12	2022	0	0	64.975.531,00	(64.975.531,00)
13	2023	0	55.659.415,00	0,00	55.659.415,00
14	2024	0	146.594.457,00	0,00	146.594.457,00
15	2025	0	0	103.131.641,00	(103.131.641,00)
Jumlah		**2.500.000.000,00**	**439.622.577,00**	**2.300.694.831,00**	**638.927.746,00**

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada Perusahaan Daerah Sola Pora sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dengan total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah ke Perusahaan Daerah SOLA PORA senilai Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus

Juta Rupiah) belum pernah melakukan pengembalian atas pokok dari penyertaan modal pemerintah daerah.

5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024. Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah berasal dari Belanja Modal, Penilaian dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.195.837.874.685,90 mengalami penurunan nilai sebesar (Rp62.655.943.891,96) atau (4,98%) dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.258.493.818.577,86 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3.27 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	JENIS ASET	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp)	Tren %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Tanah	48.106.295.467,00	48.109.462.967,00	(3.167.500,00)	(0,01)
2	Peralatan Mesin	321.430.307.691,99	304.678.635.056,79	16.751.672.635,20	5,50
3	Gedung dan Bangunan	543.387.323.268,57	515.096.308.476,40	28.291.014.792,17	5,49
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.373.177.973.420,40	1.378.143.756.570,83	(4.965.783.150,43)	(0,36)
5	Aset Tetap lainnya	26.403.515.247,00	26.218.423.226,20	185.092.020,80	0,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.841.056.183,53	4.867.614.213,53	10.973.441.970,00	225,44
7	Akumulasi Penyusutan	(1.132.508.596.592,59)	(1.018.620.381.932,89)	(113.888.214.659,70)	11,18
TOTAL		**1.195.837.874.685,90**	**1.258.493.818.577,86**	**(62.655.943.891,96)**	**(4,98)**

5.3.1.3.a Tanah

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp48.106.295.467,00	**Rp48.109.462.967,00**

Jumlah sebesar Rp48.106.295.467,00 merupakan nilai aset tetap tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang diperoleh dari hasil Penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat sebagai Kabupaten Induk sesuai data dalam SK Bupati Sumba Barat tentang Penghapusan Barang Inventaris yang di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Pembelian dan Penilaian tanah yang diperoleh dari Hibah Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah juga mutasi antar OPD.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap tanah secara rinci dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5.3.28 Mutasi tambah dan kurang aset tanah per 31 Desember 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Tanah 2024	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal tanah 2024**	**48.109.462.967,00**
B	**Mutasi tambah**	**0,00**
C	**Mutasi kurang**	**3.167.500,00**
	Penghapusan aset tetap tanah pada Dinas Komunikasi dan Informatika karena adanya kesalahan penentuan titik lokasi pembangunan Tower Menara Telekomunikasi (BTS) di 3 Desa	3.167.500,00
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)**	**3.167.500,00**
E	**Saldo Akhir 2025**	**48.106.295.467,00**

Dari semua aset tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat Aset Tetap Tanah yang belum memiliki sertifikat seperti dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT untuk Pemeriksaan Tahun Anggaran 2021. Oleh karena itu pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Tengah, agar pelaksanaan Pensertifikatan tanah Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29 Nilai tanah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	3.242.963.600,00	3.242.963.600,00	0,00
SMP N 1 Waibakul	53.542.500,00	53.542.500,00	0,00
SMP N 2 Waibakul	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
SMP N 3 Waibakul	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00
SLB N Waibakul	14.298.000,00	14.298.000,00	0,00
Sanggar Kegiatan Belajar	42.473.750,00	42.473.750,00	0,00
SMK N 1 Waibakul	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
SMP N 1 Mamboro	46.984.050,00	46.984.050,00	0,00
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	5.639.250,00	5.639.250,00	0,00
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Kecamatan Katikutana	2.198.197.050,00	2.198.197.050,00	0,00
Kecamatan Katikutana Selatan	676.645.000,00	676.645.000,00	0,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	409.802.700,00	409.802.700,00	0,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	302.573.250,00	302.573.250,00	0,00
Kecamatan Mamboro	422.083.690,00	422.083.690,00	0,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	195.942.875,00	195.942.875,00	0,00
Badan Keuangan Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.702.051.588,00	34.702.051.588,00	0,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.775.240,00	2.000.775.240,00	0,00
Dinas Perikanan	49.056.875,00	49.056.875,00	0,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	286.460.550,00	286.460.550,00	0,00
Dinas Sosial	7.656.000,00	7.656.000,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	13.810.000,00	16.977.500,00	(3.167.500,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32.934.076,00	32.934.076,00	0,00
Dinas Perhubungan	143.815.000,00	143.815.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	1.026.342.960,00	1.026.342.960,00	0,00
RSUD Waibakul	222.250.000,00	222.250.000,00	0,00
Dinas Peternakan	1.143.764.500,00	1.143.764.500,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.894.463,00	18.894.463,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.438.500,00	15.438.500,00	0,00
JUMLAH	**48.106.295.467,00**	**48.109.462.967,00**	**(3.167.500,00)**

Rincian Aset Tetap Tanah dapat dilihat dalam ***Lampiran 15.***

5.3.1.3.b	**Peralatan dan Mesin**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp321.430.307.691,99	**Rp304.678.635.056,79**

Jumlah sebesar Rp321.430.307.691,99 merupakan akumulasi nilai peralatan dan mesin termasuk kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan nilai peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp304.678.635.056,79.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap peralatan dan mesin secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.30 Mutasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin 2025	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal Peralatan Mesin 2024**	**304.678.635.056,79**
B	**Mutasi tambah**	**17.805.308.163,00**
	Belanja Modal DAU/DAK	12.694.453.271,00
	Belanja Modal Dari Dana Bos	449.718.033,00
	Belanja Modal dari Dana JKN	235.000.000,00
	Hibah	2.862.542.690,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.363.495.169,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	95.400.000,00
	Reklas dari Barang dan Jasa	84.699.000,00
	Reklas dari Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00
C	**Mutasi kurang**	**1.053.635.527,80**
	Reklas ke JIJ	107.899.900,00
	Reklas ke Gedung dan Bangunan	683.236.000,00
	Reklas ke Barang dan Jasa	235.669.722,00
	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	26.829.905,80
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B- C)**	**16.751.672.635,20**
E	**Saldo Akhir 2025**	**321.430.307.691,99**

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut:

1) Penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Perangkat Daerah (DAU/DAK) sebesar Rp12.694.453.271,00, Belanja Modal Peralatan Mesin dari Dana BOS sebesar Rp449.718.033,00, Belanja Modal dari Dana JKN sebesar Rp235.000.000,00, Hibah sebesar Rp2.862.542.690,00, Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.363.495.169,00, Reklas dari Gedung dan Bangunan Sebesar Rp95.400.000,00, Reklas dari Barang dan Jasa sebesar Rp84.699.000,00 dan Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.000.000,00.
2) Pengurangan nilai aset Peralatan dan mesin oleh karena Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp107.899.900,00, Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp683.236.000,00, Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp235.669.722,00 dan Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.829.905,80.

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.31 Rincian Aset Peratalan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	46.470.482.933,30	45.787.816.500,30	682.666.433,00

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
SMP N 1 Waibakul	703.328.084,00	703.328.084,00	-
SMP N 2 Waibakul	464.660.761,62	464.660.761,62	-
SMP N 3 Waibakul	340.591.074,12	340.591.074,12	-
SMP N 4 Waibakul	324.318.800,00	324.318.800,00	-
SMP N 5 Waibakul	166.500.000,00	166.500.000,00	-
SD – SMP Satap Taman Mas	299.768.800,00	299.768.800,00	-
SD – SMP Satap Pantai Maloba	166.602.800,00	166.602.800,00	-
Sanggar Kegiatan Belajar	877.083.022,49	886.932.928,29	(9.849.905,80)
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	240.176.516,12	240.176.516,12	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	205.000.000,00	212.900.000,00	(7.900.000,00)
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	264.231.852,00	264.231.852,00	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	163.526.074,12	163.526.074,12	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	150.934.800,00	150.934.800,00	-
SD – SMP Satap Waikajanga	241.002.074,12	241.002.074,12	-
SMP N 1 Mamboro	253.175.881,28	254.175.881,28	(1.000.000,00)
SMP N 2 Mamboro	403.239.800,00	403.239.800,00	-
SMP N 3 Mamboro	333.333.000,00	333.333.000,00	-
SD – SMP Satap Sawirara / SMP N 4 Mamboro	220.110.000,00	220.110.000,00	-
SD – SMP Satap Lailori	210.004.000,00	210.004.000,00	-
SD – SMP Satap Watu Lade	124.500.000,00	124.500.000,00	-
SD – SMP Satap Kamberalaja	220.967.700,00	220.967.700,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	530.243.574,12	530.243.574,12	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	449.718.552,00	449.718.552,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	494.589.000,00	494.589.000,00	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	64.360.000,00	64.360.000,00	-
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	523.227.108,12	523.227.108,12	-
SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	370.850.000,00	370.850.000,00	-
SD – SMP Satap Praimahala	314.389.660,00	314.389.660,00	-
SD – SMP Satap Alanga / SMPN 1 URG Tengah	265.240.000,00	265.240.000,00	-
SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	312.761.888,85	312.761.888,85	-
Kecamatan Katikutana	1.085.728.531,61	1.085.728.531,61	-
Kecamatan Katikutana Selatan	735.926.238,87	735.926.238,87	-
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	859.783.681,29	799.793.681,29	59.990.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.052.805.700,25	1.052.805.700,25	-
Kecamatan Mamboro	787.889.581,53	747.439.581,53	40.450.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	764.352.914,30	741.208.536,30	23.144.378,00
Bagian Tata Pemerintahan	1.427.412.745,09	1.427.412.745,09	-
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.445.132.500,00	1.445.132.500,00	-

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	604.494.740,00	604.494.740,00	-
Bagian Administrasi Pembangunan	1.248.368.426,00	1.199.732.626,00	48.635.800,00
Bagian Perekonomian dan SDA	729.282.659,00	729.282.659,00	-
Bagian Umum	17.534.847.178,67	13.976.880.478,67	3.557.966.700,00
Bagian Hukum	399.115.359,09	399.115.359,09	-
Bagian Organisasi	533.133.769,03	533.133.769,03	-
Sekretariat DPRD	6.953.096.293,88	6.374.331.106,88	578.765.187,00
Badan Keuangan Daerah	3.625.397.351,29	3.330.804.951,29	294.592.400,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	8.205.226.705,49	8.205.226.705,49	-
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.129.604.943,86	9.129.604.943,86	-
Dinas Perikanan	2.959.192.509,00	2.941.372.509,00	17.820.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	712.282.483,09	699.108.448,09	13.174.035,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.410.099.515,99	1.410.099.515,99	-
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.218.284.889,00	1.218.284.889,00	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.950.463.404,24	1.885.493.404,24	64.970.000,00
Dinas Perhubungan	5.032.420.078,00	5.115.856.078,00	(83.436.000,00)
Dinas Kesehatan	89.358.391.524,97	83.754.052.524,97	5.604.339.000,00
Puskesmas Wairasa	2.243.141.091,00	2.119.827.257,00	123.313.834,00
Puskesmas Malinjak	1.391.513.833,00	1.253.200.000,00	138.313.833,00
Puskesmas Lawonda	1.832.530.309,00	1.709.216.475,00	123.313.834,00
Puskesmas Mananga	847.147.735,00	773.833.901,00	73.313.834,00
Puskesmas Maradesa	992.990.000,00	970.490.000,00	22.500.000,00
Puskesmas Lendiwacu	1.592.163.834,00	1.518.850.000,00	73.313.834,00
Puskesmas Pahar	726.117.872,00	656.117.872,00	70.000.000,00
Puskesmas Wee Luri	675.674.648,00	675.674.648,00	-
Puskesmas Umbu Riri	674.042.000,00	674.042.000,00	-
Puskesmas Tanambanas	1.324.952.500,00	1.324.952.500,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	54.988.469.190,00	51.924.810.380,00	3.063.658.810,00
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2.821.686.237,30	2.801.706.237,30	19.980.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.752.727.049,97	2.752.727.049,97	-
Inspektorat	1.306.155.159,09	1.306.155.159,09	-
Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.069.267.274,00	1.996.767.275,00	72.499.999,00
Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah	2.207.334.408,37	2.196.334.408,37	11.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.057.926.840,00	991.429.900,00	66.496.940,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.884.477.905,30	2.237.829.631,30	1.646.648.274,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.680.783.530,00	6.647.868.530,00	32.915.000,00

SKPD	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	1.415.093.342,00	1.386.011.342,00	29.082.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.320.719.616,50	6.320.719.616,50	-
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.141.406.343,57	1.141.406.343,57	-
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.919.481.038,09	1.908.981.038,09	10.500.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.361.889.786,00	2.080.395.370,00	281.494.416,00
UPTD Pengelola Air Minum	1.551.032.470,00	1.551.032.470,00	-
UPTD Pembibitan Ternak	334.457.000,00	334.457.000,00	-
UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	385.475.200,00	376.475.200,00	9.000.000,00
T O T A L	**321.430.307.691,99**	**304.678.635.056,79**	**16.751.672.635,20**

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat dalam ***Lampiran 16.***

5.3.1.3.c	**Gedung dan Bangunan**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp543.387.323.268,57	**Rp515.096.308.476,40**

Jumlah sebesar Rp543.387.323.268,57 merupakan akumulasi aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Nilai perolehan gedung dan bangunan ini memenuhi klasifikasi aset tetap yang diperoleh dengan maksud tertentu untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan dalam kondisi siap pakai per 31 Desember 2025 dan nilai aset tetap gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp515.096.308.476,40.

Mutasi tambah dan kurang aset tetap gedung dan bangunan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.32 Rekapitulasi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal Gedung Bangunan 2024**	**515.096.308.476,40**
B	**Mutasi tambah**	**42.095.525.933,00**
	Belanja Modal DAU/DAK	20.379.072.968,00
	Reklas dari Peralatan dan Mesin	683.236.000,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.033.216.965,00
C	**Mutasi kurang**	**13.804.511.140,83**
	Reklas ke Peralatan dan Mesin	95.400.000,00
	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.553.332.640,00
	Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.903.253.750,00
	Kekurangan Volume pada 17 paket pekerjaan	252.524.750,83
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)**	**28.291.014.792,17**
E	**Saldo Akhir 2025**	**543.387.323.268,57**

1) Penambahan terjadi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2025 yang merupakan belanja modal yang seluruhnya ada pada perangkat daerah sebesar Rp20.379.072.968,00, Reklas dari Peralatan dan Mesin Sebesar Rp683.236.000,00, dan Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp21.033.216.965,00

2) Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK atas Tahun Anggaran 2025, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan atas sepuluh paket pekerjaan pada Dinas

Kesehatan dan Dinas PPO total senilai Rp252.524.750,83. Nilai kelebihan pembayaran tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan direklas ke Aset Lainnya.

3) Pada Aset Gedung dan Bangunan terjadi pengurangan nilai aset yang disebabkan oleh Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp95.400.000,00, Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.553.332.640,00 dan Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp10.903.253.750,00.

4) Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.33 Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	101.550.584.227,12	100.749.844.195,28	800.740.031,84
SMP N 1 Waibakul	2.167.292.000,00	2.167.292.000,00	-
SMP N 2 Waibakul	1.163.037.000,00	1.163.037.000,00	-
SMP N 3 Waibakul	4.126.906.157,10	4.126.906.157,10	-
SMP N 4 Waibakul	1.261.673.280,00	1.261.673.280,00	-
SMP N 5 Waibakul	848.724.000,00	848.724.000,00	-
SD – SMP Satap Taman Mas	1.216.197.000,00	1.216.197.000,00	-
SD – SMP Satap Pantai Maloba	1.056.722.000,00	1.056.722.000,00	-
Sanggar Kegiatan Belajar	1.499.543.993,00	1.499.543.993,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	1.894.501.291,00	1.894.501.291,00	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	1.787.954.174,00	1.787.954.174,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	1.778.567.757,00	1.778.567.757,00	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	1.412.794.000,00	1.412.794.000,00	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	507.899.000,00	507.899.000,00	-
SD – SMP Satap Waikajanga	485.158.000,00	485.158.000,00	-
SMP N 1 Mamboro	1.278.526.000,00	1.236.776.000,00	41.750.000,00
SMP N 2 Mamboro	1.238.969.000,00	1.197.219.000,00	41.750.000,00
SMP N 3 Mamboro	4.336.891.779,93	4.336.891.779,93	-
SD – SMP Satap Sawirara	903.636.675,00	903.636.675,00	-
SD - SMP Satap Lailori	1.412.977.306,53	1.412.977.306,53	-
SD - SMP Satap Watu Lade	487.200.000,00	487.200.000,00	-
SD – SMP Satap Kamberalaja	384.474.000,00	384.474.000,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	1.451.042.000,00	1.451.042.000,00	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	1.426.908.200,00	1.426.908.200,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	2.580.267.000,00	2.580.267.000,00	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	709.205.000,00	798.089.000,00	(88.884.000,00)
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	2.064.214.530,00	2.022.464.530,00	41.750.000,00
SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	1.390.901.098,00	1.390.901.098,00	-
SD – SMP Satap Praimahala	106.210.000,00	106.210.000,00	-
SD – SMP Satap Alanga	117.120.000,00	117.120.000,00	-

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	1.077.921.000,00	1.077.921.000,00	-
Kecamatan Katikutana	5.255.895.388,00	5.049.028.388,00	206.867.000,00
Kecamatan Katikutana Selatan	2.256.387.800,00	2.056.887.800,00	199.500.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	2.816.743.000,00	2.437.346.000,00	379.397.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	2.446.866.500,00	2.464.366.500,00	(17.500.000,00)
Kecamatan Mamboro	2.869.986.000,00	2.869.986.000,00	-
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	93.450.000,00	93.450.000,00	-
Bagian Perekonomian dan SDA	259.679.000,00	259.679.000,00	-
Bagian Umum	44.581.010.033,90	44.581.010.033,90	-
Sekretariat DPRD	28.712.591.841,35	28.583.670.901,35	128.920.940,00
Badan Keuangan Daerah	4.101.985.628,00	4.101.985.628,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12.817.884.926,06	11.238.181.684,06	1.579.703.242,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.707.929.183,17	11.584.122.683,17	2.123.806.500,00
Dinas Perikanan	7.968.836.300,00	5.686.386.300,00	2.282.450.000,00
Dinas Koperasi, Ukm dan Perindag	32.884.727.244,00	32.819.808.466,00	64.918.778,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.169.097.932,00	3.238.501.000,00	(69.403.068,00)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.522.597.821,00	4.572.597.854,00	(50.000.033,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	3.074.488.000,00	3.074.488.000,00	-
Dinas Perhubungan	6.172.590.514,40	5.562.042.580,40	610.547.934,00
Dinas Kesehatan	109.950.550.261,45	95.739.343.794,12	14.211.206.467,33
Puskesmas Wairasa	3.090.437.000,00	2.590.437.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Malinjak	2.030.771.000,00	1.420.771.000,00	610.000.000,00
Puskesmas Lawonda	4.002.621.000,00	3.502.621.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Mananga	3.934.975.000,00	3.324.975.000,00	610.000.000,00
Puskesmas Maradesa	2.981.939.000,00	2.481.939.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Lendiwacu	2.763.155.000,00	2.263.155.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Pahar	4.290.046.000,00	3.790.046.000,00	500.000.000,00
Puskesmas Wee Luri	4.826.918.000,00	4.826.918.000,00	-
Puskesmas Umbu Riri	500.000.000,00	-	500.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	31.092.229.341,13	29.967.931.341,13	1.124.298.000,00
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	3.001.797.000,00	3.093.061.000,00	(91.264.000,00)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.232.506.973,67	7.232.506.973,67	-
Inspektorat	2.781.338.000,00	2.781.338.000,00	-
Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.373.101.000,00	3.373.101.000,00	-
Badan Kepegawaian , Pelatihan dan Sumber Daya Manusia Daerah	4.637.867.400,00	4.637.867.400,00	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.889.460.000,00	2.680.000.000,00	209.460.000,00

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	1.212.359.935,00	1.212.359.935,00	-
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.126.991.852,18	3.126.991.852,18	-
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal dan PTSP	3.742.530.000,00	3.742.530.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	6.759.700.520,00	6.418.700.520,00	341.000.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	388.750.000,00	388.750.000,00	-
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.864.919.000,00	2.864.919.000,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.147.026.710,58	10.147.026.710,58	-
UPTD Pembibitan Ternak	328.568.694,00	328.568.694,00	-
JUMLAH	**543.387.323.268,57**	**515.096.308.476,40**	**28.291.014.792,17**

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat dalam ***Lampiran 17.***

5.3.1.3.d	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp1.373.177.973.420,40	**Rp1.378.143.756.570,83**

Jumlah sebesar Rp1.373.177.973.420,40 merupakan akumulasi belanja modal jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan yang telah dicatat sebagai kelompok aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan nilai asset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.378.143.756.570,83.

Mutasi tambah dan kurang asset tetap jalan, irigasi dan jaringan secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.3.34 Rekapitulasi Saldo akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan 2025	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal Jalan,Irigasi dan Jaringan 2024**	**1.378.143.756.570,83**
B	**Mutasi tambah**	**17.897.196.400,00**
	Belanja Modal DAU/DAK	15.235.963.860,00
	Reklas dari Peralatan dan Mesin	107.899.900,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	2.553.332.640,00
C	**Mutasi kurang**	**22.862.979.550,43**
	Reklas ke Peralatan dan Mesin	1.363.495.169,00
	Reklas ke Gedung dan Bangunan	21.033.216.965,00
	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	99.900.000,00
	Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.900.000,00
	Utang Belanja Modal	226.305.960,00
	Kekurangan Volume 17 paket pekerjaan	3.843.263,20
	Kelebihan pembayaran pada 7 kontrak jasa konsultansi	36.318.193,23
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)**	**(4.965.783.150,43)**
E	**Saldo Akhir 2025**	**1.373.177.973.420,40**

1) Penambahan dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2025 yang merupakan belanja modal yang ada pada perangkat daerah sebesar

Rp15.235.963.860,00, Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp107.899.900,00, dan Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.553.332.640,00, proses reklas ini merupakan nilai belanja modal 2025 dan perubahan kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

2) Pengurangan sebesar Rp226.305.960,00 merupakan nilai utang belanja modal atas paket pekerjaan tahun 2024 terhadap pekerjaan fisik Pembangunan Daerah Irigasi Lokurata yang pekerjaannya di lanjutkan pada Tahun 2025 tetapi telah di akui nilai asetnya pada tahun 2024 sejumlah nilai kontraknya.

3) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Tahun Anggaran 2025 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp3.843.263,20 atas paket pekerjaan Pengembangan Jaringan perpipaan dan Sambungan Rumah Desa Anajiaka dengan nilai kontrak sebesar Rp5.555.279.000,00 dan realisasi pembayaran sebesar Rp5.555.279.000,00. Nilai kelebihan pembayaran tersebut mengurangi nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan direklas ke Aset Lainnya dan kelebihan pembayaran jasa konsultansi sebesar Rp36.318.193,23.

4) Pada Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terjadi pengurangan nilai asset disebabkan oleh Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.363.495.169,00, Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp.21.033.216.965,00, Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.99.900.000,00 dan Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp.99.900.000,00, Proses reklasifikasi ini akibat adanya Belanja Modal 2025 dan Perubahan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

5) Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.35 Nilai Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama OPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	797.184.000,00	821.934.000,00	(24.750.000,00)
SMP N 2 Waibakul	20.000.000,00	20.000.000,00	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	7.900.000,00	-	7.900.000,00
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	-	-	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	-	-	-
SD – SMP Satap Waikajanga	-	-	-
SMP N 1 Mamboro	-	41.750.000,00	(41.750.000,00)
SMP N 2 Mamboro	-	41.750.000,00	(41.750.000,00)
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	27.000.000,00	27.000.000,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	15.000.000,00	15.000.000,00	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	88.884.000,00	-	88.884.000,00
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	-	41.750.000,00	(41.750.000,00)
SD – SMP Satap Alanga	12.200.000,00	12.200.000,00	-
Kecamatan Katikutana	15.000.000,00	221.867.000,00	(206.867.000,00)
Kecamatan Katikutana Selatan	73.375.000,00	272.875.000,00	(199.500.000,00)
Kecamatan Umbu Ratu Nggay	-	239.407.000,00	(239.407.000,00)
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	185.400.000,00	167.900.000,00	17.500.000,00
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	19.880.100,00	19.880.100,00	-

Nama OPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
Bagian Administrasi Pembangunan	59.840.000,00	59.840.000,00	-
Bagian Perekonomian	144.500.000,00	144.500.000,00	-
Bagian Umum	1.840.384.433,00	2.020.441.533,00	(180.057.100,00)
Sekretariat DPRD	633.099.000,00	687.062.750,00	(53.963.750,00)
Badan Keuangan Daerah	99.870.000,00	294.039.000,00	(194.169.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.296.744.512.602,95	1.285.784.519.401,38	10.959.993.201,57
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49.819.982.005,00	51.943.788.505,00	(2.123.806.500,00)
Dinas Perikanan	1.910.910.900,00	4.193.360.900,00	(2.282.450.000,00)
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	730.840.200,00	730.840.200,00	-
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.403.068,00	49.000.000,00	69.403.068,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	798.608.027,00	748.607.994,00	50.000.033,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	19.900.000,00	19.900.000,00	-
Dinas Perhubungan	72.688.066,00	-	72.688.066,00
Dinas Kesehatan	6.520.436.338,00	10.984.302.338,00	(4.463.866.000,00)
Puskesmas Wairasa	48.748.999,00	622.062.833,00	(573.313.834,00)
Puskesmas Malinjak	158.749.001,00	842.062.834,00	(683.313.833,00)
Puskesmas Lawonda	48.748.999,00	622.062.833,00	(573.313.834,00)
Puskesmas Mananga	217.499.999,00	900.813.833,00	(683.313.834,00)
Puskesmas Maradesa	482.226.833,00	982.226.833,00	(500.000.000,00)
Puskesmas Lendiwacu	-	573.313.834,00	(573.313.834,00)
Puskesmas Pahar	327.429.000,00	827.429.000,00	(500.000.000,00)
Puskesmas Wee Luri	287.000.000,00	287.000.000,00	-
Puskesmas Umbu Riri	272.664.000,00	772.664.000,00	(500.000.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	749.929.928,00	1.831.229.928,00	(1.081.300.000,00)
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	176.264.000,00	85.000.000,00	91.264.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.988.832.072,00	2.988.832.072,00	-
Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah	58.560.600,00	69.560.600,00	(11.000.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	209.460.000,00	(209.460.000,00)
Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	5.663.957.000,00	5.663.957.000,00	-
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	836.731.805,00	1.177.731.805,00	(341.000.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.833.444,45	49.833.444,45	-
JUMLAH	**1.373.177.973.420,40**	**1.378.143.756.570,83**	**(4.965.783.150,43)**

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan dalam ***Lampiran 18*.**

5.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp26.403.515.247,00	**Rp26.218.423.226,20**

Aset Tetap Lainnya adalah aset berupa buku perpustakaan, ternak, tanaman, barang bercorak kesenian atau kebudayaan dan aset tetap renovasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

Jumlah sebesar Rp26.403.515.247,00 merupakan aset tetap lainnya yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan nilai aset tetap lainnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp26.218.423.226,20.

Mutasi tambah dan kurang asset tetap lainnya secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.36 Rekapitulasi Saldo akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Lainnya 2025

No	Penjelasan Saldo Akhir 2025 dan Mutasi Aset Tetap Lainnya 2025	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal Aset Tetap Lainnya 2024**	**26.218.423.226,20**
B	**Mutasi tambah**	**375.441.900,80**
	Belanja dari Dana Bos	190.349.880,00
	Reklas dari Peralatan dan Mesin	26.829.905,80
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.900.000,00
	Hibah	58.362.115,00
C	**Mutasi kurang**	**190.349.880,00**
	Reklas ke Peralatan dan Mesin	20.000.000,00
	Reklas ke Barang dan Jasa	170.349.880,00
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)**	**185.092.020,80**
E	**Saldo Akhir 2025**	**26.403.515.247,00**

- Penambahan asset tetap lainnya terjadi karena Belanja Modal dari Dana Bos Sebesar Rp190.349.880,00, Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.829.905,80 akibat adanya perubahan kodefikasi barang milik daerah, Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.900.000,00 Pekerjaan Survey PKRMS pada Dinas PUPR belanja modal tahun 2025, dan Hibah sebesar Rp58.362.115,00 merupakan Hibah dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumba Tengah sesuai NPHD Nomor 20566/4.2/PLK.03.07/XII.2024.
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya terjadi karena Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai Belanja Dana Bos tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Reklas ke Barang dan Jasa sebesar Rp170.349.880,00 merupakan nilai belanja modal dana bos buku tahun 2025.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.3.37 Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	20.086.019.394,41	20.086.019.394,41	-
SMP N 1 Waibakul	46.140.000,26	46.140.000,26	-
SMP N 2 Waibakul	8.900.000,26	8.900.000,26	-
SMP N 3 Waibakul	52.200.000,36	52.200.000,36	-
SMP N 4 Waibakul	67.950.000,34	67.950.000,34	-
SMP N 5 Waibakul	22.335.300,00	22.335.300,00	-
SD – SMP Satap Taman Mas	11.277.100,52	11.277.100,52	-

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Sanggar Kegiatan Belajar	129.629.905,80	105.780.000,00	23.849.905,80
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	33.814.700,58	33.814.700,58	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	7.400.000,00	7.400.000,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	36.089.401,52	36.089.401,52	-
SD – SMP Satap Karanggi Rowa	24.400.001,17	24.400.001,17	-
SD – SMP Satap Uma Paohi	10.400.001,17	10.400.001,17	-
SD – SMP Satap Waikajanga	28.307.100,38	28.307.100,38	-
SMP N 1 Mamboro	93.602.200,04	92.602.200,04	1.000.000,00
SMP N 2 Mamboro	95.500.200,48	95.500.200,48	-
SMP N 3 Mamboro	61.937.980,48	61.937.980,48	-
SD – SMP Satap Sawirara	11.240.000,07	11.240.000,07	-
SD – SMP Satap Kamberalaja	21.557.900,00	21.557.900,00	-
SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	62.550.800,96	62.550.800,96	-
SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	11.500.000,00	11.500.000,00	-
SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	22.120.000,04	22.120.000,04	-
SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	16.877.100,00	16.877.100,00	-
SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	43.300.000,00	43.300.000,00	-
SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	5.900.000,00	5.900.000,00	-
SD – SMP Satap Praimahala	850.000,00	850.000,00	-
SD – SMP Satap Alanga	20.583.600,00	20.583.600,00	-
SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	19.000.001,27	19.000.001,27	-
Kecamatan Katikutana	4.500.000,00	4.500.000,00	-
Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	5.000.000,00	5.000.000,00	-
Kecamatan Mamboro	35.000.000,00	35.000.000,00	-
Bagian Tata Pemerintahan	130.123.900,00	130.123.900,00	-
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.100.000,00	10.100.000,00	-
Bagian Administrasi Pembangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	-
Bagian Perekonomian	2.500.000,00	2.500.000,00	-
Bagian Umum	14.674.000,00	14.674.000,00	-
Bagian Hukum	45.000.000,00	45.000.000,00	-
Sekretariat DPRD	619.860.677,00	619.860.677,00	-
Badan Keuangan Daerah	359.500.000,00	359.500.000,00	-
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.345.863.436,00	3.245.963.436,00	99.900.000,00
Dinas Perikanan	1.980.000,00	-	1.980.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	4.459.000,00	4.459.000,00	-
Dinas Kesehatan	175.000,00	175.000,00	-
Puskesmas Wee Luri	2.000.000,00	2.000.000,00	-
Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	1.050.000,00	1.050.000,00	-

Nama OPD	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	300.847.890,00	300.847.890,00	-
Inspektorat	11.760.000,00	11.760.000,00	-
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	49.950.000,00	49.950.000,00	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	404.288.653,89	345.926.538,89	58.362.115,00
JUMLAH	**26.403.515.247,00**	**26.218.423.226,20**	**185.092.020,80**

Rincian Aset Tetap Lainya per Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2024 dirinci dalam ***Lampiran 19*.**

5.3.1.3.f	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**31 Des 2025**	**31 Des 2024**
		Rp15.841.056.183,53	**Rp.4.867.614.213,53**

Jumlah sebesar Rp15.841.056.183,53 merupakan nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025. Nilai konstruksi dalam pengerjaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.867.614.213,53.

Mutasi tambah dan kurang konstruksi dalam pengerjaan secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.38 Rekapitulasi dan Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 2025**	**4.867.614.213,53**
B	**Mutasi tambah**	**11.003.153.750,00**
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	10.903.253.750,00
	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	99.900.000,00
C	**Mutasi kurang**	**29.711.780,00**
	Kelebihan pembayaran jasa konsultansi	29.711.780,00
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)**	**10.973.441.970,00**
E	**Saldo Akhir 2025**	**15.841.056.183,53**

Konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan oleh karena adanya reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.903.253.750,00 yang merupakan nilai perencanaan, pengawasan dan pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang dimana pekerjaannya baru selesai 75% dan Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp99.900.000,00 merupakan belanja modal 2025 pekerjaan perencanaan D.I Kabupaten Sumba Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Konstruksi dalam pengerjaan mengalami pengurangan sebesar Rp29.711.780,00 merupakan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultansi pekerjaan pada Dinas Kesehatan.

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 per Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.3.39 Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Nama OPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Bertambah / Berkurang
Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	99.692.350,00	99.692.350,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.515.430.519,53	4.415.530.519,53	99.900.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	24.961.200,00	24.961.200,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.532.000,00	223.532.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	10.977.440.114,00	103.898.144,00	10.873.541.970,00
JUMLAH	**15.841.056.183,53**	**4.867.614.213,53**	**10.973.441.970,00**

Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam ***Lampiran 20*****.**

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.3.g	**Akumulasi Penyusutan**	**Rp(1.132.508.596.592,59)**	**Rp(1.018.620.381.932,89)**

Akumulasi penyusutan adalah penyesuaian nilai aset tetap dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Sejak diterapkan PP N0. 71 Tahun 2010 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah yang Berbasis Akrual, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menerapkan Akumulasi Penyusutan pada tahun 2025 dan mengalami perubahan dengan nilai sebesar Rp(1.132.508.596.592,59). Akumulasi penyusutan ini mengalami penurunan nilai sebesar Rp(113.888.214.659,70) atau (11,18%) dari Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 sebesar (Rp1.018.620.381.932,89). Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp275.499.141.117,09
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp112.138.137.642,98
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp744.463.450.482,49
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya sebesar Rp407.867.350,00

Rincian Akumulasi Penyusutan per Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam ***Lampiran 21*****.**

Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sejak tahun 2015. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Perubahan ke empat atas Peraturan bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menganut metode garis lurus secara bulanan.

Adapun rumus penyusutan yang digunakan untuk tahun 2025 adalah:

$$\textbf{Penyusutan} = \frac{\textbf{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\textbf{Masa Manfaat}}$$

Mengingat penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem yang memadai maka mulai tahun 2019 penghitungan penyusutan aset dimulai sejak pembelian/dioperasionalkan. Hal ini akan lebih menggambarkan kondisi riil beban penyusutan yang sesungguhnya.

Pada tahun 2025 terdapat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan yang berdampak pada koreksi ekuitas dikarenakan adanya reklas aset akibat perubahan kodefikasi barang / aset sesuai dengan Permendagri 108 tahun 2016 dan kesalahan perhitungan nilai akumulasi penyusutan pada tahun – tahun sebelumnya saat migrasi data ke Aplikasi SIPD e-BMD. Nilai total koreksi saldo awal akumulasi penyusutan sebesar Rp15.413.288.414,79 dengan rincian sebagai berikut.

a. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp714.421.363,39
b. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp4.797.700.020,77
c. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp9.499.016.347,29
d. Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp402.150.683,34

5.3.1.4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut sehingga penggunaan dana cadangan tidak dapat digunakan untuk yang lainnya.

5.3.1.4.a Dana Cadangan	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Sampai dengan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah belum menganggarkan pembentukan Dana Cadangan. Dana Cadangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 bersaldo nihil.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.166.836.153,61 mengalami pengurangan sebesar Rp686.062.477,21 atau 4,16% dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.480.773.676,41 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.40 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Tren
		Rp	Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	1.966.060.000,00	1.966.060.000,00	0,00
2	Akumulasi Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(1.966.060.000,00)	(1.966.060.000,00)	0,00
4	Tuntutan Gaji Rugi	1.132.420,00	3.682.770,00	(69,25)
6	Aset Tak Berwujud	6.139.070.050,00	6.139.070.050,00	0,00
7	Amortisasi	(4.243.094.795,00)	(3.863.173.090,00)	(9,83)
8	Aset Lain-lain	14.208.194.002,93	14.201.193.946,41	0,05
Jumlah		**16.105.301.677,93**	**16.480.773.676,41**	**2,28**

Untuk rincian dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.5.a Tagihan Penjualan Angsuran	31 Des 2025	31 Des 2024
	Rp1.966.060.000,00	**Rp1.966.060.000,00**

Tagihan penjualan angsuran pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.966.060.000,00 tidak mengalami perubahan dari nilai di Tahun Anggaran 2024. Tagihan penjualan angsuran terdapat pada 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perikanan.

Tagihan penjualan angsuran Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mulai dari Tahun Anggaran 2009 dan 2010 yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa hand traktor, pompa air dan power thesser. Namun pada saat pemekaran wilayah ada tagihan penjualan angsuran yang berasal dari kabupaten induk yang diserahkan ke Kabupaten Sumba Tengah yang sudah lewat jatuh tempo pengembaliannya yang diragukan dan/atau yang pengembaliannya diharapkan diterima dalam waktu lebih dari dua belas bulan. Total tagihan penjualan angsuran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp478.500.000,00 dan sudah pernah dilakukan pengembalian atau penyetoran sebesar Rp50.800.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp427.700.000,00.

Tagihan penjualan angsuran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan tagihan penjualan angsuran yang berasal dari Dinas Pertambangan dan

Energi berupa pembangkit listrik tenaga surya berupa lampu tenaga surya yang dibagikan ke masyarakat namun sampai per 31 Desember 2022 pengembaliannya macet. Lampu tenaga surya pada Dinas Pertambangan dan Energi ini ada yang berasal dari pengadaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Tahun Anggaran 2008 dan 2009 serta dari pengadaan Pemerintah Pusat di Tahun Anggaran 2011. Tagihan penjualan angsuran pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dari Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011. Pemberian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penerima atau masyarakat pada PLTS tahun 2009 limpahan pemerintah provinsi, PLTS tahun 2010 dan 2011 dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan PLTS tahun 2011 atas limpahan pemerintah pusat. Sedangkan PLTS tahun 2008 atas limpahan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat data perjanjian kerja sama tidak ada atau masih wewenang Kabupaten Sumba Barat dimana pada saat peralihan ke Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah hanya disertakan nilainya saja. Total pokok dari tagihan penjualan angsuran pada Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp807.085.000,00 per 31 Desember 2011 sedangkan di Tahun 2011 sudah ada pengembalian sebesar Rp9.000.000,00 sehingga total tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp798.085.000,00.

Tagihan penjualan angsuran pada Dinas Perikanan berupa alat tangkap casco, ketinting, gilnet monofilament, kapal mini pursina dan alat tangkap, jukung fiber glass dan cool box yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Namun pengembaliannya macet dari Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2012. Total pokok pada tagihan penjualan angsuran pada Dinas Perikanan sebesar Rp759.600.000,00 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sudah pernah dilakukan penyetoran sebesar Rp19.325.000,00 sehingga jumlah tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp740.275.000,00, dari 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan rincian diatas dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.5.b	**Akumulasi Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran**	**(Rp1.966.060.000,00)**	**(Rp1.966.060.000,00)**

Akumulasi penyisihan tagihan penjualan angsuran di Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp1.966.060.000,00) tidak mengalami perubahan nilai penyisihan dari Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp1.966.060.000,00). Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melakukan penyisihan atas tagihan penjualan angsuran karena pengembalian atas barang yang diberikan masuk dalam kategori macet. Untuk rincian penyisihan atas penjualan angsuran dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.5.c	**Tuntutan Ganti Rugi**	**Rp1.132.420,00**	**Rp3.682.770,00**

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp1.132.420,00 dan Per 31 Desember 2024 senilai Rp3.682.770,00. Senilai 31 Desember 2025 adalah nilai sisa dari penyetoran atas Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah yang telah dihilangkan oleh ASN Pemkab Sumba Tengah dengan inisial UMH.

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.1.5.d	**Aset Tak Berwujud**	**Rp6.139.070.050,00**	**Rp6.139.070.050,00**

Aset tak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tak Berwujud tidak mengalami perubahan saldo pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian Aset Tak Berwujud telah tersaji dalam **Lampiran 23.**

5.3.1.5.e Amortisasi

31 Des 2025	31 Des 2024
(Rp.4.243.094.795,00)	**(Rp.3.863.173.090,00)**

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

Amortisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp4.243.094.795,00) mengalami penurunan sebesar Rp.379.921.705,00, atau (9,83%).

Rincian Nilai Amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran 24.**

5.3.1.5.f Aset Lain-lain

31 Des 2025	31 Des 2024
Rp14.208.194.002,93	Rp14.201.193.946,41

Aset lain - lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

Saldo Awal Aset Lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp14.208.194.002,93 mengalami kenaikan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.000.056,52 atau 0,05% karena reklas dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas temuan pemeriksaan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 yang belum seluruhnya dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp81.414.704,65 dan temuan hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Tahun 2025 senilai Rp1.998.158.834,69 dengan rincian yaitu.

a. temuan belanja pegawai sebesar Rp126.581.000,00;
b. temuan belanja barang pada UPTD Pembibitan Ternak sebesar Rp72.811.200,00;
c. temuan belanja honorarium sebesar Rp118.622.634,33;
d. temuan perjalanan dinas sebesar Rp1.059.391.391,00;
e. temuan kekurangan volume 17 paket pekerjaan sebesar Rp272.441.523,13;
f. temuan terkait jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan atas paket pekerjaan putus sebesar Rp201.900.000,00;
g. temuan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultansi sebesar Rp66.029.973,23;
h. temuan pemeriksaan persediaan pakan ternak ayam joper di UPTD Pembibitan Ternak yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.500.000,00; dan
i. temuan pemeriksaan keterlambatan penyetoran pajak daerah dan pajak negara sebesar Rp73.881.113,00.

Sedangkan pengurangan dari aset lainnya yaitu.

a. Penyetoran temuan nilai kekurangan volume pekerjaan dan jasa konsultansi untuk pekerjaan tahun 2023 pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas PPO, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.437.512.563,37;
b. penyetoran temuan nilai TDF dan Pendapatan Transfer Pusat pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp8.794.000,00;
c. Penyetoran temuan Listrik di Beberapa OPD sebesar Rp187.784.000,00;
d. Penyetoran temuan honorarium di beberapa OPD sebesar Rp184.652.250,00;
e. Penyetoran temuan jasa tenaga kesehatan pada beberapa Puskesmas sebesar Rp77.164.002,78; dan

f. Penghapusan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan bermotor roda empat mobil jabatan Pimpinan DPRD periode sebelumnya yang telah dipindahkan ke Aset Lainnya dan telah dijual kepada mantan Pimpinan DPRD terkait dengan nilai buku Rp176.666.666,67.

Mutasi tambah dan kurang Aset lain-Lain secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.3.41 Rekapitulasi Saldo akhir 2025 dan Mutasi Aset Lain-Lain 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	**Saldo awal Aset Aset Lain-Lain 2024**	**14.201.193.946,41**
B	**Mutasi tambah**	**2.079.573.539,34**
	Temuan Belanja Pegawai	126.581.000,00
	Temuan Belanja Barang pada UPTD Pembibitan Ternak	72.811.200,00
	Temuan Belanja Honorarium	118.622.634,33
	Temuan Belanja Perdin	1.059.391.391,00
	Temuan Kekurangan Volume 17 Paket Pekerjaan	272.441.523,13
	Temuan terkait Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan atas paket pekerjaan putus kontrak	201.900.000,00
	Temuan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultansi	66.029.973,23
	Temuan pemeriksaan Persediaan pakan ternak ayam joper di UPTD Pembibitan Ternak yang tidak diketahui keberadaannya	6.500.000,00
	Temuan pemeriksaan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 yang belum seluruhnya dilakukan penyetoran ke Kas Daerah	81.414.704,65
	Temuan Pemeriksaan keterlambatan penyetoran pajak daerah dan pajak negara	73.881.113,00
C	**Mutasi kurang**	**2.072.573.482,82**
	Penyetoran temuan nilai kekurangan volume dan jasa konsultansi pada pekerjaan fisik tahun 2023	1.437.512.563,37
	Penyetoran temuan tagihan Listrik	187.784.000,00
	Penyetoran temuan honorarium tim pelaksana kegiatan	184.652.250,00
	Penyetoran temuan jasa tenaga Kesehatan	77.164.002,78
	Penyetoran TDF dan Pendapatan transfer pusat	8.794.000,00
	Penghapusan kendaraan yang telah di Lelang pada Sekretariat DPRD	176.666.666,67
D	**Mutasi aset tetap 2025 (selisih jumlah B-C)**	**7.000.056,52**
E	**Saldo Akhir 2025**	**14.208.194.002,93**

Tabel 5.3.42 Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain 2025

Jenis Aset	31 Des 2024	Mutasi		31 Des 2025
		Penambah	Pengurang	
Aset tetap yang disajikan dalam Aset Lain-Lain				
Aset Tetap Rusak Berat	671.805.693,16	0,00	0,00	671.805.693,16
Aset Tetap Kendaraan Hilang	47.946.142,86	0,00	0,00	47.946.142,86

Jenis Aset	31 Des 2024	Mutasi		31 Des 2025
		Penambah	Pengurang	
Peralatan dan Mesin Non Kendaraan Hilang	853.533.928,99	0,00	0,00	853.533.928,99
Aset Tetap Tanah pada Dinas PPO yang belum dihibahkan pada Sekolah Swasta	156.591.400,00	0,00	0,00	156.591.400,00
Aset Tetap Gedung Sekolah Swasta	6.538.520.421,17	0,00	0,00	6.538.520.421,17
KDP Sekolah Swasta	79.955.000,00	0,00	0,00	79.955.000,00
Kekurangan Volume Gedung dan Bangunan	532.629.266,63	0,00	(387.872.456,30)	144.756.810,33
Kekurangan Volume JlJ	433.845.869,85	0,00	(433.845.869,85)	0,00
Kelebihan Pembayaran Jasa Konstruksi	719.460.556,11	0,00	(615.794.237,22)	103.666.318,89
Bagian Umum Kendaraan lelang Tahun 2024	226.190.476,19	0,00	0,00	226.190.476,19
Sekretariat DPRD Kendaraan lelang Tahun 2024	176.666.666,67	0,00	(176.666.666,67)	0,00
TDF dan Pendapatan Transfer Pusat	8.794.000,00	0,00	(8.794.000,00)	0,00
Temuan Pemeriksaan Belanja Pegawai berupa Kelebihan pembayaran kepada pegawai pensiun dan pegawai tugas belajar	74.021.400,00	0,00	0,00	74.021.400,00
Temuan pemeriksaan belanja Perjalanan Dinas berupa kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas	446.949.861,00	0,00	0,00	446.949.861,00
Temuan pemeriksaan belanja jasa kantor berupa kelebihan pembayaran belanja Tagihan Listrik	279.464.000,00	0,00	(187.784.000,00)	91.680.000,00
Temuan pemeriksaan Belanja Jasa kantor berupa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	293.372.250,00	0,00	(184.652.250,00)	108.720.000,00
Temuan Pemeriksaan Belanja Jasa Kantor berupa Jasa Tenaga Kesehatan	77.164.002,78	0,00	(77.164.002,78)	0,00
Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain lain atas Aset yang akan dihibahkan ke Sekolah Swasta	82.045.796,00	0,00	0,00	82.045.796,00
Temuan Belanja Pegawai	0,00	126.581.000,00	0,00	126.581.000,00
Temuan Belanja Barang pada UPTD Pembibitan Ternak	0,00	72.811.200,00	0,00	72.811.200,00
Temuan Belanja Honorarium	0,00	118.622.634,33	0,00	118.622.634,33
Temuan Belanja Perdin	0,00	1.059.391.391,00	0,00	1.059.391.391,00
Temuan Kekurangan Volume 17 Paket Pekerjaan	0,00	272.441.523,13	0,00	272.441.523,13

Jenis Aset	31 Des 2024	Mutasi		31 Des 2025
		Penambah	Pengurang	
Temuan terkait Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan atas paket pekerjaan putus kontrak	0,00	201.900.000,00	0,00	201.900.000,00
Temuan kelebihan pembayaran pada tujuh kontrak jasa konsultansi	0,00	66.029.973,23	0,00	66.029.973,23
Temuan pemeriksaan Persediaan pakan ternak ayam joper di UPTD Pembibitan Ternak yang tidak diketahui keberadaannya	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Temuan pemeriksaan kekurangan volume pekerjaan tahun 2024 yang belum seluruhnya dilakukan penyetoran ke Kas Daerah	0,00	81.414.704,65	0,00	81.414.704,65
Temuan Pemeriksaan keterlambatan penyetoran pajak daerah dan pajak negara	0,00	73.881.113,00	0,00	73.881.113,00
Dana Bergulir				
Ternak Bergulir	2.502.237.215,00	0,00	0,00	2.502.237.215,00
Jumlah	**14.201.193.946,41**	**2.079.573.539,34**	**(2.072.573.482,82)**	**14.208.194.002,93**

Rincian saldo Aset Lain-lain berikut nilai penghapusannya per Satuan Kerja Perangkat Daerah tersaji pada ***Lampiran 25*.**

5.3.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah daerah terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari satu tahun atau diharapkan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp3.104.969.576,61. mengalami kenaikkan sebesar Rp2.838.818.351,61 atau 1.066,62% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp266.151.225,00 dapat dirinci sebagai berikut:

		31 Des 2025	31 Des 2024
5.3.2.1.a	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**Rp60.687.919,61**	**Rp39.845.265,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang harus diserahkan ke pihak lain. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp60.687.919,61 mengalami kenaikkan dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp39.845.265,00. Saldo Hutang PFK terdiri dari Pajak Negara (PPn, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23) yang terlambat disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada empat SKPD, Bendahara Dana BOSP pada tujuh Sekolah, dan Bendahara Dana Kapitasi pada tujuh Puskesmas. Utang PFK tersebut sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada bulan Tahun 2026.

Rincian saldo PFK per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 26.**

5.3.2.1.b	Utang Belanja Modal – Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp0,00	**Rp226.305.960,00**

Utang Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 Senilai Rp.0,00 dan Pada Tahun 2024 Senilai Rp.226.305.960,00 mencatat atas Utang pemerintah daerah kepada Pihak ke III atas Paket pekerjaan Rehabilitasi D.I Lokurata dengan nilai kontrak Rp.1.885.883.000,00 dan pertanggal 31 Desember 2024 telah dilakukan pembayaran senilai Rp.1.659.577.040,00 dan telah dilakukan PHO pada tanggal 21 Januari 2025 atas keterlambatan pekerjaan tersebut pihak ke III telah melakukan kewajibannya, sehingga atas kekurangan pembayaran kepada Pihak Ke III senilai Rp.226.305.960,00 sudah dilakukan pembayaran pada Tanggal 28 November 2025, sehingga atas Utang Belanja Modal atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah lunas/terbayarkan kepada Pihak III.

5.3.2.1.c	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp2.895.989.000,00	**Rp0,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 senilai Rp2.895.989.000,00 yang merupakan kelebihan pembayaran atas Dana Bagi Hasil Pajak Senilai Rp948.187.000,00 dan Dana Bagi Hasil SDA Senilai Rp1.947.802.000,00 Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.120 Tahun 2025 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2025, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil. Penambahan tersebut berdampak pada koreksi ekuitas.

5.3.2.1.d	Pendapatan dibayar dimuka	31 Des 2025	31 Des 2024
		Rp148.292.657,00	**Rp0,00**

Pendapatan dibayar dimuka adalah Pendapatan atas penerimaan Pajak PBB-P2 dimana terdapat kelebihan pembayaran atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh masyarakat atas Peraturan Bupati No.12 Tahun 2024 dan Surat Keputusan Bupati No.Kep/HK/152/2024 tentang kenaikkan tarif PBB-P2, dimana masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah dan pada Tahun 2025 atas Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati dimaksud telah dicabut dan perhitungan PBB-P2 kembali di Tahun 2024, Maka Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati No. BKD.910/451.a/53.17/XI/2025 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah No. Kep/HK/16/2025. Atas nilai tersebut diatas maka akan dikompensasi atas Pembayaran Pajak PBB-P2 di Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2026.

5.3.3. EKUITAS

5.3.3.1 Ekuitas	TA 2025	TA 2024
	Rp1.340.340.817.646,57	**Rp1.405.100.800.771,02**

Ekuitas merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Jumlah ekuitas pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp1.340.340.817.646,57 mengalami penurunan senilai Rp64.759.983.124,45 atau 4,61% dari Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.405.100.800.771,02

5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang tercermin dalam Pendapatan – LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional per 31 Desember 2025 disajikan dengan perbandingan laporan operasional per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan – LO

Pendapatan Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) dan pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi dimana Pendapatan - LO pada Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pendapatan - LO Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp520.735.843.755,40 mengalami penurunan sebesar (Rp72.183.321.553,68) atau (12,17%) dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp592.919.165.309,08 dan diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain - lain Pendapatan yang Sah . secara umum terdapat perbedaan jumlah pendapatan antara Pendapatan – LO dan Pendapatan LRA, hal apa saja yang mempengaruhi perbedaan tersebut dapat di baca pada setiap akun rekening yang menimbulkan perbedaan tersebut. Adapun rincian nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Pendapatan - LO	Jumlah 2025 (Rp)	Jumlah 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	24.808.970.823,41	23.948.030.252,50	860.940.570,91	3,60%
2	Pendapatan Transfer	491.203.417.100,00	563.496.928.759,00	(72.293.511.659,00)	(12,83%)
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	(13,71%)
Jumlah		**520.735.843.755,40**	**592.919.165.309,08**	**(72.183.321.553,68)**	**(12,17%)**

Pendapatan - LO mengalami penurunan pada Sumber Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun saldo masing - masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

TA 2025	TA 2024
Rp24.808.970.823,41	**Rp23.948.030.252,50**

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Sumba Tengah ini menggambarkan saldo pada Laporan Operasional untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024. Pendapatan Asli Daerah - LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp24.808.970.823,41 mengalami peningkatan sebesar Rp860.940.570,91 atau sebesar 3,60% dari Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.948.030.252,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.485.256.697,14	7.877.956.492,61	(392.699.795,47)	(4,98%)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.182.870.544,00	9.940.561.900,46	242.308.643,54	2,44%
3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30%
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	2.469.701.467,27	3.370.382.143,43	(900.680.676,16)	(26,72%)
Jumlah		**24.808.970.823,41**	**23.948.030.252,50**	**860.940.570,91**	**3,60%**

Untuk uraian saldo masing - masing jenis Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah - LO

TA 2025	TA 2024
Rp7.485.256.697,14	**Rp7.877.956.492,61**

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional bersaldo sebesar Rp Rp7.485.256.697,14 adalah pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2025. sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp7.877.956.492,61 mengalami penurunan sebesar (Rp.392.699.795,47) atau sebesar (4,98%) Pendapatan Pajak Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pajak Hotel	141.422.619,90	20.645.000,00	120.777.619,90	585,02%
2	Pajak Restoran	1.108.007.259,94	1.156.268.216,00	(48.260.956,06)	(4,17%)
3	Pajak Reklame	12.722.525,00	240.000,00	12.482.525,00	5201,05%
4	Pajak Penerangan Jalan	804.202.364,00	734.526.302,00	69.676.062,00	9,49%
5	Pajak Galian Gol C	1.215.836.391,30	4.496.885.788,61	(3.281.049.397,31)	(72,96%)
6	PBB-P2	2.624.497.717,00	1.201.060.324,00	1.423.437.393,00	118,52%
7	BPHTB	183.851.515,00	268.330.862,00	(84.479.347,00)	(31,48%)
8	Opsen PKB	615.900.214,00	-	615.900.214,00	100,00%
9	Opsen BBNKB	778.816.091,00	-	778.816.091,00	100,00%
Jumlah		**7.485.256.697,14**	**7.877.956.492,61**	**(392.699.795,47)**	**(4,98%)**

Pendapatan Pajak Daerah – LO pada Laporan Operasional tahun ini mengalami penurunan sebesar (4,98%) yaitu pada pajak Restoran, Pajak mineral bukan logam, dan BPHTB disebabkan keadaan perekonomian secara nasional melemah sehingga berkurangnya penikmat rumah makan dan resto pada pajak restoran, adapun pada pajak mineral bukan logam dikarenakan dengan dilaksanakan amant Perda No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .atas opsi pembagian pajak mineral bukan logam dengan pemda prov ntt maka angka pendapapatan untuk akun pajak ini berkurang,sedangkakkan BPHTP pun sama hal nya demikian.

Secara sadar masyarakat berkerjasama dengan pemerintah desa dan Pemda mulai giat melaksanakan kewajiban nya yaitu membayar pajak PBB-P2 sehingga di Tahun 2025 mengalami peningkatan, walaupun dilihat pendapatan pajak secara umum mengalami penurunan disebabkan antara lain hal seperti yang di jabarkan di atas tadi.

Sedangkan atas kenaikan pajak hotel adalah bertambah nya beberapa vila dan penginapan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah.

Tabel. 5.4.4 Selisih Realisasi Pajak Daerah pada LRA dengan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*(5) = (4) – (3)*
1	Pajak Hotel	126.447.452,30	141.422.619,90	14.975.167,60
2	Pajak Restoran	1.084.792.959,94	1.108.007.259,94	23.214.300,00
3	Pajak Reklame	12.722.525,00	12.722.525,00	0,00
4	Pajak Penerangan Jalan	804.202.364,00	804.202.364,00	0,00
5	Pajak MBLB	1.200.237.200,43	1.215.836.391,30	15.599.190,87
6	PBB-P2	666.123.841,00	2.624.497.717,00	1.958.373.876,00
7	BPHTB	183.851.515,00	183.851.515,00	0,00
8	Opsen PKB	615.900.214,00	615.900.214,00	0,00
9	Opsen BBNKB	778.816.091,00	778.816.091,00	0,00
	Total	**5.473.094.162,67**	**7.485.256.697,14**	**2.012.162.534,47**

Terdapat selisih lebih besar Rp2.012.162.534,47 antara Pendapatan Pajak Daerah – LO dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA kondisi ini disebabkan karena pada Pendapatan Pajak Daerah LO PBB P2 terdapat penambahan piutang pajak PBB P2 untuk kegiatan sampai dengan tahun 2025 sehingga tercatat selisih demikian pada LRA dan LO untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Selisih Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah - LO dijelaskan sebagai berikut:
Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA sebesar Rp2.012.162.534,47 merupakan penambahan piutang Tahun 2025 pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak Mblb, dan PBB-P2.

		TA 2025	TA 2024
5.4.1.1.b	**Pendapatan Retribusi Daerah – LO**	**Rp10.182.870.544,00**	**Rp9.940.561.900,46**

Pendapatan Retribusi daerah -LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran berjalan, berdasarkan basis akrual. Pendapatan ini diakui saat timbulnya hak atas retribusi atau saat ketetapan retribusi diterbitkan, bukan semata-mata saat kas diterima.

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh 13 (tiga belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil yang tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan retribusi daerah bersaldo sebesar Rp10.182.870.544,00 adalah pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp9.940.561.900,46 mengalami peningkatan sebesar Rp242.308.643,54 atau 2,44%

Terdapat selisih lebih pada Pendapatan Retribusi Daerah LO sebesar Rp7.106.798.099,00 dari Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Rp3.076.018.445,00 karena pada tahun 2025 di Reklasifikasinya Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (Non Kapitasi) Ke Retribusi pelayan Kesehatan sehingha menabah pengakuan Retribusi di LO. Mutasi Tambah atas Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (non kapitasi) ke Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Selisih kurang di LRA adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan di RSUD dan Puskesmas atas Jasa layanan (non kapitasi) direklasifikasi kan ke akun Retribusi pelayanan kesehatan LO Rp6.300.650.831,00 dan Mutasi Kurang atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 yang disetorkan pada tahun 2025 sebesar (Rp859.693.932,00).sehingga dalam Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 nilai saldo LO lebih besar dari nilai saldo LRA pada Retribusi Daerah sebesar Rp6.300.650.831,00 dan pada tahun 2025 adanya pembayaran atas piutang retribusi pelayanan kesehatan di LRA Tahun 2024 yang di setor tahun 2025 sebesar (859.693.932,00) dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Pendapatan Retribusi Daerah per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
Retribusi Jasa Umum					
1	Dinas Kesehatan	-	0	-	
2	Rumah Sakit Umum Daerah	6.385.698.180,00	6.435.602.249,00	(49.904.069,00)	(0,78%)
3	Puskesmas Wairasa	253.451.500,00	171.292.000,00	82.159.500,00	47,96%
4	Puskesmas Lendiwacu	138.604.000,00	115.707.400,00	22.896.600,00	19,79%
5	Puskesmas Malinjak	181.519.500,00	212.179.000,00	(30.659.500,00)	(14,45%)
6	Puskesmas Lawonda	296.738.300,00	270.164.000,00	26.574.300,00	9,84%
7	Puskesmas Maradesa	127.044.900,00	143.999.900,00	(16.955.000,00)	(11,77%)
8	Puskesmas Mananga	317.782.700,00	303.102.500,00	14.680.200,00	4,84%
9	Puskesmas Weeluri	102.620.500,00	107.068.100,00	(4.447.600,00)	(4,15%)
10	Puskesmas Pahar	138.296.000,00	140.290.500,00	(1.994.500,00)	(1,42%)
11	Puskesmas Ubu riri	42.800.000,00	37.199.500,00	5.600.500,00	15,06%
13	Dinas Lingkungan Hidup	40.469.500,00	30.714.000,00	9.755.500,00	31,76%
14	Dinas Perhubungan	122.387.000,00	0	122.387.000,00	100,00%
Retribusi Jasa Usaha				-	
1	UPTD Air Minum	158.147.600,00	74.249.301,00	83.898.299,00	113,00%
2	Dinas Lingkungan Hidup	2.283.000,00	17.628.000,00	(15.345.000,00)	(87,05%)
4	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	162.001.000,00	176.384.000,00	(14.383.000,00)	(8,15%)
5	Dinas Perikanan	60.000.000,00	64.353.000,00	(4.353.000,00)	(6,76%)
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	30.030.000,00	810.228.000,46	(780.198.000,46)	(96,29%)
7	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	766.356.502,00	0,00	766.356.502,00	100,00%
8	Dinas Peternakan	1.760.000,00	2.100.000,00	(340.000,00)	(16,19%)
9	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	509.163.000,00	524.380.000,00	(15.217.000,00)	(2,90%)
11	Bagian Umum	94.560.000,00	60.120.000,00	34.440.000,00	57,29%
12	BKD	34.292.000,00	43.592.000,00	(9.300.000,00)	(21,33%)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	216.865.362,00	200.208.450,00	16.656.912,00	8,32%
Jumlah		**10.182.870.544,00**	**9.940.561.900,46**	**242.308.643,54**	**2,44%**

Masing - masing saldo pendapatan retribusi daerah pada Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 menurut jenisnya sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Uraian	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp
1	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.385.698.180,00	6.435.602.249,00
2	Puskesmas Wairasa	Retribusi Pelayanan Kesehatan	253.451.500,00	171.292.000,00
3	Puskesmas Lendiwacu	Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.604.000,00	115.707.400,00
4	Puskesmas Malinjak	Retribusi Pelayanan Kesehatan	181.519.500,00	212.179.000,00
5	Puskesmas Lawonda	Retribusi Pelayanan Kesehatan	296.738.300,00	270.164.000,00
6	Puskesmas Maradesa	Retribusi Pelayanan Kesehatan	127.044.900,00	143.999.900,00
7	Puskesmas Mananga	Retribusi Pelayanan Kesehatan	317.782.700,00	303.102.500,00
8	Puskesmas Weeluri	Retribusi Pelayanan Kesehatan	102.620.500,00	107.068.100,00
9	Puskesmas Pahar	Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.296.000,00	140.290.500,00
10	Puskesmas Ubu riri	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.800.000,00	37.199.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.469.500,00	30.714.000,00
12	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	122.387.000,00	52.468.000,00
Jumlah			**8.147.412.080,00**	**8.019.787.149,00**

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tabel 5.4.7 Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp
1	UPTD Air Minum	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Retribusi Pemakaian Alat	158.147.600,00	74.249.301,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Laboratorium	2.283.000,00	17.628.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	Retribusi Izin Bangunan ~ Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	216.865.362,00	200.208.450,00
4	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ~ Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	162.001.000,00	123.916.000,00
5	Dinas Perikanan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ~ Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	60.000.000,00	64.353.000,00
6	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Retribusi Pemakaian Alat	766.356.502,00	810.228.000,46
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah~Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	30.030.000,00	
7	Dinas Peternakan	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah~Retribusi	1.760.000,00	2.100.000,00

No	SKPD	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024
			Rp	Rp
		Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan		
8	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ~ Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	509.163.000,00	524.380.000,00
9	Bagian Perekonomian	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah~Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0	
10	Bagian Umum	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~Retribusi Pemakaian Ruangan	94.560.000,00	60.120.000,00
11	Badan Keuangan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ~ Retribusi Pemakaian Ruangan	34.292.000,00	43.592.000,00
Jumlah			**2.035.458.464,00**	**1.920.774.751,46**

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disedikan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah. Pada tabel diatas total retribusi jasa usaha sesuai dengan realisasi penerimaan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.035.458.464,00 yang di akui pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan dari retribusi jasa usaha bersumber dari 11 SKPD yaitu

Dinas Lingkungan Hidup atas Pemakaian Laboratorium, Dinas Koperasi UKM Indag atas Fasilitas Pasar Toko/Kios yang dikontrakan, Dinas Perikanan atas Penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan di beberapa balai benih ikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan atas Retribusi Pemakaian Alat pertanian dan Retribusi Penjualan Produksi hasil usaha daerah berupa Bibit atau benih tanaman hasil produksi dari beberapa kebun dinas yang tersebar di wilayah kabupaten sumba tengah, Dinas peternakan atas penjualan produksi hasil usaha daerah yaitu Bibit Ternak, Badan Keuangan Daerah yaitu retribusi pemakaian ruangan, pada Setda Bagian Umum yaitu retribusi pemakaian ruangan dalam hal ini pemakaian ruangan dan perabotan di Gedung Pertemuan Alfa Omega, UPTD Air Minum Retribusi atas pemakaian alat penyalur air bersih ke saluran rumah tangga, UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak atas penjualan hasil produksi ternak dan bibit ternak. Terdapat pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada Dinas Perikanan berasal dari penjualan ikan konsumsi dan bibit ikan yang dikelola oleh SKPD dimana Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memiliki Balai Benih Ikan Prailiang, UPR Waitaru, UPT Waideri dan Tambak Ikan Mamboro dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berasal dari penjualan hasil kebun dinas dan penjualan benih/bibit. Dimana Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melalui SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki 3 (tiga) kebun dinas yaitu Kebun Dinas Waimamongu, Kebun Dinas Waimanu dan Kebun Dinas Konda Maloba.

Terdapat selisih realisasi Pendapatan Retribusi antara Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional atas akun Pendapatan Retribusi Daerah, Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA senilai Rp. 3.076.018.445,00 dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO senilai Rp. 10.182.870.544,00 selisih sebesar Rp. 7.106.798.099,00 dapat dilihat didalam tabel berikut ini :

Tabel 5.4.8 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**(5) = (4) – (3)**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	877.757.481,00	7.984.555.580,00	7.106.798.099,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.469.500,00	40.469.500,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	122.387.000,00	122.387.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.055.639.102,00	1.055.639.102,00	0,00
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	162.001.000,00	162.001.000,00	0,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.953.000,00	600.953.000,00	0,00
8	Retribusi Perizinan Tertentu	216.865.362,00	216.865.362,00	0,00
	Total	**3.076.072.445,00**	**10.182.870.544,00**	**7.106.798.099,00**

Dapat dijelaskan atas selisih pada tabel diatas pada Akun Retribusi Pelayanan Kesehatan senilai Rp. 7.106.798.099,00 Selisih disebabkan karena adanya Penambahan nilai Reklasifikasi dari Pendapatan Lain-lain PAD - Pendapatan BLUD - LO ke Pendapatan Retribusi - Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO Sebesar Rp7.106.798.099,00 dimana seperti yang telah di jelaskan di atas .

5.4.1.1.c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

TA 2025	TA 2024
Rp4.671.142.115,00	**Rp2.759.129.716,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan - LO pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta dimana pendapatan ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersaldo sebesar Rp4.671.142.115,00 adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp2.759.129.716,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.912.012.399,00 atau (69,30%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.9 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah **2025**	Jumlah **2024**	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	**Rp**	**Rp**	
1	PT. BPD NTT	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00	1.912.012.399,00	69,30%
Jumlah		**4.671.142.115,00**	**2.759.129.716,00**	**1.912.012.399,00**	**69,30%**

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – Lo adalah perolehan deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT.

		TA 2025	TA 2024
5.4.1.1.d	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO**	**Rp2.469.701.467,27**	**Rp3.370.382.143,43**

Lain lain Pendapatan asli daerah yang sah LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pendapatan ini dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan yang terdiri dari Dinas Koperasi UKM Indag dan Badan Keuangan Daerah. Pendapatan asli daerah lainnya bersaldo sebesar Rp2.469.701.467,27 adalah pendapatan asli daerah lainnya Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.370.382.143,43 mengalami penurunan sebesar (Rp900.680.676,16) atau (26,72%) Pendapatan asli daerah lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian menurut SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Dinas Koperasi.UKM dan Perindag	70.000,00	1.104.000,00	(1.034.000,00)	(93,66%)
2	Badan Keuangan Daerah	2.469.631.467,27	3.369.278.143,43	(899.646.676,16)	(6,70%)
Jumlah		**2.469.701.467,27**	**3.370.382.143,43**	**(900.680.676,16)**	**(26,72%)**

Pendapatan asli daerah lainnya menurut jenis per Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saldo 2025 adalah **:**

Tabel 5.4.11 Pendapatan Asli Daerah Lainnya per jenis Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Uraian	Jumlah TA 2025	Jumlah TA 2024
			Rp	Rp
1	Dinas Koperasi.UKM dan Perindag	Hasil dari Pengelolaan dana bergulir	70.000,00	1.104.000,00
3	Badan Keuangan Daerah	Jasa giro kas daerah	327.073.953,69	525.164.779,88
4	Badan Keuangan Daerah	Bunga Deposito	1.029.800.827,04	897.842.577,52
5	Badan Keuangan Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	512.698.271,99	1.729.132.476,29
6	Badan Keuangan Daerah	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	354.885,84	219.687,00
7	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	303.650.869,31	129.184.182,37
8	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Denda Pajak	39.879.365,40	37.483.376,02
9	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Denda Retribusi	11.520,00	1.116.000,00
10	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan dari Pengembalian	54.261.774,00	49.135.064,35
11	Badan Keuangan Daerah	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	201.900.000,00	0
Jumlah			**2.469.701.467,27**	**3.370.382.143,43**

Penurunan saldo pada Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang terbesar adalah atas di reklasifikasikan nya akun dari saldo penerimaan Dana FKTP di 9 (sembilan) Puskesmas dan 1 RSUD di Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan ke Retribusi pelayanan kesehatana Tahun Anggaran 2025.

Terdapat selisih kurang antara Realisasi pada akun Lain-Lain PAD yang sah pada LRA dan Akun Lain-Lain PAD yang sah pada LO senilai (Rp.7.597.545.820,42) dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4.12 Tabel Selisih Lain-lain PAD yang sah pada LRA dan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	(5) = (4) – (3)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	86.341.000,00	0	(86.341.000,00)
2	Jasa Giro	327.073.953,69	327.073.953,69	-
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000,00	70.000,00	-
4	Pendapatan Bunga	1.029.800.827,04	1.029.800.827,04	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.723.252.261,41	512.698.271,99	(1.210.553.989,42)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	354.885,84	354.885,84	-
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	303.650.869,31	303.650.869,31	-
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	39.879.365,40	39.879.365,40	-
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	11.520,00	11.520,00	-
10	Pendapatan dari Pengembalian	54.261.774,00	54.261.774,00	-
11	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	6.300.650.831,00	0	(6.300.650.831,00)
12	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	-
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO		201.900.000,00	201.900.000,00
Total		**9.865.347.287,69**	**2.469.701.467,27**	**(7.395.645.820,42)**

Dapat dijelaskan selisih pada rekening Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah – LO dan LRA dapat di jelaskan sebagai berikut :

Mutasi Kurang atas Reklasifikasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (non kapitasi) ke Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO (6.300.650.831,00), Mutasi Kurang atas Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang di reklas ke Surplus kegiatan Operasional lainnya (86.341.000,00), Mutasi Kurang atas penyetoran piutang lain-lain PAD atas Temuan Kekurangan Volume pekerjaan fisik Tahun 2024 yang disetorkan pada tahun 2025 (555.804.773,90), Mutasi kurang atas setoran TGR Kendaraan yang hilang (2.550.350.000,00), Mutasi Kurang atas setoran TGR kelebihan pembayaran honorarium (184.652.250,00), Mutasi Kurang atas setoran TGR kelebihan pembayaran Tagihan Listrik (187.784.000,00) Mutasi Kurang atas setoran TGR Kekurangan volume pekerjaan fisik (6.721.185.000,70) Mutasi kurang atas setoran TGR kelebihan pembayaran Jasa Konsultasi (273.041.429,82).

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

TA 2025	TA 2024
Rp491.203.417.100,00	**Rp563.496.928.759,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Sumba Tengah adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp491.203.417.100,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.72.293.511.659,00) atau sebesar (12,83%) dari pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 563.496.928.759,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.13 Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
1	Dana Bagi Hasil	3.388.226.000,00	3.151.502.000,00	236.724.000,00	7,51%
2	Dana Alokasi Umum	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00	(27.368.922.120,00)	(7,59%)
3	Dana Alokasi Khusus	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00	(40.405.397.573,00)	(24,12%)
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			-	
4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	
5	Dana Penyesuaian	-	-	-	
6	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00	1.139.148.000,00	8,81%
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			-	
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.228.633.435,00	19.323.697.401,00	(6.095.063.966,00)	(31,54%)
8	Bantuan Keuangan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00%
Jumlah		**491.203.417.100,00**	**563.496.928.759,00**	**(72.293.511.659,00)**	**(12,83%)**

Tabel tersebut diatas rinciannya sebagai berikut:

5.4.1.2.a Dana Bagi Hasil - LO

TA 2025	TA 2024
Rp3.388.226.000,00	**Rp3.151.502.000,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode anggaran berjalan, berasal dari bagi hasil pajak pusat (PBB, PPh, Cukai) dan bagi hasil sumber daya alam (berdasarkan realisasi penerimaan, bukan kas yang diterima. DBH ini bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal, dicatat berbasis akrual, dan berfokus pada hak atas pendapatan pajak daerah tersebut.

Dana bagi hasil LO bersaldo sebesar Rp3.388.226.000,00 adalah dana bagi hasil Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp3.151.502.000,00. Terjadi peningkatan Rp.236.724.000,00 atau 7,51%.

Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.14 Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
A	**Bagi Hasil Pajak**				
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	731.463.900,00	451.892.000,00	279.571.900,00	61,87%
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	1.309.613.100,00	1.039.312.000,00	270.301.100,00	26,01%
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	43.488.000,00	32.405.000,00	11.083.000,00	34,20%
4	Bagi hasil cukai tembakau	136.497.000,00	100.634.000,00	35.863.000,00	35,64%
	Jumlah A	**2.221.062.000,00**	**1.624.243.000,00**	**596.819.000,00**	**36,74%**
B	**Bagi Hasil SDA**				
1	Bagi hasil SDA~Panas Bumi	44.636.000,00	32.343.000,00	12.293.000,00	38,01%
2	Bagi hasil SDA~Mineral dan Batubara	1.081.000,00	683.000,00	398.000,00	58,27%
3	Bagi hasil SDA~Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	9.529.000,00	0,00	9.529.000,00	100,00%

4	Bagi hasil SDA~Perikanan	0,00	1.494.233.000,00	(1.494.233.000,00)	(100,00%)
5	Bagi Hasil – TDF Non Tunai	1.111.918.000,00	0,00	1.111.918.000,00	100,00%
	Jumlah B	**1.167.164.000,00**	**1.527.259.000,00**	**(360.095.000,00)**	**23,58%**
Jumlah (A + B)		**3.388.226.000,00**	**3.151.502.000,00**	**236.724.000,00**	**7,51%**

Terdapat selisih antara Dana Bagi Hasil - LO Rp3.388.226.000,00 dan LRA Rp3.397.020.000,00 . Selisih kurang pada LO sebesar Rp(8.794.000,00) yaitu mutasi kuramg atas penerimaan TDF TA 2024 yang di transfer di tahun 2025.

5.4.1.2.b Dana Alokasi Umum - LO

TA 2025	TA 2024
Rp333.239.140.981,00	**Rp360.608.063.101,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) LO adalah Pendapatan Transfer-LO yang bersumber dari APBN, yang diakui dalam Laporan Operasional (LO) pemerintah daerah sebagai hak pendapatan yang menambah nilai kekayaan bersih

Saldo Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2025 sebesar Rp333.239.140.981,00 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp360.608.063.101,00 mengalami penurunan sebesar (Rp27.368.922.120,00) atau (7,59%) .

5.4.1.2.c Dana Alokasi Khusus

TA 2025	TA 2024
Rp127.079.261.684,00	**Rp167.484.659.257,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) LO (Laporan Operasional) adalah dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus—baik fisik maupun nonfisik—yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus berjumlah sebesar Rp127.079.261.684,00 di Tahun Anggaran 2025 sedangkan Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp167.484.659.257,00 mengalami penurunan sebesar (Rp40.405.397.573,00) atau sebesar (24,12%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.15 Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran Anggaran 2025

NO	URAIAN			Realisasi 2025	Realisasi 2024
				Rp	Rp
A	**DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**				
	1	DAK PENUGASAN		**48.566.299.405,00**	**112.784.340.291,00**
		-	Pendidikan PAUD	249.684.995,00	515.503.384,00
		-	Pendidikan SD	223.603.592,00	1.857.855.398,00
		-	Pendidikan SMP	414.195.795,00	5.596.385.808,00
		-	Kesehatan dan KB-Penguatan Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	9.519.227.364,00
		-	Kesehatan dan KB-Keluarag Berencana	0,00	189.993.887,00
		-	Jalan-Jalan	0,00	8.097.542.950,00
		-	Jalan – Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	17.758.360.200,00
		-	Jalan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	0,00	10.570.387.400,00
		-	Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	8.199.427.200,00
		-	Transportasi Perdesaan - Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi untuk Pembangunan Inklusif di Daerah Afirmasi	0,00	8.229.868.900,00
		-	Irigasi - Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	5.039.676.000,00
		-	Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate	0,00	12.935.668.350,00
		-	Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	3.807.887.750,00
		-	Air minum – air minum	12.926.380.900,00	14.096.539.700,00
		-	Sanitasi -sanitasi	4.999.654.000,00	6.370.016.000,00

NO	URAIAN		Realisasi 2025	Realisasi 2024
			Rp	Rp
B	**DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK**			
	1	BOS Reguler	14.300.449.350,00	14.571.324.000,00
	2	BOS Kinerja	755.000.000,00	767.500.000,00
	3	Tunjangan Profesi Guru	29.406.438.900,00	14.580.387.000,00
	4	Tambahan Penghasilan Guru	320.750.000,00	1.319.210.000,00
	5	Tunjangan Khusus Guru	8.161.017.060,00	7.105.670.000,00
	6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.858.555.100,00	2.485.775.000,00
	7	BOP Pendidikan Kesetaraan	179.684.800,00	137.360.000,00
	8	BOK-Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan	6.914.830.361,00	4.465.664.894,00
	9	BOK-Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	0,00	7.378.592.869,00
	10	BOK-Bantuan Operasional KesehatanBPOM	232.204.000,00	0,00
	11	BOKB-Bantuan Operasional KB	615.009.572,00	1.238.835.203,00
	13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00
	14	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Pangan	3.300.000.000,00	650.000.000,00
	15	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Pertanian	2.147.115.000,00	0,00
	16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub BOP Penyuluh Pertanian	656.706.000,00	0,00
JUMLAH			**78.512.962.279,00**	**54.700.318.966,00**
TOTAL A + B			**127.079.261.684,00**	**167.484.659.257,00**

Total realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus pada tabel diatas adalah sebesar Rp127.079.261.684,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp48.566.299.405,00 dan Dana Alokasi Non Fisik sebesar Rp78.512.962.279,00

5.4.1.2.d Insentif Fiskal - LO

TA 2025	TA 2024
Rp14.068.155.000,00	**Rp12.929.007.000,00**

Insentif Fiskal (sebelumnya Dana Insentif Daerah/DID) adalah dana penghargaan dari APBN yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah atas kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan umum, dan pelayanan dasar, seperti pengendalian inflasi dan penurunan stunting Dana ini bertujuan memacu perbaikan kinerja daerah.

Kriteria pemberian dana insentif fiskal Perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, Pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional, Pengendalian inflasi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan membantu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan Dana insentif fiskal harus diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat

Insentif Fiskal Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 bersaldo Rp14.068.155.000,00 mengalami peningkatan Rp1.139.148.000,00 atau 8,81% dari Tahun Anggaran 2024 bersaldo Rp12.929.007.000,00 .

5.4.1.2.e Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

TA 2025	TA 2024
Rp13.228.633.435,00	**Rp19.323.697.401,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO (Laporan Operasional) adalah hak pemerintah (pusat/daerah) yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas) berdasarkan basis akrual. Pendapatan ini diakui saat timbulnya hak atas pajak atau pendapatan direalisasi, bukan hanya saat kas diterima

Pendapatan bagi hasil pajak bersaldo sebesar Rp13.228.633.435,00 adalah pendapatan bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp19.323.697.401,00 mengalami penurunan sebesar (Rp6.095.063.966,00) atau (31,54%). Pendapatan bagi hasil pajak merupakan alokasi dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Tabel 5.4.16.a Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	309.076.088,00	3.713.363.758,00	(3.404.287.670,00)	(91,68)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	2.765.206.286,00	(2.765.206.286,00)	(100,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.127.586.618,00	5.278.756.615,00	(151.169.997,00)	(2,86)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.093.377,00	1.802.933,00	290.444,00	16,11
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.789.877.352,00	7.564.567.809,00	225.309.543,00	2,98
Jumlah		**13.228.633.435,00**	**19.323.697.401,00**	**(6.095.063.966,00)**	**(31,54)**

Terdapat selisih Pada Akun Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO dan pendapatan bagi hasil Pajak-LRA senilai (Rp2.089.916.196,00) dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.16 Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA dan LO

No	Jenis Pendapatan	Jumlah LRA (Rp)	Jumlah LO (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	(5) = (4) – (3)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.428.244.560,00	309.076.088,00	(1.119.168.472,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.527.267.058,00	0,00	(1.527.267.058,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.475.262.449,00	5.127.586.618,00	(1.347.675.831,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.405.213,00	2.093.377,00	(311.836,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.789.877.352,00	7.789.877.352,00	-
	Total	**17.223.056.632,00**	**13.228.633.435,00**	**(3.994.423.197,00)**

Selisih kurang pada LRA di bandingkan dengan LO sebesar Rp(3.994.423.197,00) disebabkan adanya akumulasi penerimaan piutang transfer Provinsi Tahun 2024 yang di transfer di Tahun 2025 sebesar (Rp4.303.551.743,00) dan penambahan pencatatan piutang transfer Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp309.128.546,00.

5.4.1.2.f Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

TA 2025	TA 2024
Rp200.000.000,00	**Rp0,00**

Pendapatan dari sumber bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah bersaldo Rp200.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 yang bersaldo sebesar Rp0,00. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dalam hal ini adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi untuk kabupaten sumba tengah yaitu bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

TA 2025	TA 2024
Rp4.723.455.831,99	**Rp5.474.206.297,58**

pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang berasal dari Pemerintah Pusat berjumlah sebesar Rp4.723.455.831,99 dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp5.474.206.297,58 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.17 Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.723.455.831,99	5.474.206.297,58	(750.750.465,59)	(13,71%)
	Jumlah	**4.723.455.831,99**	**5.474.206.297,58**	**(750.750.465,59)**	**(13,71%)**

Nilai Realisasi LRA Tahun 2025 sebesar Rp9.342.731.248,77 sehingga terdapat selisih sebesar Rp(4.619.275.416,78) yang merupakan pengembalian dana hibah Pilkada tahun 2024 sebesar Rp4.542.111.414,00 dan Pengembalian atas Temuan Jasa Tenaga Kesehatan TA. 2024 yang disetor pada TA. 2025 (Tahun 2024 diakui sebagai Aset Lainnya TGR) senilai Rp77.164.002,78.

		TA 2025	TA 2024
5.4.1.3.a	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO**	**Rp4.723.455.831,99**	**Rp5.474.206.297,58**

Pendapatan lainnya bersaldo sebesar Rp4.723.455.831,99 adalah pendapatan lainnya di Tahun Anggaran 2025 sedangkan di Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp5.474.206.297,58 terjadi penurunan sebesar (Rp.750.750.465,59) atau (13,71%).

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang merupakan komponen penyusunan Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah. Jumlah Beban untuk Kabupaten Sumba Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp570.088.254.859,05 mengalami peningkatan sebesar Rp23.174.286.221,26 atau 4,24% dari total beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 546.913.968.637,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.18 Beban per 31 Desember 2025 dan 2024

No	BEBAN	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	256.426.801.060,00	212.171.757.998,00	44.255.043.062,00	20,86%
2	Beban Barang	50.016.567.479,70	62.819.085.737,81	(12.802.518.258,11)	(20,38%)
3	Beban Jasa	62.300.551.527,61	81.666.288.199,22	(19.365.736.671,61)	(23,71%)
4	Beban Pemeliharaan	2.015.733.879,90	2.297.517.639,00	(281.783.759,10)	(12,26%)
5	Beban Perjalanan Dinas	30.138.449.013,00	40.839.878.209,00	(10.701.429.196,00)	(26,20%)
7	Beban Barang dan Jasa BOS	8.624.647.948,00	0,00	8.624.647.948,00	100,00%
11	Beban Hibah	9.226.925.504,00	29.764.636.772,12	(20.537.711.268,12)	(69,00%)

No	BEBAN	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
12	Beban Bantuan Sosial	17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88%
13	Beban Penyisihan Piutang	76.554.633,81	817.149.707,48	(740.595.073,67)	(90,63%)
14	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(291.666,60)	1.991.833,75	(2.283.500,35)	(114,64%)
16	Beban Penyusutan	98.474.926.244,91	74.149.512.601,41	24.325.413.643,50	32,81%
17	Beban Amortisasi	379.921.705,00	414.703.705,00	(34.782.000,00)	(8,39%)
18	Beban Transfer	34.911.401.649,00	37.639.446.235,00	(2.728.044.586,00)	(7,25%)
Jumlah		**570.088.254.859,05**	**546.913.968.637,79**	**23.174.286.221,26**	**4,24%**

Berikut adalah rincian realisasi beban Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

5.4.2.a. Beban Pegawai - LO

TA 2025	TA 2024
Rp256.426.801.060,00	**Rp212.171.757.998,00**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara. Pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah diakui berdasarkan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Jumlah saldo Beban Pegawai Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp256.426.801.060,00 mengalami peningkatan sebesar Rp44.255.043.062,00 atau sebesar 20,86% dari realisasi beban pegawai Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp212.171.757.998,00 dengan rincian sbb:

Tabel 5.4.19 Beban Pegawai per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	116.458.922.984,00	99.540.238.063,00	16.918.684.921,00	17,00%
2	Dinas Kesehatan	42.906.355.553,00	41.272.557.919,00	1.633.797.634,00	3,96%
3	Puskesmas Maradesa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	100,00%
4	Rumah Sakit Umum Daerah	17.700.000,00	-	17.700.000,00	100,00%
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.020.676.154,00	4.020.249.684,00	426.470,00	0,01%
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.292.227.799,00	1.336.252.603,00	(44.024.804,00)	(3,29%)
8	SATPOL PP dan Kebakaran	1.761.738.415,00	1.774.238.138,00	(12.499.723,00)	(0,70%)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.566.524.816,00	1.525.218.019,00	41.306.797,00	2,71%
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.303.642.633,00	1.586.521.668,00	(282.879.035,00)	(17,83%)
12	Kantor Lingkungan Hidup	1.455.997.693,00	1.541.947.962,00	(85.950.269,00)	(5,57%)
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.793.216.701,00	1.867.361.902,00	(74.145.201,00)	(3,97%)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.483.915.375,00	1.484.438.008,00	(522.633,00)	(0,04%)
15	Dinas Perhubungan	1.241.779.997,00	1.221.891.642,00	19.888.355,00	1,63%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.361.376.718,00	1.350.520.678,00	10.856.040,00	0,80%
17	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	2.634.039.942,00	2.661.999.192,00	(27.959.250,00)	(1,05%)
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.013.910.449,00	2.037.424.904,00	(23.514.455,00)	(1,15%)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.448.524.298,00	1.577.286.146,00	(128.761.848,00)	(8,16%)

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
		Rp	Rp		
20	Dinas Perikanan	1.754.616.147,00	1.727.068.292,00	27.547.855,00	1,60%
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.988.766.230,00	10.053.468.164,00	(64.701.934,00)	(0,64%)
22	DINAS PETERNAKAN	3.522.575.771,00	3.589.991.816,00	(67.416.045,00)	(1,88%)
23	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.653.460.451,00	1.666.637.218,00	(13.176.767,00)	(0,79%)
26	Bagian Pemerintahan		7.100.000,00	(7.100.000,00)	(100,00%)
27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		8.800.000,00	(8.800.000,00)	(100,00%)
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat		9.000.000,00	(9.000.000,00)	(100,00%)
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		6.650.000,00	(6.650.000,00)	(100,00%)
30	Bagian Administrasi Pembangunan	162.794.500,00	252.450.000,00	(89.655.500,00)	(35,51%)
32	Bagian Umum	5.558.364.235,00	5.516.651.892,00	41.712.343,00	0,76%
33	Bagian Hukum		7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00%)
34	Bagian Organisasi		7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00%)
35	Sekretariat DPRD	8.453.650.694,00	8.584.029.884,00	(130.379.190,00)	(1,52%)
36	Kecamatan Katikutana	754.226.196,00	914.977.753,00	(160.751.557,00)	(17,57%)
37	Kecamatan Mamboro	941.102.871,00	1.031.739.642,00	(90.636.771,00)	(8,78%)
38	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	993.932.353,00	1.042.021.366,00	(48.089.013,00)	(4,61%)
39	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	902.509.751,00	932.204.027,00	(29.694.276,00)	(3,19%)
40	Kecamatan Katikutana Selatan	875.760.770,00	995.604.146,00	(119.843.376,00)	(12,04%)
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	720.695.401,00	703.494.066,00	17.201.335,00	2,45%
43	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	900.827.515,00	881.277.276,00	19.550.239,00	2,22%
44	Inspektorat	2.484.849.819,00	2.467.752.034,00	17.097.785,00	0,69%
45	Badan Perencanaan.Penelitian dan Pengembangan	1.862.990.467,00	1.823.755.397,00	39.235.070,00	2,15%
46	Badan Keuangan Daerah	2.866.070.736,00	3.236.542.754,00	(370.472.018,00)	(11,45%)
47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	29.193.907.626,00	1.862.745.743,00	27.331.161.883,00	1.467,25 %
48	UPTD Pengelola Air Minum	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00%
49	UPTD Mekanisasi		350.000,00	(350.000,00)	(100,00%)
50	UPTD Pembibitan Ternak	49.950.000,00	31.300.000,00	18.650.000,00	59,58%
	Jumlah	**256.426.801.060,00**	**212.171.757.998,00**	**44.255.043.062,00**	**20,86%**

Sedangkan beban pegawai menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.20 Beban Pegawai per jenis untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025	Jumlah 2024
		Rp	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	207.881.818.672,00	180.134.309.812,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	619.344.500,00	769.850.000,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.611.821.518,00	23.644.379.749,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.153.474.790,00	7.307.723.981,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	158.851.580,00	33.674.456,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.880.000,00	281.820.000,00
7	Beban Pegawai BOS	613.610.000,00	0
Jumlah		**256.426.801.060,00**	**212.171.757.998,00**

Terdapat Perbedaan beban Pegawai LO - Belanja Pegawai -LRA kondisi ini disebabkan karena selisih lebih RP256.426.801.060,00 pada LO dibandingkan dengan LRA RP256.553.382.060,00 atau lebih 126.581.000,00 kondisi ini disebabkan karena adanya pengurangan atasan temuan pada belanja pegawai di LRA

5.4.2.b. Beban Persediaan - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp50.016.567.479,70	**Rp62.819.085.737,81**

Jumlah Beban Persediaan Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp50.016.567.479,70 mengalami penurunan sebesar Rp(12.802.518.258,11) atau (20,38%) dari beban persediaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.819.085.737,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.21 Beban Persediaan untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	1.551.207.463,00	5.406.653.054,00	(3.855.445.591,00)	(71,31%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	176.144.000,00	0,00	176.144.000,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	8.693.101.466,62	6.533.899.660,50	2.159.201.806,12	33,05%
4	PKM Wairasa	428.800.772,88	461.416.268,70	(32.615.495,82)	(7,07%)
5	PKM Lendiwacu	181.915.784,59	344.426.622,39	(162.510.837,80)	(47,18%)
6	PKM Malinjak	425.912.919,04	503.812.940,46	(77.900.021,42)	(15,46%)
7	PKM Lawonda	510.814.562,69	448.313.005,51	62.501.557,18	13,94%
8	PKM Maradesa	401.120.173,00	275.981.430,00	125.138.743,00	45,34%
9	PKM Mananga	531.922.689,00	570.229.701,21	(38.307.012,21)	(6,72%)
10	PKM Wee Luri	194.043.511,00	263.734.792,00	(69.691.281,00)	(26,42%)
11	PKM Pahar	345.951.971,47	530.919.360,55	(184.967.389,08)	(34,84%)
12	Puskesmas Umbu Riri	459.472.415,41	350.065.590,39	109.406.825,02	31,25%
13	Puskesmas Tanambanas	261.693.803,60	78.562.004,00	183.131.799,60	233,10%
14	RSUD	5.474.530.757,00	4.201.196.468,00	1.273.334.289,00	30,31%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.050.159.000,00	6.658.634.200,00	(1.608.475.200,00)	(24,16%)
16	Uptd Pengelola Air Minum	215.891.000,00	80.247.500,00	135.643.500,00	169,03%
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	678.039.750,00	959.592.800,00	(281.553.050,00)	(29,34%)
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	223.387.920,00	351.182.820,00	(127.794.900,00)	(36,39%)
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	658.371.697,00	373.511.476,00	284.860.221,00	76,27%
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	128.784.764,00	1.090.545.557,00	(961.760.793,00)	(88,19%)
21	Dinas Lingkungan Hidup	396.034.950,00	460.850.163,00	(64.815.213,00)	(14,06%)
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	203.787.500,00	282.026.250,00	(78.238.750,00)	(27,74%)
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	269.584.167,00	386.898.500,00	(117.314.333,00)	(30,32%)
24	Dinas Perhubungan	92.192.000,00	359.340.300,00	(267.148.300,00)	(74,34%)
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	119.460.654,00	285.728.067,00	(166.267.413,00)	(58,19%)
26	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	506.570.600,00	337.053.212,00	169.517.388,00	50,29%
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	428.147.100,00	815.775.130,00	(387.628.030,00)	(47,52%)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	245.830.848,00	279.584.400,00	(33.753.552,00)	(12,07%)
29	Dinas Perikanan	514.973.100,00	3.227.974.450,00	(2.713.001.350,00)	(84,05%)
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.593.467.658,00	9.047.960.900,00	(3.454.493.242,00)	(38,18%)
31	UPTD Mekanisasi	1.522.710.879,00	110.906.200,00	1.411.804.679,00	1272,97 %
32	Dinas Peternakan	766.662.241,40	4.066.468.334,60	(3.299.806.093,20)	(81,15%)
33	Uptd Pembibitan dan Agribisnis Ternak	1.007.231.035,00	1.208.827.200,00	(201.596.165,00)	(16,68%)
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, PMPTSP	196.739.830,00	372.545.090,00	(175.805.260,00)	(47,19%)
35	Bagian Pemerintahan	305.126.500,00	195.697.400,00	109.429.100,00	55,92%
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	93.354.000,00	109.003.550,00	(15.649.550,00)	(14,36%)
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	479.973.000,00	475.047.235,00	4.925.765,00	1,04%
38	Bagian Perekonomian dan SDA	74.069.900,00	86.029.500,00	(11.959.600,00)	(13,90%)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
39	Bagian Adm Pembangunan	65.693.500,00	46.768.500,00	18.925.000,00	40,47%
40	Bagian Umum	3.390.754.720,00	2.249.262.140,00	1.141.492.580,00	50,75%
41	Bagian Hukum	72.097.000,00	88.160.920,00	(16.063.920,00)	(18,22%)
42	Bagian Organisasi	112.558.000,00	160.121.000,00	(47.563.000,00)	(29,70%)
43	Sekretariat DPRD	2.864.233.668,00	3.679.081.240,00	(814.847.572,00)	(22,15%)
44	Kecamatan Katikutana	133.983.000,00	181.786.800,00	(47.803.800,00)	(26,30%)
45	Kecamatan Mamboro	162.747.517,00	219.589.767,00	(56.842.250,00)	(25,89%)
46	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	166.460.000,00	134.043.850,00	32.416.150,00	24,18%
47	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	150.222.944,00	226.925.000,00	(76.702.056,00)	(33,80%)
48	Kecamatan Katikutana Selatan	66.822.500,00	160.342.850,00	(93.520.350,00)	(58,33%)
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	650.501.662,00	733.921.404,50	(83.419.742,50)	(11,37%)
50	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	180.224.000,00	260.779.500,00	(80.555.500,00)	(30,89%)
51	Inspektorat	300.747.000,00	315.396.000,00	(14.649.000,00)	(4,64%)
52	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	407.853.586,00	643.807.300,00	(235.953.714,00)	(36,65%)
53	Badan Keuangan Daerah	1.716.336.500,00	1.719.675.334,00	(3.338.834,00)	(0,19%)
54	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	168.149.500,00	408.783.000,00	(240.633.500,00)	(58,87%)
Jumlah Beban Barang		**50.016.567.479,70**	**62.819.085.737,81**	**(12.802.518.258,11)**	**(20,38%)**

Sedangkan beban persediaan menurut jenisnya untuk saldo Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.22 Beban Persediaan per sub rincian objek Tahun Anggaran 2025

No.	Beban Barang	Jumlah 2025	Jumlah 2024
1	**Beban Bahan Pakai Habis**		
-	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	147.311.187,00	341.962.805,50
-	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.272.722.139,00	1.317.566.278,00
-	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.745.235.998,00	2.334.257.518,00
-	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	901.266.523,00	275.581.000,00
-	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	418.055.000,00	187.852.500,00
-	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.175.933.462,00	10.659.075.751,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.510.436.256,00	1.211.544.000,00
-	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.099.713.029,00	107.500.000,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	99.983.250,00	16.935.000,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.350.000,00	1.976.835.347,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.888.790.544,00	4.556.995.120,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.201.943.354,00	43.970.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	46.650.000,00	416.616.494,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	264.857.866,00	1.211.544.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.500.000,00	15.000.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	250.000,00	42.300.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	398.000.000,00	199.700.000,00
-	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	374.071.768,00	961.674.900,00
-	Beban Obat-Obatan-Obat	4.322.888.571,30	(730.153.835,29)
-	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	328.205.799,00	3.145.978.026,00
-	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.062.035.528,00	16.605.735.244,00
-	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	(98.007.020,00)	(411.843.144,00)
-	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	669.353.359,32	1.174.396.700,00
-	Beban Natura dan Pakan-Pakan	668.689.455,40	(429.862.455,40)
-	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.516.621.500,00	6.781.203.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.577.985.000,00	1.097.000.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	717.426.889,00	651.228.755,00
-	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	405.432.567,00	638.818.670,00
-	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	66.760.000,00	74.000.000,00
-	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	9.962.000,00	4.995.000,00
-	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	99.900.000,00
-	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.393.200,00	155.144.700,00
-	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.600.000,00	105.700.000,00
-	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.994.400,00	115.485.840,00
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.550.000,00	52.392.000,00

-		Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	60.989.300,00	26.862.000,00
		Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	129.600.000,00	23.750.000,00
-		Beban Pakaian Adat Daerah	32.194.200,00	29.304.000,00
		Beban Pakaian Olah raga		56.080.000,00
-		Beban Pakaian Paskibraka	318.986.250,00	647.370.400,00
2	Beban Bahan Tak Pakai Habis		185.934.500,00 -	
3	Beban Barang Bekas		-	
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi		-	
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	29.942.250,00	438.675.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	81.425.000,00	15.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	453.885.000,00	147.933.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.680.000,00	50.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	2.210.000,00	1.270.564.700,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	204.911.000,00	295.376.550,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	436.258.200,00	410.465.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	407.903.850,00	28.999.860,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	8.000.000,00	13.280.000,00
	-	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	184.884.722,00	1.211.400.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.115.767.680,00	6.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	6.000.000,00	49.999.395,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	49.952.000,00	170.727.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	331.530.495,00	299.458.500,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	449.682.987,00	42.000.000,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	35.000.000,00	34.995.969,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	37.353.165,00	149.905.500,00
	-	Beban Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	6.750.000,00	
	-	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	277.980.780,00	
		Beban Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		218.710.800,00
		Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang		1.016.342.850,00
		Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya		1.330.000.000,00
		Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi		228.000.000,00
		Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi		760.000.000,00
		Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum		52.400.000,00
				218.710.800,00
Jumlah Beban Barang			**50.016.567.479,70**	**62.819.085.737,81**

Pengakuan terhadap beban persediaan dilakukan dengan pendekatan aset yaitu pengakuan beban persediaan ketika persediaan telah dipakai dan penyesuaian dilakukan pada akhir periode dengan perhitungan persediaan awal ditambah pembelian dalam periode dikurangi persediaan akhir. Beban persediaan disajikan dengan basis akrual dimana beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods) dan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai.

Terdapat selisih pada Akun Belanja Barang-LRA dengan beban persediaan-LO dimana pada Belanja Barang-LRA nilai Rp49.549.793.629,00 dan beban persediaan-LO nilai

Rp50.016.567.479,70 dengan selisih sebesar Rp466.773.850,70 dapat dijelaskan Selisih terjadi sebagai akibat dari bertambah nya persediaan 2024 sebesar Rp13.280.961.627,31 di reklasifikasikan belanja barang dan jasa ke aset tetap peralatan dan mesin pada Beban barang dan jasa (Rp84.699.000,00) atas reklas aset tetap lainnya ke beban barang dan jasaperalatana dan mesin menambah jumlah beban persediaan sebesar Rp234.309.722,00, selanjutnya bertambah atas reklasisfiksi aset tetap lainnya ke beban barang dan jasa sebesar Rp171.709.880,00. Dan berkurang nya nilai persediian TA 2025 sebesar (Rp13.031.526.213,61). atas Temuan Belanja Barang berkurang Rp(89.011.200,00), atas kekurangan pencatatan Persediaan Pakan ternak ayam petelur dan joper tahun 2025 berkurang Rp(14.970.965,00)

5.4.2.c. Beban Jasa - LO	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp. 62.300.551.527,61	**Rp81.666.288.199,22**

Beban jasa adalah penggunaan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban jasa dalam Laporan Operasional (LO) adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, berupa konsumsi aset, jasa, atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp62.300.551.527,61 mengalami Penurunan sebesar (Rp19.365.736.671,61) atau (23,71%) dari realisasi beban jasa Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp81.666.288.199,22 dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.4.23 Beban Jasa per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025	Jumlah 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	13.673.483.188,00	22.415.872.295,00	(8.742.389.107,00)	(39,00%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	574.613.500,00	-	574.613.500,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	11.352.008.324,94	14.514.172.715,22	(3.162.164.390,28)	(21,79%)
4	Pusk. Wairasa	413.323.373,00	333.453.287,00	79.870.086,00	23,95%
5	Pusk. Lendiwacu	238.541.516,00	220.558.550,00	17.982.966,00	8,15%
6	Pusk. Malinjak	411.245.571,00	357.968.044,00	53.277.527,00	14,88%
7	Pusk. Lawonda	422.029.407,00	340.011.797,00	82.017.610,00	24,12%
8	Pusk. Maradesa	287.188.053,00	250.888.165,00	36.299.888,00	14,47%
9	Pusk. Mananga	474.787.609,00	287.203.506,00	187.584.103,00	65,31%
10	Pusk. Wee Luri	230.569.540,00	186.765.961,00	43.803.579,00	23,45%
11	Pusk. Pahar	195.767.734,00	217.396.974,00	(21.629.240,00)	(9,95%)
12	Pusk Ubu Riri	297.261.952,00	202.273.499,00	94.988.453,00	46,96%
13	Pusk Tanambanas	180.083.172,00	33.720.000,00	146.363.172,00	434,05%
14	RSUD Waibakul	7.172.625.779,00	8.834.828.730,00	(1.662.202.951,00)	(18,81%)
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.342.376.379,00	4.203.481.496,00	(2.861.105.117,00)	(68,07%)
16	UPTD PDAM	532.264.127,00	634.772.920,00	(102.508.793,00)	(16,15%)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	480.966.683,00	1.072.385.309,00	(591.418.626,00)	(55,15%)
18	SATPOL PP dan Kebakaran	1.360.047.778,00	2.149.628.415,00	(789.580.637,00)	(36,73%)
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	771.643.065,00	871.064.700,00	(99.421.635,00)	(11,41%)
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.432.872.467,00	1.680.247.627,00	(247.375.160,00)	(14,72%)

21	Dinas Lingkungan Hidup	1.401.418.170,00	1.270.725.500,00	130.692.670,00	10,28%
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	296.313.434,00	475.475.390,00	(179.161.956,00)	(37,68%)
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	290.916.186,00	368.274.862,00	(77.358.676,00)	(21,01%)
24	Dinas Perhubungan	229.235.536,00	512.791.940,00	(283.556.404,00)	(55,30%)
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	290.942.080,00	583.532.115,00	(292.590.035,00)	(50,14%)
26	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	453.210.110,00	540.175.167,00	(86.965.057,00)	(16,10%)
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	458.155.308,00	719.717.200,00	(261.561.892,00)	(36,34%)
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	539.829.009,00	551.693.655,00	(11.864.646,00)	(2,15%)
29	Dinas Perikanan	178.906.636,00	352.257.938,00	(173.351.302,00)	(49,21%)
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.252.278.954,00	2.257.570.345,00	994.708.609,00	44,06%
31	UPTD Mekanisasi Alsintan	291.595.972,00	1.750.000,00	289.845.972,00	16562,63 %
32	DINAS PETERNAKAN	937.553.483,00	496.802.650,00	440.750.833,00	88,72%
33	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	91.031.800,00	118.108.800,00	(27.077.000,00)	(22,93%)
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	820.480.061,00	268.595.560,00	551.884.501,00	205,47%
35	Bagian Pemerintahan	160.617.490,00	226.330.371,00	(65.712.881,00)	(29,03%)
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	92.939.000,00	14.750.000,00	78.189.000,00	530,09%
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	191.700.000,00	250.050.000,00	(58.350.000,00)	(23,34%)
38	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	127.489.000,00	672.155.896,00	(544.666.896,00)	(81,03%)
39	Bagian Administrasi Pembangunan	649.720.533,00	628.004.900,00	21.715.633,00	3,46%
40	Bagian Umum	1.660.785.638,00	2.307.911.643,00	(647.126.005,00)	(28,04%)
41	Bagian Hukum	60.730.000,00	173.085.300,00	(112.355.300,00)	(64,91%)
42	Bagian Organisasi	235.931.342,00	96.021.512,00	139.909.830,00	145,71%
43	Sekretariat DPRD	1.374.045.898,00	1.524.817.628,00	(150.771.730,00)	(9,89%)
44	Kecamatan Katikutana	143.979.120,00	208.044.020,00	(64.064.900,00)	(30,79%)
45	Kecamatan Mamboro	241.252.280,00	331.617.140,00	(90.364.860,00)	(27,25%)
46	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	124.982.170,00	187.092.460,00	(62.110.290,00)	(33,20%)
47	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	239.021.216,00	235.678.460,00	3.342.756,00	1,42%
48	Kecamatan Katikutana Selatan	100.994.182,00	186.428.460,00	(85.434.278,00)	(45,83%)
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	374.758.880,00	252.608.020,00	122.150.860,00	48,36%
50	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	149.857.598,00	115.824.562,00	34.033.036,00	29,38%
51	Inspektorat	200.054.584,00	194.620.473,00	5.434.111,00	2,79%
52	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	1.057.624.072,00	2.064.238.369,00	(1.006.614.297,00)	(48,76%)
53	Badan Keuangan Daerah	2.861.556.529,67	2.362.222.345,00	499.334.184,67	21,14%
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	876.946.038,00	2.310.621.528,00	(1.433.675.490,00)	(62,05%)
Jumlah Beban Jasa		**62.300.551.527,61**	**81.666.288.199,22**	**(19.365.736.671,61)**	**(23,71%)**

Terdapat selisih Jumlah Belanja Jasa di LRA dan Beban Jasa di LO kondisi ini di sebabkan karena berkurang atas temuan belanja honorarium dan belanja jasa di LRA sehingga menimbulkan selisih kurang sebesar Rp(134.822.634,33)

Beban Jasa menurut jenisnya untuk Saldo Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.24 Beban Jasa per jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Beban Jasa	Jumlah 2025	Jumlah 2024
		Rp	Rp
1	Beban Jasa Kantor	47.531.713.909,61	67.586.858.027,22
2	Beban Premi Asuransi Kesehatan	7.762.378.787,00	7.996.223.102,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	598.863.500,00	538.150.000,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	283.655.000,00	488.729.000,00
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	107.000.000,00	109.000.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi	1.100.000.000,00	1.586.454.000,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	80.000.000,00
8	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.145.790.331,00	2.657.024.070,00
9	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	171.250.000,00	238.200.000,00
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	469.900.000,00	385.650.000,00
	Jumlah Beban Jasa	**62.300.551.527,61**	**81.666.288.199,22**

5.4.2.d. Beban Pemeliharaan - LO

TA 2025	TA 2024
Rp2.015.733.879,90	**Rp2.297.517.639,00**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang berada dalam kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp2.015.733.879,90 mengalami penurunan sebesar (Rp281.783.759,10) atau (12,26%) dari realisasi beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.297.517.639,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.25 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	13.491.500,00	17.500.000,00	(4.008.500,00)	(22,91%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	78.146.000,00	70.948.000,00	7.198.000,00	10,15%
4	Pusk. Wairasa	-		-	0,00%
5	Pusk. Lendiwacu	6.850.000,00	15.000.000,00	(8.150.000,00)	(54,33%)
6	Pusk. Malinjak	1.150.000,00	1.600.000,00	(450.000,00)	(28,13%)
7	Pusk. Lawonda	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00%
8	Pusk. Maradesa	-	12.640.000,00	(12.640.000,00)	(100,00%)
9	Pusk. Mananga	15.570.000,00	10.814.000,00	4.756.000,00	43,98%
10	Pusk. Wee Luri	8.443.000,00	10.354.000,00	(1.911.000,00)	(18,46%)
11	Pusk. Pahar	77.000.000,00	5.850.000,00	71.150.000,00	1216,24%
12	Pusk Uburiri	18.600.000,00	2.500.000,00	16.100.000,00	644,00%
13	Pusk Tanambanas	17.050.000,00	7.370.000,00	9.680.000,00	131,34%
14	RSUD Waibakul	449.419.000,00	315.418.900,00	134.000.100,00	42,48%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.995.000,00	5.909.500,00	(1.914.500,00)	(32,40%)
16	UPTD Air Minum	149.880.000,00	1.500.000,00	148.380.000,00	9892,00%
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.052.500,00	2.172.500,00	880.000,00	40,51%

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	107.500.000,00	39.750.000,00	67.750.000,00	170,44%
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.997.500,00	4.070.000,00	3.927.500,00	96,50%
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.000.000,00	-	16.000.000,00	100,00%
21	Dinas Lingkungan Hidup	13.155.000,00	14.706.500,00	(1.551.500,00)	(10,55%)
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(16,67%)
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		5.537.000,00	(5.537.000,00)	(100,00%)
24	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	900,00%
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	37,50%
26	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	18.225.000,00	2.830.000,00	15.395.000,00	543,99%
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00%)
28	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.319.000,00	16.817.500,00	(14.498.500,00)	(86,21%)
29	Dinas Perikanan	9.990.000,00	299.900.000,00	(289.910.000,00)	(96,67%)
30	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.500.000,00	28.177.500,00	7.322.500,00	25,99%
31	UPTD MEKANISASI, PERBENIHAN DAN POPT	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100,00%
32	DINAS PETERNAKAN	16.425.000,00	18.898.500,00	(2.473.500,00)	(13,09%)
33	UPTD Pembibitan Ternak	40.000.000,00	52.000.000,00	(12.000.000,00)	(23,08%)
34	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.640.000,00	4.719.000,00	(3.079.000,00)	(65,25%)
35	Bagian Pemerintahan	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00%)
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(100,00%)
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	3.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(14,29%)
38	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.730.000,00	3.230.000,00	(500.000,00)	(15,48%)
39	Bagian Administrasi Pembangunan	5.031.000,00	3.536.000,00	1.495.000,00	42,28%
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		-	-	0,00%
41	Bagian Umum	621.409.502,00	756.086.339,00	(134.676.837,00)	(17,81%)
42	Bagian Hukum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00%
43	Bagian Organisasi	1.000.000,00	2.250.000,00	(1.250.000,00)	(55,56%)
44	Sekretariat DPRD	55.000.000,00	419.827.400,00	(364.827.400,00)	(86,90%)
45	Kecamatan Katikutana	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33%
46	Kecamatan Mamboro	3.775.000,00	7.310.000,00	(3.535.000,00)	(48,36%)
47	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	-	-	-	0,00%
48	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	-	-	-	0,00%
49	Kecamatan Katikutana Selatan	2.000.000,00	6.770.000,00	(4.770.000,00)	(70,46%)
50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(60,00%)
51	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	49.451.500,00	27.000.000,00	22.451.500,00	83,15%
52	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	15.602.500,00	2.250.000,00	13.352.500,00	593,44%
53	Inspektorat	44.700.000,00	15.602.500,00	29.097.500,00	186,49%
54	Badan Keuangan Daerah	(31.544.122,10)	6.162.500,00	(37.706.622,10)	(611,87%)
55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.180.000,00	39.510.000,00	(37.330.000,00)	(94,48%)
Jumlah Beban Pemeliharaan		**2.015.733.879,90**	**2.297.517.639,00**	**(281.783.759,10)**	**(12,26%)**

Sedangkan beban pemeliharaan menurut jenisnya untuk saldo Tahun Anggaran 2025 dan 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.4.26 Beban Pemeliharaan per jenis Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Beban Pemeliharaan	Jumlah **2025**	Jumlah **2024**
		Rp	**Rp**
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.334.754.389,00	1.008.122.036,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	591.985.490,90	1.134.503.603,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi	48.994.000,00	77.892.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000,00	77.000.000,00
Jumlah Beban Pemeliharaan		**2.015.733.879,90**	**2.297.517.639,00**

Terdapat selisih antara Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA dan LO di mana LRA Jumlah LRA Rp2.053.805.502,00 dan LO Rp2.015.733.879,90 kondisi ini di sebabkan kareana atas temuan Kekurangan Volume Pekerjaan berkurang Rp(16.073.509,10) dan Temuan atas belanja pemeliharaan berkurang Rp(21.998.113,00).

5.4.2.e. Beban Perjalanan Dinas - LO

TA 2025	TA 2024
Rp30.138.449.013,00	**Rp40.839.878.209,00**

Beban perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi dan jabatan untuk kegiatan rekonsiliasi data dan rapat koordinasi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp30.138.449.013,00 mengalami penurunan sebesar Rp(10.701.429.196,00) atau sebesar (26,20%) dari realisasi beban perjalanan dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.839.878.209,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.27 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1	Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga	941.337.820,00	1.219.178.700,00	(277.840.880,00)	(22,79%)
2	Sanggar Kegiatan Belajar	81.857.700,00	-	81.857.700,00	100,00%
3	Dinas Kesehatan	2.369.781.773,00	2.204.531.957,00	165.249.816,00	7,50%
4	Pusk. Wairasa	599.500.000,00	602.000.000,00	(2.500.000,00)	(0,42%)
5	Pusk. Lendiwacu	418.700.000,00	341.700.000,00	77.000.000,00	22,53%
6	Pusk. Malinjak	738.100.000,00	611.700.000,00	126.400.000,00	20,66%
7	Pusk. Lawonda	540.800.000,00	496.864.000,00	43.936.000,00	8,84%
8	Pusk. Maradesa	446.755.000,00	396.200.000,00	50.555.000,00	12,76%
9	Pusk. Mananga	599.200.000,00	553.940.000,00	45.260.000,00	8,17%
10	Pusk. Wee Luri	402.600.000,00	324.300.000,00	78.300.000,00	24,14%
11	Pusk. Pahar	239.900.000,00	354.200.000,00	(114.300.000,00)	(32,27%)
12	Pusk Umbu Riri	494.900.000,00	457.900.000,00	37.000.000,00	8,08%
13	Pusk. Tanambanas	275.400.000,00	21.120.000,00	254.280.000,00	1203,98%
14	RSUD Waibakul	242.097.250,00	233.290.200,00	8.807.050,00	3,78%
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.379.062.569,00	4.944.541.619,00	(3.565.479.050,00)	(72,11%)
16	UPTD PAM	52.365.000,00	134.285.000,00	(81.920.000,00)	(61,00%)
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Pertanahan		-		
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	222.685.106,00	1.244.630.696,00	(1.021.945.590,00)	(82,11%)
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	210.665.000,00	787.861.750,00	(577.196.750,00)	(73,26%)
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	384.801.688,00	716.159.430,00	(331.357.742,00)	(46,27%)
21	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	119.792.660,00	128.568.850,00	(8.776.190,00)	(6,83%)
22	Dinas Ketahanan Pangan		-		
23	Dinas Lingkungan Hidup	301.876.810,00	749.744.743,00	(447.867.933,00)	(59,74%)

No	SKPD	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
24	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	246.**794**.430,00	566.206.240,00	(319.411.810,00)	(56,41%)
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	488.770.128,00	613.057.031,00	(124.286.903,00)	(20,27%)
26	Dinas Perhubungan	253.131.681,00	516.594.748,00	(263.463.067,00)	(51,00%)
27	Dinas Komunikasi dan Informatika	240.351.580,00	611.275.588,00	(370.924.008,00)	(60,68%)
28	Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan	424.550.213,00	582.866.431,00	(158.316.218,00)	(27,16%)
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	259.829.430,00	406.166.420,00	(146.336.990,00)	(36,03%)
30	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	337.522.340,00	593.770.000,00	(256.247.660,00)	(43,16%)
31	Dinas Perikanan	204.645.500,00	336.956.499,00	(132.310.999,00)	(39,27%)
32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.795.883.918,00	939.268.606,00	856.615.312,00	91,20%
33	UPTD ALSINTAN	44.995.000,00	4.950.000,00	40.045.000,00	808,99%
34	DINAS PETERNAKAN	251.626.717,00	532.499.566,00	(280.872.849,00)	(52,75%)
35	UPTD Pembibitan Ternak	19.190.000,00	67.572.270,00	(48.382.270,00)	(71,60%)
36	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	242.437.670,00	435.449.310,00	(193.011.640,00)	(44,32%)
37	Bagian Pemerintahan	489.650.420,00	452.441.811,00	37.208.609,00	8,22%
38	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	186.367.320,00	323.656.214,00	(137.288.894,00)	(42,42%)
39	Bagian Kesejahteraan Rakyat	219.988.400,00	323.396.528,00	(103.408.128,00)	931,98%)
40	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	183.865.017,00	316.222.000,00	(132.356.983,00)	(41,86%)
41	Bagian Administrasi Pembangunan	250.929.517,00	79.098.113,00	171.831.404,00	217,24%
42	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		-		
43	Bagian Umum	1.321.538.868,00	1.407.364.441,00	(85.825.573,00)	(6,10%)
44	Bagian Hukum	159.600.000,00	345.770.370,00	(186.170.370,00)	(53,84%)
45	Bagian Organisasi	163.793.000,00	179.967.000,00	(16.174.000,00)	(8,99%)
46	Sekretariat DPRD	6.681.588.117,00	7.053.826.997,00	(372.238.880,00)	(5,28%)
47	Kecamatan Katikutana	211.648.807,00	276.705.380,00	(65.056.573,00)	(23,51%)
48	Kecamatan Mamboro	126.831.292,00	125.808.160,00	1.023.132,00	0,81%
49	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	212.450.000,00	228.905.000,00	(16.455.000,00)	(7,19%)
50	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	199.671.400,00	220.000.000,00	(20.328.600,00)	(9,24%)
51	Kecamatan Katikutana Selatan	175.097.200,00	212.849.600,00	(37.752.400,00)	(17,74%)
52	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.586.198,00	392.008.503,00	(111.422.305,00)	(28,42%)
53	Sekretariat Korpri		-	-	0,00%
54	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	148.292.200,00	99.810.000,00	48.482.200,00	48,57%
55	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	1.571.902.025,00	1.802.306.842,00	(230.404.817,00)	(12,78%)
56	Inspektorat	941.509.514,00	1.278.809.772,00	(337.300.258,00)	(26,38%)
57	Badan Keuangan Daerah	151.106.512,00	1.307.291.537,00	(1.156.185.025,00)	(88,44%)
58	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	590.126.223,00	1.684.290.287,00	(1.094.164.064,00)	(64,96%)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas		**30.138.449.013,00**	**40.839.878.209,00**	**(10.701.429.196,00)**	**(26,20%)**

Terdapat selisih Lebih Pada LRA Rp31.217.323.404,00 sebesar Rp1.078.874.391,00 dibandingkan dengan LO sebesar Rp30.138.449.013,00 kondisi ini di sebabkan oleh mutasi kurang atas temuan Belanja perjalanan dinas.

5.4.2.f. Beban Barang dan Jasa BOS - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp8.624.647.948,00	**Rp0,00**

Beban Barang dan Jasa BOS adalah penggunaan Barang dan Jasa BOS dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp8.624.647.948,00 dan realisasi beban jasa Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp0,00.

5.4.2.g Beban Hibah - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp9.226.925.504,00	**Rp29.764.636.772,12**

Beban Hibah adalah bantuan kepada masyarakat dalam bentuk hibah dimana jumlah beban hibah Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp9.226.925.504,00 mengalami penurunan sebesar (Rp20.537.711.268,12) atau (69,00%) dari realisasi beban hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.764.636.772,12. Beban Hibah dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga yaitu beban dana BOS untuk SD dan SMP Swasta serta dana BOP PAUD. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu beban yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Beban Hibah termasuk hibah tanah dan bangunan kantor desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Tengah yang selama ini di aset nya di 6 kecamatan ini.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban Hibah -LO Tahun per jenis nya di Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 Rp	2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	599.000.000,00	21.633.929.272,12	(21.034.929.272,12)	(97,23)
2	Beban Hibah Dana BOS	5.278.408.350,00	5.351.471.000,00	(73.062.650,00)	(1,37)
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	469.107.254,00		469.107.254,00	100,00
4	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.765.725.100,00	2.381.965.000,00	383.760.100,00	16,11
5	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	114.684.800,00		114.684.800,00	100,00
Jumlah Beban Hibah		**9.226.925.504,00**	**29.367.365.272,12**	**(20.140.439.768,12)**	**(68,58)**

5.4.2.h Beban Bantuan Sosial - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp17.496.065.880,72	**Rp4.332.000.000,00**

Beban Bantuan Sosial adalah bantuan sosial kepada masyarakat dimana jumlah Beban Bantuan Sosial Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp17.496.065.880,72 mengalami peningkatan sebesar Rp13.164.065.880,72 atau 303,88% dari realisasi Beban bantuan sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.332.000.000,00.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban Bantuan Sosial -LO Tahun per jenis nya di Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	17.496.065.880,72	4.332.000.000,00	13.164.065.880,72	303,88
Jumlah Beban Bantuan Sosial		**17.496.065.880,72**	**4.332.000.000,00**	**13.164.065.880,72**	**303,88**

Terdapat perbedaaan antara Belanja Bantuan Sosial di LRA 21.140.000.000,00 dengan Beban Bantuan Sosial di LO sebesar 17.496.065.880,72 menimbulkan selisih kurang (3.643.934.119,28) di LO. Kondisi ini di sebabkan karena ada nya temuan Belanja Bantuan Sosial Rumah Mandiri yang sampai dengan waktu pemeriksaan Tim Audit BPK menemukan bahwa masih ada sejumlah dana yang belum di salurkan ke rekening penerima Rumah Mandiri tersebut. Sehingga sisa dana tersebut diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka.

5.4.2.i Beban Penyusutan - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp98.474.926.244,91	**Rp74.149.512.601,41**

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Jumlah Beban Penyusutan Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp98.474.926.244,91 mengalami peningkatan sebesar Rp24.325.413.643,50 atau 32,81% dari realisasi beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp74.149.512.601,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.29 Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Beban Penyusutan	Jumlah 2025	Jumlah 2024
		Rp	Rp
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.580.049.051,31	21.255.461.762,60
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.121.939.697,01	9.832.504.199,05
3	Beban Penyusutan Jaringan. Irigasi dan Jembatan	67.767.220.829,93	43.061.546.639,76
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.716.666,67	0,00
Jumlah Beban Penyusutan		**98.474.926.244,91**	**74.149.512.601,41**

Rincian atas Beban Penyusutan masing masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

5.4.2.j Beban Amortisasi - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp379.921.705,00	**Rp414.703.705,00**

Beban amortisasi adalah pencatatan beban tahunan untuk mencerminkan penurunan nilai aset tidak berwujud. Beban amortisasi aset tidak berwujud sama prinsipnya seperti beban penyusutan pada aset tetap.

Beban amortisasi pada Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp379.921.705,00 menagalami penurunan sebesar (Rp34.782.000,00) atau (8,39%) sedangkan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp414.703.705,00.

5.4.2.k Beban Penyisihan Piutang - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp76.554.633,81	**Rp817.149.707,48**

Beban penyisihan piutang Adalah Biaya estimasi atau cadangan yang dicatat untuk mengantisipasi kerugian akibat piutang yang tidak tertagih pada suatu periode akuntansi Beban penyisihan piutang untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp76.554.633,81 mengalami penurunan sebesar Rp(740.595.073,67) atau sebesar (90,63%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp817.149.707,48.

5.4.2.l Beban Penyisihan Piutang lainnya - LO	TA 2025	TA 2024
	(Rp.291.666,60)	**Rp1.991.833,75**

Beban penyisihan piutang lainnya Adalah biaya yang dicadangkan atau dialokasikan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat piutang yang tidak tertagih (macet) di luar aktivitas rutin instansi, yang dihitung berdasarkan estimasi atau persentase tertentu dari saldo piutang. Beban penyisihan piutang lainnya di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp291.666,60) mengalami penurunan sebesar Rp(2.283.500,35) atau sebesar (114,64%) dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.991.833,75.

5.4.2.m Beban Transfer - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp34.911.401.649,00	**Rp37.639.446.235,00**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Jumlah Beban Transfer Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp34.911.401.649,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.728.044.586,00) atau (7,25%) dari realisasi beban transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.639.446.235,00. Beban transfer ini terdiri atas transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa sebesar Rp1.087.482.549,00, transfer bantuan keuangan ke desa (ADD) sebesar Rp33.823.919.100,00 di Tahun Anggaran 2025. Beban Transfer ini dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sedangkan yang tercatat dalam beban transfer ini adalah transfer Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Untuk rincian beban transfer sebagai berikut:

Tabel 5.4.30 Beban Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Jenis	Jumlah 2025 Rp	Jumlah 2024 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa	1.087.482.549,00	825.716.235,00	261.766.314,00	31,70%
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	36.813.730.000,00	(36.813.730.000,00)	(100,00%)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	33.823.919.100,00	0,00	33.823.919.100,00	100,00%
	Jumlah	**34.911.401.649,00**	**37.639.446.235,00**	**(2.728.044.586,00)**	**(7,25%)**

Terdapat perbedaaan antara Belanja Transfer di LRA Rp84.809.787.389,00 dengan Beban Transfer di LO sebesar 34.911.401.649,00 menimbulkan selisih kurang Rp(49.898.385.740,00) di LO. Kondisi ini di sebabkan karena pada Bultek 21 Dana Desa Rp49.898.385.740,00 tidak di akui dalam Laporan Opersioanal.

5.4.2.n SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI - LO	TA 2025	TA 2024
	(Rp49.352.411.103,65)	**Rp46.005.196.671,29**

Surplus/defisit dari operasi merupakan selisih antara jumlah pendapatan – LO dengan jumlah beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi dimana pada Tahun Anggaran 2025 bersaldo sebesar (Rp49.352.411.103,65) mengalami penurunan sebesar (Rp95.357.607.774,94) atau (207,28%) dari Surplus/Defisit dari Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.005.196.671,29.

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

5.4.3.a Surplus Penjualan Aset non Lancar - LO	TA 2025	TA 2024
	RP0,00	**Rp665.539.500,00**

Jumlah surplus penjualan aset non lancar Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada dan mengalami penurunan sebesar (Rp665.539.500,00) atau (100,00%) yang di peroleh atas hasil penjualan aset pemda dari penjualan atau pelelangan kendaraan dinas sedangkan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp665.539.500,00.

5.4.3.b Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp146.594.457,00**

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya - LO adalah kenaikan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit Surplus dari kegiatan non operasional lainnya untuk Tahun Anggaran 2025 tidak ada sehingga mengalami penuruna (100%) dari saldo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp146.594.457,00.

5.4.3.c Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya - LO

TA 2025	TA 2024
Rp193.457.307,67	**Rp130.902.727,62**

Jumlah defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar Rp193.457.307,67 dan defisit kegiatan non operasional lainnya Tahun Anggaran 2024 bersaldo sebesar Rp130.902.727,62. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah rugi Perusahaan Daerah Sola Pora di Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Audit dari Akuntan Jojo Sunarjo & Rekan per 31 Desember 2025,.

5.4.3.d SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO

TA 2025	TA 2024
(Rp193.457.307,67)	**Rp681.231.229,38**

Jumlah Surplus/Defisit dari Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit dari Non Operasional pada Laporan Operasional Kabupaten Sumba Tengah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 bersaldo sebesar (Rp193.457.307,67) atau berkurang (128,40%)dari Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp681.231.229,38

5.4.3.e SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA - LO

TA 2025	TA 2024
(Rp49.545.868.411,32)	**Rp46.686.427.900,67**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasi dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Jumlah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran2025 adalah bersaldo sebesar (Rp49.545.868.411,32) mengalami penurunan sebesar Rp(96.232.296.311,99) atau sebesar (206,12%) dari Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa di Tahun Anggaran 2024 yang bersaldo sebesar Rp46.686.427.900,67.

5.4.4 Pos Luar Biasa

5.4.4.a Pos Luar Biasa - LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar

kendali entitas pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tidak mengakui Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa pada tahun 2025 dan 2024

5.4.5 Surplus/Defisit LO	TA 2025	TA 2024
	(Rp49.545.868.411,32)	**Rp46.686.427.900,67**

Surplus/ Defisit Laporan Operasional di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp49.545.868.411,32) mengalami penurunan sebesar Rp(96.232.296.311,99) atau sebesar (206,12%) dibandingkan dengan surplus/defisit Laporan Operasional di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.686.427.900,67.

5.5. Laporan Arus Kas

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

5.5.1.a Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
	Rp577.447.066.296,13	**Rp658.384.706.125,08**

Jumlah senilai Rp577.447.066.296,13 merupakan jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus masuk dari aktivitas operasi senilai Rp658.384.706.125,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA. 2025 (Rp)	Realisasi TA. 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	5.473.094.162,67	7,611,248,292.61
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.076.072.445,00	2,314,742,567.46
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.671.142.115,00	2.759.129.716,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.779.006.287,69	10.885.352.343,43
5	Dana Bagi Hasil Pajak	3.397.020.000.,00	3.489.469.000,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Alam (Bukan Pajak)	0,00	0,00
7	Dana Alokasi Umum	333.239.140.981,00	360.608.063.101,00
8	Dana Alokasi Khusus	127.079.261.684,00	167.484.659.257,00
9	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
10	Dana Desa	49.898.385.740,00	65.947.240.000,00
11	Insentif Fiskal	14.068.155.000,00	12.929.007.000,00
12	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak (Propinsi)	17.223.056.632,00	18.881.588.550,00
13	Dana dari Bantuan Keuangan	200.000.000,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.342.731.248,77	5.474.206.297,58
15	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
	Jumlah	**577.447.066.296,13**	**658.384.706.125,08**

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas masuk dari aktivitas operasi.

5.5.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah	TA 2025	TA 2024
	Rp5.473.094.162,67	**Rp7.611.248.292,61**

Jumlah senilai Rp5.473.094.162,67 merupakan jumlah pendapatan pajak daerah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang terdiri atas pajak hotel. pajak restoran. pajak reklame. pajak penerangan jalan. pajak mineral bukan logam dan batuan. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp7.611.248.292,61 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Pendapatan Pajak Daerah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	126.447.452,30	21.530.000,00
2	Pajak Restoran	1.084.792.959,94	1.156.268.216,00
3	Pajak Reklame	12.722.525,00	240.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan	804.202.364,00	734.526.302,00
5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.237.200,43	4.496.885.788,61
6	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	666.123.841,00	933.467.124,00
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	183.851.515,00	268.330.862,00
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	615.900.214,00	0,00
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	778.816.091,00	0,00
Jumlah		**5.473.094.162,67**	**7.611.248.292,61**

a) Pendapatan pajak hotel berasal dari pajak atas penggunaan penginapan di PUSPAS Katikuloku dan Hotel Bintang Waibakul. Pajak hotel umumnya diperoleh dari kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh sejumlah perangkat daerah.
b) Pendapatan pajak restoran berasal dari pajak makanan dan minuman yang dilakukan secara jasa boga/katering atas kegiatan pemerintahan dari perangkat daerah. sekolah. puskesmas. pemerintah desa maupun pihak swasta.
c) Pendapatan pajak reklame berasal dari penyetoran pajak reklame rokok. papan merk *thin plate*. *Neon Sign* dan pajak reklame tempat usaha seperti warung/rumah makan. apotik dan koperasi dalam bentuk kain dan *sticker*.
d) Pendapatan pajak penerangan jalan berasal dari pembagian PT. PLN Cabang Kupang atas pajak penerangan jalan.
e) Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan berasal dari pengambilan material bahan baku batu. pasir dan tanah untuk pekerjaan konstruksi.
f) Pendapatan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dari 65 desa di Kabupaten Sumba Tengah yang tersebar di enam kecamatan.
g) Pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas penyetoran dari pembelian tanah masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah.
h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan opsen yang dikenakan daerah atas pokok PKB yang dibayarkan masyarakat Sumba Tengah sebagai wajib pajak PKB.
i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan opsen yang dikenakan daerah atas pokok PKB yang dibayarkan masyarakat Sumba Tengah sebagai wajib pajak BBNKB.

		TA 2025	TA 2024
5.5.1.a.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**Rp3.076.072.445,00**	**Rp2.314.742.567,46**

Jumlah senilai Rp3.076.072.445,00 merupakan jumlah retribusi daerah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp2.314.742.567,46. Pendapatan retribusi daerah di Tahun Anggaran (TA) 2025 terdiri atas retribusi jasa umum. retribusi jasa usaha. dan retribusi perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.3 Pendapatan Retribusi Daerah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	877.757.481,00	208.885.017,00
2	Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	40.469.500,00	30.714.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	122.387.000,00	52.468.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.055.639.102,00	1.106.822.100,46
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	162.001.000,00	124.812.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	600.953.000,00	590.833.000,00
7	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	216.865.362,00	200.208.450,00
Jumlah		**3.076.072.445,00**	**2.314.742.567,46**

a) Pendapatan retribusi daerah pelayanan kesehatan dari penerimaan atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan Puskesmas.
b) Pendapatan retribusi daerah pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah.
c) Pendapatan retribusi daerah parkir di tepi jalan umum ada pada Dinas Koperasi. UKM. Perindustrian dan Perdagangan terhadap jenis retribusi berupa parkir di Pasar Waibakul. Pasar Mamboro. dan Pasar Mananga untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.
d) Pendapatan retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah terdiri atas penyewaan tanah dan bangunan yang disewa oleh PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Anakalang atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang berlokasi di Kecamatan Mamboro untuk keperluan Kantor Kas Mamboro. Retribusi penyewaan uji kualitas air pada laboratorium Dinas Lingkungan Hidup. penyewaan ruangan terhadap penggunaan ruangan untuk kegiatan pemerintahan dan swasta pada gedung Alfa Omega dan penyewaan Alsintan terhadap penggunaan alat pertanian berupa traktor dan mesin potong padi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta retribusi pelayanan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui UPTD Pengelolaan Air Minum Kabupaten Sumba Tengah.
e) Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diperoleh dari Pasar Waibakul. Pasar Mananga. Pasar Ole Ate. Pasar Mamboro. Pasar Cendana Barat. Pasar Tanambanas. Pasar Lenang. Pasar Weluk Praimemang. Pasar Maradesa Selatan. Pasar Sambaliloku dan Pasar Maderi. Dari pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan terbagi atas retribusi pelayanan pasar los dan retribusi pelayanan pasar kios. Pelayanan pasar los mencakup semua pasar yang ada di Kabupaten Sumba Tengah sedangkan pelayanan pasar kios pada Pasar Waibakul. Pasar Mamboro. Pasar Ole Ate. dan Pasar Weluk Praimemang.
f) Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah terdiri dari pendatapan retribusi atas jasa usaha penjualan hasil telur ayam. ayam joper dan ternak babi pada UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak. pendapatan retribusi jasa usaha penjualan benih

ikan pada Dinas Perikanan dan Kelautan serta pendapatan retribusi atas pungutan pembuatan kartu tanda kepemilikan ternak yang dimiliki oleh masyarakat dan retribusi atas pengeluaran ternak antarkabupaten yang keluar dan masuk melalui wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

g) Pendapatan retribusi daerah Persetujuan Bangunan Gedung dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pemberian izin kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru. mengubah. memperluas. mengurangi. dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

5.5.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2025	TA 2024
	Rp4.671.142.115,00	**Rp2.759.129.716.00**

Jumlah senilai Rp4.671.142.115,00 merupakan jumlah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang adalah deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah. Deviden yang diperoleh pada Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp2.759.129.716,00.

5.5.1.a.4 Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2025	TA 2024
	Rp9.779.006.287,69	**Rp10.885.352.343,43**

Jumlah senilai Rp9.779.006.287,69 merupakan jumlah Lain-lain PAD yang Sah dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang terdiri atas jasa giro. bunga deposito. tuntutan ganti kerugian daerah. denda atas keterlambatan pekerjaan. denda pajak. denda retribusi. pendapatan dari pengembalian. Lain-lain PAD yang sah lainnya. pengelolaan dana bergulir. dana kapitasi JKN. dan denda keterlambatan klaim BPJS. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 nilai Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp10.885.352.343,43 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.4 Lain-lain PAD yang Sah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	327.073.953,69	525.164.779,88
2	Bunga Deposito	1.029.800.827,04	897.842.577,52
3	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	70.000,00	1.104.000,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.723.252.261,41	1.729.132.476,29
5	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain	354.885,84	219.687,00
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	303.650.869,31	129.184.182,37
7	Denda Pajak	39.879.365,40	37.483.376,02
8	Denda Retribusi	11.520,00	1.116.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	54.261.774,00	49.135.064,35
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	6.300.650.831,00	7.514.970.200,00
Jumlah		**9.779.006.287,69**	**10.885.352.343,43**

5.5.1.a.5 Dana Bagi Hasil Pajak	TA 2025	TA 2024
	Rp3.397.020.000,00	**Rp3.489.469.000,00**

Jumlah senilai Rp3.397.020.000,00 merupakan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang terdiri atas bagi hasil dari Pajak Penghasilan. Pajak Bumi dan Bangunan. bagi hasil atas Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp3.489.469.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.5 Dana Bagi Hasil Pajak dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	1.353.101.100,00	1.071.717.000,00
2	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	740.257.900,00	789.859.000,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	136.497.000,00	100.634.000,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.111.918.000,00	1.494.233.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	44.636.000,00	32.343.000,00
6	Bagi Hasil dari Mineral dan Batu Bara	1.081.000,00	683.000,00
7	Bagi Hasil Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	9.529.000,00	0,00
Jumlah		**3.397.020.000,00**	**3.489.469.000,00**

5.5.1.a.6 Dana Alokasi Umum (DAU)

TA 2025	TA 2024
Rp333.239.140.981,00	**Rp360.608.063.101,00**

Jumlah senilai Rp333.239.140.981,00 merupakan jumlah Dana Alokasi Umum dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp 360.608.063.101,00.

5.5.1.a.7 Dana Alokasi Khusus (DAK)

TA 2025	TA 2024
Rp127.079.261.684,00	**Rp167.484.659.257,00**

Jumlah senilai Rp127.079.261.684,00 merupakan jumlah Dana Alokasi Khusus dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp167.484.659.257,00 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut.

Tabel 5.5.7 Dana Alokasi Khusus dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
A	**DAK REGULER**		
1	Bidang Pendidikan SD/SDLB/PAUD	473.288.587,00	2.373.358.782,00
2	Bidang Pendidikan SMP/SMPLB	414.195.795,00	5.596.385.808,00
3	Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	189.993.887,00
4	Bidang Sanitasi	4.999.654.000,00	0,00
5	Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	29.752.780.123,00	9.519.227.364,00
B	**DAK PENUGASAN**		
1	Air Minum	12.926.380.900,00	14.096.539.700,00

No	Uraian	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024
		(Rp)	(Rp)
2	Jalan	0,00	44.625.717.750,00
3	Irigasi	0,00	5.039.676.000,00
4	Sanitasi	0,00	6.370.016.000,00
5	Kelautan dan Perikanan	0,00	3.807.887.750,00
6	Pertanian	0,00	12.935.668.350,00
7	Transportasi Perdesaan	0,00	8.229.868.900,00
C	**DAK NON FISIK**		
1	Tunjangan Profesi Guru	29.406.438.900,00	14.580.387.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru	320.750.000,00	1.319.210.000,00
3	Tunjangan Khusus Guru	8.161.017.060,00	7.105.670.000,00
4	BO Kesehatan	15.411.576.497,00	11.844.257.763,00
6	BOKKB	615.009.572,00	1.238.835.203,00
7	BOP PAUD	2.858.555.100,00	2.485.775.000,00
8	BOP Kesetaraan	179.684.800,00	137.360.000,00
9	BOS Reguler	14.300.449.350,00	14.571.324.000,00
10	BOS Kinerja	755.000.000,00	767.500.000,00
12	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	0,00
13	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	5.447.115.000,00	650.000.000,00
14	Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	656.706.000,00	0,00
Jumlah		**127.079.261.684,00**	**167.484.659.257,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik disalurkan dari Pemerintah Pusat berdasarkan laporan realisasi fisik dan belanja pada masing-masing bidang Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang ditransfer dari Pemerintah Pusat senilai Rp127.079.261.684,00 terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik senilai Rp48.566.299.405,00 dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik senilai Rp78.512.962.279,00. Nilai DAK Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp167.484.659.257,00.

5.5.1.a.8 Dana Desa

TA 2025	TA 2024
Rp49.898.385.740,00	**Rp65.947.240.000,00**

Jumlah senilai Rp49.898.385.740,00 merupakan jumlah Dana Desa dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp65.947.240.000,00. Dana Desa pada Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah Dana Desa untuk 65 desa yang tersebar pada enam wilayah kecamatan.

5.5.1.a.9 Insentif Fiskal

TA 2025	TA 2024
Rp14.068.155.000,00	**Rp12.929.007.000,00**

Jumlah senilai Rp14.068.155.000,00 merupakan jumlah Insentif Fiskal yang diperoleh dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp12.929.007.000,00.

5.5.1.a.10	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak	TA 2025	TA 2024
		Rp17.223.056.632,00	Rp18.881.588.550,00

Jumlah senilai Rp17.223.056.632,00 merupakan jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp18.881.588.550,00.

5.5.1.a.11	Dana dari Bantuan Keuangan	TA 2025	TA 2024
		Rp200.000.000,00	Rp0,00

Pada Tahun Anggaran (TA) 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah memperoleh Dana dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp200.000.000,00 untuk pembanguna Rumah Layak Huni. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Daerah tidak menerima Bantuan Keuangan sehingga nilainya Rp0,00.

5.5.1.a.12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	TA 2025	TA 2024
		Rp9.342.731.248,77	Rp5.474.206.297,58

Jumlah senilai Rp9.342.731.248,77 merupakan jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dari seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp5.474.206.297,58.

5.5.1.b	Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
		Rp525.611.039.597,94	Rp542.480.753.165,50

Jumlah senilai Rp525.611.039.597,94 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar dari aktivitas operasi senilai Rp542.480.753.165,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.8 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	256.553.382.060,00	213.986.839.398,00
2	Belanja Barang dan Jasa	153.880.944.644,94	190.482.106.032,50
3	Bunga	0,00	0,00
4	Subsidi	0,00	0,00
5	Hibah	9.226.925.504,00	30.093.121.500,00
6	Bantuan Sosial	21.140.000.000,00	4.332.000.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
8	Bagi Hasil Pajak	777.821.000,00	596.597.165,00
9	Bagi Hasil Retribusi	309.661.549,00	229.119.070,00
10	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	83.722.304.840,00	102.760.970.000,00
	Jumlah	**525.611.039.597,94**	**542.480.753.165,50**

5.5.1.b.1	Belanja Pegawai	TA 2025	TA 2024
		Rp256.553.382.060,00	**Rp213.986.839.398,00**

Jumlah senilai Rp256.553.382.060,00 merupakan jumlah Belanja Pegawai dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp213.986.839.398,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.9 Belanja Pegawai dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	208.008.399.672,00	180.191.231.212,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	40.231.166.018,00	769.850.000,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	23.661.479.749,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.153.474.790,00	7.307.723.981,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	158.851.580,00	33.674.456,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	387.880.000,00	281.820.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	613.610.000,00	1.741.060.000,00
	Jumlah	**256.553.382.060,00**	**213.986.839.398,00**

5.5.1.b.2	Belanja Barang dan Jasa	TA 2025	TA 2024
		Rp153.880.944.644,94	**Rp190.482.106.032,50**

Jumlah senilai Rp153.880.944.644,94 merupakan jumlah Belanja Barang dan Jasa dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp190.482.106.032,50. Arus kas keluar pada belanja barang dan jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.10 Belanja Barang dan Jasa dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	45.521.062.602,00	54.672.380.693,50
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	185.934.500,00	0,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.842.796.527,00	7.136.224.924,00
4	Belanja Jasa Kantor	47.666.536.543,94	62.070.996.475,00
5	Belanja Premi Asuransi	7.762.378.787,00	7.996.223.102,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	598.863.500,00	538.150.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	283.655.000,00	488.729.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	107.000.000,00	109.000.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.100.000.000,00	1.586.454.000,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	130.000.000,00	80.000.000,00

No	Uraian	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
11	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.145.790.331,00	2.657.024.070,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	171.250.000,00	238.200.000,00
13	Belanja Pemeliharaan	2.053.805.502,00	3.453.631.639,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	31.217.323.404,00	41.286.828.070,00
15	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	469.900.000,00	385.650.000,00
16	Belanja Barang dan Jasa BOS	8.624.647.948,00	7.782.614.059,00
	Jumlah	**153.880.944.644,94**	**190.482.106.032,50**

5.5.1.b.3 Hibah

TA 2025	TA 2024
Rp9.226.925.504,00	**Rp30.093.121.500,00**

Jumlah senilai Rp9.226.925.504,00 merupakan jumlah Hibah dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp30.093.121.500,00. Arus kas keluar pada hibah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5.11 Hibah dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	599.000.000,00	21.962.414.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	8.158.818.250,00	7.733.436.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	469.107.254,00	397.271.500,00
	Jumlah	**9.226.925.504,00**	**30.093.121.500,00**

5.5.1.b.4 Bantuan Sosial

TA 2025	TA 2024
Rp21.140.000.000,00	**Rp4.332.000.000,00**

Jumlah senilai Rp21.140.000.000,00 merupakan jumlah Bantuan Sosial dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp4.332.000.000,00.

5.5.1.b.5 Bagi Hasil Pajak

TA 2025	TA 2024
Rp777.821.000,00	**Rp596.597.165,00**

Jumlah senilai Rp777.821.000,00 merupakan jumlah Bagi Hasil Pajak dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 senilai Rp596.597.165,00. Bagi hasil pajak senilai Rp777.821.000,00 pada Tahun Anggaran (TA) 2025 merupakan bagi hasil pajak daerah untuk desa.

5.5.1.b.6 Bagi Hasil Retribusi

TA 2025	TA 2024
Rp309.661.549,00	**Rp229.119.070,00**

Bagi Hasil Retribusi dari seluruh arus kas keluar aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp309.661.549,00 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp229.119.070,00.

5.5.1.b.7 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp83.722.304.840,00	**Rp102.760.970.000,00**

Jumlah senilai Rp83.722.304.840,00 merupakan jumlah Bagi Hasil Pajak dari seluruh arus kas keluar pada aktivitas operasi Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp102.760.970.000,00. Bagi hasil Pendapatan Lainnya ini merupakan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten Sumba Tengah senilai untuk 65 Desa yang tersebar pada enam kecamatan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah.

5.5.1.c Arus Kas Bersih	TA 2025	TA 2024
	Rp51.836.026.698,19	**Rp115.903.952.959,58**

Jumlah senilai Rp51.836.026.698,19 merupakan selisih arus kas masuk dari aktivitas operasi senilai Rp577.447.066.296,13 dan arus kas keluar dari aktivitas operasi senilai Rp525.611.039.597,94 dari aktivitas operasi Tahun Anggaran (TA) 2025. sementara arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp115.903.952.959,58.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Aset Non Keuangan

5.5.2.a Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
	Rp86.341.000,00	**Rp665.539.500,00**

Jumlah arus masuk kas ke Bendahara Umum Daerah senilai Rp86.341.000,00 dari seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp665.539.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.12 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Pendapatan Penjualan atas Jalan.Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
6	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	86.341.000,00	665.539.500,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah		**86.341.000,00**	**665.539.500,00**

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan.

5.5.2.a.1 Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp86.341.000,00	**Rp665.539.500,00**

Pendapatan Penjualan Aset Lainnya dari seluruh arus kas masuk aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp86.341.000,00 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp665.539.500,00.

5.5.2.b Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
	Rp49.184.558.012,00	**Rp126.264.375.442,34**

Jumlah senilai Rp49.184.558.012,00 merupakan jumlah arus keluar kas dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp126.264.375.442,34 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.13 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Belanja Tanah	0,00	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin	13.379.171.304,00	13.143.410.114,45
4	Belanja Gedung dan Bangunan	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
5	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	15.235.963.860,00	98.063.043.920,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	190.349.880,00	166.536.000,00
7	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
8	Pengeluaran Pembelian Invetasi Non Permanen	0,00	0,00
9	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	6.000.000.000,00
	Jumlah	**49.184.558.012.00**	**126.264.375.442,34**

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan.

5.5.2.b.1 Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2025	TA 2024
	Rp13.379.171.304,00	**Rp13.143.410.114,45**

Jumlah senilai Rp13.379.171.304,00 merupakan jumlah belanja peralatan dan mesin dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp13.143.410.114,45 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.14 Belanja Peralatan dan Mesin dari Aktivitas Investasi Aset Non KeuanganTA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	74.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.204.832.578,00	4.329.075.500,00

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	1.168.885.100,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	67.460.000,00	263.598.500,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.244.307.837,00	2.642.434.480,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	822.478.940,00	735.471.800,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.784.500,00	153.028.350,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	172.778.334,00	146.249.330,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	14.998.000,00	143.944.800,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	475.710.000,00	58.590.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	2.832.103.182,00	1.737.732.482,00
12	Belanja Modal Sumur	99.999.900,00	1.018.839.444,45
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	13.990.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	232.332.828,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin BOS	435.718.033,00	424.337.500,00
Jumlah		**13.379.171.304,00**	**13.143.410.114,45**

5.5.2.b.2 Belanja Gedung dan Bangunan

TA 2025	TA 2024
Rp20.379.072.968,00	**Rp8.891.385.407,89**

Jumlah senilai Rp20.379.072.968,00 merupakan jumlah belanja gedung dan bangunan dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp8.891.385.407,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.15 Belanja Gedung dan Bangunan dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.379.072.968,00	8.891.385.407,89
	Jumlah	**20.379.072.968,00**	**8.891.385.407,89**

5.5.2.b.3 Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan

TA 2025	TA 2024
Rp15.235.963.860,00	**Rp98.063.043.920,00**

Jumlah senilai Rp15.235.963.860,00 merupakan jumlah belanja jalan. irigasi dan jaringan dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp98.063.043.920,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.16 Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	99.900.000,00	67.483.111.150,00
2	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	1.419.381.950,00
3	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	326.205.960,00	7.847.852.320,00
4	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	29.975.000,00
5	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Belanja Instalasi Pengaman	2.230.000.000,00	4.220.000.000,00
6	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	12.579.857.900,00	17.062.723.500,00
Jumlah		**15.235.963.860,00**	**98.063.043.920.00**

5.5.2.b.4 Belanja Aset Tetap Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp190.349.880,00	**Rp16.536.000,00**

Jumlah senilai Rp190.349.880,00 merupakan jumlah belanja aset tetap lainnya dari arus keluar kas Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas investasi aset non-keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 di mana pada Tahun Anggaran (TA) 2024 arus keluar kas dari aktivitas ini senilai Rp166.536.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.17 Belanja Aset Tetap Lainnya dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	26.200.000,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	190.349.880,00	140.336.000,00
	Jumlah	**190.349.880,00**	**166.536.000,00**

5.5.2.b.5 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp6.000.000.000,00**

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dari dari seluruh arus kas keluar aktivitas investasi aset non keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp0,00 dikarenakan tidak ada penyertaan modal ke Bank Pembangunan Daerah NTT.

5.5.2.c Arus Kas Bersih

TA 2025	TA 2024
(Rp49.098.217.012,00)	**(Rp125.598.835.942,34)**

Jumlah senilai (Rp49.098.217.012,00) Tahun Anggaran (TA) 2025 merupakan selisih kurang arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan yang senilai Rp86.341.000,00 dan arus kas keluar dari aktivitasi investasi aset non keuangan senilai Rp49.184.558.012,00 sementara arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai (Rp125.598.835.942,34).

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

5.5.3.a Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
	Rp2.916.666,00	**Rp48.999.998,00**

Jumlah arus kas masuk di Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp2.916.666,00 sedangkan di Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp48.999.998,00 merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.3.a.1 Penerimaan kembali Pinjaman Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp2.916.666,00	**Rp48.999.998,00**

Penerimaan kembali pinjaman lainnya dari arus kas masuk aktivitas pendanaan Bendahara Umum Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp2.916.666,00 atas penerimaan kembali Pokok Pinjaman (dana bergulir) bagi pelaku Usaha Mikro. Kecil. dan Menengah di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Penerimaan kembali pinjaman lainnya pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp48.999.998,00.

5.5.3.b Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
	Rp0.00	**Rp0.00**

Jumlah arus kas keluar-aktivitas pendanaan di Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp0,00 dan Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

5.5.3.b.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	TA 2025	TA 2024
	Rp0.00	**Rp0.00**

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

5.5.3.c Arus Kas Bersih	TA 2025	TA 2024
	Rp2.916.666,00	**Rp48.999.998,00**

Arus Kas Bersih di Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp2.916.666,00 merupakan selisih antara arus kas masuk aktivitas pendanaan senilai Rp2.916.666,00 dengan arus kas keluar aktivitas pendanaan senilai Rp0,00. Arus kas bersih aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp48.999.998,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran / Transitoris

5.5.4.a Arus Kas Masuk	TA 2025	TA 2024
	Rp33.476.189.719,61	**Rp42.346.910.767,02**

Jumlah senilai Rp33.476.189.719,61 merupakan jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran (TA) 2024 sementara pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.346.910.767,02. Rincian arus kas masuk aktivitas transitoris Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.18 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	33.476.189.719,61	42.346.910.767,02
	Jumlah	**33.476.189.719,61**	**42.346.910.767,02**

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas masuk dari aktivitas transitoris.

5.5.4.a.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	TA 2025	TA 2024
	Rp33.476.189.719,61	**Rp42.346.910.767,02**

Penerimaan perhitungan pihak ketiga dari arus kas masuk aktivitas transitoris Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp33.476.189.719,61 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.346.910.767,02.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga adalah penerimaan atas pajak dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah atas seluruh transaksi yang dikenakan pajak untuk penerimaan Iuran Wajib Pegawai 1%. Iuran Wajib Pegawai 8%. Iuran Wajib Pegawai 4%. pajak penghasilan PPh 21. pajak penghasilah PPh 22. pajak penghasilah PPh 23. pajak penghasilah PPh 04 (2). dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kematian. serta utang pajak negara yaitu utang PPh baik PPh 21. PPh 23. dan juga utang PPN. Untuk penerimaan perhitungan pihak ketiga dapat dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5.19 Perhitungan Fihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Penerimaan PFK (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.348.562.711,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	9.683.989.751,00
3	Iuran Wajib Pegawai 4%	9.298.503.129,00
4	Pajak Penghasilan PPh 21	2.112.024.871,00
5	Pajak Penghasilan PPh 22	513.648.535,00
6	Pajak Penghasilan PPh 23	146.340.256,00
7	Pajak Penghasilan PPh 04 (2)	629.650.788,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPn)	7.163.191.247,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	408.742.943,00
10	Jaminan Kematian	1.110.847.569,00
11	Utang PPh 21	1.482.800,00
12	Utang PPh 22	688.311,73
13	Utang PPh 23	7.777.574,78
14	Utang PPn Pusat	50.739.233,10
	Total	**33.476.189.719,61**

5.5.4.b Arus Kas Keluar	TA 2025	TA 2024
	Rp33.455.347.065,00	**Rp42.307.065.502,02**

Jumlah senilai Rp33.455.347.065,00 merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran/transitoris yang terdiri atas Pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Tahun Anggaran (TA) 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Arus kas keluar Aktivitas Non Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.307.065.502,02. Rincian arus kas keluar aktivitas non anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.5.20 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp33.455.347.065,00	42.307.065.502,02
	Jumlah	**Rp33.455.347.065,00**	**42.307.065.502,02**

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan di bawah ini menurut akun arus kas keluar dari aktivitas transitoris.

	TA 2025	TA 2024
5.5.4.b.1 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	**Rp33.455.347.065,00**	**Rp42.307.065.502,02**

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga dari arus kas keluar aktivitas transitoris Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp33.455.347.065,00 dan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 senilai Rp42.307.065.502,02.

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga adalah pengeluaran atas pajak dari Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah atas seluruh transaksi yang dikenakan pajak untuk pengeluaran Iuran Wajib Pegawai 1%. Iuran Wajib Pegawai 8%. Iuran Wajib Pajak 4%. pajak penghasilah PPh 21. pajak penghasilah PPh 22. pajak penghasilah PPh 23. pajak penghasilah PPh 04 (2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jaminan Kecelakaan Kerja. Jaminan Kematian. utang PPh 21. utang PPh 22. utang PPh 23. dan utang PPN. Pengeluaran perhitungan pihak ketiga dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.5.21 Perhitungan Fihak Ketiga TA 2025

No	Uraian	Pengeluaran PFK (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	2.348.562.711,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	9.683.989.751,00
3	Iuran Wajib Pegawai 4%	9.298.503.129,00
4	Pajak Penghasilan Pph 21	2.112.024.871,00
5	Pajak Penghasilan Pph 22	513.648.535,00
6	Pajak Penghasilan Pph 23	146.340.256,00
7	Pajak Penghasilan Pph 04 (2)	629.650.788,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)	7.163.191.247,00
9	Jaminan Kecelakaan Kerja	408.742.943,00
10	Jaminan Kematian	1.110.847.569,00
11	Utang PPh 21	14.854.078,00
12	Utang PPh 22	48.395,00
13	Utang PPh 23	3.903.300,00
14	Utang PPN Pusat	21.039.492,00
	Total	**33.455.347.065,00**

	TA 2025	TA 2024
5.5.4.c Arus Kas Bersih-Aktivitas Transitoris	**Rp20.842.654,61**	**Rp39.845.265,00**

Jumlah senilai Rp20.842.654,61 merupakan selisih arus kas masuk senilai Rp33.476.189.719,61 dan arus kas keluar senilai Rp33.455.347.065,00 dari aktivitas transitoris Tahun Anggaran (TA) 2025. Pada Tahun Anggaran 2024 arus kas bersih atas aktivitas transitoris senilai Rp39.845.265,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

TA 2025	TA 2024
Rp2.761.569.006,80	**(Rp9.606.037.719,76)**

Jumlah senilai Rp2.761.569.006,80 merupakan Kenaikan kas Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 terjadi penurunan kas senilai Rp9.606.037.719,76 merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.22 Saldo Kenaikan (Penurunan) Kas TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	51.836.026.698,19	115.903.952.959,58
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(49.098.217.012,00)	(125.598.835.942,34)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2.916.666,00	48.999.998,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Anggaran	20.842.654,61	39.845.265,00
Jumlah		**2.761.569.006,80**	**(9.606.037.719,76)**

5.5.5.a Saldo Awal Kas di BUD

TA 2025	TA 2024
Rp38.260.218.420,15	**Rp47.866.256.139,91**

Jumlah senilai Rp38.260.218.420,15 merupakan saldo awal kas Tahun Anggaran (TA) 2025 yang merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2024 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 saldo awal kas senilai Rp47.866.256.139,91 yang merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2023.

5.5.5.b Saldo Akhir Kas di BUD

TA 2025	TA 2024
Rp41.021.787.426,95	**Rp38.260.218.420,15**

Jumlah senilai Rp41.021.787.426,95 merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan jumlah senilai Rp38.260.218.420,15 merupakan saldo akhir kas Tahun Anggaran (TA) 2024.

5.5.6. Saldo Kas di Neraca

TA 2025	TA 2024
Rp41.021.787.426,95	**Rp38.260.218.420,15**

Jumlah senilai Rp41.021.787.426,95 merupakan saldo akhir kas di Neraca Tahun Anggaran (TA) 2025 sedangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2024 saldo akhir kas di neraca senilai Rp38.260.218.420,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.23 Saldo Kas Akhir TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1	Kas di Daerah	39.416.098.992,62	36.325.555.154,80
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	54.000,00	20.638.900,46
4	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	618.555.915,41	778.302.345,58
5	Kas di BOS	304.788.208,31	299.243.069,31
6	Kas Dana BOK Puskesmas	613.623.191,00	796.633.685,00
7	Kas Lainnya	68.667.119,61	39.845.265,00
8	Kad di Deposito Berjangka	0,00	0,00
Jumlah		**41.021.787.426,95**	**38.260.218.420,15**

Untuk rincian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.6.a Kas di Kas Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp39.416.098.992,62	**Rp36.325.555.154,80**

Jumlah senilai Rp39.416.098.992,62 merupakan saldo akhir Kas di Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2025 yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sedangkan per 31 Desember 2024 saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah senilai Rp36.325.555.154,80.

5.5.6.b Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2025	TA 2024
Rp54.000,00	**Rp20.638.900,46**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp54.000,00. Nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2024 senilai Rp20.638.900,46.

5.5.6.c Kas Dana Kapitasi Pada FKTP

TA 2025	TA 2024
Rp618.555.915,41	**Rp778.302.345,58**

Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2025 senilai Rp618.555.915,41 yaitu sisa Dana Kapitasi pada Puskesmas yang ada dalam Rekening Giro Puskesmas sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp778.302.345,58.

5.5.6.d Kas Dana BOSP

TA 2025	TA 2024
Rp304.788.208,31	**Rp299.243.069,31**

Kas di BOS per 31 Desember 2025 adalah Kas di Rekening Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp304.788.208,31 sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp299.243.069,31.

5.5.6.e Kas Dana BOK Puskesmas

TA 2025	TA 2024
Rp613.623.191,00	**Rp796.633.685,00**

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp613.623.191,00 yaitu sisa BOK Puskesmas sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp796.633.685,00 yang adalah sisa BOK Puskesmas.

5.5.6.f Kas Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp68.667.119,61	**Rp39.845.265,00**

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp68.667.119,61 merupakan Utang PFK atas kegiatan pada Tahun 2025 sedangkan per 31 Desember 2024 senilai Rp39.845.265,00 merupakan kas BOK Puskesmas.

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang mencerminkan adanya penambahan maupun pengurangan Ekuitas sebagai akibat adanya perubahan kebijakan dan metode akuntansi. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1. Perubahan Ekuitas

	TA 2025	TA 2024
5.6.1.a Ekuitas Awal	**Rp1.405.100.800.771,02**	**Rp1.382.145.304.668,40**

Jumlah ekuitas awal Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1.405.100.800.771,02 merupakan reklasifikasi dari Ekuitas Akhir Tahun Anggaran (TA) 2024.

	TA 2025	TA 2024
5.6.1.b Surplus / Defisit – LO	**(Rp49.545.868.411,32)**	**Rp46.686.427.900,67**

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit – Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan senilai (Rp49.545.868.411,32) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025.

	TA 2025	TA 2024
5.6.1.c Dampak Kumulatif	**(Rp15.214.114.713,13)**	**(Rp23.730.931.798,05)**

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar pada Tahun 2025 sebesar (Rp15.214.114.713,13) dan pada Tahun 2024 sebesar (Rp23.730.931.798,05) mengalami peningkatan sebesar Rp8.516.817.084,92 atau 35,89%. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2025	TA 2024
5.6.1.c.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	**(Rp15.214.114.713,13)**	**(Rp23.730.931.798,05)**

Koreksi ekuitas lainnya di Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp15.214.114.713,13) mengalami Peningkatan sebesar Rp8.516.817.084,92 atau 35,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar (Rp23.730.931.798,05). Koreksi ekuitas lainnya pada Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terdiri atas :

a. Koreksi atas saldo Piutang pajak sebesar Rp13.510.900,00
b. Koreksi atas saldo awal piutang transfer antar daerah sebesar (Rp1,00)
c. Koreksi atas saldo aset tetap-aset tanah sebesar (Rp3.167.500,00)
d. Koreksi atas saldo aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.862.542.690,00
e. Koreksi saldo aset tetap lainnya sebesar Rp58.362.115,00
f. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar (Rp714.421.363,39)
g. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar (Rp4.797.700.020,77)
h. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar (Rp9.499.016.347,29).

i. Koreksi saldo akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar (Rp402.150.683,34)
j. Koreksi atas saldo aset lain-lain sebesar (Rp1.157.749.947,85)
k. Koreksi atas saldo Utang kelebihan bayar transfer Pemerintah Pusat sebesat (Rp1.574.257.000,00)
l. Koreksi saldo awal beban penyisihan piutang sebesar (Rp67.554,49)

5.6.1.d Ekuitas Akhir

TA 2025	TA 2024
Rp1.340.340.817.646,57	**Rp1.405.100.800.771,02**

Ekuitas Akhir di Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1.340.340.817.646,57 adalah penambahan dari ekuitas awal sebesar Rp1.405.100.800.771,02 ditambah dengan defisit Laporan Operasional sebesar (Rp49.545.868.411,32) ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp15.214.114.713,13).

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Sumba Tengah mempunyai luas wilayah 2.060,54 km2, terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Katikutana, Kecamatan Katikutana Selatan, Kecamatan Mamboro, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah. Kondisi topografi wilayah pada umumnya didominasi wilayah perbukitan dengan ketinggian dari permukaan laut bervariasi antara 0-800 m.

Kabupaten Sumba Tengah terletak pada 90° 20' – 90° 50' lintang selatan dan 119° 22' – 119° 55' bujur timur. Kabupaten Sumba Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hahar dan Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Loli dan Kecamatan Tanarighu Kabupaten Sumba Barat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah untuk periode tahun 2025 – 2030 adalah :
Bupati : Drs. Paulus Sakayu Karungu Limu
Wakil Bupati : Marthinus Umbu Djoka, S. Hut, M. Si

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah dibentuk berdasarkan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, dengan susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah (8 Bagian);
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas (18 SKPD);
5. Badan (4 SKPD);
6. Kantor (5 SKPD); dan
7. Kecamatan (6 SKPD)
8. Unit Pelayanan Teknis Daerah/UPTD (3 UPTD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah sudah melakukan perubahan Perangkat Daerah per tanggal 10 September 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah tersebut diatas dilakukan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan:

1. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah;
4. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
5. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumba Tengah;
6. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Dengan susunan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah (8 Bagian)

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah
b. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial yang membawahi 3 bagian yaitu:
   1) Bagian Pemerintahan;
   2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
   3) Bagian Hukum.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi 2 bagian yaitu :
   1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
   2) Bagian Administrasi Pembangunan.
d. Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3 bagian yaitu :
   1) Bagian Umum;
   2) Bagian Organisasi; dan
   3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan (4 Badan)

   Badan Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari:
   a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
   b. Badan Keuangan Daerah;
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
   d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Kecamatan (6 unit)
   a. Kecamatan Katikutana;
   b. Kecamatan Katikutana Selatan;
   c. Kecamatan Umbu Ratu Nggay;
   d. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
   e. Kecamatan Mamboro; dan
   f. Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah.
6. Dinas (18 Dinas)

   Dinas Daerah Kabupaten Sumba Tengah terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
   b. Dinas Kesehatan;
   c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
   e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   h. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   i. Dinas Lingkungan Hidup;
   j. Dinas Perikanan;
   k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
   n. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
   p. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
   q. Dinas Peternakan; dan
   r. Dinas Perhubungan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ada 3 (Tiga)
   a. UPTD Pelayanan Air Minum (PAM)
   b. UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT, dan
   c. UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah per 31 Desember 2025 berjumlah 4.059 orang dengan rincian Eselon II sebanyak 26 orang, Eselon III sebanyak 108 orang, Eselon IV sebanyak 117 orang, tenaga fungsional pendidik sebanyak 565 orang, tenaga fungsional kesehatan sebanyak 398, tenaga fungsional lainnya sebanyak 106 orang, staff / pelaksana sebanyak 2.739 orang. Untuk Rincian Aparatur Sipil Negara pergolongan dapat dirinci sebagai berikut,

Tabel 6.1 Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupten Sumba Tengah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai					
		Lainnya	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Pegawai	1.677	13	436	1.758	175	4.059

Untuk tenaga fungsional pendidik di Kabupaten Sumba Tengah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.2 Tenaga Fungsional Pendidik per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Guru TK/PAUD	-	-	6	-	6
2	Guru SLB	-	-	-	-	-
3	Guru SD	-	34	305	10	349
4	Guru SMP	-	5	198	7	210
TOTAL						565

Sedangkan untuk tenaga fungsional kesehatan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.3 Tenaga Fungsional Kesehatan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Administrator Kesehatan Ahli Muda	-	-	3	1	4
2	Apoteker Muda	-	-	12	-	12
3	Apoteker Pertama	-	-	3	-	3
4	Asisten Apoteker Pelaksana	-	9	-	-	9
5	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-
6	Asisten Apoteker Penyelia	-	-	3	-	3
7	Bidan Muda	-	-	3	-	3
8	Bidan Pelaksana	-	24	22	-	46
9	Bidan Pelaksana Lanjutan	-	7	20	-	27
10	Bidan Penyelia	-	-	14	-	14
11	Bidan Pertama	-	-	6	-	6
12	Dokter Madya	-	-	-	1	1
13	Dokter Muda	-	-	9	-	9
14	Dokter Pertama	-	-	6	-	6
15	Dokter Gigi Muda	-	-	1	-	1
16	Dokter Gigi Pertama	-	-	1	-	1
17	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	-	-	4	-	4
18	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	-	-	2	-	2
19	Epidemiolog Kesehatan Pertama	-	-	1	-	1
20	Nutrisionis Muda	-	-	1	-	1
21	Nutrisionis Pelaksana	-	6	-	-	6
22	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-
23	Nutrisionis Pertama	-	-	14	-	14
24	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	-	-	2	-	2
25	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	-	-	1	-	1

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
26	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	-	-	-	1	1
27	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	-	-	5	-	5
28	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	-	-	-	-	-
29	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	-	-	3	-	3
30	Perawat Ahli Pertama	-	-	3	-	3
31	Perawat Gigi Pelaksana	-	6	-	-	6
32	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	-	-	5	-	5
33	Perawat Gigi Penyelia	-	-	18	-	18
34	Perawat Muda~Diploma	-	-	9	-	9
35	Perawat Muda~Sarjana	-	-	18	-	18
36	Perawat Madya	-	-	-	1	1
37	Perawat Pelaksana	-	30	40	-	70
38	Perawat Pelaksana Lanjutan	-	5	33	-	38
39	Perawat Pelaksana Pemula	-	2	-	-	2
40	Perawat Penyelia	-	-	26	-	26
41	Perawat Pertama (Diploma)	-	-	2	-	2
42	Perawat Pertama (Sarjana)	-	-	2	-	2
43	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	-	-	1	-	1
44	Perekam Medis Terampil	-	3	-	-	3
45	Perekam Medis Terampil / Pelaksana	-	3	-	-	3
46	Perencana Ahli Muda	-	-	1	-	1
47	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	-	10	-	-	10
48	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	-	-	1	-	1
49	Radiografer Penyelia	-	-	1	-	1
50	Sanitarian Ahli Muda	-	-	1	-	1
51	Repraksionis Optisen Pelaksana	-	-	-	-	-
52	Sanitarian Pelaksana	-	3	-	-	3
53	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	-	-	2	-	2
54	Sanitarian Pelaksana Penyelia	-	-	5	-	5
TOTAL						**398**

Untuk tenaga fungsional lainnya terdiri atas tenaga fungsional pada Dinas Perhubungan sebanyak 3 orang, tenaga fungsional pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sebanyak 76 orang dan tenaga fungsional pada Inspektorat sebanyak 27 orang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.4 Tenaga Fungsional Lainnya pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Operator Sandiman Pelaksana Muda	-	1	-	-	1
2	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	-	-	1	-	1
3	Analis Kebijakan Ahli Muda	-	-	1	-	1
TOTAL						**3**

Tabel 6.5 Tenaga Fungsional Lainnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Analis Kepegawaian Ahli Muda	-	-	1	-	1
2	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	-	-	6	-	6
3	Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	-	-	1	-	1
4	Asisten Pengawas Bibit Ternak Penyelia	-	8	-	-	8
5	Asisten Penyuluh Pertanian Muda	-	-	3	-	3
6	Asisten Penyuluh Pertanian Muda Lanjutan	-	-	3	-	3
7	Medik Veteriner Utama	-	-	1	-	1
8	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	-	-	2	-	2
9	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	-	-	2	-	2
10	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Ahli	-	-	-	-	-
11	Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Muda	-	-	1	-	1
12	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	-	-	2	-	2
13	Penyuluh Pertanian Penyelia	-	5	3	-	8
14	Penyuluh Pertanian Pertama	-	-	16	-	16
15	Penyuluh Pertanian Utama Lanjutan	-	-	-	5	5
16	Penyuluh Pertanian Utama Pratama	-	-	14	-	14
17	Perencana Ahli Muda	-	-	1	-	1
18	Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	-	1	-	-	1
19	Pranata Komputer	-	-	1	-	1
TOTAL						**76**

Tabel 6.6 Tenaga Fungsional Lainnya pada Inspektorat per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Asisten Auditor Madya	-	-	5	-	5
2	Auditor Penyelia	-	-	7	-	7
3	Auditor Pertama Lanjutan	-	-	2	-	2
4	Pengawas Pemerintahan Muda	-	-	3	-	3
5	Pengawas Penyelenggaraan	-	-	8	-	8
6	Perencana Ahli Muda	-	-	1	-	1
7	Pranata Komputer	-	-	1	-	1
TOTAL						**27**

Untuk tenaga Non PNS (tenaga kontrak daerah) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor: BKPSDM.820/SK/9/53.17/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang pengangkatan tenaga kerja Non ASN pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 6.7 Tenaga Non Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Tenaga Teknis	736
2	Tenaga Kesehatan	6
3	Tenaga Pendidikan	688
Jumlah		**1.430**

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendapat program pengembangan kawasan pangan berbasis korporasi petani atau lebih dikenal dengan nama Food Estate (FE) yang merupakan Program

Pemerintah Pusat yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Program Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah sudah dimulai dari Tahun Anggaran 2020 dan akan berlanjut sampai dengan Tahun Anggaran 2024 yang lebih difokuskan pada upaya peningkatan dan pengembangan tanaman padi dan jagung.

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan Program Food Estate ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian - Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan peralatan dan mesin berupa Alsintan dari Tahun Anggaran 2020 dan 2022 yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah dengan rincian jenis barang / Alsintan sebagai berikut.

Tabel 6.8 Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Barang	Spesifikasi		Tahun Pembelian	Jumlah (unit)
		Merek	Type		
1	Hand Traktor	Kubota RD 85	Quick G 3000 zeva	2020	30
		Kubota RD 110	Quick Zena Rotary	2020	20
		Yanmar	YST-85 L	2020	30
		Kubota RD 110	Quick Zena Rotary	2021	103
2	Traktor Besar	ISEKI	NT-548 F	2020	10
		KIOTI	DK 4510	2021	10
3	Combine Harvester	GUNUNG BIRU	MCB 200 SP	2020	10
		JAVATECH	4LZT-4,0 ZD	2020	2
		TANIKAYA	MEGATRON HT 88	2021	5
		CROWN	MCH 2000JP STAR	2021	5
		JAVATECH	BIG.CO 1000	2022	1
4	Corn Sheller	GUNUNG BIRU	CS-2M	2020	5
		ISOKU	CS1000GP	2021	5
5	Cultivator	ISOKU	IC-800	2021	10
6	Mesin Pompa Air 3 Dim	HONDA	WB30XN	2021	30
		ISOKU	HONDA GX 200	2021	10
7	Mesin Pompa Air 4 Dim	Yanmar MB-P 100	Yanmar 8,5 HP	2021	5
		ISOKU 100	Yanmar TF 85	2021	15
8	Mesin Pompa Air 6 Dim	ISOKU 150	KUBOTA RD150 DI-2N	2021	25
9	Power Thresser	ISOKU	PTP1000GP	2021	10
10	RICE MILLING	JAVATECH	Rice Milling 1000	2022	8
11	BED DRYER	Pabrikan	Pabrikan	2022	3
Jumlah					**352**

Oleh karena itu Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan Kabupaten Sumba Tengah sebagai kawasan *food estate* yang merupakan konsep pengembangan pangan dengan luasan kawasan food estate di Sumba Tengah mencapai 10.000 hektare terdiri dari 5.000 hektare kawasan persawahan dan 5.000 hektare merupakan lahan pertanian lahan kering untuk pengembangan tanaman jagung dan peternakan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sangat merasakan dampak positif dari program Food Estate Pemerintah Pusat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yakni:

1. Peningkatan areal persawahan pertanian dan perkebunan yang di kerjakan oleh masyarakat;

2. Peningkatan produktivitas tanaman padi dan jagung;
3. Adanya perubahan pola kerja para petani dari pola kerja tradisional ke pola kerja yang lebih modern;
4. Adanya efisiensi waktu pengolahan lahan sampai dengan waktu panen karena didukung dengan peralatan dan mesin atau Alsintan yang memadai;
5. Biaya pengolahan lahan menjadi lebih murah karena didukung dengan sejumlah peralatan dan mesin atau Alsintan;
6. Pola kerja dilakukan melalui kelompok tani yang terkoordinir serta terdata lengkap; dan
7. Adanya pengembangan Holtikultura dan usaha peternakan itik;

Dengan adanya peralatan dan mesin berupa Traktor Besar dan *Combine Hervester*, Mesin Pompa Air, Kultivator, dan alat-alat pertanian lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah berupaya untuk mengoptimalkan aset dimaksud sehingga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah guna menunjang perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang - undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR REAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.278.000,00	-	-	41.278.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Piutang Tagihan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran	427.700.000,00	-	-	427.700.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Piutang Tagihan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran	798.085.000,00	-	-	798.085.000,00
4	Dinas Perikanan	Piutang Tagihan Angsuran dan Tagihan Penjualan Angsuran	740.275.000,00	-	-	740.275.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	Piutang Lainnya (Gaji dan Tunjangan)	8.535.700,00	-	-	8.535.700,00
6	Badan Keuangan Daerah	Piutang Lainnya (Gaji dan Tunjangan)	16.293.900,00	-	-	16.293.900,00
7	Dinas Peternakan	Piutang Lainnya (Uang Muka dan Denda Keterlambatan)	19.893.500,00	-	-	19.893.500,00
8	Inspektorat	Piutang Lainnya (LHP KNKD SEMESTER II~2021)	15.838.559,09	-	-	15.838.559,09
9	Badan Keuangan Daerah	Piutang PBB sektor Perkotaan dan Pedesaan	3.226.621.059,00	2.349.255.832,00	242.589.299,00	5.333.287.592,00
10	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi (Sewa Truk)	248.250.000,00	-	-	248.250.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	Piutang klaim BPJS pada RSUD Waibakul yang belum diakui	859.693.932,00	1.665.841.200,00	859.693.932,00	1.665.841.200,00
12	UPTD Pengelolaan Air Minum	Piutang Retribusi Pemakaian Air Minum/Bersih	1.325.484.318,00	-	-	1.325.484.318,00
13	Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Hotel	-	14.975.167,60	-	14.975.167,60
14	Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	36.725.200,00	-	36.725.200,00
15	Badan Keuangan Daerah	Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	-	15.599.190,87	-	15.599.190,87
16	Badan Keuangan Daerah	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	637.219.478,55	-	637.219.478,55	-
		Jumlah	**8.365.168.446,64**	**4.082.396.590,47**	**1.739.502.709,55**	**10.708.062.327,56**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	Jumlah Piutang Bersih
1	2	3	4	5
1	Badan Keuangan Daerah	41.278.000,00	(41.278.000,00)	41.278.000,00
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	427.700.000,00	(427.700.000,00)	427.700.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	798.085.000,00	(798.085.000,00)	798.085.000,00
4	Dinas Perikanan	740.275.000,00	(740.275.000,00)	740.275.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	8.535.700,00	(8.535.700,00)	8.535.700,00
6	Badan Keuangan Daerah	16.293.900,00	(16.293.900,00)	16.293.900,00
7	Dinas Peternakan	19.893.500,00	(19.893.500,00)	19.893.500,00
8	Inspektorat	15.838.559,09	(15.838.559,09)	15.838.559,09
9	Badan Keuangan Daerah	5.333.287.592,00	(2.320.795.868,70)	5.333.287.592,00
10	Dinas Perhubungan	248.250.000,00	(248.250.000,00)	248.250.000,00
11	Rumah Sakit Umum Daerah	1.665.841.200,00	-	1.665.841.200,00
12	UPTD Pengelolaan Air Minum	1.325.484.318,00	(1.325.484.318,00)	1.325.484.318,00
13	Badan Keuangan Daerah	14.975.167,60	(74.875,84)	14.975.167,60
14	Badan Keuangan Daerah	36.725.200,00	(183.626,00)	36.725.200,00
14	Badan Keuangan Daerah	15.599.190,87	-	15.599.190,87
	JUMLAH	**10.708.062.327,56**	**(5.962.688.347,62)**	**10.708.062.327,56**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH

DAFTAR REKEPITULASI DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	*Perangkat Daerah*	*Jumlah Dana Bergulir*	*Jumlah Penyisihan Dana Bergulir*	*Jumlah Piutang Bersih*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	678.729.573,17	(601.401.566,87)	678.729.573,17
JUMLAH		**678.729.573,17**	**(601.401.566,87)**	**678.729.573,17**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2025	PT. BANK NTT		UANG	66.422.830.000,00	66.422.830.000,00	-	66.422.830.000,00	-	4.671.142.115,00	-	66.422.830.000,00
2	2025	PD. SOLAPORA		UANG	-	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-	-	-	2.500.000.000,00
	Jumlah				66.422.830.000,00	68.922.830.000,00	-	68.922.830.000,00	-	4.671.142.115,00	-	68.922.830.000,00

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	**Tanah**				
	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	3.242.963.600,00	-	-	3.242.963.600,00
	SMP N 1 Waibakul	53.542.500,00	-	-	53.542.500,00
	SMP N 2 Waibakul	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00
	SMP N 3 Waibakul	73.400.000,00	-	-	73.400.000,00
	SLB N Waibakul	14.298.000,00	-	-	14.298.000,00
	Sanggar Kegiatan Belajar	42.473.750,00	-	-	42.473.750,00
	SMK N 1 Waibakul	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
	SMP N 1 Mamboro	46.984.050,00	-	-	46.984.050,00
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	5.639.250,00	-	-	5.639.250,00
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
	Kecamatan Katikutana	2.198.197.050,00		-	2.198.197.050,00
	Kecamatan Katikutana Selatan	676.645.000,00		-	676.645.000,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	409.802.700,00		-	409.802.700,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	302.573.250,00		-	302.573.250,00
	Kecamatan Mamboro	422.083.690,00		-	422.083.690,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	195.942.875,00		-	195.942.875,00
	Badan Keuangan Daerah	11.000.000,00		-	11.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.702.051.588,00		-	34.702.051.588,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.000.775.240,00		-	2.000.775.240,00
	Dinas Perikanan	49.056.875,00		-	49.056.875,00
	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	286.460.550,00		-	286.460.550,00
	Dinas Sosial	7.656.000,00		-	7.656.000,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	32.934.076,00		-	32.934.076,00
	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	16.977.500,00		3.167.500,00	13.810.000,00
	Dinas Perhubungan	143.815.000,00		-	143.815.000,00
	Dinas Kesehatan	1.026.342.960,00		-	1.026.342.960,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	222.250.000,00		-	222.250.000,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.143.764.500,00		-	1.143.764.500,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.894.463,00		-	18.894.463,00
	Dinas Lingkungan Hidup	500.000.000,00		-	500.000.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.438.500,00		-	15.438.500,00
2	**Peralatan dan Mesin**				
	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	45.787.816.500,30	684.026.433,00	1.360.000,00	46.470.482.933,30
	SMP N 1 Waibakul	703.328.084,00	-	-	703.328.084,00
	SMP N 2 Waibakul	464.660.761,62	-	-	464.660.761,62
	SMP N 3 Waibakul	340.591.074,12	-	-	340.591.074,12
	SMP N 4 Waibakul	324.318.800,00	-	-	324.318.800,00
	SMP N 5 Waibakul	166.500.000,00	-	-	166.500.000,00
	SD – SMP Satap Taman Mas	299.768.800,00	-	-	299.768.800,00
	SD – SMP Satap Pantai Maloba	166.602.800,00	-	-	166.602.800,00
	Sanggar Kegiatan Belajar	886.932.928,29	14.000.000,00	23.849.905,80	877.083.022,49
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	240.176.516,12	-	-	240.176.516,12
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	212.900.000,00	-	7.900.000,00	205.000.000,00
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	264.231.852,00	-	-	264.231.852,00
	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	163.526.074,12	-	-	163.526.074,12
	SD – SMP Satap Uma Paohi	150.934.800,00	-	-	150.934.800,00
	SD – SMP Satap Waikajanga	241.002.074,12	-	-	241.002.074,12
	SMP N 1 Mamboro	254.175.881,28	-	1.000.000,00	253.175.881,28
	SMP N 2 Mamboro	403.239.800,00	-	-	403.239.800,00
	SMP N 3 Mamboro	333.333.000,00	-	-	333.333.000,00
	SD – SMP Satap Sawirara / SMP N 4 Mamboro	220.110.000,00	-	-	220.110.000,00
	SD - SMP Satap Lailori	210.004.000,00	-	-	210.004.000,00
	SD - SMP Satap Watu Lade	124.500.000,00	-	-	124.500.000,00
	SD – SMP Satap Kamberalaja	220.967.700,00	-	-	220.967.700,00
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	530.243.574,12	-	-	530.243.574,12
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	449.718.552,00	-	-	449.718.552,00
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	494.589.000,00	-	-	494.589.000,00
	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	64.360.000,00	-	-	64.360.000,00
	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	523.227.108,12	-	-	523.227.108,12
	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	370.850.000,00	-	-	370.850.000,00
	SD – SMP Satap Praimahala	314.389.660,00	-	-	314.389.660,00
	SD – SMP Satap Alanga / SMPN 1 URG Tengah	265.240.000,00	-	-	265.240.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	312.761.888,85	-	-	312.761.888,85
	Kecamatan Katikutana	1.085.728.531,61	-	-	1.085.728.531,61
	Kecamatan Katikutana Selatan	735.926.238,87	-	-	735.926.238,87
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	799.793.681,29	59.990.000,00	-	859.783.681,29
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	1.052.805.700,25	-	-	1.052.805.700,25
	Kecamatan Mamboro	747.439.581,53	40.450.000,00	-	787.889.581,53
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	741.208.536,30	23.144.378,00	-	764.352.914,30
	Bagian Tata Pemerintahan	1.427.412.745,09	-	-	1.427.412.745,09
	Bagian Humas & Informatika	1.445.132.500,00	-	-	1.445.132.500,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	604.494.740,00	-	-	604.494.740,00
	Bagian Administrasi Pembangunan	1.199.732.626,00	48.635.800,00	-	1.248.368.426,00
	Bagian Ekonomi	729.282.659,00	-	-	729.282.659,00
	Bagian Umum	13.976.880.478,67	3.707.391.600,00	149.424.900,00	17.534.847.178,67
	Bagian Hukum	399.115.359,09	-	-	399.115.359,09
	Bagian Organisasi	533.133.769,03	-	-	533.133.769,03
	Sekretariat DPRD	6.374.331.106,88	578.765.187,00	-	6.953.096.293,88
	Badan Keuangan Daerah	3.330.804.951,29	294.592.400,00	-	3.625.397.351,29
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.205.226.705,49	-	-	8.205.226.705,49
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.129.604.943,86	-	-	9.129.604.943,86
	Dinas Perikanan	2.941.372.509,00	19.800.000,00	1.980.000,00	2.959.192.509,00
	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	699.108.448,09	13.174.035,00	-	712.282.483,09
	Dinas Sosial	1.410.099.515,99	-	-	1.410.099.515,99
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.218.284.889,00	-	-	1.218.284.889,00
	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	1.885.493.404,24	64.970.000,00	-	1.950.463.404,24
	Dinas Perhubungan	5.115.856.078,00	599.800.000,00	683.236.000,00	5.032.420.078,00
	Dinas Kesehatan	83.754.052.524,97	5.604.339.000,00	-	89.358.391.524,97
	Puskesmas Wairasa	2.119.827.257,00	123.313.834,00	-	2.243.141.091,00
	Puskesmas Malinjak	1.253.200.000,00	138.313.833,00	-	1.391.513.833,00
	Puskesmas Lawonda	1.709.216.475,00	123.313.834,00	-	1.832.530.309,00
	Puskesmas Mananga	773.833.901,00	73.313.834,00	-	847.147.735,00
	Puskesmas Maradesa	970.490.000,00	22.500.000,00	-	992.990.000,00
	Puskesmas Lendiwacu	1.518.850.000,00	73.313.834,00	-	1.592.163.834,00
	Puskesmas Pahar	656.117.872,00	70.000.000,00	-	726.117.872,00
	Puskesmas Wee Luri	675.674.648,00	-	-	675.674.648,00
	Puskesmas Umbu Riri	674.042.000,00	-	-	674.042.000,00
	Puskesmas Tanambanas	1.324.952.500,00	-	-	1.324.952.500,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	51.924.810.380,00	3.248.543.532,00	184.884.722,00	54.988.469.190,00
	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	2.801.706.237,30	19.980.000,00	-	2.821.686.237,30

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.752.727.049,97	-	-	2.752.727.049,97
	Inspektorat	1.306.155.159,09	-	-	1.306.155.159,09
	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	1.996.767.275,00	72.499.999,00	-	2.069.267.274,00
	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	2.196.334.408,37	11.000.000,00	-	2.207.334.408,37
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	991.429.900,00	66.496.940,00	-	1.057.926.840,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.237.829.631,30	1.646.648.274,00	-	3.884.477.905,30
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ar	6.647.868.530,00	32.915.000,00	-	6.680.783.530,00
	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	1.386.011.342,00	29.082.000,00	-	1.415.093.342,00
	Dinas Lingkungan Hidup	6.320.719.616,50	-	-	6.320.719.616,50
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1.141.406.343,57	-	-	1.141.406.343,57
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	1.908.981.038,09	10.500.000,00	-	1.919.481.038,09
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.080.395.370,00	281.494.416,00	-	2.361.889.786,00
	UPTD Pengelola Air Minum	1.551.032.470,00	-	-	1.551.032.470,00
	UPTD Pembibitan Ternak	334.457.000,00	-	-	334.457.000,00
	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT	376.475.200,00	9.000.000,00	-	385.475.200,00
3	**Gedung & Bangunan**				
	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	100.749.844.195,28	925.393.350,00	124.653.318,16	101.550.584.227,12
	SMP N 1 Waibakul	2.167.292.000,00	-	-	2.167.292.000,00
	SMP N 2 Waibakul	1.163.037.000,00	-	-	1.163.037.000,00
	SMP N 3 Waibakul	4.126.906.157,10	-	-	4.126.906.157,10
	SMP N 4 Waibakul	1.261.673.280,00	-	-	1.261.673.280,00
	SMP N 5 Waibakul	848.724.000,00	-	-	848.724.000,00
	SD – SMP Satap Taman Mas	1.216.197.000,00	-	-	1.216.197.000,00
	SD – SMP Satap Pantai Maloba	1.056.722.000,00	-	-	1.056.722.000,00
	Sanggar Kegiatan Belajar	1.499.543.993,00	-	-	1.499.543.993,00
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	1.894.501.291,00	-	-	1.894.501.291,00
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	1.787.954.174,00	-	-	1.787.954.174,00
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	1.778.567.757,00	-	-	1.778.567.757,00
	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	1.412.794.000,00	-	-	1.412.794.000,00
	SD – SMP Satap Uma Paohi	507.899.000,00	-	-	507.899.000,00
	SD – SMP Satap Waikajanga	485.158.000,00	-	-	485.158.000,00
	SMP N 1 Mamboro	1.236.776.000,00	41.750.000,00	-	1.278.526.000,00
	SMP N 2 Mamboro	1.197.219.000,00	41.750.000,00	-	1.238.969.000,00
	SMP N 3 Mamboro	4.336.891.779,93	-	-	4.336.891.779,93
	SD – SMP Satap Sawirara	903.636.675,00	-	-	903.636.675,00
	SD - SMP Satap Lailori	1.412.977.306,53	-	-	1.412.977.306,53
	SD - SMP Satap Watu Lade	487.200.000,00	-	-	487.200.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	SD – SMP Satap Kamberalaja	384.474.000,00	-	-	384.474.000,00
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	1.451.042.000,00	-	-	1.451.042.000,00
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	1.426.908.200,00	-	-	1.426.908.200,00
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	2.580.267.000,00	-	-	2.580.267.000,00
	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	798.089.000,00	-	88.884.000,00	709.205.000,00
	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	2.022.464.530,00	41.750.000,00	-	2.064.214.530,00
	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	1.390.901.098,00	-	-	1.390.901.098,00
	SD – SMP Satap Praimahala	106.210.000,00	-	-	106.210.000,00
	SD – SMP Satap Alanga	117.120.000,00	-	-	117.120.000,00
	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	1.077.921.000,00	-	-	1.077.921.000,00
	Kecamatan Katikutana	5.049.028.388,00	206.867.000,00	-	5.255.895.388,00
	Kecamatan Katikutana Selatan	2.056.887.800,00	199.500.000,00	-	2.256.387.800,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	2.437.346.000,00	379.397.000,00	-	2.816.743.000,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	2.464.366.500,00	-	17.500.000,00	2.446.866.500,00
	Kecamatan Mamboro	2.869.986.000,00	-	-	2.869.986.000,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	93.450.000,00	-	-	93.450.000,00
	Bagian Ekonomi	259.679.000,00	-	-	259.679.000,00
	Bagian Umum	44.581.010.033,90	-	-	44.581.010.033,90
	Sekretariat DPRD	28.583.670.901,35	311.270.940,00	182.350.000,00	28.712.591.841,35
	Badan Keuangan Daerah	4.101.985.628,00	-	-	4.101.985.628,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.238.181.684,06	3.377.303.242,00	1.797.600.000,00	12.817.884.926,06
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.584.122.683,17	2.123.806.500,00	-	13.707.929.183,17
	Dinas Perikanan	5.686.386.300,00	2.282.450.000,00	-	7.968.836.300,00
	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	32.819.808.466,00	64.918.778,00	-	32.884.727.244,00
	Dinas Sosial	3.238.501.000,00	-	69.403.068,00	3.169.097.932,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.572.597.854,00	131.143.473,00	181.143.506,00	4.522.597.821,00
	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	3.074.488.000,00	-	-	3.074.488.000,00
	Dinas Perhubungan	5.562.042.580,40	683.236.000,00	72.688.066,00	6.172.590.514,40
	Dinas Kesehatan	95.739.343.794,12	25.390.231.650,00	11.179.025.182,67	109.950.550.261,45
	Puskesmas Wairasa	2.590.437.000,00	500.000.000,00	-	3.090.437.000,00
	Puskesmas Malinjak	1.420.771.000,00	610.000.000,00	-	2.030.771.000,00
	Puskesmas Lawonda	3.502.621.000,00	500.000.000,00	-	4.002.621.000,00
	Puskesmas Mananga	3.324.975.000,00	610.000.000,00	-	3.934.975.000,00
	Puskesmas Maradesa	2.481.939.000,00	500.000.000,00	-	2.981.939.000,00
	Puskesmas Lendiwacu	2.263.155.000,00	500.000.000,00	-	2.763.155.000,00
	Puskesmas Pahar	3.790.046.000,00	500.000.000,00	-	4.290.046.000,00
	Puskesmas Wee Luri	4.826.918.000,00	-	-	4.826.918.000,00
	Puskesmas Umbu Riri	-	500.000.000,00	-	500.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	29.967.931.341,13	1.124.298.000,00	-	31.092.229.341,13
	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	3.093.061.000,00	-	91.264.000,00	3.001.797.000,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.232.506.973,67	-	-	7.232.506.973,67
	Inspektorat	2.781.338.000,00	-	-	2.781.338.000,00
	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	3.373.101.000,00	-	-	3.373.101.000,00
	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	4.637.867.400,00	-	-	4.637.867.400,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.680.000.000,00	209.460.000,00	-	2.889.460.000,00
	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	1.212.359.935,00	-	-	1.212.359.935,00
	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan An	3.126.991.852,18	-	-	3.126.991.852,18
	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	3.742.530.000,00	-	-	3.742.530.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	6.418.700.520,00	341.000.000,00	-	6.759.700.520,00
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	388.750.000,00	-	-	388.750.000,00
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2.864.919.000,00	-	-	2.864.919.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.147.026.710,58	-	-	10.147.026.710,58
	UPTD Pembibitan Ternak	328.568.694,00	-	-	328.568.694,00
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**				
	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	821.934.000,00	-	24.750.000,00	797.184.000,00
	SMP N 2 Waibakul	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	-	7.900.000,00	-	7.900.000,00
	SMP N 1 Mamboro	41.750.000,00	-	41.750.000,00	-
	SMP N 2 Mamboro	41.750.000,00	-	41.750.000,00	-
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00
	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	-	88.884.000,00	-	88.884.000,00
	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	41.750.000,00	-	41.750.000,00	-
	SD – SMP Satap Alanga	12.200.000,00	-	-	12.200.000,00
	Kecamatan Katikutana	221.867.000,00	-	206.867.000,00	15.000.000,00
	Kecamatan Katikutana Selatan	272.875.000,00	-	199.500.000,00	73.375.000,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	239.407.000,00	-	239.407.000,00	-
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	167.900.000,00	17.500.000,00	-	185.400.000,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah	19.880.100,00	-	-	19.880.100,00
	Bagian Administrasi Pembangunan	59.840.000,00	-	-	59.840.000,00
	Bagian Ekonomi	144.500.000,00	-	-	144.500.000,00
	Bagian Umum	2.020.441.533,00	99.999.900,00	280.057.000,00	1.840.384.433,00
	Sekretariat DPRD	687.062.750,00	182.350.000,00	236.313.750,00	633.099.000,00
	Badan Keuangan Daerah	294.039.000,00	-	194.169.000,00	99.870.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.285.784.519.401,38	14.803.563.860,00	3.843.570.658,43	1.296.744.512.602,95

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	51.943.788.505,00	-	2.123.806.500,00	49.819.982.005,00
	Dinas Perikanan	4.193.360.900,00	-	2.282.450.000,00	1.910.910.900,00
	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	730.840.200,00	-	-	730.840.200,00
	Dinas Sosial	49.000.000,00	69.403.068,00	-	118.403.068,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	748.607.994,00	181.143.506,00	131.143.473,00	798.608.027,00
	Dinas Statistik, Komunikasi, Informatika dan Persandian	19.900.000,00	-	-	19.900.000,00
	Dinas Perhubungan	-	72.688.066,00	-	72.688.066,00
	Dinas Kesehatan	10.984.302.338,00	2.282.500.000,00	6.746.366.000,00	6.520.436.338,00
	Puskesmas Wairasa	622.062.833,00	-	573.313.834,00	48.748.999,00
	Puskesmas Malinjak	842.062.834,00	-	683.313.833,00	158.749.001,00
	Puskesmas Lawonda	622.062.833,00	-	573.313.834,00	48.748.999,00
	Puskesmas Mananga	900.813.833,00	-	683.313.834,00	217.499.999,00
	Puskesmas Maradesa	982.226.833,00	-	500.000.000,00	482.226.833,00
	Puskesmas Lendiwacu	573.313.834,00	-	573.313.834,00	-
	Puskesmas Pahar	827.429.000,00	-	500.000.000,00	327.429.000,00
	Puskesmas Wee Luri	287.000.000,00	-	-	287.000.000,00
	Puskesmas Umbu Riri	772.664.000,00	-	500.000.000,00	272.664.000,00
	Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul	1.831.229.928,00	-	1.081.300.000,00	749.929.928,00
	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	85.000.000,00	91.264.000,00	-	176.264.000,00
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.988.832.072,00	-	-	2.988.832.072,00
	Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan	69.560.600,00	-	11.000.000,00	58.560.600,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	209.460.000,00	-	209.460.000,00	-
	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah	5.663.957.000,00	-	-	5.663.957.000,00
	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.177.731.805,00	-	341.000.000,00	836.731.805,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.833.444,45	-	-	49.833.444,45
5	**Aset Tetap Lainnya**				
	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	20.086.019.394,41	190.349.880,00	190.349.880,00	20.086.019.394,41
	SMP N 1 Waibakul	46.140.000,26	-	-	46.140.000,26
	SMP N 2 Waibakul	8.900.000,26	-	-	8.900.000,26
	SMP N 3 Waibakul	52.200.000,36	-	-	52.200.000,36
	SMP N 4 Waibakul	67.950.000,34	-	-	67.950.000,34
	SMP N 5 Waibakul	22.335.300,00	-	-	22.335.300,00
	SD – SMP Satap Taman Mas	11.277.100,52	-	-	11.277.100,52
	Sanggar Kegiatan Belajar	105.780.000,00	23.849.905,80	-	129.629.905,80
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay Barat	33.814.700,58	-	-	33.814.700,58
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay Barat	7.400.000,00	-	-	7.400.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay Barat	36.089.401,52	-	-	36.089.401,52
	SD – SMP Satap Karanggi Rowa	24.400.001,17	-	-	24.400.001,17
	SD – SMP Satap Uma Paohi	10.400.001,17	-	-	10.400.001,17
	SD – SMP Satap Waikajanga	28.307.100,38	-	-	28.307.100,38
	SMP N 1 Mamboro	92.602.200,04	1.000.000,00	-	93.602.200,04
	SMP N 2 Mamboro	95.500.200,48	-	-	95.500.200,48
	SMP N 3 Mamboro	61.937.980,48	-	-	61.937.980,48
	SD – SMP Satap Sawirara	11.240.000,07	-	-	11.240.000,07
	SD – SMP Satap Kamberalaja	21.557.900,00	-	-	21.557.900,00
	SMP N 1 Umbu Ratu Nggay	62.550.800,96	-	-	62.550.800,96
	SMP N 2 Umbu Ratu Nggay	11.500.000,00	-	-	11.500.000,00
	SMP N 3 Umbu Ratu Nggay	22.120.000,04	-	-	22.120.000,04
	SMP N 4 Umbu Ratu Nggay	16.877.100,00	-	-	16.877.100,00
	SMP N 5 Umbu Ratu Nggay	43.300.000,00	-	-	43.300.000,00
	SMP N 6 Umbu Ratu Nggay	5.900.000,00	-	-	5.900.000,00
	SD – SMP Satap Praimahala	850.000,00	-	-	850.000,00
	SD – SMP Satap Alanga	20.583.600,00	-	-	20.583.600,00
	SD – SMP Satap Ngadu Mbolu	19.000.001,27	-	-	19.000.001,27
	Kecamatan Katikutana	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00
	Kecamatan Mamboro	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
	Bagian Tata Pemerintahan	130.123.900,00	-	-	130.123.900,00
	Bagian Humas & Informatika	10.100.000,00	-	-	10.100.000,00
	Bagian Pembangunan	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
	Bagian Ekonomi	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
	Bagian Umum	14.674.000,00	-	-	14.674.000,00
	Bagian Hukum	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00
	Sekretariat DPRD	619.860.677,00	-	-	619.860.677,00
	Badan Keuangan Daerah	359.500.000,00	-	-	359.500.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.245.963.436,00	99.900.000,00	-	3.345.863.436,00
	Dinas Perikanan	-	1.980.000,00	-	1.980.000,00
	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	4.459.000,00	-	-	4.459.000,00
	Dinas Kesehatan	175.000,00	-	-	175.000,00
	Puskesmas Wee Luri	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00

No	Perangkat Daerah	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	300.847.890,00	-	-	300.847.890,00
	Inspektorat	11.760.000,00	-	-	11.760.000,00
	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal	49.950.000,00	-	-	49.950.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	345.926.538,89	58.362.115,00	-	404.288.653,89
	Jumlah	**2.272.246.586.297,23**	**78.173.472.396,80**	**37.914.643.599,06**	**2.312.505.415.094,97**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL 2025	MUTASI								SALDO AKHIR
			TAMBAH				KURANG				
			BELANJA MODAL TA. 2024	REKLASIFIKASI ASET	HIBAH	JUMLAH	Koreksi Aset	REKLAS	Mutasi	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ASET TETAP TANAH	48.109.462.967,00				-	3.167.500,00			**3.167.500,00**	48.106.295.467,00
2	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN	304.678.635.056,79	13.379.171.304,00	1.563.594.169,00	2.862.542.690,00	**17.805.308.163,00**		1.053.635.527,80		**1.053.635.527,80**	321.430.307.691,99
3	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN	515.096.308.476,40	20.379.072.968,00	21.716.452.965,00		**42.095.525.933,00**		13.804.511.140,83		**13.804.511.140,83**	543.387.323.268,57
4	ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN	1.378.143.756.570,83	15.235.963.860,00	2.661.232.540,00		**17.897.196.400,00**	226.305.960,00	22.636.673.590,43		**22.862.979.550,43**	1.373.177.973.420,40
5	ASET TETAP LAINNYA	26.218.423.226,20	190.349.880,00	126.729.905,80	58.362.115,00	**375.441.900,80**		190.349.880,00		**190.349.880,00**	26.403.515.247,00
TOTAL		**2.272.246.586.297,22**	**49.184.558.012,00**	**26.068.009.579,80**	**2.920.904.805,00**	**78.173.472.396,80**	**229.473.460,00**	**37.685.170.139,06**		**37.914.643.599,06**	**2.312.505.415.094,96**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Per 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA SKPD	SALDO AWAL 2025	MUTASI							SALDO AKHIR
			BERTAMBAH						BERKURANG	
			REKLAS DARI GB	REKLAS DARI JIJ	KOREKSI	JUMLAH	Koreksi	REKLAS KE GB	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga	99.692.350,00				-			-	99.692.350,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.415.530.519,53		99.900.000,00		99.900.000,00	-		-	4.515.430.519,53
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-				-			-	-
4	Dinas Koperasi, Perindag & UKM	24.961.200,00				-			-	24.961.200,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	223.532.000,00				-			-	223.532.000,00
6	Dinas Kesehatan	103.898.144,00	10.903.253.750,00			10.903.253.750,00	29.711.780,00		29.711.780,00	10.977.440.114,00
TOTAL		**4.867.614.213,53**	**10.903.253.750,00**	**99.900.000,00**	**-**	**11.003.153.750,00**	**29.711.780,00**	**-**	**29.711.780,00**	**15.841.056.183,53**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
ASET LAINNYA ~ ASET LAIN-LAIN
per 31 DESEMBER 2025

No	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7.513.334.162,06	29.253.318,16	56.453.763,45	7.486.133.716,77
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.958.887,26		-	40.958.887,26
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	218.468.431,27	201.900.000,00	10.311.097,94	410.057.333,33
4	Dinas Peternakan	2.512.392.216,00		-	2.512.392.216,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.153.000.078,47	40.161.456,43	1.018.064.112,47	175.097.422,43
6	Dinas Lingkungan Hidup	54.476.669,67		7.000.000,00	47.476.669,67
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.390.839,00		3.832.500,00	9.558.339,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.786.579,00		5.585.000,00	12.201.579,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	65.197.857,14		3.305.000,00	61.892.857,14
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.677.501,00		-	7.677.501,00
11	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Kebakaran	800.005,00		-	800.005,00
12	Badan Keuangan Daerah	12.253.006,00	2.528.640.842,98	8.794.000,00	2.532.099.848,98
13	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah	29.148.986,99		-	29.148.986,99
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	56.473.333,33		-	56.473.333,33
15	Bappelitbangda	358.999.750,00		185.617.250,00	173.382.500,00
16	Bagian Humas dan Komunikasi Pimpinan	8.705.227,00		-	8.705.227,00
17	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Bagian Administrasi Pembangunan	630.064,00		-	630.064,00
18	Bagian Umum	403.153.505,76	16.073.509,10	-	419.227.014,86

No	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
19	Bagian Organisasi	2,00		-	2,00
20	Bagian Kesejahteraan Rakyat	375.000,00		-	375.000,00
21	Bagian Perekonomian	1.920.000,00		-	1.920.000,00
22	Bagian Tata Pemerintahan	4.240.000,00		-	4.240.000,00
23	Sekretariat DPRD	222.675.799,53		179.868.666,67	42.807.132,86
24	Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat	15.313.201,00		2.550.000,00	12.763.201,00
25	Kecamatan Umbu Ratu Nggay	17.317.143,86		540.000,00	16.777.143,86
26	Kecamatan Katikutana Selatan	8.460.003,00		8.460.000,00	3,00
27	Puskesmas Weeluri	5.926.396,17		5.926.395,17	1,00
28	Puskesmas Malinjak	38.232.146,02		38.232.144,02	2,00
29	Puskesmas Maradesa	8.906.657,24		8.906.655,24	2,00
30	Puskesmas Lawonda	15.242.753,69		15.242.753,69	-
31	Puskesmas Lendiwacu	13.104.728,81		13.104.728,81	-
32	Puskesmas Mananga	18.220.000,00		18.220.000,00	-
33	Puskesmas Tanambanas	3.430.000,00		3.430.000,00	-
34	Puskesmas Umbu Riri	22.364.890,61		22.364.890,61	-
35	Puskesmas Wairasa	10.012.149,78		10.012.149,78	-
36	Puskesmas Pahar	10.914.285,46		10.914.285,46	-
37	Kecamatan Katiku Tana	87.214.250,00		-	87.214.250,00
38	Kecamatan Mamboro	14.450.000,00		4.450.000,00	10.000.000,00
39	Kecamatan URG Tengah	9.000.000,00		2.000.000,00	7.000.000,00
40	Dinas Kesehatan	713.658.246,90	252.983.212,67	120.003.046,90	846.638.412,67
41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	369.379.113,31		256.693.113,31	112.686.000,00
42	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag	31.348.580,08		15.408.929,30	15.939.650,78
43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.195.000,00		4.000.000,00	16.195.000,00
44	Dinas Perhubungan	4.620.000,00		-	4.620.000,00
45	Dinas Perikanan	2.720.000,00		-	2.720.000,00
46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.914.500,00		2.711.000,00	14.203.500,00
47	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan PTSP	10.275.000,00		4.200.000,00	6.075.000,00
48	Sanggar Kegiatan Belajar	5.190.000,00		3.930.000,00	1.260.000,00

No	PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
49	UPTD PAM	5.245.000,00		4.900.000,00	345.000,00
50	UPTD Pembibitan dan Agribisnis Ternak	18.440.000,00	72.095.675,68	8.500.000,00	82.035.675,68
51	Inspektorat	9.042.000,00		9.042.000,00	-
	JUMLAH	**14.201.193.946,41**	**3.141.108.015,02**	**2.072.573.482,82**	**15.269.728.478,62**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR DANA CADANGAN
per 31 DESEMBER 2025

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer Dari Kas Daerah (Rp)	Transfer Ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	Jumlah		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
per 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Pfk Ganti Uang Bendahara Pengeluaran				
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	39.339.370,00	3.696.456,00	39.339.370,00	3.696.456,00
	Dinas Kesehatan		1.132.094,60		1.132.094,60
	Puskesmas Wairasa	24.600,00		24.600,00	-
	Puskesmas Lendiwacu		3.178.198,49		3.178.198,49
	Puskesmas Lawonda		13.732.751,55		13.732.751,55
	Puskesmas Maradesa		5.704.120,65		5.704.120,65
	Puskesmas Mananga		14.957.545,08		14.957.545,08
	Puskesmas Weeluri		2.277.070,22		2.277.070,22
	Puskesmas Pahar	78.000,00	2.962.441,00	78.000,00	2.962.441,00
	Puskesmas Umbu Riri		7.980.192,02		7.980.192,02
	Dinas Lingkungan Hidup		63.242,00		63.242,00
	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		2.760.108,00		2.760.108,00
	UPTD Mekanisasi, Perbenihan dan POPT		119.000,00		119.000,00
	Sekretariat DPRD	403.295,00		403.295,00	-
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.124.700,00		2.124.700,00
					-
2	Utang Kepada Pihak Ketiga				-
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	226.305.960,00		226.305.960,00	-
					-
3	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat				-
	Badan Keuangan Daerah		2.895.989.000,00		2.895.989.000,00
					-

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak PBB-P2				-
	Badan Keuangan Daerah		148.292.657,00		148.292.657,00
TOTAL		**266.151.225,00**	**3.104.969.576,61**	**266.151.225,00**	**3.104.969.576,61**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
per 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
Jumlah		-	-	-	-

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN 2025
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

No	PERANGKAT DAERAH	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			-	-	-	-	-	-
2			-	-	-	-	-	-
3			-	-	-	-	-	-
4			-	-	-	-	-	-
5			-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-	-

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025

Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH

IKTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	BUMD/Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17x18
1	Bidang Usaha Jasa Penginapan dan Pembibitan Ternak																	
	PD. SOLA PORA	Usaha Jasa Penginapan	Usaha Pembibitan Ternak	559.927.744,00	-	-	559.927.744,00	-	-	-	2.500.000.000,00	-	(1.757.940.615,00)	-	-	638.927.744,00	100,00%	638.927.744,00
Total Bidang Industri				**559.927.744,00**	**-**	**-**	**559.927.744,00**	**-**	**-**	**-**	**2.500.000.000,00**	**-**	**(1.757.940.615,00)**	**-**	**-**	**638.927.744,00**	**100,00%**	**638.927.744,00**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2025
Nomor : 01 Tahun 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

KABUPATEN SUMBA TENGAH
IKTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

NO	BUMD/Perusahaan Daerah	Sumber a)	Status b)	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DILUAR USAHA	BEBAN DILUAR USAHA	LABA (Rugi) SEBELUM PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Usaha Jasa Penginapan dan Pembibitan Ternak								
	PD. SOLA PORA	Usaha Jasa Penginapan	Usaha Pembibitan Ternak	79.024.000,00	182.472.951,00	(103.448.951,00)	317.310,00	-	(103.131.641,00)
Total Bidang Industri				**79.024.000,00**	**182.472.951,00**	**(103.448.951,00)**	**317.310,00**	**-**	**(103.131.641,00)**

Waibakul, 20 Juli 2026

BUPATI SUMBA TENGAH,

Drs. PAULUS S. K. LIMU

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Penghasilan Komprehensif	1
Laporan Perubahan Ekuitas	2
Laporan Arus Kas	3
Laporan Posisi Keuangan	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 – 13

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
Jl. Wailolong – Desa Anajiaka, Kec. Umbu Ratu Nggay Barat
Kabupaten Sumba Tengah – NTT – 87384
Email : solapora@yahoo.com
Bank : Bank NTT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PD SOLAPORA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	JAMES DEAN ALFACINO SAMANI,ST
Alamat Kantor	:	WAIBAKUL
Alamat Rumah	:	WAIKABUBAK
Nomor Telepon	:	081392992929
Jabatan	:	DIREKTUR

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PD Solapora;
2. Laporan Keuangan PD Solapora telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar *Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia*;
3. Laporan Keuangan PD Solapora tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PD Solapora;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Nusa Tenggara Timur, 12 Maret 2026
Atas nama dan mewakili Direksi



JAMES D. A. SAMANI,ST
Direktur

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00061/3.0410/AU.8/05/2042-1/1/III/2026

Yth.
Dewan Pengawas dan Pengurus
Perusahaan Daerah Sola Pora

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Perusahaan Daerah Sola Pora ("Perusahaan")**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Perusahaan, tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

Basis Opini Wajar dengan Pengecualian

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 6 atas laporan keuangan, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai Saldo Uang Muka Kerja sebesar Rp295.763.000 yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2025. Kami tidak dapat melakukan prosedur konfirmasi maupun prosedur alternatif lainnya untuk memverifikasi keberadaan serta kemungkinan pemulihan (*recoverability*) atas saldo tersebut. Oleh karena itu, kami tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap Saldo Uang Muka Kerja dan dampaknya terhadap Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Perusahaan belum menerapkan Liabilitas Imbalan Pasca Kerja untuk karyawannya sesuai dengan Bab 28 SAK Entitas Privat. Perusahaan mencatat beban imbalan tersebut pada saat pembayaran dilakukan (*cash basis*). Jika Perusahaan menerapkan akuntansi akrual sesuai standar tersebut, maka nilai liabilitas jangka panjang dan beban imbalan kerja akan meningkat, serta saldo laba akan menurun dalam jumlah yang material, namun dampak pastinya terhadap laporan keuangan tidak dapat ditentukan karena tidak tersedianya perhitungan aktuaris.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Jojo Sunarjo dan Rekan

Dedy Iswani, CPA
No. Izin Akuntan Publik AP.2042

12 Maret 2026

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan	2f,11	**79.024.000**	**336.473.451**
Beban Usaha	2f,12	**182.472.951**	**190.045.500**
Laba (rugi) usaha		**(103.448.951)**	**146.427.951**
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan lain-lain	2f,13	713.310	562.506
Beban lain-lain	2f,13	(396.000)	(394.000)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain - bersih		**317.310**	**166.506**
Laba (rugi) sebelum pajak		**(103.131.641)**	**146.594.457**
Pajak penghasilan	2g	**-**	**-**
Laba bersih setelah pajak		**(103.131.641)**	**146.594.457**
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-
Laba (rugi) bersih komprehensif		**(103.131.641)**	**146.594.457**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Penyertaan Modal Pemkab Sumba Tengah yang belum ditetapkan statusnya	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2024	**2.500.000.000**	**(1.904.535.070)**	**595.464.930**
Koreksi saldo laba	-	(2)	**(2)**
Laba (rugi) tahun 2024	-	146.594.457	**146.594.457**
Saldo 31 Desember 2024	**2.500.000.000**	**(1.757.940.615)**	**742.059.385**
Koreksi saldo laba	-	-	-
Laba (rugi) tahun 2025	**-**	(103.131.641)	**(103.131.641)**
Saldo 31 Desember 2025	**2.500.000.000**	**(1.861.072.256)**	**638.927.744**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	2025	2024
Arus Kas Dari (Untuk) Aktivitas Operasi		
Laba (rugi) bersih	**(103.131.641)**	**146.594.457**
Penyesuaian terhadap laba bersih :		
Penyusutan aset tetap	13.000.001	-
Laba (rugi) sebelum perubahan modal kerja	**(90.131.640)**	**146.594.457**
Perubahan Atas Aktiva dan Kewajiban Operasional		
Penurunan (kenaikan) piutang usaha	29.324.050	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	**(60.807.590)**	**146.594.457**
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi		
Perolehan aset tetap	(52.000.000)	-
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	**(52.000.000)**	**-**
Kenaikan (penurunan) kas dan bank	**(112.807.590)**	**146.594.457**
Kas dan bank awal periode	**331.322.334**	**184.727.877**
Kas dan bank akhir periode	**218.514.744**	**331.322.334**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN DAERAH SOLA PORA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan bank	2b,3	218.514.744	331.322.334
Piutang lain-lain	2c,4	85.650.000	85.650.000
Persediaan	2d,5	-	29.324.050
Uang muka	6	295.763.000	295.763.000
Jumlah aset lancar		**559.927.744**	**742.059.384**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	2e,7		
Nilai perolehan aset tetap		483.703.440	431.703.440
Akumulasi penyusutan		(444.703.440)	(431.703.439)
Nilai buku		39.000.000	1
Aset lain-lain		-	-
Jumlah aset tidak lancar		**39.000.000**	**1**
Jumlah aset		**638.927.744**	**742.059.385**
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Beban masih harus dibayar		-	-
Jumlah kewajiban jangka pendek		**-**	**-**
Jumlah kewajiban		-	**-**
Ekuitas			
Modal	9	2.500.000.000	2.500.000.000
Saldo laba (rugi)	10	(1.861.072.256)	(1.757.940.615)
Jumlah ekuitas		**638.927.744**	**742.059.385**
Jumlah kewajiban dan ekuitas		**638.927.744**	**742.059.385**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

a. Pendirian dan Legalitas Perusahaan

Perusahaan Daerah Sola Pora selanjutnya cukup disebut "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2010. Perda Pendirian Perusahaan tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2010 Nomor 4 tanggal 10 Mei 2010.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati Sumba Tengah Nomor: 135/24-07/PB/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 dan Surat Izin Gangguan / Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Kepala Bagian Ekonomi atas nama Bupati Sumba Tengah Nomor: 032/500.53.17/2011 tanggal 24 Juni 2011.

b. Tujuan Perusahaan

Tujuan Perusahaan Daerah Sola Pora sesuai Pasal 4 Perda Pendirian Perusahaan tersebut adalah ikut serta menunjang pembangunan daerah serta melaksanakan pembangunan nasional.

c. Jenis Usaha

Jenis Usaha Perusahaan Daerah Sola Pora sesuai Pasal 5 Perda Pendirian Perusahaan tersebut adalah melakukan jenis usaha:

a. Usaha jasa penginapan dan layanan lainnya.
b. Usaha pembibitan dan penggemukan ternak sapi dan babi.
c. Usaha jasa penyewaan alat berat.

Kedudukan Perusahaan saat ini di Jl.Umbu Remu Samapaty-Waibakul, Desa Makatakeri, Kec. Katiku Tana Kab. Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Kedudukan Perusahaan

Sesuai Pasal 3 Perda Pendirian Perusahaan tersebut, Perusahaan Daerah Sola Pora berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Waibakul. Perusahaan dapat membentuk unit pelayanan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan atau Kelurahan/Desa.

Kedudukan Perusahaan saat ini di Jl.Umbu Remu Samapaty-Waibakul, Desa Makatakeri, Kec. Katiku Tana Kab. Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. UMUM (LANJUTAN)

e. Personalia

Sesuai Keputusan Bupati Sumba Tengah Tanggal 26 September 2023 Nomor : BKPSDM.820/SPMT/1121/53.17/IX/2023 telah memutuskan:

- Menunjuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai Pngelola pada Perusahaan Daerah Sumba Tengah sebagai Pengelola pada Perusahaan Daerah Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah sebagai berikut :

Instansi	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah	James Dean. A Samani, ST /19780828 200904 1 006	Pembina / IV/a	Kepala Bagian Perekonomian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Tengah

- Keputusan ini berlaku sampai adanya pengangkatan kembali Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Sumba Tengah

- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2025 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Pagu/cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Kas dan Bank

Kas dan bank meliputi Kas dan bank yang tidak dijaminkan atas utang.

c. Piutang Usaha

Piutang perusahaan disajikan dalam jumlah bruto, tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu yang dicadangkan karena manajemen perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih.

Saldo-saldo piutang yang tidak tertagih, akan dihapuskan sebagai beban tahun berjalan.

d. Persediaan

Persediaan barang dagangan dinilai berdasarkan biaya perolehan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli Aset tatap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa Aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran Aset tetap, biaya pemindahan, dan biaya restorasi relokasi, pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskonto dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi Aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat Aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika Aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika Aset tetap tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu Aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).

	Masa Manfaat	**Persentase (%)**
Bangunan permanen	20 Tahun	5%
Bangunan tidak permanen	10 Tahun	10%
Peralatan / perlengkapan	4 Tahun	25%
Inventaris / perabot	4 Tahun	25%
Kendaraan bermotor	4 Tahun	25%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Perolehan tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas hak tanah akan ditangguhkan dan disajikan sebagai perkiraan biaya tangguhan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan laba rugi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

f. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon dan potongan. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Beban diakui pada saat terjadinya transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis akrual).

g. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut. Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai asset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

h. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan belum melaksanakan SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

3. KAS DAN BANK

	2025	2024
Kas		
Kas	43.021.135	136.286.035
Bank		
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	175.493.609	195.036.300
Jumlah kas dan bank	**218.514.744**	**331.322.334**

4. PIUTANG LAIN-LAIN

	2025	2024
Pinjaman Karyawan	45.150.000	45.150.000
Piutang atas Penjualan Babi	36.500.000	36.500.000
Pinjaman Dinkes	4.000.000	4.000.000
Jumlah piutang usaha	**85.650.000**	**85.650.000**

5. PERSEDIAAN

	2025	2024
Persediaan	-	29.324.050
Jumlah persediaan	**-**	**29.324.050**

6. UANG MUKA

	2025	2024
Uang Muka Kerja	295.763.000	295.763.000
Jumlah persediaan	**295.763.000**	**295.763.000**

7. ASET TETAP

	31 Desember 2025			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-	-	75.700.000
Inventaris / perabot	128.765.000	52.000.000	-	180.765.000
Jumlah	**431.703.440**	**52.000.000**	**-**	**483.703.440**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-		215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-		75.700.000
Inventaris / perabot	128.764.999	13.000.001	-	141.765.000
Jumlah	**431.703.439**	**13.000.001**	**-**	**444.703.440**
Nilai buku bersih	**1**			**39.000.000**

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Saldo Akhir**
Biaya Perolehan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-	-	75.700.000
Inventaris / perabot	128.765.000	-	-	128.765.000
Jumlah	**431.703.440**	**-**	**-**	**431.703.440**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan / gedung	12.000.000	-	-	12.000.000
Peralatan & perlengkapan	215.238.440	-	-	215.238.440
Kendaraan	75.700.000	-		75.700.000
Inventaris / perabot	128.764.999	-	-	128.764.999
Jumlah	**431.703.439**	**-**	**-**	**431.703.439**
Nilai buku bersih	**1**			**1**

8. ASET LAIN-LAIN

	2025	2024
Biaya investasi pemeliharaan wisma	149.938.500	149.938.500
Amortisasi 20%	(149.938.500)	(149.938.500)
Nilai buku	-	-
Perencanaan bisnis ternak	535.552.500	535.552.500
Amortisasi 20%	(535.552.500)	(535.552.500)
Nilai buku	-	-
	-	**-**

9. MODAL

	2025	2024
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	2.500.000.000	2.500.000.000
Jumlah modal	**2.500.000.000**	**2.500.000.000**

10. SALDO LABA (RUGI)

	2025	2024
Saldo awal	(1.757.940.615)	(1.904.535.070)
Koreksi saldo awal	-	(2)
Laba (rugi) tahun berjalan	(103.131.641)	146.594.457
Jumlah saldo laba (rugi)	**(1.861.072.256)**	**(1.757.940.615)**

11. PENDAPATAN OPERASIONAL

	2025	2024
Pendapatan sewa kamar dan aula	79.024.000	336.473.451
Jumlah Pendapatan Usaha	**79.024.000**	**336.473.451**

12. BEBAN USAHA

	2025	2024
Beban gaji pegawai	50.700.000	60.700.000
Beban Akuntan Publik	35.000.000	35.000.000
Beban pemeliharaan gedung	24.428.500	39.559.000
Beban listrik, air dan telepon	16.950.500	16.430.500
Beban Penyusutan	13.000.001	-
Beban konsumsi kegiatan	1.577.000	115.000
Beban transportasi dan perjalanan dinas	-	11.298.000
Beban operasi lain	11.492.900	-
Jumlah beban usaha	**153.148.901**	**190.045.500**

13. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2025	2024
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan jasa giro	713.310	562.506
Jumlah pendapatan lain-lain	**713.310**	**562.506**
Beban Lain-lain		
Beban administrasi bank	(396.000)	(396.000)
Jumlah beban lain-lain	**(396.000)**	**(396.000)**
Total pendapatan (beban) lain-lain	**317.310**	**166.506**

14. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diuraikan dimuka dan diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2026.